



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan oleh berbagai pihak guna membuat keputusan dan kebijakan diselaraskan dengan keperluannya masing-masing. Sebagai tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan, laporan keuangan pemerintah daerah juga menunjukkan realisasi pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.

Untuk mendasari pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, telah disusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2023 telah dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja yang lebih dititikberatkan pada peningkatan pelayanan dasar yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan dana Tahun Anggaran 2023 juga diprioritaskan untuk



menunjang efektivitas pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

1. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat, atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;



4. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan implikasinya di masa mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan;

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD;

- 2.1 Ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD;
- 2.2 Kebijakan Keuangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2.3 Penjelasan mengenai pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi;

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan;



- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan;

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran;
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Transfer;
 - 5.1.4 Pembiayaan;
 - 5.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL
 - 5.2.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan - LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
 - 5.4.5 Surplus/Defisit - LO
- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit – LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

Bab VI Penjelasan Informasi Tambahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2023 dan RKPD DIY tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan.

Kerangka ekonomi makro Tahun 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, Indeks Gini, dan tingkat pengangguran, mengacu RPJMD 2021-2026 dan arah pembangunan kewilayahan DIY, sebagai berikut:

Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

No	Indikator	Target RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomii	3,97%
2	Tingkat Kemiskinan	12,90%
3	Indeks Pembangunan Manusia	81,09%
4	Indeks Gini	0,35%
5	Tingkat pengangguran terbuka	3,50%

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul

Realisasi ekonomi makro sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023,

Uraian	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,53%	-1,65%	4,99%	5,20%	Rilis 28 feb



Beberapa sektor ekonomi berhasil mencapai kondisi normal, permintaan masyarakat juga menunjukkan perkembangan membaik. Meningkatnya daya beli masyarakat, kunjungan wisatawan ke Bantul yang meningkat, pelajar dan mahasiswa sudah aktif kembali, dan faktor lain yang menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul dengan diterbitkannya SK Bupati Kab. Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bantul. Penerbitan SK ini dengan maksud agar program penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tepat sasaran. Program khusus yang menjadi ikon di Bantul dalam penanganan kemiskinan adalah Program Boga Sehat. Program boga sehat merupakan pemberian makanan sesuai dengan standar nilai gizi tertentu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang layak dengan sasaran lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat yang sudah ada sejak tahun 2019 untuk 11 Kapanewon dan 53 Kalurahan. Dasar hukum pelaksanaan boga sehat terdapat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat. Pada tahun 2023 terdapat penambahan cakupan pelaksanaan boga sehat menjadi seluruh kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul.

Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2019 - 2023

Uraian	Tingkat Kemiskinan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bantul	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
DIY	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04
Nasional	9,22	10,19	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,96% atau lebih rendah 0,31% dibandingkan tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dan garis kemiskinan naik 6,51% menjadi Rp. 445.511. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.



3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Bantul	80,01	80,36	80,63	81,04	81,74
DIY	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mencapai 81,74 pada tahun 2023 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM \geq 80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.



Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2019-2023 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada tahun 2022 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 ketimpangan di seluruh Kabupaten/Kota se DIY mengalami kenaikan. Gini rasio Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 0,454 naik 0,044 dibanding tahun 2022.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bantul	0,422	0,418	0,441	0,410	0,454
DIY	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
Nasional	0,380	0,385	0,384	0,384	0,388

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

5. Tingkat pengangguran terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul turun dari 3,97% di tahun 2022 menjadi 3,78% di tahun 2023, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Bantul	3,06	4,06	4,04	3,97	3,78
DIY	3,14	4,57	4,56	4,06	3,69
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024



2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antardokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun 2023 bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dana transfer terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah.

Pada tahun 2023 target pendapatan diproyeksikan sebesar Rp.2,06 triliun. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2023, PAD secara total diperkirakan masih sama dengan tahun 2022, karena walaupun ada sektor tertentu yang mulai mengalami peningkatan, tetapi masih ada sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih, seperti misalnya industri hotel yang masih bersifat musiman, dan penyelenggaraan hiburan yang masih terbatas. Namun demikian ada beberapa upaya untuk peningkatan PAD antara lain:
 - a) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi dengan optimalisasi pendataan potensi PAD;
 - b) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;
 - c) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
 - e) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
 - f) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;



- g) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
 - h) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - i) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak;
 - j) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.
- 2) Proyeksi tahun 2023 dalam perhitungannya belum memasukkan anggaran DAK Fisik. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai dan tunjangan Sertifikasi Guru.
- 3) Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.

2. Belanja Daerah

Proyeksi belanja tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2,253 triliun, meningkat sebesar 0,28% dari tahun 2022, yang diharapkan berimplikasi pada aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mulai kembali normal. Hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain:

- 1) Belanja daerah diarahkan pada:
 - a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
 - c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
 - d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 - f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (public interest);
 - i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
 - j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
 - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, RPJMD dan RKPD maka belanja diprioritaskan pada:



- a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial.
- d) Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Mandatory spending.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dan wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagaimana amanat Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp714.597.261.185,00 dari total belanja daerah sebesar Rp2.514.432.803.487,00 atau 28,42% dengan realisasi sebesar Rp700.073.880.155,00 atau 97,96%. Adapun rincian per jenis belanjanya sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Anggaran Fungsi Pendidikan	714.597.261.185,00	700.073.880.155,00	97,96%
2.	Total Belanja Daerah	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90%
3	Rasio anggaran Pendidikan (1:3) x100%	28,42%	29,03%	

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp489.690.203.487,00 dari total belanja daerah sebesar Rp2.514.432.803.487,00 atau 18,33% dengan realisasi sebesar Rp348.954.035.131,29 atau 97,32%.

Adapun rincian per jenis belanjanya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Urusan Bidang Kesehatan				
	A. Dinas Kesehatan	238.377.190.545,00	12,19%	105.396.442.428,29	44,21%
	B. RSUD Panembahan Senopati	240.175.504.162,00	12,28%	235.911.045.039,00	98,22%
	C. RSUD Saras Adyatma	8.137.508.837,00	0,42%	7.646.547.664,00	93,97%
2	Anggaran Fungsi Kesehatan(A+B+C)	486.690.203.544,00	24,89%	348.954.035.131,29	97,32%
3.	Total Belanja Daerah	2.514.432.803.487,00		2.411.425.977.527,72	95,90%
4	Gaji dan tunjangan ASN	558.841.230.389,00		520.281.693.331,00	93,10%
5	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	1.955.591.573.098,00		1.891.144.284.196,72	
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5)x100%	24,89%		18,45%	

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 tahun.



Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp.287.871.342.351,00 dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer sebesar Rp2.172.130.997.990,00 atau baru 13,62% dengan realisasi sebesar Rp277.702.339.899,00 atau 94,38%. Adapun rincian per jenis belanjanya sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Anggaran Belanja Infrastruktur	287.871.342.351,00	13,25%	277.702.339.899,00	94,38
2	Total Belanja Daerah	2.514.432.803.487,00		2.411.425.977.527,72	
3	Belanja bagi hasil dan /atau belanja transfer	342.301.805.497,00		342.301.805.497,00	
4	Total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer	2.172.130.997.990,00		2.069.124.172.030,27	
	Rasio anggaran insfrastruktur (40%x selisih)	868.852.399.196,00		827.649.668.812,11	

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sesuai dengan klasifikasi. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul total belanja daerah sebesar Rp2.507.240.782.170,00 masuk klasifikasi diatas Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00.



Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran untuk fungsi pengawasan sebesar Rp12.983.794.258,00 dari total belanja daerah sebesar Rp2.514.432.803.487,00 atau baru 0,52% dengan realisasi sebesar Rp12.659.547.893,00 atau 0,52%%. Adapun rincian per jenis belanjanya sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Anggaran Belanja Inpektorat	12.983.794.258,00	12.659.547.893,00	100,98%
2	Total Belanja Daerah	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	100,96%
4	Total belanja daerah dikurangi belanja gaji ASN	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	
	Rasio anggaran pengawasan (1:4) x100%	0,52%	0,52%	



3. Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan netto tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp193,73 milyar. Diasumsikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan antara lain:

- 1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
- 3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan daerah yang mendesak terutama risiko bencana pada setiap aspek, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan kajian terhadap kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul, prioritas pelaksanaan pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul terutama masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi lokal.



Capaian kinerja berdasarkan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	2023				KETERANGAN
			Target RPJMD 2021-2026	Target RKPD/RKPD-P	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4.1815	4.1815/ 4.1815	2,92	69,83	Realisasi Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2023 dengan Status Kinerja Sedang
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP/ WTP	WTP	100	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023• Didukung komitmen semua stakeholder laporan.
3	Nilai Rerata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	83.5	83.5/ 83.5	95	115.15	Nilai sudah selesai diverifikasi tetapi masih menunggu proses QA KPKP untuk penetapan nilai.
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.3	3.3/ 3.3	3.72	114.46	Realisasi tahun 2023 sesuai Keputusan KemenPANRB No. 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2023, tertanggal 11 Januari 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Indikator	Satuan	2023				KETERANGAN
			Target RPJMD 2021-2026	Target RKPD/RKPD-P	Realisasi	Capaian (%)	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.4	88.4/ 88.4	88,73	100,37	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023• Komitmen pimpinan yang tinggi dengan memasukan pelayanan prima pada visi dan misi RPJMD
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.11	74.11/ 74.11	74,64	100,72	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023 berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 89/12/34/Th.XXV, tanggal 1 Desember 2023• Didukung komitmen kepala daerah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.25	15.25/ 15.25	15,61	102,36	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023 berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 89/12/34/Th.XXV, 1 Desember 2023• Di dukung peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan serta kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.
8	Desa/ Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6	6/ 6	10	166,67	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023• Antusiasme yang tinggi dari calon desa pamor budaya utk mengelola potensi desanya
9	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlinmas	Persen	100	100/ 100	100	100	Setiap ada aduan langsung ditindaklanjuti



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Indikator	Satuan	2023				KETERANGAN
			Target RPJMD 2021-2026	Target RKPDP/RKPDP-P	Realisasi	Capaian (%)	
10	Rasio Gini	Angka	0.35	0.35/ 0,406-0,355	0,454	88,17	Realisasi tahun 2023 berdasarkan tabel dinamis BPS Provinsi DIY. Sumber: https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/333/1/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html
11	TPT	Persen	3.5	3.5/ 3.5	3,78	92	• Realisasi tahun 2023 berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 83/11/34/Th.VVV, 6 November 2023
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	90	90/ 90	94	116,05	Semua komponen yang dipersyaratkan telah terpenuhi dan telah diajukan ke Tim Evaluator UCCN.
13	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75,05	75,05/ 75,05	75.69	102.69	Realisasi tahun 2022, untuk realisasi 2023 masih proses penghitungan karena ada penyesuaian SK status jalan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk penghitungan kondisi jalan.
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.05	75.05/ 75.05	75,57	100,68	• Realisasi tahun 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Indikator	Satuan	2023				KETERANGAN
			Target RPJMD 2021-2026	Target RKPDP/RKPD-P	Realisasi	Capaian (%)	
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63.59	63.59/ 63.59	63,68	100,14	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023 Dengan komponen: - IKU 88,16 dengan target 87,50 - IKA 39,83 dengan target 40,50 - IKTL 59,34 dengan target 59• Untuk Bantul belum memakai aplikasi LHK dan masih dihitung secara manual dengan memakai 3 komponen yaitu IKA, IKU dan IKTL.
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169.94	169.94/ 169.94	163,4	103,85	Realisasi merupakan proyeksi dengan model trend linier. Realisasi IRB menunggu penetapan dari BNPB
17	Jumlah (PPKS)	Orang	71,667	71,667/ 71,667	40.323	143,74	Realisasi tahun 2023
18	Indeks Pemberdaya-an Gender (IDG)	Indeks	71.01	71.01/ 71.01	65,06	91,62	Realisasi merupakan Proyeksi dengan model <i>Single Exponential Smoothing</i>
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama/	Utama	100	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi tahun 2023• Sudah ada Satgas KLA di setiap kalurahan dan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Setiap Kapanewon;



2.3.2 Realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan BKK dari Provinsi ke Desa/Kelurahan)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRESS		
		VOL	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	VOL	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROGRES TERKINI
1	Dana Keistimewaan	4	Urusan	45.467.260.000	50	45.467.260.606	Sudah selesai dilaksanakan
2	Jambanisasi (Dinas Kesehatan Bantul)	50	Unit	250.000.000	50	250.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
3	Pada Karya Infrastruktur (Disnakertrans Bantul)	208	Paket	32.600.000.000	208	32.443.512.429	Terdapat SILPA akibat sisa lelang bahan material
3	Padat Karya Jogja Istimewa	39	Kalurahan	7.175.000.000	39	6.459.388.894	39 Kalurahan telah selesai dilaksanakan
4	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	1	Kalurahan	1.000.000.000	1	950.350.000	Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
5	Arsitektur Gaya Yogyakarta (untuk RTLH)	21	Kalurahan	4.500.000.000	21	4.500.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
6	Desa Mandiri Budaya	5	Kalurahan	4.800.000.000	5	4.800.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
7	Kesejarahan	1	Kalurahan	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
8	Desa Prima (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan DP3AP2 DIY)	1	Kalurahan	250.000.000	1	250.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
9	Desa Maritim	3	Kalurahan	1.600.000.000	3	1.600.000.000	Sudah selesai dilaksanakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRESS		
		VOL	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	VOL	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROGRES TERKINI
10	Desa Preneur (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan DKUMKM DIY)	3	Kalurahan	1.200.000.000	3	998.994.000	Kalurahan Dlingo tidak mencairkan Tahap II karena RAB Perubahan tidak disetujui
11	Desa Wisata (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan Dinpar DIY)	4	Kalurahan	3.050.000.000	4	3.050.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
12	Desa Mandiri Pangan (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan Dinas Pertanian DIY)	2	Kalurahan	950.000.000	2	949.600.000	Terdapat selisih Rp400.000 yang berasal dari Kalurahan Sriharjo akibat selisih SHBJ pembelian gazebo dan pembelian bambu
13	Omah Jagawarga	10	Kalurahan	500.000.000	10	500.000.000	Sudah selesai dilaksanakan
14	Pengelolaan Sampah	3	Kalurahan	6.000.000.000	3	5.985.089.940	Kalurahan Guwosari, Kalurahan Karangtengah dan Kalurahan Panggungharjo sudah selesai dilaksanakan
15	Kawasan Terpadu	1	Kalurahan	500.000.000	1	500.000.000	Penyusunan DED sudah mencapai 100% untuk Pembangunan fisik baru mencapai 85%.
16	Tata Kelola Pertanahan	2	Kalurahan	267.000.000	2	267.000.000	Kelurahan Argodadi ; untuk pengadaan barang dan jasa sudah selesai. Kalurahan Sriharjo sudah melaksanakan panen bawang merah dan padi.
17	Kampung Berkah	1	Kalurahan	200.000.000	1	200.000.000	Sudah terlaksana dengan pembangunan 6 kolam dan pompa



2.3.3 Progres Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi permasalahan tidak hanya di tingkat daerah namun juga menjadi salah satu permasalahan nasional. Oleh karena itu Penanggulangan Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan penanganan secara multi sektor. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No.	PROGRAM	Tahun 2023		
		Jumlah Penerima	ada di data P3KE	Persentase
1	PKH	59,246	33,560	56.65%
2	BPNT	86,411	43,445	50.28%
3	PBI APBD	68,534	22,073	32.21%
4	PIRT	448	98	21.88%
5	BLT DD	4,006	1,758	43.88%
6	Padat Karya	938	485	51.71%
7	Transmigrasi	16	7	43.75%
8	Peningkatan Produktifitas tenaga kerja	100	5	5.00%
9	Pelatihan Keterampilan LPK	96	39	40.63%
10	Pemberdayaan UMKM	360	127	35.28%
11	WRSE	46	20	43.48%
12	Bantuan Sosial BAZNAS	40	17	42.50%
13	JAMBANISASI	80	29	36.25%
14	Pengembangan Potensi SDM Pariwisata	70	4	5.71%
15	Pelatihan ketrampilan BLK	464	74	15.95%
16	RTLH	155	91	58.71%
17	Boga Sehat	900	416	46.22%



No.	PROGRAM	Tahun 2023		
		Jumlah Penerima	ada di data P3KE	Persentase
18	BUMKALMA	2,460	355	14.43%
19	PELATIHAN BUDIDAYA PERIKANAN	25	5	20.00%
20	PELATIHAN PASCA PANEN HASIL PERIKANAN	25	12	48.00%

I. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi

1. Rendahnya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan warga miskin;
2. Keterbatasan akses dan asset kebutuhan dasar warga miskin meliputi sandang, perumahan, sanitasi, air bersih dan sumber penghasilan;
3. Keterbatasan akses dan keterampilan dalam berusaha;
4. Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sektor dan instansi;
5. Sasaran program penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat;
6. Kurangnya kolaborasi dan kemitraan;
7. Belum ada database dan rencana penanggulangan kemiskinan yang komprehensif;
8. Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

II. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi kabupaten;
2. Koordinator pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. Fasilitator pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2.3.5 Penanganan Sampah di Kabupaten Bantul

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah berupaya secara bertahap mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Langkah2 yang diambil oleh Pemkab Bantul pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bupati Bantul menetapkan status darurat sampah dengan menerbitkan SK No 333/2023 tanggal 24 juli 2024;
2. Pembangunan ITF Pasar niten dengan kapasitas 5 TPD dengan alokasi sebesar 2,4M dan akan dimanfaatkan pada bulan januari 2024;
3. Pembangunan TPST Bantul (Modalan) dengan menggunakan dana Loan dengan kapasitas 45 TPD, alokasi 22,6M dan siap beroperasi pada semester 4 tahun 2024;
4. Peningkatan kapasitas TPS3R di 3 kalurahan (Panggunharjo, Karangtengah, Guwosari) dengan skema BKK bersumber dana keistimewaan;
5. Pemkab mengalokasikan kurang lebih 30% dana P2BMP untuk pengelolaan sampah;
6. Adanya SE Bupati untuk mahasiswa KKN wajib melaksanakan kegiatan untuk mendukung capaian Bantul Bersama.

Prasarana pengolahan sampah yang dibangun pada tahun 2023 adalah ITF Pasar Niten yang rencananya akan digunakan untuk mengolah sampah pasar seperti Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, Pasar Imogiri dan Pasar Pijenan dengan kapasitas kurang lebih 5 ton perhari, TPST Modalan dengan kapasitas 45 ton perhari yang pembangunannya diharapkan dapat terselesaikan di tahun 2024 dengan pembiayaan dari loan bank dunia melalui Kemen PUPR program ITDP.

Selain itu juga pendanaan dari Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk optimalisasi pengelolaan sampah di Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Karang Tengah. Sampah yang dapat terolah oleh 3 Kalurahan tersebut kurang lebih 10 ton perhari.

Saat ini potensi timbulan sampah yang ada di Kabupaten bantul sebesar 440 ton perhari, berdasarkan data bulan Januari sampai Juni 2023, rata – rata sampah yang dikirim ke TPA Piyungan sebesar 171 ton perhari. Dengan adanya pembatasan sampah yang masuk TPA Piyungan, Kabupaten Bantul mendapatkan kuota sampah yang dikirim ke TPA Piyungan sebesar 90 ton perhari terhitung mulai 5 September 2023 sampai dengan akhir Oktober 2023.



Tahun 2024 membangun TPST di Argodadi Sedayu dengan kapasitas 60 tpd, untuk optimalisasi TPS3R Bantul, Potorono menggunakan sumber dana keistimewaan dan CSR di fokuskan untuk penanganan sampah.

2.3.6 Penanganan Inflasi Daerah

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang jasa secara umum dimana barang jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang suatu negara. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan rancangan bantuan sosial dengan melakukan identifikasi masyarakat yang belum menerima BLT yang sudah masuk dalam DTKS.

1. Secara rutin akan memonitor harga dan ketersediaan stok;
2. Terkait operasi pasar akan dilaksanakan bersama Bulog dengan terlebih dahulu ada persetujuan dari TAPD;
3. Untuk besaran BLT akan disamakan dengan nasional;
4. Pemerintah Bantul melakukan kerja sama dengan BAZNAS tentang penyaluran dana bantuan BAZNAS.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Struktur APBD murni Kabupaten Bantul yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 129 tahun 2022 tanggal 29. Desember 2022 adalah Pendapatan Rp2.283.955.356.166,00 Belanja Rp2.406.376.986.992,00 dan Pembiayaan Rp122.421.630.826,00

Perubahan APBD TA 2023 terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023, dengan struktur: Pendapatan Rp2.322.852.031.554,00 Belanja Rp2.514.432.803.487,00 dan Pembiayaan Rp191.580.771.933,00

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2023. Realisasi keuangan ini merupakan angka konsolidasi dari pencapaian kinerja keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran 2023. Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan

Pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum besaran target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh, sedangkan di akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Sebagaimana diketahui bahwa Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran pendapatan tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	539.285.322.834,00	587.368.945.672,92	108,92
Pendapatan Transfer	1.777.566.708.720,00	1.821.467.142.818,65	102,47
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	6.000.000.000,00	7.215.619.863,00	120,26
Jumlah Pendapatan	2.322.852.031.554,00	2.416.051.708.354,57	104,01



a. Rasio realisasi pendapatan

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	587.368.945.672,92	24,31
2.	Pendapatan Transfer	1.821.467.142.818,65	75,39
3.	Lain-lain Pendapatan Yang sah	7.215.619.863,00	0,30
Jumlah		2.416.051.708.354,57	100,00

b. Rasio komponen pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	269.918.537.186,00	45,95
2.	Retribusi Daerah	42.382.506.560,80	7,22
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	20.515.070.732,29	3,49
4.	Lain-lain PAD	254.552.831.193,83	43,34
Jumlah		587.368.945.672,92	100,00



c. Rasio komponen pendapatan transfer terhadap total pendapatan transfer

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	34.766.685.062,00	1,91
2.	Dana Alokasi Umum	954.626.878.777,00	52,41
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik	56.576.626.350,00	3,11
4.	Dana Alokasi Khusus non Fisik	309.913.057.548,00	17,01
5.	Dana Insentif Daerah	58.809.566.000,00	3,23
6.	Dana Kalurahan	126.479.025.000,00	6,94
7.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	201.588.461.475,00	11,07
8.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	78.706.842.606,65	4,32
Jumlah		1.821.467.142.818,65	100,00

d. Rasio komponen lain-lain pendapatan yang sah atas lain-lain pendapatan yang sah

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Hibah	7.215.619.863,00	100,00
Jumlah		7.215.619.863,00	100,00



e. Rasio kemandirian daerah

Pendapatan Asli Daerah	x 100 %	
(Dana Transfer + Pinjaman Daerah)		
587.368.945.672,92	x 100%	= 32,25%
1.821.467.142.818,65		
Pendapatan Asli Daerah	x 100 %	
Total Belanja dan Transfer		
587.368.945.672,92	x 100%	= 24,36%
2.411.425.977.527,72		

3.1.2 Belanja dan Transfer

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam bentuk regulasi peraturan daerah mencantumkan batas maksimal penganggaran, yang dipergunakan sebagai dasar belanja daerah

Realisasi Belanja tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Operasi	1.907.502.908.396,00	1.840.327.289.726,91	96,48
Belanja Modal	238.080.232.448,00	227.673.894.188,81	95,63
Belanja Tak terduga	26.547.857.146,00	1.122.989.975,00	4,23
Belanja Transfer	342.301.805.497,00	342.301.803.637,00	100,00
Jumlah Belanja Daerah	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90



a. Rasio komponen belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer

No.	Komponen Belanja dan transfer	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	1.840.327.289.726,91	76,32
2.	Belanja modal	227.673.894.188,81	9,44
3.	Belanja tak terduga	1.122.989.975,00	0,05
4.	Transfer ke kab/kota/desa	342.301.803.637,00	14,19
Jumlah		2.411.425.977.527,72	100,00

b. Rasio komponen belanja operasi terhadap total belanja operasi

No.	Komponen Belanja Operasi	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	860.578.542.728,00	46,76
2.	Belanja Barang dan Jasa	858.885.766.998,91	46,67
3.	Belanja Bunga	0	0
4.	Belanja Subsidi	0	0
5.	Belanja Hibah	115.915.380.000,00	6,30
6.	Belanja Bantuan Sosial	4.947.600.000,00	0,27
Jumlah		1.840.327.289.726,91	100,00

c. Rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja dan transfer

$$= \frac{4.947.600.000,00}{2.411.425.977.527,72} \times 100\% = 0,21\%$$



d. Rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja dan transfer

$$= \frac{1.122.989.975,00}{2.411.425.977.527,72} \times 100\% = 0,05\%$$

e. Rasio belanja hibah terhadap total belanja dan transfer

$$= \frac{115.915.380.000,00}{2.411.425.977.527,72} \times 100\% = 4,81\%$$

f. Rasio belanja transfer terhadap total belanja dan transfer

$$= \frac{342.301.803.637,00}{2.411.425.977.527,72} \times 100\% = 14,19\%$$

g. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer

$$= \frac{860.578.542.728,00}{2.411.425.977.527,72} \times 100\% = 35,69\%$$

h. Rasio belanja barang dan jasa terhadap total belanja dan transfer

$$= \frac{858.885.766.998,91}{2.411.425.977.527,72} \times 100\% = 35,62\%$$

3.1.3 Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp215.664.574.732,74 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp215.631.865.732,74, dan Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp32.709.000,00.
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp24.051.093.800,00, untuk penyertaan modal Rp24.051.093.800,00 dan Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Rp0,00.



3. Realisasi pembiayaan netto tahun 2023 adalah sebesar Rp191.613.480.932,74 yang berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp215.664.674.732,74 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp24.051.093.800,00

- a. Rasio SILPA terhadap total penerimaan pembiayaan

$$= \frac{215.631.865.732,74}{215.664.574.732,74} \times 100\% = 99,98\%$$

- b. Rasio Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$= \frac{32.709.000,00}{215.664.574.732,74} \times 100\% = 0,02\%$$

- c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{0,00}{24.051.093.800,00} \times 100\% = 0\%$$

3.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59 yang diperoleh dari perbandingan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan netto

3.2 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu proses analisis terhadap laporan keuangan, dengan tujuan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik.

Berikut ini beberapa analisis rasio keuangan yang dilakukan:

1) Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Semakin besar nilainya, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan



kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

<u>Total Pendapatan Asli Daerah</u> Total Pendapatan
<u>587.368.945.672,92</u> 2.416.051.708.354,57 =24,31%

2) Rasio Efektifitas PAD

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif jika rasio efektifitas yang dicapai minimal 100% dan semakin tinggi semakin baik

<u>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</u> Target Penerimaan PAD
<u>587.368.945.672,92</u> 539.285.322.834,00 =108,92%

3) Rasio Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity). Rasio ini menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang pemerintah daerah untuk satu periode tertentu. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luar biasa, yang dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah.



(Total Pendapatan – DAK)
(Total Kewajiban + Belanja Pegawai)

2.049.562.024.456,57
923.091.479.881,63
= 222,03

4) Rasio Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah

(Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)
Total Beban LO

2.129.994.600,12
2.419.441.246.799,85
=88,04

5) Rasio Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Semakin tinggi nilainya maka semakin banyak aset lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar. Namun nilai yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebihan yang lebih baik digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aset lancar yang berlebih-lebihan dapat menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat

(Kas dan Setara Kas +Investasi Jangka pendek)
Kewajiban Lancar

196.239.211.759,59
62.512.937.153,63
=313,92%



6) Rasio Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan. Rasio ini menunjukkan keseimbangan pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasional selama satu periode. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah.

(Total Pendapatan – Pendapatan DAK) (Total Belanja – Belanja Modal)
--

<u>2.049.562.024.456,57</u> 2.183.752.083.338,91 =93,86%
--

7) Rasio Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya.

Total Aset Tetap Jumlah Penduduk

<u>3.659.100.489.148,84</u> 972.161 =376,39%
--



3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

3.2.1 Pencapaian target pembangunan pada tahun 2023 masih terdapat hambatan dan kendala di beberapa sub kegiatan meliputi:

No	Nama Sub Kegiatan	Hambatan	OPD Pelaksana
1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) direncanakan untuk 3 bulan hanya bisa dibayarkan 1 bulan karena transfer dana dari pusat tidak mencukupi	Disdikpora
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<ul style="list-style-type: none">- Penapisan sasaran kurang optimal (IUD dan IMplan). Sebagian sasaran dilayani untuk memenuhi kebutuhan praktek Pelatihan Kontrasepsi / CTU bagi bidan dan dokter yang dilaksanakan di RSUP dr. Sardjito;- Minat pemakaian KB MKJP lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP. Persentase pemakaian MKJP masih 13.38%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Berkas yang disampaikan banyak yang tidak lengkap sehingga membutuhkan waktu kembali untuk melengkapi sesuai ketentuan.	DPTR
4	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	<ul style="list-style-type: none">- Belum tersedia Peta Bidang Tanah (PBT) untuk pemberkasan Pendaftaran TD dan SG- ada bidangan yg belum terukur dikarenakan belum adanya peraturan terkait pendaftaran tanah Wedi Kengser;- Ada 2 kalurahan yang sampai sekarang belum mengumpulkan berkas pendaftaran ukur tanah desa (Patalan dan Sitimulyo), anggaran tersisa masih banyak	DPTR



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Nama Sub Kegiatan	Hambatan	OPD Pelaksana
		dikarenakan biaya SPS per bidang tanah ternyata tidak sesuai dengan prediksi Ada bidang tanah yang harus diploting ulang dan diukur ulang dikarenakan luas tanah yg tercatat di sertipikat dengan peta di BPN berbeda	
5	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	- harga pengujian sampel bakso elisa mengalami kenaikan tarif sehingga tidak semua sampel bisa diujikan Terdapat PHL yang mengundurkan diri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Berdasarkan hasil verifikasi piutang masih banyak daftar piutang yang harus ditindak lanjuti degan penelitian lapangan, akan tetapi belum semua penelitian lapangan bisa selesai di tahun 2023	BPKPAD

3.3.2 Hambatan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah antara lain:

1. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan SKPD kepada SKPKD;
2. Perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
3. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggunakan SIPD mulai tahun 2021 dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
4. Keterbatasan SDM di SKPD yang berbasis Pendidikan akuntansi; dan
5. Kecermatan SKPD dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut telah diupayakan dengan memberikan diklat kepada Pembuat laporan keuangan di SKPD yang dilakukan oleh BKPSDM. Disamping melakukan Diklat pembuat laporan keuangan SKPD, BPKPAD telah memberikan bimbingan kepada PPK SKPD fungsi akuntansi dan pelaporan dalam penatausahaan keuangan di seluruh SKPD dan melakukan rekonsiliasi secara



periodik terhadap realisasi pendapatan dan belanja yang dikelola oleh masing-masing SKPD dengan data maupun dokumen yang ada di BPKPAD sebagai PPKD sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan.

Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul masih menerapkan kebijakan penggunaan sistem informasi keuangan yang paralel dengan ketentuan dari pusat (SIPD), dikarenakan sistem dari pusat tersebut belum dapat berjalan secara maksimal. SIPD baru digunakan pada tahap perencanaan anggaran sedangkan penatausahaan dan pelaksanaan akuntansi dan laporannya masih menggunakan aplikasi pendamping yaitu SIMRAL.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

- a. Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat 54 OPD yang merupakan entitas akuntansi.
- b. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Produk dari entitas pelaporan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca, dan CaLK.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian;
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengungkapan dan Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disajikan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam mata uang asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:



4.3.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Pendapatan Kas yang telah diterima pada RKUD;
 - b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
 - c) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
 - d) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah;
 - e) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah;
 - f) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. BLUD menyampaikan laporan pendapatan setiap bulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD;
- 3) Pengukuran Pendapatan-LRA
Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya*, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran;
- 4) Penyajian Pendapatan-LRA
 - a. Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah;
 - b. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - c. Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Pengakuan Belanja
 - a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D;
 - c) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d) BLUD menyampaikan laporan belanja setiap bulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD;
 - e) Kas yang dikeluarkan entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai belanja;
 - f) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD;
 - g) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa;
 - (3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
 - (4) Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
 - (5) Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal OPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, alat tulis kantor, penggandaan, biaya makan



- minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan;
- (6) Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
- h) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
 - (2) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau;
 - (3) Bertambah umur ekonomis; dan/atau;
 - (4) Bertambah volume; dan/atau;
 - (5) Bertambah kapasitas produksi.
 - (6) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - (7) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
 - (8) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
 - (9) Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.
 - (10) Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa, dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - (11) Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - (12) Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 3) Pengukuran Belanja
Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 4) Penyajian Belanja
Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi belanja, yaitu:



- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga
- d) Belanja Transfer

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- 3) Transfer diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen yang sah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis transfer masuk dan jenis transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Surplus/Defisit-LRA

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 3) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam



periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya;

- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 5) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 7) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

- 1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- 2) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.3.2 Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan Laporan yang disusun hanya oleh Entitas Pelaporan dengan mengkonsolidasikan SiLPA Entitas Akuntansi pada akhir periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih menggambarkan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal adalah akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah bagian SAL awal yang dipergunakan sebagai penerimaan pembiayaan periode pelaporan;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan unsur unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Operasi, Surplus defisit kegiatan non-operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:



4.3.3.1 Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, asal pendapatan dan jenis pendapatan.
- c. Klasifikasi Pendapatan-LO meliputi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non-operasional dan pos luar biasa.
- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)—LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- e. Pendapatan Transfer—LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- f. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah—LO dan Pendapatan Transfer—LO;
- g. Pendapatan Non Operasional—LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi;
- h. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
- i. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- j. Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- k. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan tersebut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3.2 Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah;



- 2) Terjadinya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah;
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- c. Pengukuran beban
- 1) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
 - 2) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
 - 3) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
 - 4) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga
 - 5) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum
- d. Beban disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi belanja, yaitu:
- 1) Beban operasi;
 - 2) Beban Transfer;
 - 3) Beban Luar Biasa
- e. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut atas beban tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan



4.3.4 Pos-pos Neraca

4.3.4.1 Aset

4.3.4.1.1 Aset Lancar

4.3.4.1.1.1 Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.
- b. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.
- c. Kas diakui pada diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/ rekening kas umum daerah.
- d. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.3.4.1.1.2 Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- c. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - 1) Telah diterbitkan surat ketetapan (termasuk dokumen yang surat ketetapan yang dipersamakan dengan surat ketetapan); dan/atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- e. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- f. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.



- g. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- h. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	% penyisihan berdasarkan kualitas piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Piutang Pajak	0,5 %	10 %	50 %	100 %
2.	Piutang Retribusi	0,5 %	10 %	50 %	100 %
3.	Piutang Selain Pajak dan Retribusi	0,5 %	10 %	50 %	100 %

- i. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- j. Penyisihan piutang tidak tertagih di neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- k. Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
- l. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- m. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/*face* di Neraca untuk nilai piutang ditampilkan beriringan antara nilai nominal/bruto piutang dengan penyisihan piutang dan disajikan berdasarkan jenis piutang.

4.3.4.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

- 1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- 2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- 3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.



- 4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.3.4.1.1.4 Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
- d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- e. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- f. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
- g. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- i. Persediaan dapat berasal dari belanja modal aset daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan, nilainya di bawah batas kapitalisasi dan menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan.
- j. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.
- k. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



- l. Barang yang diserahkan kepada masyarakat apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan.
- m. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penentuan biaya standar untuk produksi sendiri diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penentuan nilai wajar untuk hewan dan tanaman diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:
 - 1) Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
 - 2) Dalam Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- o. Pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu:
 - 1) pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk



maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

- 2) pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait persediaan harus mengungkapkan/menyajikan tentang rincian persediaan, penjelasan tentang nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/kedaluwarsa, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4.1.2 Investasi Jangka Panjang.

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen.
- b. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang meliputi penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- e. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- f. Investasi non permanen yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- h. Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.



Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir mempunyai karakteristik:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
 2. Dana tersebut tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
 4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 5. Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir
 6. Investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
 7. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non-permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*)
 8. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non-permanen dana bergulir.
 9. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir setelah periode jatuh tempo.
 10. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- i. Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan kualitas			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Investasi non permanen	0,5 %	10 %	50 %	100 %

- j. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir.
- j. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- k. Investasi non permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstrakomtabel.
- l. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- m. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:



- 1) Metode biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan: digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah kurang dari 20 % (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima
 - 2) Metode ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi, digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%;
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- n. Harga perolehan investasi dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Investasi jangka panjang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi kebijakan penentuan nilai investasi, jenis investasi serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Khusus untuk Dana Bergulir disajikan sebagai komponen piutang selama mekanisme masih melalui mekanisme Kas Daerah.

4.3.4.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan biaya perolehan dapat diukur dengan secara andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- c. Tidak mudah rusak;
- d. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- g. Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - (1) Pengadaan/pembelian tanah;
 - (2) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - (3) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan. atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.



Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas, terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Kebijakan atas setiap akun Aset Tetap:

- 1.3.1.1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 1.3.1.2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.
- 1.3.1.3. Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah yang sejak awal dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.
- 1.3.1.4. Tanah diakui sebagai aset tetap pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Pakai/Hak Pengelolaan (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).
- 1.3.1.5. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran, hibah/donasi dan lainnya. Tanah yang diperoleh dengan melalui pembelian sebagai pelaksanaan kegiatan didasarkan pada anggaran belanja modal sehingga nilai perolehan diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan.
- 1.3.1.6. Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- 1.3.1.7. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



- 1.3.1.8. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 1.3.1.9. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 1.3.1.10. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 1.3.1.11. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan, kecuali jika tidak memungkinkan dapat dinilai menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
- 1.3.1.12. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
- 1.3.1.13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- 1.3.1.14. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- 1.3.1.15. Jalan Irigasi dan Jaringan diakui pada saat aset telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai serta dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar saat diperoleh.
- 1.3.1.16. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 1.3.1.17. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.



- 1.3.1.18. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- 1.3.1.19. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.
- 1.3.1.20. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan atau aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 1.3.1.21. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui dan disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 1.3.1.22. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat
- 1.3.1.23. Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut.
- a. Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

Pelaksanaan pengelolaan aset pada Tahun 2020 dilakukan dengan Sistem Berbasis Komputer (SIMAS BMD). Dalam SIMAS BMD untuk beban penyusutan aset tetap dilakukan langsung setelah tahun perolehan tanpa ada tenggang waktu, sehingga penyajian akumulasi penyusutan aset tetap di Neraca dan beban penyusutan di Laporan Operasional merupakan akumulasi penyusutan dari tahun pertama asset tersebut diperoleh.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/*face* di Neraca untuk nilai aset ditampilkan beserta penyusutannya.

4.3.4.1.4 Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan



pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
- b. Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- c. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- d. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-jasa giro/bunga dana cadangan.

4.3.4.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan meliputi:

1. Tagihan jangka panjang (tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah);
2. Kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna);
3. Aset tidak berwujud (lisensi, hak cipta, hak paten, aset tidak berwujud lainnya); dan;
4. Aset lain-lain.

Pengakuan aset lainnya ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah (TPTGR) diakui ketika terbit putusan TPTGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan mempergunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan pihak ketiga antara lain dapat berupa sewa, Kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun kelola/guna serah, bangun serah kelola/guna.
- 4) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan dengan perubahan pencatatan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara sewa.
- 5) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.
- 6) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak dan dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.
- 7) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- 8) Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- 9) Aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria:
 - a. Dapat diidentifikasi;
 - b. Dikendalikan oleh entitas;
 - c. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan;



- d. Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dari aset tidak berwujud tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi.
- 10) Pengakuan aset tidak berwujud.
Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 11) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.
Pengeluaran atas aset takberwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
- 12) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- 13) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

4.3.4.2 Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari pihak ketiga, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

- 1) Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya menjadi dua kelompok yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam periode 12 (dua belas) bulan, diluar itu maka diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Panjang.
- 2) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul.
- 3) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut.
- 4) Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang yang terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban pokok atau commitment fee yang telah terjadi diakui pada setiap akhir periode pelaporan.



- 5) Bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo pada periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, termasuk jumlah bagian dari utang jangka panjang.
- 6) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. Akun ini dinilai sebesar bagian barang/ jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- 7) Utang belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 8) Utang jangka pendek lainnya antara lain utang jamkesmas diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
- 9) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- 10) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber dalam negeri.

4.3.4.3 Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
- 5) Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran PPKD) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- 6) Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual penuh belum sepenuhnya menyeluruh dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan untuk perhitungan umur



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

penyusutan piutang masih konsisten berdasarkan perhitungan yang telah diterapkan dimasa yang lalu terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan LRA	2.322.852.031.554,00	2.416.084.417.354,57	104,01	2.260.577.439.195,54

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	539.285.322.834,00	587.435.038.672,92	108,93	540.572.423.372,80
5.1.1.2.	Pendapatan Transfer	1.777.566.708.720,00	1.821.467.142.818,65	102,47	1.712.037.734.603,00
5.1.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	7.182.235.863,00	119,70	7.967.281.219,74
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.322.852.031.554,00	2.416.084.417.354,57	104,01	2.260.577.439.195,54

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.416.084.417.354,57 atau mencapai 104,01% dari pagu anggaran sebesar Rp2.322.852.031.554,00. Realisasi pendapatan tersebut termasuk pendapatan Dana Kalurahan, pendapatan BLUD, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	539.285.322.834,00	587.435.038.672,92	108,93	540.572.423.372,80

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.	Pajak Daerah	249.088.495.863,00	269.918.537.186,00	108,36	252.857.438.493,70
5.1.1.1.2.	Retribusi Daerah	43.302.138.144,00	42.382.506.560,80	97,88	42.178.624.886,07
5.1.1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.515.070.732,29	101,56	20.839.915.416,20
5.1.1.1.4.	Lain – Lain PAD yang Sah	226.694.993.959,00	254.618.924.193,83	112,32	224.696.444.576,83
	Jumlah Pendapatan asli Daerah	539.285.322.834,00	587.435.038.672,92	108,93	540.572.423.372,80

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut dengan asas *Self Assesment* dan *Official Assesment*.

Pengampu Pajak Daerah dikelola oleh BPKPAD.

Rincian atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.	Pendapatan atas Pajak Daerah terdiri atas:				
5.1.1.1.1.1.	Pajak hotel	8.000.000.000,00	9.545.901.045,00	119,32	7.304.257.386,70
5.1.1.1.1.2.	Pajak restoran	27.000.000.000,00	31.135.851.736,00	115,32	22.867.157.537,60

5.1.1.1.1.3	Pajak hiburan	890.000.000,00	985.113.818,00	110,69	582.618.635,00
5.1.1.1.1.4	Pajak reklame	3.400.000.000,00	3.711.605.801,00	109,16	3.298.139.214,00
5.1.1.1.1.5	Pajak penerangan jalan	56.700.000.000,00	57.776.381.090,00	101,90	53.818.957.841,00
5.1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	140.000.000,00	186.696.450,00	133,35	296.414.530,00
5.1.1.1.1.7	Pajak parkir	280.000.000,00	291.070.969,00	103,95	227.778.698,00
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.285.364.422,00	116,85	1.217.776.430,00
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan PerKalurahan dan Perkotaan	67.610.000.000,00	69.506.010.787,00	102,80	59.023.884.065,00
5.1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	83.966.995.863,00	95.493.041.068,00	113,73	104.218.954.156,40
	Jumlah Pajak Daerah	249.088.495.863,00	269.918.537.186,00	108,36	252.857.438.493,70

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp269.918.537.186,00. atau mencapai 108,36% dari anggarannya sebesar Rp249.088.495.863,00. . Kenaikan penerimaan pajak daerah yang signifikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak PBBP2.

Peningkatan Pajak Daerah ini karena adanya :

1. Ekstensifikasi Pajak yaitu dengan :

- a. Pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak;
- b. Pendataan obyek pajak dan subyek pajak;
- c. Pemutakhiran basis data PBB;
- d. Intergrasi data BPHTB dengan data PBB;
- e. pelayanan kepada wajib pajak secara tatap muka maupun online melalui citigov;
- f. Sosialisasi pajak kepada wajib pajak dan dukuh;
- g. Menambah jumlah tempat pembayaran pajak dengan bekerjasama dengan Bank Nasional.

2. Intensifikasi Pajak yaitu dengan :

- a. Melakukan panagihan dengan menerbitkan STPD;
- b. Pelayanan pembayaran pajak dengan mobil keliling;
- c. Pengawasan pelaporan dengan tapping device;
- d. Mensyaratkan pelunasan tunggakan PBB P2 untuk proses penelitian SSPD BPHTB;
- e. Memberikan reward kepada Dukuh dan Kalurahan yang lunas PBB P2;
- f. Apresiasi kepada wajib pajak yang membayar pajak lebih awal.

Rincian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak hotel	8.000.000.000,00	9.545.901.045,00	119,32	7.304.257.386,70

Pajak Hotel di Kabupaten Bantul dikelola berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.

Pajak Hotel merupakan pajak *Self Assesment* dimana Wajib Pajak menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran pajaknya sesuai omzet di hotel masing-masing setiap bulan dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan pelanggan kepada hotel.

Anggaran dan Realisasi masing-masing Pajak Hotel Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 per wilayah Kepanewon sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	7.973.000.000,00	9.511.470.084,00	119,30	7.260.344.126,70

1	Kepanewon Banguntapan	5.740.000.000,00	6.549.055.021,00	114,10	4.689.972.724,00
2	Kepanewon Sewon	1.570.000.000,00	1.931.349.693,00	123,02	1.225.496.158,70
3	Kepanewon Sanden	-	-	-	2.782.965,00
4	Kepanewon Kretek	12.000.000,00	18.316.400,00	152,64	18.186.300,00
5	Kepanewon Bambanglipuro	-	1.467.500,00	-	225.006.353,00
6	Kepanewon pleret	11.000.000,00	11.653.000,00	105,94	9.286.708,00
7	Kepanewon Piyungan	30.000.000,00	34.368.463,00	114,56	30.342.527,00
8	Kepanewon Bantul	-	220.000,00	-	-
9	Kepanewon Imogiri	-	3.254.000,00	-	-
10	Kepanewon Dlingo	-	16.495.238,00	-	405.858.698,00
11	Kepanewon Kasihan	600.000.000,00	930.530.769,00	155,09	643.581.693,00
12	Kepanewon Sedayu	10.000.000,00	14.760.000,00	147,60	9.830.000,00

5.1.1.1.1.2	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		27.000.000,00	34.430.961,00	127,52	43.913.260,00

5.1.1.1. 1.2	Pajak restoran	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		27.000.000.000,00	31.135.851.736,00	115,32	22.867.157.537,60

Pajak Restoran merupakan pajak *Self Assesment* dimana Wajib Pajak menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran pajaknya sesuai omzet di Restoran masing-masing setiap bulan.

Pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran konsumen yang dilakukan kepada restoran.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1	Pajak Restoran dan sejenisnya	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		7.780.000.000,00	8.292.503.236,00	106,59	7.148.616.329,00

Realisasi Pajak Restoran berasal dari Restoran yang tersebar di beberapa Kepanewon di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Nama Kepanewon	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Kepanewon Bantul	460.000.000,00	523.633.757,00	113,83	644.698.971,00
2	Kepanewon Dlingo	-	-	-	190.599.046,00
3	Kepanewon Pleret	1.450.000.000,00	1.587.683.600,00	109,50	1.449.359.140,00
4	Kepanewon Banguntapan	1.250.000.000,00	1.357.781.730,00	108,62	1.063.566.280,00
5	Kepanewon Piyungan	-	-	-	134.261.652,00
6	Kepanewon Sewon	840.000.000,00	851.650.064,00	101,39	819.853.579,00
7	Kepanewon Kasihan	3.380.000.000,00	3.535.391.953,00	104,60	2.792.966.161,00
8	Kepanewon sedayu	400.000.000,00	436.362.132,00	109,09	-
9	Kepanewon Imogiri	-	-	-	53.311.500,00
	Jumlah	7.780.000.000,00	8.292.503.236,00	106,59	7.148.616.329,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.2.2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.100.000.000,00	12.467.892.963,00	112,32	6.472.236.098,00

Realisasi Pajak Restoran atas Rumah Makan dan sejenisnya berasal dari Rumah Makan yang tersebar di beberapa Kepanewon di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Nama Kepanewon	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Kepanewon Srandakan	60.000.000,00	80.445.920,00	134,08	33.825.244,00
2	Kepanewon Sanden	210.000.000,00	247.232.600,00	117,73	122.085.713,00
3	KepanewonKretek	140.000.000,00	162.692.155,00	116,21	62.329.394,00
4	Kepanewon Pundong	60.000.000,00	67.856.550,00	113,09	40.422.857,00
5	Kepanewon Bambanglipuro	200.000.000,00	241.190.607,00	120,60	70.060.771,00
6	Kepanewon Pandak	170.000.000,00	192.506.250,00	113,24	87.684.105,00
7	Kepanewon Pajangan	220.000.000,00	243.205.608,00	110,55	81.094.096,00
8	Kepanewon Bantul	1.300.000.000,00	1.461.438.290,00	112,42	892.384.338,00
9	Kepanewon Jetis	250.000.000,00	289.832.024,00	115,93	136.798.890,00
10	Kepanewon Imogiri	270.000.000,00	292.613.250,00	108,38	113.580.819,00
11	Kepanewon Dlingo	150.000.000,00	161.289.552,00	107,53	60.689.000,00
12	Kepanewon Banguntapan	2.450.000.000,00	2.702.720.279,00	110,32	1.609.577.019,00
13	Kepanewon Pleret	340.000.000,00	399.780.856,00	117,58	111.014.544,00
14	Kepanewon Piyungan	320.000.000,00	358.656.232,00	112,08	167.697.871,00
15	Kepanewonn Sewon	1.460.000.000,00	1.657.919.304,00	113,56	863.206.541,00
16	Kepanewon Kasihan	3.150.000.000,00	3.517.445.958,00	111,66	1.885.075.216,00
17	Kepanewon Sedayu	350.000.000,00	391.067.528,00	111,73	134.709.680,00
	Jumlah	11.100.000.000,00	12.467.892.963,00	112,32	6.472.236.098,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.2.3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	10.245.262.937,00	128,07	9.055.070.773,60

Realisasi Pajak Restoran atas Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya yang tersebar di beberapa Kepanewon di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Nama Kepanewon	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Kepanewon Banguntapan	-	-	-	400.000,00
2	Kepanewon Kasihan	3.000.000,00	4.200.000,00	140,00	4.200.000,00
3	Katering Wajib Pungut	7.997.000.000,00	10.241.062.937,00	128,06	9.050.470.773,60
	Jumlah	8.000.000.000,00	10.245.262.937,00	128,07	9.055.070.773,60

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.2.4	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000,00	130.192.600,00		191.234.337,00

Realisasi Pajak Restoran atas Warung dan sejenisnya berasal dari Warung yang tersebar di 17 Kepanewon di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Nama Kepanewon	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Kepanewon Srandakan	3.200.000,00	3.593.000,00	112,28	3.932.000,00
2	Kepanewon Sanden	600.000,00	650.000,00	108,33	1.675.000,00
3	KepanewonKretek	36.770.000,00	40.367.500,00	109,78	39.530.000,00

4	Kepanewon Pundong	2.200.000,00	2.370.000,00	107,73	1.870.000,00
5	Kepanewon Bambanglipuro	2.200.000,00	2.260.000,00	102,73	2.927.000,00
6	Kepanewon Pandak	4.000.000,00	4.405.000,00	110,13	4.410.000,00
7	Kepanewon Pajangan	700.000,00	755.000,00	107,86	695.000,00
8	Kepanewon Bantul	9.280.000,00	10.050.000,00	108,30	47.308.237,00
9	Kepanewon Jetis	1.700.000,00	1.920.000,00	112,94	1.760.000,00
10	Kepanewon Imogiri	600.000,00	660.000,00	110,00	1.580.000,00
11	Kepanewon Dlingo	200.000,00	220.000,00	110,00	-
12	Kepanewon Banguntapan	10.500.000,00	11.280.000,00	107,43	13.197.000,00
13	Kepanewon Pleret	11.300.000,00	11.740.000,00	103,89	8.655.000,00
14	Kepanewon Piyungan	6.800.000,00	7.460.000,00	109,71	9.380.000,00
15	Kepanewon Sewon	11.800.000,00	12.820.000,00	108,64	22.090.000,00
16	Kepanewon Kasihan	14.450.000,00	15.592.100,00	107,90	26.800.100,00
17	Kepanewon Sedayu	3.700.000,00	4.050.000,00	109,46	5.425.000,00
	Jumlah	120.000.000,00	130.192.600,00	108,49	191.234.337,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	890.000.000,00	985.113.818,00	110,69	582.618.635,00

Pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan dengan besaran tarif pengenaan sesuai jenis hiburan meliputi:

- 1 Tontonan Film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 2 Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 3 Kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 4 Kontes Binaraga dan sejenisnya 25% (dua puluh lima perseratus);
- 5 Pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- 6 Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- 7 Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 8 Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 9 Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 10 Permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- 11 Panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- 12 Refleksi dan pusat kebugaran (Fitnes center) sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 13 Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus)

Rincian dari anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

Jenis Pajak Hiburan		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.3.1	Pajak Pameran	137.000.000,00	195.499.000,00	142,70	225.585.500,00
5.1.1.1.1.3.2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	285.015.773,00	308.216.841,00	108,14	241.066.032,00
5.1.1.1.1.3.3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00	20.813.750,00	115,63	7.776.750,00
5.1.1.1.1.3.4	Pertandingan Olah Raga	-	10.600.000,00	-	82.416.865,00
5.1.1.1.1.3.5	Pusat Kebugaran	-	-	-	12.740.500,00

5.1.1.1.1.3.6	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	449.984.227,00	449.984.227,00	100,00	13.032.988,00
	Jumlah	890.000.000,00	985.113.818,00	110,69	582.618.635,00

5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		3.400.000.000,00	3.711.605.801,00	109,16	3.298.139.214,00

Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame.

Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

Jenis Pajak Reklame		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.605.000.000,00	2.829.625.841,00	108,62	2.411.888.774,00
5.1.1.1.1.4.2	Pajak Reklame Kain	235.000.000,00	286.879.286,00	122,08	338.141.576,00
5.1.1.1.1.4.3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	560.000.000,00	574.954.736,00	102,67	548.108.864,00
5.1.1.1.1.4.4	Pajak Reklame Berjalan	-	20.145.938,00	-	-
	Jumlah	3.400.000.000,00	3.711.605.801,00	109,16	3.298.139.214,00

5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		56.700.000.000,00	57.776.381.090,00	101,90	53.818.957.841,00

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pengenaan sebesar 8% untuk penggunaan listrik dari PLN bukan untuk industri dan 3% untuk penggunaan listrik dari PLN untuk industri.

5.1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Pasir dan Kerikil	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		140.000.000,00	186.696.450,00	133,35	296.414.530,00

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bantul 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukal Logam dan Batuan, dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

5.1.1.1.1.7	Pajak Parkir	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		280.000.000,00	291.070.969,00	103,95	227.778.698,00

Pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 dan Tahun 2022 berasal dari titik parkir yang tersebar di 12 Kepanewon di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama Kepanewon	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Kepanewon Kretek	11.100.000,00	12.612.000,00	113,62	12.774.000,00
2	Kepanewon Bambanglipuro	400.000,00	405.000,00	101,25	504.000,00
3	Kepanewon Pandak	94.000.000,00	94.893.900,00	100,95	60.690.000,00
4	Kepanewon Bantul	27.350.000,00	27.542.100,00	100,70	29.191.800,00

5	Kepanewon Jetis	5.600.000,00	5.863.800,00	104,71	6.175.500,00
6	Kepanewon Imogiri	150.000,00	204.000,00	136,00	405.600,00
7	Kepanewon Banguntapan	69.700.000,00	74.791.101,00	107,30	53.670.975,00
8	Kepanewon Pleret	6.300.000,00	6.793.350,00	107,83	11.770.200,00
9	Kepanewon Piyungan	5.500.000,00	5.967.900,00	108,51	5.479.020,00
10	Kepanewon Sewon	2.200.000,00	2.425.800,00	110,26	1.834.500,00
11	Kepanewon Kasihan	49.000.000,00	50.062.618,00	102,17	44.167.103,00
12	Kepanewon Sedayu	8.700.000,00	9.509.400,00	109,30	1.116.000,00
	Jumlah	280.000.000,00	291.070.969,00	103,95	227.778.698,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.285.364.422,00	116,85	1.217.776.430,00

Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah dengan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air.

Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 dari target sebesar Rp1.100.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp1.285.364.422,00 atau mencapai 116,85%. Pelampauan Pendapatan Pajak Air Tanah dari target dikarenakan adanya penambahan Wajib Pajak Air Tanah dan penentuan nilai perolehan air/NPA yang diputuskan melalui SK Gubernur DIY.

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2023 dan tahun 2022 berasal dari wajib pajak yang tersebar di 15 Kepanewon di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama Kepanewon	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Kepanewon Srandakan	-	-	-	-
2	Kepanewon Sanden	250.000,00	301.950,00	120,78	184.578,00
3	Kepanewon Kretek	4.000.000,00	4.365.341,00	109,13	5.421.366,00
4	Kecamatan Pundong	400.000,00	488.424,00	122,11	413.006,00
5	Kecamatan Bambanglipuro	15.000.000,00	18.458.267,00	123,06	16.558.452,00
6	Kecamatan Pandak	30.000.000,00	35.720.146,00	119,07	29.866.727,00
7	Kecamatan Pajangan	5.000.000,00	11.102.267,00	222,05	10.038.225,00
8	Kecamatan Bantul	487.350.000,00	554.823.655,00	113,85	480.219.035,00
9	Kecamatan Jetis	15.000.000,00	21.394.602,00	142,63	28.433.625,00
10	Kecamatan Imogiri	3.000.000,00	3.759.482,00	125,32	3.059.715,00
11	Kecamatan Banguntapan	225.000.000,00	260.680.602,00	115,86	215.389.135,00
12	Kecamatan Pleret	5.000.000,00	6.409.536,00	128,19	5.907.173,00
13	Kecamatan Piyungan	90.000.000,00	106.968.908,00	118,85	124.827.556,00
14	Kecamatan Sewon	60.000.000,00	76.124.225,00	126,87	104.944.885,00
15	Kecamatan Kasihan	90.000.000,00	106.759.319,00	118,62	111.140.283,00
16	Kecamatan Sedayu	70.000.000,00	78.007.698,00	111,44	81.372.669,00
	Jumlah	1.100.000.000,00	1.285.364.422,00	116,85	1.217.776.430,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diubah dengan Perda Nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2022 dari target sebesar Rp1.500.000,00 terealisasi 100%.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Per Kalurahan dan Perkotaan	67.610.000.000,00	69.506.010.787,00	102,80	59.023.884.065,00

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati yang mendasari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah:

- 1 Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2;
- 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2;
- 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan /atau Kekeliruan Penetapan Ketentuan PBB-P2;
- 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2;
- 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 64A Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
- 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2;
- 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2
- 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding PBB-P2;
- 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2014 tentang Nomor Objek Pajak PBB-P2;
- 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2.

Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PerKalurahan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp69.506.010.787,00 atau mencapai 102,97%. Kenaikan ini didorong oleh adanya optimalisasi mobil keliling, intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak, bulan panutan PBB dan kerjasama dengan Kepala Kalurahan dan Dukuh dan adanya reward bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	83.966.995.863,00	95.493.041.068,00	113,73	104.218.954.156,40

Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010. Obyek pemungutan adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tarif pengenaan sebesar 5% dari nilai selisih jual setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000,00 selain Hibah Wasiat dan Waris. Sedangkan khusus untuk Pajak BPHTB Hibah Wasiat dan Waris, nilai NPOPTKP-nya sebesar Rp300.000.000,00.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) digolongkan dalam 3 jenis retribusi:

- 1 Retribusi Jasa Umum

- 2 Retribusi Jasa Usaha
- 2 Retribusi Perizinan Tertentu

Adapun ketentuan yang mengatur retribusi menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Dasar Hukum		SKPD Pengampu
A.	Retribusi Jasa Umum	
1	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan
2	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Perhubungan.
3	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Perdagangan
4	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Perhubungan.
5	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2013	Dinas Kesehatan
6	Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2016	Dinas Komunikasidan Informatika
7	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Pekerjaan Umum, Perumaahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perdagangan
8	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2013	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
9	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Kesehatan
10	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Dinas Pekerjaan Umum, Perumaahan dan Kawasan Pemukiman
11	Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2018	Dinas Perdagangan
B.	Retribusi Jasa Usaha	
1	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Dinas Pekerjaan Umum, Perumaahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumaahan dan Kawasan Pemukiman
2	Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2017	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
3	Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Dinas Perhubungan
4	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Bagian Umum
5	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
6	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
7	Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011	Dinas Pekerjaan Umum, Perumaahan dan Kawasan Pemukiman
2	Perda Kab. Bantul Nomor 1 tahun 2017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rincian target dan realisasi dalam retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.1.1.1.2	Retribusi Daerah terdiri atas:	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	9.693.675.894,00	9.393.839.229,00	96,91	9.575.855.281,00
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	30.840.462.250,00	30.957.304.753,00	100,38	30.993.782.028,00

5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00	2.031.362.578,80	73,39	1.608.987.577,07
	Jumlah	43.302.138.144,00	42.382.506.560,80	97,88	42.178.624.886,07

Rincian target dan realisasi menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	9.693.675.894,00	9.393.839.229,00	96,91	9.575.855.281,00
5.1.1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	2.095.598.820,00	2.054.622.640,00	98,04	2.584.983.000,00
5.1.1.1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	278.960.000,00	265.455.000,00	95,16	210.905.000,00
5.1.1.1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.556.803.074,00	4.412.038.089,00	96,82	3.971.324.381,00
5.1.1.1.2.1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.278.511.500,00	910.708.000,00	71,23	913.468.000,00
5.1.1.1.2.1.5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00	21.775.000,00	100,80	21.607.500,00
5.1.1.1.2.1.6	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis/Pelayanan Kesehatan Hewan	350.000.000,00	351.928.000,00	100,55	387.942.000,00
5.1.1.1.2.1.7	Retribusi Rumah Tangga /Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000,00	145.327.000,00	129,52	152.137.000,00
5.1.1.1.2.1.8	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.000.000,00	13.729.000,00	171,61	11.817.000,00
5.1.1.1.2.1.9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	1.121.400.000,00	124,60	1.242.000.000,00
5.1.1.1.2.1.10	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	92.000.000,00	96.856.500,00	105,28	79.671.400,00
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	30.840.462.250,00	30.957.304.753,00	100,38	30.993.782.028,00
5.1.1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.673.795.000,00	1.647.778.200,00	98,45	1.727.162.600,00
5.1.1.1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	86.700.000,00	72.576.993,00	83,71	54.677.028,00
5.1.1.1.2.2.3	Retribusi Terminal	187.173.000,00	231.057.700,00	123,45	180.004.400,00
5.1.1.1.2.2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	267.995.000,00	107,20	245.430.000,00
5.1.1.1.2.2.5	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	37.380.000,00	106,80	29.220.000,00
5.1.1.1.2.2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	27.373.078.250,00	27.446.416.750,00	100,27	27.513.197.250,00
5.1.1.1.2.2.7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.229.716.000,00	1.242.800.110,00	101,06	1.236.390.750,00
5.1.1.1.2.2.8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000,00	11.300.000,00	226,00	7.700.000,00
5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00	2.031.362.578,80	73,39	1.608.987.577,07
5.1.1.1.2.3.1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- LRA	2.205.000.000,00	1.257.002.578,80	57,01	1.303.557.577,07
5.1.1.1.2.3.2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	563.000.000,00	774.360.000,00	137,54	305.430.000,00

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dari masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	200.000.000,00	350.535.000,00	175,27	405.930.000,00
2	Dinas Kesehatan	149.555.000,00	180.756.000,00	120,86	126.090.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.846.042.500,00	2.892.278.878,80	75,20	3.080.230.077,07
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	563.000.000,00	774.360.000,00	137,54	305.430.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.851.598.820,00	1.783.300.140,00	96,31	2.343.291.600,00
6	Dinas Perhubungan	1.999.644.500,00	1.681.015.700,00	84,07	1.555.107.400,00
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	900.000.000,00	1.121.400.000,00	124,60	1.242.000.000,00
8	Dinas Pariwisata	26.513.473.000,00	26.283.785.500,00	99,13	26.513.478.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	367.950.000,00	301.366.603,00	81,90	307.430.778,00

10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.993.071.250,00	2.215.414.750,00	111,16	1.994.688.250,00
11	Dinas Perdagangan	-	-	-	-
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.912.803.074,00	4.786.993.989,00	97,44	4.297.248.781,00
13	Bagian Umum	5.000.000,00	11.300.000,00	226,00	7.700.000,00
	Jumlah	43.302.138.144,00	42.382.506.560,80	97,88	42.178.624.886,07

Realisasi masing-masing Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	2.095.598.820,00	2.054.622.640,00	98,04	2.584.983.000,00

Anggaran dan realisasi dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Per OPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Nomor	Nama Perangkat Daerah	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	1.831.598.820,00	1.776.523.240,00	96,99	2.338.730.000,00
2	DKUKMP	264.000.000,00	278.099.400,00	105,34	246.253.000,00
	Jumlah	2.095.598.820,00	2.054.622.640,00	98,04	2.584.983.000,00

Capaian retribusi dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak melampaui target disebabkan adanya penutupan TPST Piyungan .

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	278.960.000,00	265.455.000,00	95,16	210.905.000,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.556.803.074,00	4.412.038.089,00	96,82	3.971.324.381,00

. Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.278.511.500,00	910.708.000,00	71,23	913.468.000,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas Perhubungan.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00	21.775.000,00	100,80	21.607.500,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.6 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis/Pelayanan Kesehatan Hewan	350.000.000,00	351.928.000,00	100,55	387.942.000,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1.7	Retribusi Rumah Tangga /Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000,00	145.327.000,00	129,52	152.137.000,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.					
5.1.1.1.2.1.8	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.000.000,00	13.729.000,00	171,61	11.817.000,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Dinas Kesehatan.					
5.1.1.1.2.1.9	Retribusi Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	1.121.400.000,00	124,60	1.242.000.000,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Komunikasi, dan Informatika. Realisasi tahun 2023 melampaui target karena ada pembayaran piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun-tahun sebelumnya.					
5.1.1.1.2.1.10	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	92.000.000,00	96.856.500,00	105,28	79.671.400,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan.					
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha				
5.1.1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.673.795.000,00	1.647.778.200,00	98,45	1.727.162.600,00
5.1.1.1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	86.700.000,00	72.576.993,00	83,71	54.677.028,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.					
5.1.1.1.2.2.3	Retribusi Terminal :	187.173.000,00	231.057.700,00	123,45	180.004.400,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan.					
5.1.1.1.2.2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	267.995.000,00	107,20	245.430.000,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Dinas Perhubungan.					
5.1.1.1.2.2.5	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	37.380.000,00	106,80	29.220.000,00
Pelaksana Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.					

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	27.373.078.250,00	27.446.416.750,00	100,27	27.513.197.250,00

Rincian anggaran dan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga per OPD pengelola sebagai berikut:

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah Pengampu	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pariwisata	26.513.473.000,00	26.283.785.500,00	99,13	26.513.478.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	200.000.000,00	350.535.000,00	175,27	405.930.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	659.605.250,00	812.096.250,00	123,12	593.789.250,00
	Jumlah	27.373.078.250,00	27.446.416.750,00	100,27	27.513.197.250,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.229.716.000,00	1.242.800.110,00	101,06	1.236.390.750,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebagai berikut :

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
1	Penjualan Produksi Usaha Daerah Bibit atau benih tanaman	818.771.000,00	825.890.000,00	100,87	808.771.000,00
2	Penjualan Produksi Usaha Daerah bibit ternak	80.000.000,00	106.614.000,00	133,27	125.271.000,00
3	Penjualan Produksi Usaha Daerah selain bibit atau benih tanaman, bibit ternak & bibit atau benih ikan	49.695.000,00	81.506.500,00	164,01	49.695.000,00
	Dinas Kelautan Dan Perikanan				
4	Penjualan Produksi Usaha Daerah bibit atau benih ikan	281.250.000,00	228.789.610,00	81,35	252.653.750,00
	Jumlah	1.229.716.000,00	1.242.800.110,00	101,06	1.236.390.750,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2.8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000,00	11.300.000,00	226,00	7.700.000,00

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa ini merupakan realisasi biaya sewa/penginapan di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ada di Jakarta dan dimanfaatkan oleh PNS maupun warga masyarakat Bantul yang pergi ke Jakarta. Pelaksana pemungutan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa adalah Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00	2.031.362.578,80	73,39	1.608.987.577,07

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.3.1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- LRA	2.205.000.000,00	1.257.002.578,80	57,01	1.303.557.577,07

Persetujuan Bangunan Gedung, adalah pengganti IMB setelah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.

Dasar pemungutan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu, dan mulai berlaku pada 1 Juli 2022.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.3.2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	563.000.000,00	774.360.000,00	137,54	305.430.000,00

Dasar pemungutan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.

5.1.1.1.3 Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas:

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah Tahun 2022 yang disetorkan di Tahun Anggaran 2023 dengan pengaturan sesuai masing-masing Peraturan Daerah sebagai payung hukum pendirian perusahaan daerah.

Nomor	Dasar Hukum	Keterangan
1	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2007 dan telah dirubah dengan Perda Nomor 11 tahun 2019	Penyertaan modal murni milik Pemerintah Kabupaten Bantul
2	Perda Kab. Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 terakhir diubah dengan Perda Nomor 03 tahun 1991	
3	Perda Kab. Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2020	
4	Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989	
5	Perda Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000	

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD. Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.692.694.868,00	19.714.456.371,29	100,11	20.060.046.871,20
5.1.1.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00	19.112.119,00	12,17	10.266.058,00
5.1.1.1.3.3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00	781.502.242,00	223,29	769.602.487,00
	Jumlah	20.199.694.868,00	20.515.070.732,29	101,56	20.839.915.416,20

Rincian realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terdiri dari:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.1.1	Bagian Laba PT Bank BPD DIY	15.865.045.674,00	15.865.045.674,00	100,00	16.680.395.988,35
5.1.1.1.3.1.2	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah PD BPR Bank Bantul	3.627.482.239,00	3.627.482.239,00	100,00	3.009.104.199,00
5.1.1.1.3.1.3	Bagian Laba BUKP	200.166.955,00	221.928.458,29	110,87	370.546.683,85
	Jumlah	19.692.694.868,00	19.714.456.371,29	100,11	20.060.046.871,20

Penjelasan lebih lanjut dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) adalah sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.1.1 Bagian Laba PT Bank BPD DIY	15.865.045.674,00	15.865.045.674,00	100,00	16.680.395.988,35

Bagian Laba PT Bank BPD DIY merupakan pembagian laba dari PT Bank BPD DIY. Penetapan bagian laba tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BPD DIY Tahun Buku 2022. Deviden tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Februari 2023. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BPD DIY dengan penjelasan sebagai berikut:

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Bagian Laba Pemerintah Kabupaten Bantul	15.865.045.674,00	15.865.045.674,00	100,00	16.680.395.988,35
Bagian Laba yang telah disetor		15.865.045.674,00		16.680.395.988,35
Kewajiban yang belum disetor		-		-

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.1.2 Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah PD BPR Bank Bantul	3.627.482.239,00	3.627.482.239,00	100,00	3.009.104.199,00

Penetapan bagian laba Tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berasal dari hasil audit atas Laporan Keuangan PD BPR Bank Bantul Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan.

Laba setelah pajak		6.602.024.278,00	5.476.575.119,00
Laba dibagi 55%		3.631.113.352,90	3.012.116.315,45
Pemda 99,9%		3.627.482.239,55	3.009.104.199,13
PDAM 0,10%		3.631.113,35	3.012.116,32
Pembulatan			
Bagian laba tahun 2022 yang telah disetor di 2023		3.627.482.239,00	3.009.104.199,00
Kewajiban yang belum disetor		0,55	0,13

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.1.3 Bagian Laba BUKP	200.166.955,00	221.928.458,30	110,87	370.546.683,85

Penetapan bagian laba tahun buku 2022 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 352/KEP/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 267/KEP/2023 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit PeKalurahanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2022.

Rincian dari penerimaan bagian laba BUKP untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

NO	BUKP WILAYAH KERJA KEPANEWON	Kewajiban Menurut SK Gubernur	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Imogiri	12.662.609,11	12.662.609,11	20.729.987,40	(8.067.378,29)
2	Srandakan	19.940.636,70	19.940.636,70	23.122.523,34	(3.181.886,64)
3	Pandak	-	-	-	-
4	Kretek	32.759.487,92	32.759.487,92	35.712.717,72	(2.953.229,80)
5	Pleret	7.059.930,92	7.059.930,92	13.033.902,09	(5.973.971,17)
6	Piyungan	-	-	-	-
7	Sedayu	11.886.200,02	11.886.200,02	43.829.675,33	(31.943.475,31)
8	Pajangan	-	-	5.316.432,52	(5.316.432,52)

9	Sanden	-	-	3.136.159,66	(3.136.159,66)
10	Dlingo	16.536.524,37	16.536.524,37	36.132.145,75	(19.595.621,38)
11	Bambanglipuro	11.002.628,56	11.002.628,56	18.837.318,88	(7.834.690,32)
12	Sewon	9.532.740,12	9.532.740,12	15.895.510,08	(6.362.769,96)
13	Banguntapan	12.077.442,41	12.077.442,41	18.739.377,55	(6.661.935,14)
14	Jetis	32.776.746,99	32.776.746,99	39.033.959,68	(6.257.212,69)
15	Pundong	23.105.354,66	23.105.354,66	33.014.347,87	(9.908.993,21)
16	Bantul	11.631.369,02	11.631.369,02	35.636.375,51	(24.005.006,49)
17	Kasih	20.956.787,50	20.956.787,50	28.376.250,47	(7.419.462,97)
	Jumlah	221.928.458,30	221.928.458,30	370.546.683,85	(148.618.225,55)

Pembagian Laba bersih BUKP dibagi untuk pemilik modal 55%, Cadangan Umum 15%, Cadangan Tujuan 15%, Dana Pembinaan 7,5% dan Jasa Produksi 7,5%.

Untuk realisasi pembagian laba bersih BUKP tahun 2023 sebagai berikut :

NO	BUKP WILAYAH KERJA KEPANEWON	Bagian Laba	Dana Pembinaan	Jasa Produksi	Jumlah
1	Imogiri	7.669.082,27	2.853.443,91	2.140.082,93	12.662.609,11
2	Srandakan	14.250.986,87	3.251.228,48	2.438.421,36	19.940.636,71
3	Pandak	-	-	-	-
4	Kretek	20.789.178,83	6.840.176,63	5.130.132,47	32.759.487,93
5	Pleret	5.070.277,36	1.136.944,89	852.708,67	7.059.930,92
6	Piyungan	-	-	-	-
7	Sedayu	9.221.152,41	1.522.884,35	1.142.163,26	11.886.200,02
8	Pajangan	-	-	-	-
9	Sanden	-	-	-	-
10	Dlingo	8.589.606,34	4.541.096,02	3.405.822,01	16.536.524,37
11	Bambanglipuro	6.932.854,01	2.325.585,46	1.744.189,10	11.002.628,57
12	Sewon	5.966.692,26	2.037.741,64	1.528.306,23	9.532.740,13
13	Banguntapan	8.355.786,39	2.126.660,59	1.594.995,44	12.077.442,42
14	Jetis	18.494.763,42	8.161.133,47	6.120.850,10	32.776.746,99
15	Pundong	15.342.615,76	4.435.850,80	3.326.888,10	23.105.354,66
16	Bantul	8.985.031,53	1.512.192,85	1.134.144,64	11.631.369,02
17	Kasih	14.271.902,18	3.819.934,47	2.864.950,85	20.956.787,50
	Sub Jumlah	143.939.929,63	44.564.873,56	33.423.655,16	221.928.458,35

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.2				
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00	19.112.119,00	12,17	10.266.058,00

Penetapan bagian laba tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Hadiono dan Rekan dengan perincian sebagai berikut :

Laba Bersih setelah pajak	REALISASI 2023 34.749.307,00	REALISASI 2022 18.665.560,00
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Bagian laba dibagi (55% dari Laba)	19.112.118,85	10.266.058,00
Pembulatan		
Bagian laba yang telah disetor	19.112.119,00	10.266.058,00
Kewajiban yang belum disetor	-0,15	0,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.3.3 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00	781.502.242,00	223,29	769.602.487,00

Penetapan bagian laba tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berasal dari hasil audit atas Laporan Keuangan PDAM Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosoetro dengan perincian sebagai berikut:

	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Laba Bersih setelah pajak	1.420.913.167,05	1.399.277.249,50
Bagian laba dibagi (55% dari Laba)	781.502.241,88	769.602.487,23
Pembulatan	(0,23)	(0,63)
Bagian laba yang telah disetor	781.502.242,00	769.602.487,00
Kewajiban yang belum disetor	(0,35)	(0,40)

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin kecuali pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Rumah Sakit Saras Adhyatma dan 27 (dua puluh tujuh) puskesmas (BLUD).

Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dari SKPD pengelola sebagai berikut:

Nomor	OPD Penghasil	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	54.950.168.337,00	61.119.731.140,00	111,23	46.970.664.872,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	163.290.592.275,00	177.245.819.100,00	108,55	163.308.981.442,00
3	Rumah Sakit Saras Adhyatma	400.000.000,00	1.127.069.997,00	281,77	-
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	7.233.786,00	-	9.972.126,00
5	Dinas Perhubungan	16.000.000,00	27.450.500,00	171,57	11.507.040,00
6	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00	8.863.740,00	118,18	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	17.391.600,00	-	-
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	14.383.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	72.126.800,00	-	24.000.000,00
9	Dinas Perdagangan	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan	727.196.926,00	279.181.420,00	38,39	261.115.600,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	4.842.188,00	-	3.641.680,00
12	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.303.536.421,00	14.709.213.922,83	201,40	14.092.178.816,83
	Jumlah lain-lain PAD yang sah	226.694.993.959,00	254.618.924.193,83	112,32	224.696.444.576,83

Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	1.012.036.421,00	759.066.011,00	75,00	1.060.040.143,00
5.1.1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	633.696.926,00	703.727.183,00	111,05	671.987.100,00
5.1.1.1.4.3	Penerimaan Jasa Giro - LRA	275.000.000,00	1.505.146.050,00	547,33	1.492.562.528,00
5.1.1.1.4.4	Pendapatan Bunga - LRA	6.000.000.000,00	6.209.253.125,36	103,49	8.139.194.653,33
5.1.1.1.4.5	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	103.000.000,00	38.299.000,00	37,18	5.455.000,00
5.1.1.1.4.6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	16.500.000,00	30.257.637,75	183,38	6.500.000,00
5.1.1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak - LRA	-	5.301.325.359,00	-	2.820.827.438,00
5.1.1.1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	14.000.000,00	47.302.784,00	337,88	25.120.846,00
5.1.1.1.4.9	Pendapatan BLUD - LRA	218.640.760.612,00	239.492.620.237,00	109,54	210.279.646.314,00
5.1.1.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	-	505.698.155,55	-	150.762.305,00
5.1.1.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	26.228.651,17	-	44.348.249,50
	Jumlah	226.694.993.959,00	254.618.924.193,83	112,32	224.696.444.576,83

Penjelasan lebih lanjut dari realisasi penerimaan lain-lain yang sah sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	1.012.036.421,00	759.066.011,00	75,00	1.060.040.143,00

Rincian anggaran dan realisasi dari Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA Tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 terdiri dari:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.1.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
5.1.1.1.4.1.2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	240.000.000,00	255.385.876,00	106,41	134.980.000,00
5.1.1.1.4.1.3	Hasil Penjualan Alat Angkutan	667.036.421,00	417.420.635,00	62,58	820.060.143,00
5.1.1.1.4.1.4	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00	52.250.000,00	49,76	105.000.000,00
5.1.1.1.4.1.5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	25.500.000	-	-
5.1.1.1.4.1.6	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	8.509.500	-	-
	Jumlah Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	1.012.036.421,00	759.066.011,00	75,00	1.060.040.143,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	633.696.926,00	703.727.183,00	111,05	671.987.100,00

Rincian anggaran dan realisasi dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.2.1	Hasil Sewa BMD	48.000.000,00	414.675.183,00	863,91	406.196.000,00
5.1.1.1.4.2.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	585.696.926,00	216.925.200,00	37,04	265.791.100,00
5.1.1.1.4.2.3	Hasil Kerjasama daerah		72.126.800,00		
	Jumlah	633.696.926,00	703.727.183,00	111,05	671.987.100,00

Adapun rincian OPD pelaksana pemungutan dari komponen hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.2.1	Hasil Sewa BMD	48.000.000,00	414.675.183,00	863,91	406.196.000,00

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan Perdagangan :				
1	Sewa lahan sebagian di Pasar Unggas Bantul, Pasar Niten dan PSG untuk event khusus, setoran pengelolaan SRG	35.000.000,00	53.284.750,00	152,24	19.324.500,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:				
2	Sewa fasilitas di kebun buah mangunan	13.000.000,00	21.860.500,00	168,16	8.928.000,00
	BPKAD :				
3	Sewa Gedung Dwi Windu utk Pabrik Rokok	-	18.634.453,00	-	17.250.000,00
4	Sewa ruang kantor kas kompleks Pemda 2 untuk BPD Cabang Bantul	-	40.000.000,00	-	-
5	Sewa ruang kantor kas kompleks Pemda 2 untuk Bank Mandiri Cabang Bantul	-	33.384.000,00	-	-
6	Sewa Eks Kantor Pengawas UPT Piyungan Kabupaten Bantul untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keluarga kurang mampu di wilayah Kalurahan Sitimulyo	-	-	-	2.500.000
7	Sewa Eks Transito Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bantul	-	-	-	78.111.000,00
8	Sewa tanah milik Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Bantul	-	-	-	32.982.000,00
9	Pendapatan diterima dimuka pada BKAD atas sewa tanah milik Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul	-	-	-	12.100.500,00
10	Sewa Gedung Eks DIKMENOF di Jln Juanda No 103 Bantul oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kab Bantul dalam rangka penyelenggaraan SMPUA	-	-	-	55.000.000,00
11	Sewa berupa sebagian tanah dan bangunan yang digunakan untuk bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY (Komplek Parasamya)	-	-	-	180.000.000,00
12	Sewa lahan untuk pembangunan dan pengoperasian industri daging olahan dan rumah potong ayam di desa argosari	-	247.511.480,00	-	-
	Jumlah	48.000.000,00	414.675.183,00	863,91	406.196.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.2.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	585.696.926,00	216.925.200,00	37,04	265.791.100,00

Pos pendapatan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk menampung pendapatan dari pemanfaatan MCK yang ada di Pasar.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.3	Penerimaan Jasa Giro	275.000.000,00	1.505.146.050,00	547,33	1.492.562.528,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank Pembangunan Daerah DIY dan penempatan rekening bendahara pengeluaran .

Penempatan rekening BUD dalam rangk apelaksanaan APBD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Umum Daerah.

Pelampauan target penerimaan Jasa giro tersebut disebabkan karena penyerapan anggaran pada awal tahun kurang optimal, sehingga saldo dana di RKUD cukup tinngi yang berdampak pada tingginya jasa Giro.

Rincian dari Penerimaan Jasa Giro adalah :		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.3.1	Jasa Giro Kas Daerah	275.000.000,00	1.499.700.192,00	545,35	1.451.187.722,00
5.1.1.1.4.3.1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	5.445.858,00	-	41.374.806,00
	Jumlah	275.000.000,00	1.505.146.050,00	547,33	1.492.562.528,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.3.1 Jasa Giro Kas Daerah	275.000.000,00	1.499.700.192,00	545,35	1.451.187.722,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank BPD DIY selama tahun 2023 dan 2022.

Penempatan rekening BUD dalam rangka pelaksanaan APBD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor Bupati Bantul nomor 435 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.3.2 Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	5.445.858,00		41.374.806,00

Penempatan uang di bank bagi Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran tahun 2023 diatur dengan Keputusan Bupati Bantul 435 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00	6.209.253.125,36	103,49	8.139.194.653,33

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah/Deposito merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa bunga deposito penempatan dana daerah yang belum terpakai atau menurut perkiraan masih dapat ditanamkan dalam bentuk deposito dengan pertimbangan bunganya relatif lebih tinggi dari pada dalam bentuk giro.

Sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020, dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Termasuk investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dapat diperpanjang secara otomatis.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.5 Hasil dari pengelolaan dana bergulir	103.000.000,00	38.299.000,00	37,18	5.455.000,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.6 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	16.500.000,00	30.257.637,75	183,38	6.500.000,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penyetoran kerugian daerah yang telah ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Majelis TGR) untuk ditagih atau dikembalikan ke kas daerah.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.7 Pendapatan denda Pajak	-	5.301.325.359,00	-	2.820.827.438,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah yang melebihi masa jatuh temponya.

Adapun rincian denda pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Jenis Denda Pajak Daerah	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.7.1	Pajak Hotel				
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	4.739.378,00	-	2.819.416,00

	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	123.560,00	-	91.800,00
5.1.1.1.4.7.2	Pajak Restoran				
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	5.459.495,00	-	9.154.749,00
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	8.947.330,00	-	16.292.177,00
	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	-	383.288,00	-	255.140,00
	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	21.244,00
5.1.1.1.4.7.3	Pajak Hiburan				
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	13.650,00
	Pendapatan Denda Pajak Pantu Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	4.920,00	-	4.800,00
5.1.1.1.4.7.4	Pajak Reklame				
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	14.470.807,00	-	8.493.975,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	8.640,00	-	218.160,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	223.000,00	-	-
5.1.1.1.4.7.5	Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C	-	-	-	4.202.800,00
5.1.1.1.4.7.6	Pajak Parkir	-	537.813,00	-	83.733,00
5.1.1.1.4.7.7	Pajak Air Bawah Tanah	-	1.374.886,00	-	240.596,00
5.1.1.1.4.7.8	Pajak PBBP2	-	5.265.052.242,00	-	2.778.935.198,00
5.1.1.1.4.7.9	Denda Pelimpaham PBB	-	-	-	-
	Jumlah	-	5.301.325.359,00	-	2.820.827.438,00

5.1.1.1.4.8	Pendapatan denda Retribusi	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		14.000.000,00	47.302.784,00	337,88	25.120.846,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah yang melebihi masa jatuh temponya..

Adapun rincian denda retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.4.8.1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.8.1.1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	4.842.188,00	-	3.641.680,00
5.1.1.1.4.8.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	8.863.740,00	118,18	11.507.040,00
5.1.1.1.4.8.1.3	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	-	97.080,00	-	133.920,00
5.1.1.1.4.8.1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	6.500.000,00	8.971.470,00	138,02	-
5.1.1.1.4.8.2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-
5.1.1.1.4.8.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	7.136.706,00	-	9.838.206,00
5.1.1.1.4.8.2.2	Pendapatan Denda Retribusi Sampah	-	-	-	-
5.1.1.1.4.8.2.3	Pendapatan Denda Retribusi Menara Telekomunikasi	-	17.391.600,00	-	-
	Jumlah	14.000.000,00	47.302.784,00	337,88	25.120.846,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.9	Pendapatan BLUD - LRA	218.640.760.612,00	239.492.620.237,00	109,54	210.279.646.314,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan dari 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Mekanisme penerimaan tidak melalui Rekening Kas Daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan pendapatan Blud UPT Puskesmas.

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai OPD yang menerapkan PPK BLUD sebanyak dua Rumah Sakit Umum daerah dan 27 UPT Puskesmas. Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.9.1	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas	54.950.168.337,00	61.119.731.140,00	111,23	46.970.664.872,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas. Dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas di Bantul masih menginduk pada Dinas Kesehatan karena BLUD Puskesmas sebagai BLUD Unit SKPD (UPT Puskesmas) sehingga DPA nya masih jadi satu dengan Dinas Kesehatan.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi Pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Nomor	Puskesmas	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Srandakan	2.200.000.000,00	2.238.535.856,00	101,75	1.745.715.415,00
2	Sanden	2.361.500.000,00	2.454.477.162,00	103,94	1.898.576.127,00
3	Kretak	2.330.000.000,00	2.346.846.517,00	100,72	1.679.097.615,00
4	Pundong	2.820.000.000,00	2.648.917.276,00	93,93	2.072.902.311,00
5	Bambanglipuro	2.750.319.894,00	2.926.428.868,00	106,40	2.317.310.513,00
6	Pandak I	1.849.000.000,00	2.100.618.844,00	113,61	1.584.021.837,00
7	Pandak II	1.538.570.600,00	1.646.542.879,00	107,02	1.311.282.037,00
8	Bantul I	2.166.361.916,00	2.219.662.679,00	102,46	1.705.687.435,00
9	Bantul II	1.441.000.000,00	1.743.037.290,00	120,96	1.308.016.351,00
10	Jetis I	2.000.000.000,00	2.287.065.963,00	114,35	1.830.566.610,00
11	Jetis II	1.310.000.000,00	1.694.055.569,00	129,32	1.280.887.768,00
12	Imogiri I	2.197.047.620,00	2.402.735.029,00	109,36	1.860.542.075,00
13	Imogiri II	1.949.842.125,00	2.483.912.172,00	127,39	1.871.256.200,00
14	Dlingo I	1.580.504.000,00	1.522.542.154,00	96,33	1.204.396.266,00
15	Dlingo II	1.255.700.000,00	1.478.819.553,00	117,77	1.143.401.600,00
16	Pleret	2.710.672.337,00	3.180.466.089,00	117,33	2.286.517.716,00
17	Piyungan	2.888.000.000,00	3.117.308.742,00	107,94	2.332.388.929,00
18	Banguntapan I	2.358.948.382,00	2.574.796.210,00	109,15	1.974.414.336,00
19	Banguntapan II	1.550.800.000,00	1.998.434.696,00	128,86	1.449.523.128,00
20	Banguntapan III	727.000.000,00	1.113.273.474,00	153,13	769.276.430,00
21	Sewon I	2.803.581.663,00	3.136.124.975,00	111,86	2.473.174.989,00
22	Sewon II	1.930.500.000,00	2.462.425.521,00	127,55	1.838.236.663,00
23	Kasihani I	2.805.000.000,00	3.054.936.673,00	108,91	2.420.647.228,00
24	Kasihani II	1.750.800.000,00	2.203.465.029,00	125,85	1.799.621.667,00

25	Pajangan	2.551.519.800,00	2.585.313.526,00	101,32	2.095.554.607,00
26	Sedayu I	1.718.500.000,00	1.778.223.581,00	103,48	1.394.898.312,00
27	Sedayu II	1.405.000.000,00	1.720.764.813,00	122,47	1.322.750.707,00
	Jumlah	54.950.168.337,00	61.119.731.140,00	111,23	46.970.664.872,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.9.2	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Panembahan Senopati	163.290.592.275,00	177.245.819.100,00	108,55	163.308.981.442,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSUD Panembahan Senopati yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 195 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Pada tahun 2022 RSUD Panembahan Senopati berubah struktur organisasinya menjadi Unit Organisasi Berbadan Khusus (UOBK) berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Dan Tata Kerja, Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.9.3	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Saras Adhyatma	400.000.000,00	1.127.069.997,00	281,77	-

RSUD Saras Adhyatma Rumah Sakit tipe D yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 dan telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 597 tahun 2022.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	-	505.698.155,55	-	150.762.305,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tahun-tahun sebelum Tahun Anggaran 2023 yang telah diperhitungkan sebagai belanja tahun bersangkutan.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.1.4.11	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	26.228.651,17	-	44.348.249,50

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Pendapatan ini tidak ditetapkan targetnya dalam APBD akan tetapi ada realisasinya.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.777.566.708.720,00	1.821.467.142.818,65	102,47	1.712.037.734.603,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Propinsi untuk periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.507.103.037.059,00	1.541.171.838.737,00	102,26	1.469.251.642.781,00
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	270.463.671.661,00	280.295.304.081,65	103,64	242.786.091.822,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.777.566.708.720,00	1.821.467.142.818,65	102,47	1.712.037.734.603,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang penerimaannya berdasar Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Rincian Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.507.103.037.059,00	1.541.171.838.737,00	102,26	1.469.251.642.781,00

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
5.1.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.321.814.446.059,00	1.355.883.247.737,00	102,58	1.309.437.261.781,00
5.1.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	185.288.591.000,00	185.288.591.000,00	100,00	159.814.381.000,00
	Jumlah	1.507.103.037.059,00	1.541.171.838.737,00	102,26	1.469.251.642.781,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2022 tentang perubahan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Masing-masing dasar penerimaan untuk penetapan definitif maupun penetapan kelebihan/kekurangan realisasi pembayarannya sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Asumsi yang diberlakukan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu :

- 1 Penetapan pagu anggaran Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, yang ditetapkan sesuai peruntukannya sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- 2 Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023.
- 3 Atas kelebihan/kekurangan transfer akan dicatat sebagai hutang/piutang apabila Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan definitif atau dokumen lainnya sebagai informasi yang mendukung penetapan hutang/piutang.

Pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.321.814.446.059,00	1.355.883.247.737,00	102,58	1.309.437.261.781,00

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Perimbangan terdiri dari :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan				
5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.435.208.913,00	34.766.685.062,00	103,98	36.764.154.907,00
5.1.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	943.058.991.000,00	954.626.878.777,00	101,23	902.030.732.566,00
5.1.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	345.320.246.146,00	366.489.683.898,00	106,13	370.642.374.308,00
	Jumlah	1.321.814.446.059,00	1.355.883.247.737,00	102,58	1.309.437.261.781,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.435.208.913,00	34.766.685.062,00	103,98	36.764.154.907,00

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentasi atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
5.1.1.2.1.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	1.924.979.783,00	-	6.213.370.395,00
5.1.1.2.1.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	22.373.621.266,00	24.225.546.734,00	108,28	21.613.969.970,00
5.1.1.2.1.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.768.972.453,00	2.179.495.000,00	37,78	3.158.784.630,00

5.1.1.2.1.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.285.097.656,00	4.863.841.615,00	113,51	3.773.114.850,00
5.1.1.2.1.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	4.390.193,00	-	-
5.1.1.2.1.1.1.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	7.000,00	-	10.360.000,00
5.1.1.2.1.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	39.280.526,00	-	36.244.062,00
5.1.1.2.1.1.1.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	31.285.975,00	-	-	-
5.1.1.2.1.1.1.9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	976.231.563,00	1.529.144.211,00	156,64	1.958.311.000,00
	Jumlah	33.435.208.913,00	34.766.685.062,00	103,98	36.764.154.907,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	943.058.991.000,00	954.626.878.777,00	101,23	902.030.732.566,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Berdasarkan PMK nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK nomor 212/PMK.7/2022 DAU tahun anggaran 2023 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Untuk alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, diserahkan sesuai kewenangan prioritas masing-masing daerah. Sementara untuk alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan bidang layanan umum.

Penggunaan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan bidang layanan umum. DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah, belanja pegawai selain gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan, dan belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN, serta tidak digunakan untuk belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Sementara untuk penggunaan DAU bidang layanan umum dialokasikan untuk dukungan pendanaan kalurahan dan dukungan penggajian PPPK. Dukungan pendanaan kalurahan digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi penganggaran bagi kalurahan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPK tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023.

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	345.320.246.146,00	366.489.683.898,00	106,13	370.642.374.308,00

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rincian anggaran dan realisasi dana transfer khusus - DAK Fisik sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)				
5.1.1.2.1.1.3.1 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.502.244.000,00	56.576.626.350,00	95,08	77.408.558.243,00
5.1.1.2.1.1.3.2 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	285.818.002.146,00	309.913.057.548,00	108,43	293.233.816.065,00
	Jumlah	345.320.246.146,00	106,13	370.642.374.308,00

Rincian anggaran dan realisasi dana transfer khusus (DAK) sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3.1 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
5.1.1.2.1.1.3.1.1 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.356.000.000,00	3.065.880.000,00	91,36	-
5.1.1.2.1.1.3.1.2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	-	-	1.043.846.125,00
5.1.1.2.1.1.3.1.3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.477.455.000,00	1.267.225.850,00	85,77	4.038.766.558,00
5.1.1.2.1.1.3.1.4 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.070.676.000,00	1.856.048.500,00	89,63	4.249.325.413,00

5.1.1.2.1.1.3.1.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	3.670.274.489,00
5.1.1.2.1.1.3.1.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	406.903.000,00	391.690.000,00	96,26	2.339.578.900,00
5.1.1.2.1.1.3.1.7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	2.763.750.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	-	-	1.119.893.536,00
5.1.1.2.1.1.3.1.9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.090.000.000,00	10.513.006.000,00	94,80	3.825.148.273,00
5.1.1.2.1.1.3.1.10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	24.857.500.000,00	23.254.487.000,00	93,55	6.716.573.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	-	13.420.623.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	7.085.480.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	5.020.951.200,00
5.1.1.2.1.1.3.1.14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	-	3.111.601.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.15	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	-	4.615.122.720,00
5.1.1.2.1.1.3.1.16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	6.607.609.171,00
5.1.1.2.1.1.3.1.17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	3.151.566.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	-	-	359.500.000,00
5.1.1.2.1.1.3.1.19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	708.246.000,00	693.289.000,00	97,89	1.715.319.063,00
5.1.1.2.1.1.3.1.20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.535.464.000,00	15.535.000.000,00	100,00	2.553.629.795,00
	Jumlah	59.502.244.000,00	56.576.626.350,00	95,08	77.408.558.243,00

5.1.1.2.1.1.3.2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3.2.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	76.504.800.000,00	102.590.252.271,00	134,10	100.341.041.812,00
5.1.1.2.1.1.3.2.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.691.181.067,00	5.027.500.000,00	136,20	2.360.000.000,00
5.1.1.2.1.1.3.2.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143.052.318.000,00	140.587.086.560,00	98,28	130.241.259.027,00
5.1.1.2.1.1.3.2.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.515.250.000,00	2.826.210.000,00	80,40	2.401.795.000,00
5.1.1.2.1.1.3.2.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.679.440.000,00	24.537.329.664,00	99,42	21.114.867.000,00
5.1.1.2.1.1.3.2.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.352.720.000,00	4.322.385.974,00	99,30	3.770.700.000,00
5.1.1.2.1.1.3.2.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.790.829.337,00	20.390.425.337,00	103,03	22.242.870.072,00
5.1.1.2.1.1.3.2.8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	599.596.000,00	-	-	-
5.1.1.2.1.1.3.2.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.198.102.072,00	6.198.102.072,00	100,00	7.066.489.918,00
5.1.1.2.1.1.3.2.12	DAK Non Fisik-PK2UKM	407.482.240,00	407.482.240,00	100,00	399.904.080,00
5.1.1.2.1.1.3.2.14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	787.947.000,00
5.1.1.2.1.1.3.2.15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	331.892.430,00	331.892.430,00	100,00	233.267.656,00
5.1.1.2.1.1.3.2.16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	525.178.500,00	525.178.500,00	100,00	300.725.500,00
5.1.1.2.1.1.3.2.17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.969.212.500,00	1.969.212.500,00	100,00	659.100.000,00
5.1.1.2.1.1.3.2.18	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	-	-	1.313.849.000,00
	Jumlah	285.818.002.146,00	309.913.057.548,00	108,43	293.233.816.065,00

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
5.1.1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	58.809.566.000,00	58.809.566.000,00	100,00	58.566.684.000,00
5.1.1.2.1.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
5.1.1.2.1.2.3	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5.1.1.2.1.2.4	Dana Kalurahan	126.479.025.000,00	126.479.025.000,00	100,00	101.247.697.000,00
	Jumlah	185.288.591.000,00	185.288.591.000,00	100,00	159.814.381.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	58.809.566.000,00	58.809.566.000,00	100,00	58.566.684.000,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.2.4	Dana Kalurahan	126.479.025.000,00	126.479.025.000,00	100,00	101.247.697.000,00

Pendapatan Transfer pemerintah pusat- Dana Kalurahan merupakan pendapatan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pendapatan tersebut dari Pemerintah pusat langsung di transfer ke rekening Pemerintah Kalurahan. Pedoman terkait pengelolaan Dana Kalurahan berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Kalurahan.

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	188.785.746.371,00	201.588.461.475,00	106,78	192.023.344.227,00
5.1.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	81.677.925.290,00	78.706.842.606,65	96,36	50.762.747.595,00
	Jumlah	270.463.671.661,00	280.295.304.081,65	103,64	242.786.091.822,00

Penjelasan pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	188.785.746.371,00	201.588.461.475,00	106,78	192.023.344.227,00

Realisasi dari penerimaan Transfer antar daerah yang berasal dari pos Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp201.588.461.475,00 atau mencapai 106,78% dari anggaran sebesar Rp188.785.746.371,00 karena adanya realisasi penerimaan dari kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi pada tahun 2022 sebesar Rp8.655.595.674,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 456/KEP/2023 tanggal 28 Desember 2023 Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5/KEP/2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil Pajak berdasarkan :

Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 456/KEP/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5/KEP/2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2023. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 6/KEP/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2023

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
5.1.1.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	67.252.626.426,00	66.837.303.520,00	99,38	57.066.200.577,00
5.1.1.2.2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.098.195.700,00	29.308.165.516,00	94,24	22.036.458.104,00
5.1.1.2.2.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.719.065.000,00	57.946.328.116,00	149,66	49.839.088.450,00
5.1.1.2.2.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	143.084.580,00	88.964.405,00	62,18	14.019.593.260,00
5.1.1.2.2.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.572.774.665,00	47.407.699.918,00	91,92	49.062.003.836,00
	Jumlah	188.785.746.371,00	201.588.461.475,00	106,78	192.023.344.227,00

Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak

		Realisasi murni 2023	kurang bayar tahun 2022	Jumlah 2023
5.1.1.2.3.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	65.667.361.420,00	1.169.942.100,00	66.837.303.520,00
5.1.1.2.3.1.2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.736.619.816,00	571.545.700,00	29.308.165.516,00
5.1.1.2.3.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.946.328.116,00	-	57.946.328.116,00
5.1.1.2.3.1.4	Pajak Air Permukaan	85.359.825,00	3.604.580,00	88.964.405,00
5.1.1.2.3.1.5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	40.497.196.624,00	6.910.503.294,00	47.407.699.918,00
	Jumlah	192.932.865.801,00	8.655.595.674,00	201.588.461.475,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.2.2	Bantuan Keuangan				
5.1.1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-
5.1.1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	81.282.601.290,00	78.317.260.606,65	96,35	50.367.423.595,00
5.1.1.2.2.2.3	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	395.324.000,00	389.582.000,00	98,55	395.324.000,00
	Jumlah	81.677.925.290,00	78.706.842.606,65	96,36	50.762.747.595,00

5.1.1.2.2.2.2 Realisasi Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi DIY Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Danais	48.432.601.290,00	45.467.260.606,65	93,88	50.177.423.595,00
5.1.1.2.2.2.2.2	BKK Jambanisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	190.000.000,00
5.1.1.2.2.2.2.3	BKK Padat Karya Infrastruktur	32.600.000.000,00	32.600.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	81.282.601.290,00	78.317.260.606,65	96,35	50.367.423.595,00

5.1.1.2.2.2.3 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.2.2.2.3.1	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk biaya Dana Kompensasi Dampak Negatif TPA/TPS Piyungan Tahun 2023 (Sumber Dana Kasda Kota Yogyakarta)	232.293.000,00	221.477.000,00	95,34	232.293.000,00
5.1.1.2.2.2.3.2	Bantuan Keuangan kepadapemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPA/TPST Piyungan Tahun 2023	163.031.000,00	168.105.000,00	103,11	163.031.000,00

	Jumlah	395.324.000,00	389.582.000,00	98,55	395.324.000,00
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	7.182.235.863,00	119,70	7.967.281.219,74

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	7.164.398.619,00	119,41	6.725.000.000,00
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	17.837.244,00	-	22.148.900,00
5.1.1.3.3	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan	-	-	-	1.220.132.319,74
	Jumlah	6.000.000.000,00	7.182.235.863,00	119,41	7.967.281.219,74

Rincian Pendapatan Hibah tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.3.1.1	Hibah Air Minum Perkotaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
5.1.1.3.1.2	Hibah air limbah	-	480.000.000,00	-	-
5.1.1.3.1.3	Hibah sanitasi	-	-	-	189.000.000,00
5.1.1.3.1.4	Hibah air minum pedesaan	-	600.000.000,00	-	536.000.000,00
5.1.1.3.1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	84.398.619,00	-	-
	Jumlah	6.000.000.000,00	7.164.398.619,00	119,41	6.725.000.000,00

Pendapatan Hibah Air Minum Perdesaan berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk hibah air minum perdesaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2023. Nomor PHD-49/MK.7/DTK.03/AMD/2023 tanggal 16 Juni 2023

Pendapatan Hibah Sanitasi berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk hibah Sanitasi (Air limbah setempat) yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2023. Nomor PHD-26/MK.7/DTK.03/ALS/2023 tanggal 06 Maret 2023

Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2023. Nomor PHD-57/MK.7/DTK.03/2023 tanggal 16 Juni 2023

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
5.1.1.3.2.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-
5.1.1.3.2.2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	17.837.244,00	-	22.148.900,00
	Jumlah	-	17.837.244,00	-	22.148.900,00

5.1.1.3.3	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	-	-	1.220.132.319,74
5.1.2	Belanja	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90	2.272.474.588.197,13

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan Realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	1.907.502.908.396,00	1.840.327.289.726,91	96,48	1.721.577.286.930,32
5.1.2.2.	Belanja Modal	238.080.232.448,00	227.673.894.188,81	95,63	221.698.419.757,81
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	26.547.857.146,00	1.122.989.975,00	4,23	19.683.697.169,00
5.1.2.4	Belanja Transfer	342.301.805.497,00	342.301.803.637,00	100,00	309.515.184.340,00
	Jumlah Belanja Daerah	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90	2.272.474.588.197,13

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.411.425.977.527,72 atau 95,90% dari anggaran sebesar Rp2.514.432.803.487,00 termasuk belanja Dana Kalurahan, BLUD dan BOSP dan BOK Puskesmas tahun 2023

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan Kegiatan TA 2023 telah dilaksanakan sesuai capaian kinerjanya namun dari sisi belanja terealisasi sebesar 95,90% terutama disebabkan belanja dari anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat DAK dan pendapatan hibah TA 2023 sebagian turun di bulan Desember 2023 dan adanya upaya-upaya untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Rincian belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	1.907.502.908.396,00	1.840.327.289.726,91	96,48	1.721.577.286.930,32

Belanja Operasi Kabupaten Bantul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial

	Rincian Belanja Operasi tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	914.396.735.952,00	860.578.542.728,00	94,11	853.342.373.348,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	898.492.905.582,00	858.885.766.998,91	95,59	768.495.409.619,24
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	89.345.222.707,00	115.915.380.000,00	129,74	91.629.103.963,08
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.268.044.155,00	4.947.600.000,00	93,92	8.110.400.000,00
5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah	1.907.502.908.396,00	1.840.327.289.726,91	96,48	1.721.577.286.930,32

Rincian per jenis belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	914.396.735.952,00	860.578.542.728,00	94,11	853.342.373.348,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

	Uraian Belanja Pegawai	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	558.841.230.389,00	520.281.693.331,00	93,10	523.530.261.836,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.088.450.513,00	113.953.212.449,00	94,89	100.622.293.986,00
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	166.154.384.033,00	158.697.139.482,00	95,51	163.275.037.910,00
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	95,96	22.524.045.381,00
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.837.260,00	169.004.900,00	90,94	168.028.996,00
5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00	1.093.120.000,00	100,00	1.093.120.000,00
5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	28.551.603.863,00	28.372.820.500,00	99,37	26.553.563.603,00
5.1.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	15.589.166.302,00	15.084.322.505,00	96,76	15.576.021.636,00
	Jumlah	914.396.735.952,00	860.578.542.728,00	94,11	853.342.373.348,00

Penjelasan lebih lanjut dari Belanja Pegawai tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.1 Gaji dan tunjangan ASN	558.841.230.389,00	520.281.693.331,00	93,10	523.530.261.836,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 diperuntukkan PNSD sebanyak 76.553 orang dan PPPK sebanyak 1.344 orang.

Dasar penggajian adalah :

PNSD berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam gaji pokok PNS menurut PP Nomor 15 Tahun 2019

PPPK berdasarkan PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja

Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.2.1.1.1.1 Belanja Gaji Pokok ASN	416.551.666.950,00	394.476.147.553,00	94,70	397.444.898.222,00
- Belanja Gaji Pokok PNS	353.422.643.158,00	350.290.606.433,00	99,11	372.158.232.002,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	63.129.023.792,00	44.185.541.120,00	69,99	25.286.666.220,00
5.1.2.1.1.1.2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	38.749.771.272,00	34.105.329.587,00	88,01	34.074.504.752,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	32.054.932.942,00	30.633.971.437,00	95,57	32.121.352.038,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.694.838.330,00	3.471.358.150,00	51,85	1.953.152.714,00
5.1.2.1.1.1.3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.240.161.239,00	5.741.690.000,00	92,01	5.621.072.144,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.240.161.239,00	5.741.690.000,00	92,01	5.621.072.144,00
5.1.2.1.1.1.4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.358.878.211,00	26.605.800.000,00	97,25	26.527.325.630,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.358.878.211,00	26.605.800.000,00	97,25	26.527.325.630,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-	-
5.1.2.1.1.1.5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.917.624.941,00	4.729.280.000,00	79,92	6.101.721.055,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.917.624.941,00	4.729.280.000,00	79,92	6.060.866.055,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	-	40.855.000,00
5.1.2.1.1.1.6 Belanja Tunjangan Beras ASN	23.859.026.296,00	20.692.172.280,00	86,73	20.541.343.441,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	18.968.188.076,00	18.046.380.000,00	95,14	19.042.611.541,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.890.838.220,00	2.645.792.280,00	54,10	1.498.731.900,00
5.1.2.1.1.1.7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.214.056.224,00	2.582.763.244,00	80,36	2.421.588.284,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.214.056.224,00	2.582.763.244,00	80,36	2.421.588.284,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	-	-	-
5.1.2.1.1.1.8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.350.132,00	5.551.034,00	38,68	5.420.256,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.353.077,00	4.795.388,00	46,32	4.992.434,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.997.055,00	755.646,00	18,91	427.822,00
5.1.2.1.1.1.9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.721.216.864,00	28.095.043.917,00	85,86	27.517.708.384,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.913.809.608,00	26.347.766.907,00	88,08	26.550.353.171,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.807.407.256,00	1.747.277.010,00	62,24	967.355.213,00
5.1.2.1.1.1.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.000.808.369,00	811.986.453,00	81,13	815.243.408,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	866.232.787,00	718.030.552,00	82,89	761.817.915,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	134.575.582,00	93.955.901,00	69,82	53.425.493,00
5.1.2.1.1.1.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.931.727.403,00	2.435.929.263,00	83,09	2.450.754.343,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.530.006.307,00	2.154.094.379,00	85,14	2.290.484.763,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	401.721.096,00	281.834.884,00	70,16	160.269.580,00

5.1.2.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	281.942.488,00	-	-	8.681.917,00
	- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	281.063.955,00	-	-	8.681.917,00
	- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	878.533,00	-	-	-
5.1.2.1.1.1.13	Iuran Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
	Jumlah	558.841.230.389,00	520.281.693.331,00	93,10	523.530.261.836,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 sebagai berikut :

NO	OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DISDIKORA	314.633.526.715,00	287.242.143.387,00	91,29	289.399.668.096,00
2	DINKES	77.035.600.467,00	71.908.994.793,00	93,35	71.359.660.806,00
3	RSUD PS	34.594.527.856,00	33.434.019.696,00	96,65	32.639.113.259,00
4	DPUPKP	1.286.097.635,00	1.285.882.881,00	99,98	6.404.798.417,00
5	SATPOL PP	6.144.331.828,00	6.071.412.318,00	98,81	2.897.898.455,00
6	BPBD	2.722.801.011,00	2.651.524.470,00	97,38	2.283.417.772,00
7	DINSOS	2.254.490.898,00	2.109.734.620,00	93,58	2.278.347.624,00
8	DISNAKERTRANS	2.513.466.358,00	2.469.002.627,00	98,23	3.757.568.713,00
9	DP3APP & KB	3.392.512.709,00	3.183.099.724,00	93,83	2.612.937.470,00
10	DKPP	2.498.275.751,00	2.372.839.400,00	94,98	13.252.731.001,00
11	DPTR	13.437.313.299,00	12.685.261.531,00	94,40	2.714.994.149,00
12	DLH	2.813.125.466,00	2.744.951.178,00	97,58	6.267.071.095,00
13	DISDUKCAPIL	6.112.526.666,00	5.993.505.903,00	98,05	3.602.112.858,00
14	DPMK	3.610.644.024,00	3.450.230.004,00	95,56	2.067.942.229,00
15	DISHUB	2.180.021.626,00	2.054.283.007,00	94,23	3.175.597.765,00
16	DISKOMINFO	3.127.691.289,00	3.074.654.637,00	98,30	2.816.445.825,00
17	DKUKMPP	3.044.180.946,00	3.018.617.683,00	99,16	7.637.763.164,00
18	DPMPST	7.358.426.452,00	7.005.804.243,00	95,21	2.198.174.168,00
19	DISBUD	2.219.710.730,00	2.138.304.180,00	96,33	2.242.527.859,00
20	DISPERPUSIP	2.308.663.677,00	2.196.072.175,00	95,12	2.618.196.394,00
21	DKP / DISKANLA	2.630.653.823,00	2.573.324.968,00	97,82	1.438.886.974,00
22	DISPAR	1.398.036.814,00	1.372.897.975,00	98,20	3.717.284.945,00
23	SEKDA	3.751.948.577,00	3.687.566.321,00	98,28	-
24	Bagian Perencanaan Keuangan	10.400.528.038,00	10.253.798.528,00	98,59	10.031.720.429,00
25	SETWAN	2.593.523.193,00	2.529.044.620,00	97,51	2.665.805.128,00
26	BAPPEDA	3.650.603.684,00	3.619.845.224,00	99,16	3.587.351.819,00
27	BKPAD	9.209.800.884,00	9.147.710.900,00	99,33	8.680.336.404,00
28	BKPSDM	4.548.497.938,00	3.327.065.987,00	73,15	3.352.211.018,00
29	INSPEKTORAT	4.087.856.650,00	4.087.839.054,00	100,00	3.991.584.936,00
30	Kapanewon Piyungan	1.335.749.433,00	1.284.207.451,00	96,14	1.286.268.328,00
31	Kapanewon Dlingo	1.340.518.130,00	1.316.743.196,00	98,23	1.222.472.973,00
32	Kapanewon Imogiri	1.353.277.126,00	1.342.428.655,00	99,20	1.247.636.865,00
33	Kapanewon Pandak	1.310.592.608,00	1.286.971.676,00	98,20	1.388.843.501,00
34	Kapanewon Bantul	1.213.695.698,00	1.183.057.613,00	97,48	1.291.113.174,00

35	Kapanewon Kretek	1.454.509.137,00	1.402.152.935,00	96,40	1.412.757.367,00
36	Kapanewon Bambanglipuro	1.238.684.329,00	1.228.360.006,00	99,17	1.308.719.277,00
37	Kapanewon Jetis	1.118.326.877,00	1.108.171.950,00	99,09	1.152.260.089,00
38	Kapanewon Kasihan	1.400.940.998,00	1.314.802.351,00	93,85	1.393.481.482,00
39	Kapanewon Pleret	1.110.923.312,00	1.109.139.934,00	99,84	1.258.700.684,00
40	Kapanewon Pajangan	1.215.671.857,00	1.168.546.680,00	96,12	1.359.934.717,00
41	Kapanewon Sanden	1.164.586.230,00	1.072.529.518,00	92,10	1.202.617.442,00
42	Kapanewon Sedayu	1.459.751.920,00	1.402.048.005,00	96,05	1.384.539.611,00
43	Kapanewon Sewon	1.361.083.073,00	1.350.206.229,00	99,20	1.440.075.339,00
44	Kapanewon Srandakan	1.223.922.423,00	1.182.950.242,00	96,65	1.253.480.328,00
45	Kapanewon Banguntapan	1.412.243.423,00	1.368.313.324,00	96,89	1.575.091.282,00
46	Kapanewon Pundong	1.216.521.960,00	1.202.826.992,00	98,87	1.282.153.742,00
47	BAKESBANGPOL	1.350.846.851,00	1.268.804.540,00	93,93	1.377.966.863,00
	Jumlah	558.841.230.389,00	520.281.693.331,00	93,10	523.530.261.836,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.2 Tambahan Penghasilan ASN	120.088.450.513,00	113.953.212.449,00	94,89	100.622.293.986,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan Penghasilan ASN untuk tahun 2023 dan realisasi 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.043.518.123,00	18.421.247.179,00	91,91	7.878.961.415,00
5.1.2.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-
5.1.2.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	100.044.932.390,00	95.531.965.270,00	95,49	92.743.332.571,00
	Jumlah	120.088.450.513,00	113.953.212.449,00	94,89	100.622.293.986,00

Rincian anggaran dan realisasi tambahan penghasilan ASN tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Terdiri dari :	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.043.518.123,00	18.421.247.179,00	91,91	7.878.961.415,00
5.1.2.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	-	-	-
	Jumlah	20.043.518.123,00	18.421.247.179,00	91,91	7.878.961.415,00

Rincian anggaran dan realisasi dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah :

No	SKPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.324.800.000,00	1.262.450.000,00	95,29	1.116.250.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	2.451.218.335,00	2.229.926.229,00	90,97	2.024.567.546,00
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.365.972.322,00	2.302.364.790,00	97,31	2.511.152.004,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.043.043.386,00	2.895.240.065,00	95,14	2.224.891.865,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	2.100.000,00
6	Dinas Kebudayaan	2.035.019.944,00	1.973.371.316,00	96,97	-
7	BKPSDM	3.777.503.900,00	2.983.304.859,00	78,98	-
8	Inspektorat Daerah	3.972.706.303,00	3.707.634.011,00	93,33	-
9	Kapanewon Sewon	1.073.253.933,00	1.066.955.909,00	99,41	-
	Jumlah	20.043.518.123,00	18.421.247.179,00	91,91	7.878.961.415,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.043.518.123,00	18.421.247.179,00	91,91	7.878.961.415,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan alah Raga dengan realisasi sebesar Rp18.421.247.179,00. Tambahan penghasilan ini diperuntukan bagi Kepala Sekolah TK Negeri, Kepala Sekolah SD Negeri dan Koordinator Wilayah Kepanewon.

Dasar pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS adalah :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemusaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 038 Tahun 2023 tentang Penerima Tambahan Penghasilan Bagi kepala TK Negeri, Kepala SDN, Kepala SMPN dan koordinator wilayah bidan pendidikan tahun 2023.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemusaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 039 Tahun 2023 tentang Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD yang tidak menerima tunjangan profesi tahun 2023.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	-	-	-
5.1.2.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-
5.1.2.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	100.044.932.390,00	95.531.965.270,00	95,49	92.743.332.571,00

Dasar pemberian Tambahan Penghasilan PNS TA 2023 adalah Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul tidak diberikan kepada :

- 1 PNS/CPNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 2 PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa di unit kerja pengadaan barang /jasa;
- 3 PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, guru dan pengawas;
- 4 PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada perangkat daerah di luar jajaran Pemerintah Daerah;
- 5 PNS Pemerintah Pusat atau Daaerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan / atau remunerasi dan / atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dari instansi asal;
- 6 PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan negara;
- 7 PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
- 8 PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT);
- 9 PNS yang diberhentikan sementara.

Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN tahun 2023 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.2.3.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	99.672.632.390,00	95.172.965.270,00	95,49	92.524.832.571,00
5.1.2.1.1.2.3.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	372.300.000,00	359.000.000,00	96,43	218.500.000,00
	Jumlah	100.044.932.390,00	95.531.965.270,00	95,49	92.743.332.571,00

Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN tahun 2023 per OPD sebagai berikut :

NO	SKPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10.613.588.868,00	8.942.718.269,00	84,26	8.794.777.796,00
2	Dinas Kesehatan	5.644.740.851,00	5.608.717.682,00	99,36	5.366.743.207,00
3	RSUD Saras Adyatma	1.125.111.202,00	1.107.784.500,00	98,46	4.150.271.150,00
4	DPUPKP	4.682.889.424,00	4.588.849.660,00	97,99	2.041.477.119,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1.708.584.744,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.004.332.579,00	1.863.044.637,00	92,95	1.718.214.869,00
7	Dinas Sosial	2.277.522.550,00	2.220.096.048,00	97,48	2.809.215.870,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.109.856.817,00	2.956.472.355,00	95,07	1.504.385.304,00
9	DP3APP & KB	2.181.512.727,00	2.104.563.426,00	96,47	7.713.089.985,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.930.629.846,00	8.661.547.389,00	96,99	3.649.097.451,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.235.260.575,00	4.091.391.096,00	96,60	1.579.217.277,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.864.050.533,00	1.795.384.708,00	96,32	2.131.898.830,00
13	Dinas Perhubungan	2.599.049.353,00	2.524.006.138,00	97,11	4.905.402.014,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.817.740.304,00	2.714.218.226,00	96,33	1.839.096.848,00
15	DKUKMPP	5.537.113.094,00	5.291.736.471,00	95,57	1.698.619.499,00
16	DPMPTSP	2.126.845.128,00	2.034.658.998,00	95,67	1.942.901.420,00
17	Dinas Kebudayaan	-	-	-	1.112.096.993,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.239.292.024,00	2.222.092.365,00	99,23	2.385.020.922,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.338.357.555,00	1.328.872.214,00	99,29	7.932.484.739,00
20	Dinas Pariwisata	2.789.098.440,00	2.731.903.425,00	97,95	1.965.474.049,00
21	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9.491.134.106,00	9.125.257.144,00	96,15	3.034.417.746,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.277.859.548,00	2.221.042.380,00	97,51	2.537.321.020,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.571.061.297,00	3.474.289.323,00	97,29	3.245.946.726,00
24	BKPSDM	-	-	-	938.765.578,00
25	Inspektorat Daerah	-	-	-	937.322.373,00
26	Kapanewon Piyungan	1.159.364.175,00	1.099.607.716,00	94,85	871.377.041,00
27	Kapanewon Dlingo	1.200.690.490,00	1.162.127.299,00	96,79	944.361.371,00
28	Kapanewon Imogiri	1.082.616.644,00	1.072.716.629,00	99,09	914.914.504,00
29	Kapanewon Pandak	1.016.497.764,00	1.013.035.069,00	99,66	993.059.998,00
30	Kapanewon Bantul	1.030.816.427,00	1.021.366.010,00	99,08	910.491.267,00
31	Kapanewon Kretek	1.189.247.829,00	1.140.369.233,00	95,89	896.900.443,00
32	Kapanewon Bambanglipuro	1.046.923.775,00	1.034.207.604,00	98,79	1.000.574.250,00
33	Kapanewon Jetis	975.330.342,00	974.919.211,00	99,96	874.727.810,00
34	Kapanewon Kasihan	1.236.817.770,00	1.174.372.593,00	94,95	948.632.500,00
35	Kapanewon Pleret	977.582.352,00	947.552.448,00	96,93	890.114.449,00
36	Kapanewon Pajangan	1.051.612.362,00	997.439.961,00	94,85	913.127.472,00
37	Kapanewon Sanden	1.005.112.428,00	946.611.830,00	94,18	985.555.809,00
38	Kapanewon Sedayu	1.079.007.714,00	1.066.231.884,00	98,82	926.947.427,00
39	Kapanewon Sewon	-	-	-	1.016.225.697,00
40	Kapanewon Srandakan	1.083.290.894,00	1.021.599.087,00	94,31	879.068.460,00
41	Kapanewon Banguntapan	1.141.263.286,00	1.085.161.402,00	95,08	1.135.410.544,00

42	Kapanewon Pundong	1.065.353.762,00	948.438.550,00	89,03	-
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.246.357.555,00	1.217.562.290,00	97,69	-
	Jumlah	100.044.932.390,00	95.531.965.270,00	95,49	92.743.332.571,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	166.154.384.033,00	158.697.139.482,00	95,51	163.275.037.910,00

Rincian anggaran dan realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN per OPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

NO	OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	147.631.477.240,00	140.418.673.572,00	95,11	144.694.462.960,00
2	Dinas Kesehatan	645.070.000,00	637.930.000,00	98,89	1.398.293.236,00
3	RSUD Saras Adyatma	75.300.000,00	67.750.000,00	89,97	331.995.000,00
4	DPUPKP	268.585.000,00	237.660.000,00	88,49	75.039.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	107.360.000,00	107.304.000,00	99,95	77.185.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	102.755.000,00	93.805.000,00	91,29	142.210.000,00
7	Dinas Sosial	144.635.000,00	144.535.000,00	99,93	149.110.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	135.060.000,00	130.060.000,00	96,30	148.110.000,00
9	DP3APP & KB	177.060.000,00	170.360.000,00	96,22	243.295.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	215.690.000,00	206.430.000,00	95,71	134.885.000,00
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	148.510.000,00	148.510.000,00	100,00	196.500.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	219.575.000,00	217.000.000,00	98,83	114.860.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	117.960.000,00	117.360.000,00	99,49	126.410.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	128.935.000,00	123.785.000,00	96,01	118.385.000,00
15	Dinas Perhubungan	129.135.000,00	123.960.000,00	95,99	130.190.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.570.000,00	143.520.000,00	95,96	232.935.000,00
17	DKUKMPP	236.025.000,00	233.075.000,00	98,75	100.760.000,00
18	DPMPTSP	99.460.000,00	94.660.000,00	95,17	143.610.000,00
19	Dinas Kebudayaan	146.980.000,00	113.680.000,00	77,34	80.860.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.310.000,00	82.130.000,00	99,78	59.365.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	127.585.000,00	112.585.000,00	88,24	164.130.000,00
22	Dinas Pariwisata	160.080.000,00	143.230.000,00	89,47	54.360.000,00
23	Bagian Tata Pemerintahan	56.260.000,00	56.260.000,00	100,00	53.700.000,00
24	Bagian Hukum	53.700.000,00	53.700.000,00	100,00	57.680.000,00
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	59.880.000,00	57.880.000,00	96,66	53.735.000,00
26	Bagian Pereko PSDA	51.960.000,00	51.960.000,00	100,00	350.570.000,00
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	99.810.000,00	93.260.000,00	93,44	106.430.000,00

28	Bagian Umum dan Protokol	102.330.000,00	102.330.000,00	100,00	56.160.000,00
29	Bagian Organisasi	62.460.000,00	62.460.000,00	100,00	65.000.000,00
30	Bagian Perencanaan dan Keuangan	97.560.000,00	97.560.000,00	100,00	148.920.000,00
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	152.170.000,00	142.230.000,00	93,47	131.810.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.560.000,00	137.910.000,00	99,53	12.242.347.714,00
33	BPKPAD	12.884.306.793,00	12.832.446.910,00	99,60	146.260.000,00
34	BKPSDM	155.010.000,00	151.110.000,00	97,48	122.760.000,00
35	Inspektorat Daerah	129.960.000,00	129.230.000,00	99,44	44.160.000,00
36	Kapanewon Piyungan	44.160.000,00	44.160.000,00	100,00	43.870.000,00
37	Kapanewon Dlingo	45.670.000,00	45.670.000,00	100,00	41.460.000,00
38	Kapanewon Imogiri	43.560.000,00	43.560.000,00	100,00	41.960.000,00
39	Kapanewon Pandak	50.210.000,00	50.210.000,00	100,00	43.860.000,00
40	Kapanewon Bantul	46.260.000,00	46.260.000,00	100,00	52.200.000,00
41	Kapanewon Kretek	50.300.000,00	50.300.000,00	100,00	39.660.000,00
42	Kapanewon Bambanglipuro	42.060.000,00	42.060.000,00	100,00	45.360.000,00
43	Kapanewon Jetis	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	45.720.000,00
44	Kapanewon Kasihan	45.720.000,00	45.720.000,00	100,00	44.810.000,00
45	Kapanewon Pleret	44.160.000,00	44.160.000,00	100,00	40.560.000,00
46	Kapanewon Pajangan	47.810.000,00	47.810.000,00	100,00	45.810.000,00
47	Kapanewon Sanden	45.960.000,00	45.960.000,00	100,00	45.360.000,00
48	Kapanewon Sedayu	47.860.000,00	47.860.000,00	100,00	47.160.000,00
49	Kapanewon Sewon	47.485.000,00	47.210.000,00	99,42	41.060.000,00
50	Kapanewon Srandakan	43.735.000,00	43.510.000,00	99,49	42.235.000,00
51	Kapanewon Banguntapan	44.910.000,00	44.910.000,00	100,00	45.710.000,00
52	Kapanewon Pundong	45.720.000,00	45.720.000,00	100,00	71.760.000,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.160.000,00	79.160.000,00	100,00	-
	Jumlah	166.154.384.033	158.697.139.482	95,51	163.275.037.910,00

Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif ASN TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.1	Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.454.424.793,00	12.454.381.910,00	100,00	11.678.902.714,00
5.1.2.1.1.3.2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	143.843.372.240,00	137.335.933.572,00	95,48	141.985.467.960,00
5.1.2.1.1.3.3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.520.585.000,00	2.820.045.000,00	80,10	2.413.915.000,00
5.1.2.1.1.3.4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	731.403.236,00
5.1.2.1.1.3.5	Belanja Honorarium	6.336.002.000,00	6.086.779.000,00	96,07	6.461.389.000,00
5.1.2.1.1.3.6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	3.960.000,00
	Jumlah	166.154.384.033,00	158.697.139.482,00	95,51	163.275.037.910,00

Penjelasan lebih lanjut dari jenis Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif ASN adalah sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.454.424.793,00	12.454.381.910,00	100,00	11.678.902.714,00

Pagu anggaran ditetapkan sebesar 5% dari target pendapatan masing-masing pajak, sedangkan realisasinya diberikan jika dapat mencapai target kinerja pendapatan yang telah ditentukan dan sebesar 5% dari target kinerja tersebut.

Dasar pelaksanaan belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah tahun 2023 sebagai berikut :

- 1 Perbup Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
- 2 Perbup Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
- 3 Perbup Nomor 46 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
- 4 Perbup Nomor 71 tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
- 5 Keputusan Bupati Nomor 198 tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2023
- 6 Keputusan Bupati Nomor 199 tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2023
- 7 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.13.1/0678/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2023
- 8 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.3.1/0679/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2023
- 9 Keputusan Bupati Nomor 301 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2023
- 10 Keputusan Bupati Nomor 302 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2023
- 11 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.19.1/1002/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2023
- 12 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.19.1/1003/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2023
- 13 Keputusan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Ketiga Tahun 2023
- 14 Keputusan Bupati Nomor 417 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Ketiga Tahun 2023
- 15 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.13.1/1314/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Ketiga Tahun 2023
- 16 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.13.1/1315/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Ketiga Tahun 2023
- 17 Keputusan Bupati Nomor 519 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2023
- 18 Keputusan Bupati Nomor 520 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2023
- 19 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.13.1/1463/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2023
- 20 Keputusan Kepala BPKPAD Nomor B/900.1.3.1/1464/P3 Tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2023

Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.1.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	400.000.000,00	399.999.271,00	100,00	299.999.504,00
5.1.2.1.1.3.1.2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.350.000.000,00	1.349.997.563,00	100,00	949.998.557,00
5.1.2.1.1.3.1.3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	44.500.000,00	44.499.901,00	100,00	5.749.928,00
5.1.2.1.1.3.1.4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	170.000.000,00	169.999.706,00	100,00	144.999.763,00
5.1.2.1.1.3.1.5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.835.000.000,00	2.834.994.726,00	100,00	2.634.995.769,00
5.1.2.1.1.3.1.6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	14.000.000,00	13.999.979,00	100,00	10.049.980,00
5.1.2.1.1.3.1.7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	55.000.000,00	54.999.892,00	100,00	53.499.903,00
5.1.2.1.1.3.1.8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.000,00	75.000,00	100,00	74.997,00
5.1.2.1.1.3.1.9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00	6.999.993,00	100,00	14.599.967,00
5.1.2.1.1.3.1.10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	3.380.500.000,00	3.380.473.883,00	100,00	2.856.241.846,00
5.1.2.1.1.3.1.11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.198.349.793,00	4.198.341.996,00	100,00	4.708.692.500,00
	Jumlah	12.454.424.793,00	12.454.381.910,00	100,00	11.678.902.714,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.2 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	143.843.372.240,00	137.335.933.572,00	95,48	141.985.467.960,00

Pos belanja tunjangan profesi guru yang pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah propinsi, kabupaten/kota.

OPD pelaksana Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.3 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.520.585.000,00	2.820.045.000,00	80,10	2.413.915.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan Guru dialokasikan untuk membayar tambahan penghasilan guru yang pelaksanaannya berdasarkan pada Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah propinsi, kabupaten/kota Tambahan Penghasilan Guru ini untuk membayar Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang belum bersertifikasi yang ditugaskan sebagai guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK dan Pengawas selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan dalam empat tahap atau per triwulan.

OPD pelaksana Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.4 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	731.403.236,00

Pelaksana Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5 Belanja Honorarium	6.336.002.000,00	6.086.779.000,00	96,07	6.461.389.000,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja honorarium Tahun Anggaran 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.777.602.000,00	5.613.585.000,00	97,16	5.242.639.000,00
5.1.2.1.1.3.5.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	558.400.000,00	473.194.000,00	84,74	930.250.000,00
5.1.2.1.1.3.5.3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-	288.500.000,00
	Jumlah	6.336.002.000,00	6.086.779.000,00	96,07	6.461.389.000,00

Penjelasan lebih lanjut belanja honorarium Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5.1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.777.602.000,00	5.613.585.000,00	97,16	5.242.639.000,00

Dasar pemberian belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan adalah Surat Keputusan dari kepala OPD.

Pelaksanaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan adalah semua OPD di Kabupaten Bantul

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan tahun 2023 per OPD adalah sebagai berikut :

Nomor	OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga	255.720.000,00	252.120.000,00	98,59	185.980.000,00
2	Dinas Kesehatan	622.920.000,00	615.780.000,00	98,85	616.590.000,00
3	RSUD Saras Adyatma	68.100.000,00	62.100.000,00	91,19	-
4	DPUPKP	188.760.000,00	172.560.000,00	91,42	162.370.000,00

5	Satuan Polisi Pamong Praja	104.760.000,00	104.760.000,00	100,00	71.789.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.680.000,00	84.780.000,00	95,60	66.460.000,00
7	Dinas Sosial	130.860.000,00	130.760.000,00	99,92	132.960.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	135.060.000,00	130.060.000,00	96,30	131.460.000,00
9	DP3APP & KB	177.060.000,00	170.360.000,00	96,22	144.860.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	201.540.000,00	192.580.000,00	95,55	192.145.000,00
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	140.160.000,00	140.160.000,00	100,00	132.360.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	178.200.000,00	178.200.000,00	100,00	169.800.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	117.960.000,00	117.360.000,00	99,49	110.160.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	114.360.000,00	112.360.000,00	98,25	115.560.000,00
15	Dinas Perhubungan	103.560.000,00	99.310.000,00	95,90	94.560.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	146.720.000,00	143.520.000,00	97,82	93.565.000,00
17	DKUKMPP	186.000.000,00	185.250.000,00	99,60	183.360.000,00
18	DPMPTSP	90.360.000,00	85.560.000,00	94,69	90.360.000,00
19	Dinas Kebudayaan	103.530.000,00	103.530.000,00	100,00	104.010.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77.760.000,00	77.580.000,00	99,77	78.260.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	101.160.000,00	88.860.000,00	87,84	49.665.000,00
22	Dinas Pariwisata	137.880.000,00	122.980.000,00	89,19	129.780.000,00
23	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
24	Bagian Tata Pemerintahan	53.660.000,00	53.660.000,00	100,00	54.360.000,00
25	Bagian Hukum	53.700.000,00	53.700.000,00	100,00	53.700.000,00
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	59.880.000,00	57.880.000,00	96,66	56.880.000,00
27	Bagian Pereko PSDA	51.960.000,00	51.960.000,00	100,00	52.435.000,00
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	56.760.000,00	50.760.000,00	89,43	47.760.000,00
29	Bagian Umum dan Protokol	80.880.000,00	80.880.000,00	100,00	99.930.000,00
30	Bagian Organisasi	62.460.000,00	62.460.000,00	100,00	56.160.000,00
31	Bagian Perencanaan dan Keuangan	97.560.000,00	97.560.000,00	100,00	65.000.000,00
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	133.620.000,00	126.180.000,00	94,43	128.070.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	125.160.000,00	125.160.000,00	100,00	123.360.000,00
34	BKPAD	409.332.000,00	362.065.000,00	88,45	366.245.000,00
35	BKPSDM	143.160.000,00	143.160.000,00	100,00	141.060.000,00
36	Inspektorat Daerah	129.960.000,00	129.230.000,00	99,44	122.760.000,00
37	Kepanewon Piyungan	44.160.000,00	44.160.000,00	100,00	44.160.000,00
38	Kepanewon Dlingo	44.220.000,00	44.220.000,00	100,00	43.020.000,00
39	Kepanewon Imogiri	41.760.000,00	41.760.000,00	100,00	41.460.000,00
40	Kepanewon Pandak	49.560.000,00	49.560.000,00	100,00	41.960.000,00
41	Kepanewon Bantul	46.260.000,00	46.260.000,00	100,00	43.860.000,00
42	Kepanewon Kretek	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	52.200.000,00
43	Kepanewon Bambanglipuro	42.060.000,00	42.060.000,00	100,00	39.660.000,00
44	Kepanewon Jetis	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	45.360.000,00
45	Kepanewon Kasihan	45.720.000,00	45.720.000,00	100,00	45.720.000,00
46	Kepanewon Pleret	44.160.000,00	44.160.000,00	100,00	44.160.000,00
47	Kepanewon Pajangan	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	40.560.000,00

48	Kepanewon Sanden	45.960.000,00	45.960.000,00	100,00	45.360.000,00
49	Kepanewon Sedayu	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	45.360.000,00
50	Kepanewon Sewon	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	46.560.000,00
51	Kepanewon Srandakan	42.860.000,00	42.860.000,00	100,00	41.060.000,00
52	Kepanewon Banguntapan	42.960.000,00	42.960.000,00	100,00	41.585.000,00
53	Kepanewon Pundong	45.720.000,00	45.720.000,00	100,00	45.060.000,00
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.760.000,00	77.760.000,00	100,00	71.760.000,00
	Jumlah	5.777.602.000,00	5.613.585.000,00	97,16	5.242.639.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	558.400.000,00	473.194.000,00	84,74	930.250.000,00

Dasar pemberian belanja honorarium pengadaan barang/jasa adalah Surat Keputusan Kepala OPD

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja honorarium pengadaan barang dan jasa tahun 2023 dan 2022 per OPD adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.800.000,00	10.575.000,00	89,62	109.100.000,00
2	Dinas Kesehatan	22.150.000,00	22.150.000,00	100,00	50.300.000,00
3	RSUD Saras Adyatma	7.200.000,00	5.650.000,00	78,47	-
4	DPUPKP	79.825.000,00	65.100.000,00	81,55	169.625.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.600.000,00	2.544.000,00	97,85	3.250.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.075.000,00	9.025.000,00	64,12	10.725.000,00
7	Dinas Sosial	13.775.000,00	13.775.000,00	100,00	9.250.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	17.650.000,00
9	DP3APP & KB	-	-	-	3.250.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.150.000,00	13.850.000,00	97,88	51.150.000,00
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	2.525.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	41.375.000,00	38.800.000,00	93,78	26.700.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	-	-	-	4.700.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	14.575.000,00	11.425.000,00	78,39	10.850.000,00
15	Dinas Perhubungan	25.575.000,00	24.650.000,00	96,38	23.825.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.850.000,00	-	-	36.625.000,00
17	DKUKMPP	50.025.000,00	47.825.000,00	95,60	49.575.000,00
18	DPMPTSP	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	10.400.000,00
19	Dinas Kebudayaan	43.450.000,00	10.150.000,00	23,36	39.600.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00	2.600.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	26.425.000,00	23.725.000,00	89,78	9.700.000,00
22	Dinas Pariwisata	22.200.000,00	20.250.000,00	91,22	34.350.000,00
23	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
24	Bagian Tata Pemerintahan	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	-
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	800.000,00
26	Bagian Pereko PSDA	-	-	-	1.300.000,00
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	43.050.000,00	42.500.000,00	98,72	10.350.000,00
28	Bagian Umum dan Protokol	21.450.000,00	21.450.000,00	100,00	6.500.000,00

29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.550.000,00	16.050.000,00	86,52	20.850.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.400.000,00	12.750.000,00	95,15	8.450.000,00
31	BKPAD	20.550.000,00	16.000.000,00	77,86	197.200.000,00
32	BKPSDM	11.850.000,00	7.950.000,00	67,09	5.200.000,00
33	Kepanewon Dlingo	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	850.000,00
34	Kepanewon Imogiri	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
35	Kapanewon Pandak	650.000,00	650.000,00	100,00	-
36	Kapanewon Kretek	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	-
37	Kapanewon Pleret	-	-	-	650.000,00
38	Kapanewon Pajangan	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	-
39	Kepanewon Sanden	-	-	-	450.000,00
40	Kapanewon Sedayu	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	-
41	Kepanewon Sewon	925.000,00	650.000,00	70,27	600.000,00
42	Kapanewon Srandakan	875.000,00	650.000,00	74,29	-
43	Kepanewon Banguntapan	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	650.000,00
44	Kepanewon Pundong	-	-	-	650.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
	Jumlah	558.400.000,00	473.194.000,00	84,74	930.250.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5.3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-	288.500.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	3.960.000,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja honorarium Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.3.6.1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				3.960.000,00
5.1.2.1.1.3.6.2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				3.960.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	95,96	22.524.045.381,00

Dasar pemberian belanja gaji dan Tunjangan DPRD adalah :

PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja gaji dan tunjangan DPRD Tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	992.985.000,00	98,90	992.985.000,00
5.1.2.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	81.404.400,00	57,91	80.396.400,00

5.1.2.1.1.4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400,00	99.215.400,00	90,13	97.694.580,00
5.1.2.1.1.4.4	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	99,27	85.585.500,00
5.1.2.1.1.4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.439.828.250,00	98,90	1.439.828.250,00
5.1.2.1.1.4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000,00	120.673.350,00	86,91	120.764.700,00
5.1.2.1.1.4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00	12.408.375,00	19,64	20.538.525,00
5.1.2.1.1.4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	99,26	7.893.900.000,00
5.1.2.1.1.4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	99,26	1.955.100.000,00
5.1.2.1.1.4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000,00	16.681.950,00	41,70	16.476.600,00
5.1.2.1.1.4.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.611.824,00	82.403.748,00	86,19	80.859.618,00
5.1.2.1.1.4.12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.050.272,00	99,27	2.054.052,00
5.1.2.1.1.4.13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.150.816,00	99,27	6.162.156,00
5.1.2.1.1.4.14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.090.000.000,00	5.929.600.000,00	97,37	5.520.000.000,00
5.1.2.1.1.4.15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00	4.196.800.000,00	88,86	4.205.400.000,00
5.1.2.1.1.4.16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.805.000,00	12.600.000,00	85,11	6.300.000,00
	Jumlah	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	95,96	22.524.045.381,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.837.260,00	169.004.900,00	90,94	168.028.996,00

Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 dan realisasi 2022 sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Uraian				
5.1.2.1.1.5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.817.260,00
5.1.2.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00	3.528.000,00	23,08	3.528.000,00
5.1.2.1.1.5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.2.1.1.5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	5.069.400,00	71,43	4.127.940,00
5.1.2.1.1.5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.319.260,00	1.714.500,00	51,65	1.462.996,00
5.1.2.1.1.5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00	1.160,00	59,18	960,00
5.1.2.1.1.5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.726.720,00	5.362.560,00	79,72	5.362.560,00
5.1.2.1.1.5.8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	112.320,00	85,71	112.320,00
5.1.2.1.1.5.9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	336.960,00	85,71	336.960,00
	Jumlah	185.837.260,00	169.004.900,00	90,94	168.028.996,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00	1.093.120.000,00	100,00	1.093.120.000,00

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Sedangkan belanja penerimaan lainnya untuk Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. termasuk di dalamnya Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.2.1.1.6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00
	Jumlah	1.093.120.000,00	1.093.120.000,00	100,00	1.093.120.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	28.551.603.863,00	28.372.820.500,00	99,37	26.553.563.603,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai Bos tahun 2023 adalah

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Belanja Bosda untuk SD Negeri	-	8.869.335.500,00	-	-
	Belanja Bosda untuk SMP Negeri	-	4.954.392.000,00	-	-
	Belanja BOSNAS SD	-	7.748.791.000,00	-	-
	Belanja BOSNAS SMP	-	6.570.832.000,00	-	-
	Belanja BOS Pendidikan non Formal	-	2.400.000,00	-	-
	Belanja BOS PAUD	-	144.000.000,00	-	-
	Belanja BOS Kesetaraan	-	83.070.000,00	-	-
	Jumlah	28.551.603.863,00	28.372.820.500,00	99,37	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	15.589.166.302,00	15.084.322.505,00	96,76	15.576.021.636,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.1.8.1	Realisasi Belanja Pegawai BLUD RS Panembahan Senopati	13.126.764.382,00	12.738.218.069,00	97,04	12.555.531.616,00
5.1.2.1.1.8.2	Realisasi Belanja Pegawai BLUD UPT Puskesmas	2.462.401.920,00	2.346.104.436,00	95,28	3.020.490.020,00
	Jumlah	15.589.166.302,00	15.084.322.505,00	96,76	15.576.021.636,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	898.492.905.582,00	858.885.766.998,91	95,59	768.495.409.619,24

Rincian anggaran dan realisasi 2023 dan realisasi tahun 2022 dari belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.1	Belanja Barang	176.778.360.220,00	170.584.238.783,29	96,50	132.201.693.888,00
5.1.2.1.2.2	Belanja Jasa	302.317.607.924,00	285.655.866.509,80	94,49	258.565.000.227,50
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	27.961.782.225,00	26.454.572.748,30	94,61	21.124.853.870,64
5.1.2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	44.228.794.000,00	37.486.232.078,50	84,76	18.535.303.528,00
5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.880.226.940,00	47.456.831.343,00	89,74	59.904.754.429,00
5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	71.628.112.511,00	71.530.844.668,00	99,86	72.899.390.231,00
5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	222.698.021.762,00	219.717.180.868,02	98,66	205.264.413.445,10
	Jumlah	898.492.905.582,00	858.885.766.998,91	95,59	768.495.409.619,24

Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.1 Belanja Barang	176.778.360.220,00	170.584.238.783,29	96,50	132.201.693.888,00

Rincian dari belanja barang adalah sebagai berikut :		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	175.441.035.220,00	169.255.582.733,29	96,47	131.515.055.388,00
5.1.2.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.337.325.000,00	1.328.656.050,00	99,35	686.638.500,00
		176.778.360.220,00	170.584.238.783,29	96,50	132.201.693.888,00

5.1.2.1.2.1.1 Rincian dari anggaran dan realisasi belanja barang habis pakai tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.1.1.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.160.171.295,00	29.946.738.267,00	99,29	19.021.748.248,00
5.1.2.1.2.1.1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.019.355.000,00	1.749.632.320,00	86,64	236.335.492,00
5.1.2.1.2.1.1.3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.569.650.143,00	12.291.653.236,00	97,79	10.460.153.837,00
5.1.2.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.590.000,00	5.590.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.1.1.5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.424.904.800,00	1.391.260.700,00	97,64	1.076.795.700,00
5.1.2.1.2.1.1.6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	53.025.000,00	51.763.725,00	97,62	41.441.000,00
5.1.2.1.2.1.1.7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	125.952.000,00	124.324.100,00	98,71	50.596.200,00
5.1.2.1.2.1.1.8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	311.067.500,00	295.128.900,00	94,88	267.250.000,00
5.1.2.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.685.003.650,00	11.070.786.986,12	94,74	3.574.028.626,00
5.1.2.1.2.1.1.10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	290.996.000,00	289.251.750,00	99,40	142.882.900,00
5.1.2.1.2.1.1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	95.466.450,00	84.792.466,00	88,82	41.562.191,00
5.1.2.1.2.1.1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.1.1.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	37.935.000,00	36.396.000,00	95,94	-
5.1.2.1.2.1.1.14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.726.633.959,00	11.321.355.353,00	96,54	7.189.316.080,00
5.1.2.1.2.1.1.15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover	49.476.050,00	47.439.800,00	95,88	-
5.1.2.1.2.1.1.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.070.872.758,00	6.718.159.682,00	95,01	10.174.211.941,00
5.1.2.1.2.1.1.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	266.122.000,00	262.878.000,00	98,78	310.644.000,00
5.1.2.1.2.1.1.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	840.154.464,00	769.718.514,00	91,62	253.731.000,00
5.1.2.1.2.1.1.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	108.540.000,00	108.422.000,00	99,89	143.289.252,00
5.1.2.1.2.1.1.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.790.851.109,00	1.765.272.778,00	98,57	1.861.999.100,00
5.1.2.1.2.1.1.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Dinas	-	-	-	76.792.000,00
5.1.2.1.2.1.1.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.725.000,00	1.725.000,00	100,00	86.060.000,00
5.1.2.1.2.1.1.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.291.925.000,00	1.249.111.828,00	96,69	791.100.600,00
5.1.2.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.607.585.570,00	5.452.231.681,00	97,23	7.185.870.868,00

5.1.2.1.2.1.1.25	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.942.789.811,00	3.809.767.242,17	96,63	4.415.308.022,00
5.1.2.1.2.1.1.26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	632.617.500,00	507.121.500,00	80,16	1.240.542.630,00
5.1.2.1.2.1.1.27	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.600.116.361,00	6.329.116.550,00	95,89	961.002.875,00
5.1.2.1.2.1.1.28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain	2.182.925.000,00	2.088.644.500,00	95,68	-
5.1.2.1.2.1.1.29	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	298.262.500,00	297.460.000,00	99,73	281.576.762,00
5.1.2.1.2.1.1.30	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga lainnya	133.750.000,00	133.750.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.1.1.31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	295.330.000,00	293.018.700,00	99,22	44.850.000,00
5.1.2.1.2.1.1.32	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	589.938.800,00	530.396.800,00	89,91	426.731.000,00
5.1.2.1.2.1.1.33	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	169.543.599,00
5.1.2.1.2.1.1.34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.216.341.000,00	21.745.881.850,00	93,67	20.095.953.458,00
5.1.2.1.2.1.1.35	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.705.252.500,00	2.514.944.700,00	92,97	1.749.995.200,00
5.1.2.1.2.1.1.36	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.1.1.37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	548.592.000,00	548.582.250,00	100,00	526.662.000,00
5.1.2.1.2.1.1.38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.567.852.500,00	6.540.862.500,00	99,59	195.355.500,00
5.1.2.1.2.1.1.39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	398.700.000,00	397.928.150,00	99,81	6.196.504.800,00
5.1.2.1.2.1.1.40	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.094.044.500,00	31.993.078.956,00	96,67	26.777.796.005,00
5.1.2.1.2.1.1.41	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	191.250.000,00	169.041.325,00	88,39	146.178.450,00
5.1.2.1.2.1.1.42	Belanja Pakaian Dinas dan atribut Pimpinnan dan Anggota DPRD	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.1.1.43	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	132.000.000,00	97,78	133.751.000,00
5.1.2.1.2.1.1.44	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	75.000.000,00	74.960.000,00	99,95	123.440.000,00
5.1.2.1.2.1.1.45	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	128.100.000,00	126.028.000,00	98,38	62.387.207,00
5.1.2.1.2.1.1.46	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	235.900.000,00	206.630.000,00	87,59	703.197.700,00
5.1.2.1.2.1.1.47	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00	66.000.000,00	97,78	8.000.000,00
5.1.2.1.2.1.1.48	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	770.250.000,00	766.805.475,00	99,55	46.015.200,00
5.1.2.1.2.1.1.49	Belanja Pakaian Teknik	638.830.000,00	620.784.200,00	97,18	195.975.495,00
5.1.2.1.2.1.1.50	Belanja Pakaian Adat Daerah	472.660.000,00	443.410.000,00	93,81	585.563.000,00
5.1.2.1.2.1.1.51	Belanja Pakaian Batik Tradisional	747.310.000,00	736.245.000,00	98,52	286.698.500,00
5.1.2.1.2.1.1.52	Belanja Pakaian Olahraga	3.189.230.000,00	3.099.001.949,00	97,17	2.618.362.950,00
5.1.2.1.2.1.1.53	Belanja Pakaian Paskibraka	25.600.000,00	25.600.000,00	100,00	537.855.000,00
	Jumlah	175.441.035.220,00	169.255.582.733,29	96,47	131.515.055.388,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.1.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.337.325.000,00	1.328.656.050,00	99,35	686.638.500,00

Rincian anggaran dan realisasi Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 per OPD pelaksana :

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DINKES	-	-	-	61.250.000,00
2	DPUPKP	-	-	-	1.300.000,00
3	DISHUB	1.337.325.000,00	1.328.656.050,00	99,35	624.088.500,00
	Jumlah	1.337.325.000,00	1.328.656.050,00	99,35	686.638.500,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa	302.317.607.924,00	285.655.866.509,80	94,49	258.565.000.227,50

Rincian anggaran dan realisasi Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 per OPD pelaksana :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	225.167.173.300,00	213.520.511.547,00	94,83	191.788.675.916,50
5.1.2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.063.772.435,00	36.266.542.449,30	92,84	27.802.145.276,00
5.1.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	3.202.928.606,00	2.901.283.509,50	90,58	2.003.283.140,00
5.1.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.787.764.503,00	8.066.724.720,00	91,79	4.555.506.182,00
5.1.2.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.575.631.000,00	2.372.965.000,00	92,13	1.755.510.000,00
5.1.2.1.2.2.6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5.1.2.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	874.275.000,00	791.725.000,00	90,56	269.500.000,00
5.1.2.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.292.714.180,00	6.080.719.758,00	96,63	7.323.179.025,00
5.1.2.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.208.731.300,00	9.787.953.799,00	95,88	5.610.289.368,00
5.1.2.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	87.750.000,00	86.833.947,00	98,96	-
5.1.2.1.2.2.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	263.850.000,00
5.1.2.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.229.917.600,00	5.003.304.890,00	95,67	17.193.061.320,00
5.1.2.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	55.000.000,00	50.397.469,00	91,63	-
5.1.2.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	769.200.000,00	724.154.421,00	94,14	-
	Jumlah	302.317.607.924,00	285.655.866.509,80	94,49	258.565.000.227,50

Adapun rincian dari masing-masing komponen belanja jasa adalah :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor	225.167.173.300,00	213.520.511.547,00	5,237,76	191.788.675.916,50

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.1.1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.579.117.500,00	16.558.588.000,00	94,19	15.240.330.000,00
5.1.2.1.2.2.1.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.852.188.500,00	8.624.236.500,00	97,42	7.980.695.500,00

5.1.2.1.2.2.1.3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	102.000.000,00	93.500.000,00	91,67	87.500.000,00
5.1.2.1.2.2.1.4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14.200.000,00	11.400.000,00	80,28	-
5.1.2.1.2.2.1.5	Honorarium Rohaniawan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	28.400.000,00	25.500.000,00	89,79	58.310.000,00
5.1.2.1.2.2.1.7	Honorarium Penyelenggara Ujian	270.000.000,00	258.900.000,00	95,89	-
5.1.2.1.2.2.1.8	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	91.600.000,00	84.100.000,00	91,81	-
5.1.2.1.2.2.1.10	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.936.900.000,00	1.756.466.800,00	90,68	27.600.000,00
5.1.2.1.2.2.1.11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	38.097.300.000,00	35.756.284.000,00	93,86	40.415.297.000,00
5.1.2.1.2.2.1.12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.744.971.000,00	7.185.223.187,00	92,77	5.780.691.749,00
5.1.2.1.2.2.1.13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	288.977.000,00	266.393.600,00	92,19	109.839.876,00
5.1.2.1.2.2.1.14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.769.495.860,00	1.694.091.060,00	95,74	2.983.400.600,00
5.1.2.1.2.2.1.15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	40.900.000,00	40.900.000,00	100,00	1.430.605.830,00
5.1.2.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	1.425.600.000,00
5.1.2.1.2.2.1.17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	140.100.000,00	140.100.000,00	100,00	879.322.483,00
5.1.2.1.2.2.1.18	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	658.050.000,00	657.000.000,00	99,84	1.394.574.352,00
5.1.2.1.2.2.1.19	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	672.000,00	669.500,00	99,63	921.414.424,00
5.1.2.1.2.2.1.20	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.239.900.000,00	1.221.301.500,00	98,50	1.675.840.000,00
5.1.2.1.2.2.1.21	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	350.686.000,00	350.686.000,00	100,00	1.547.040.740,00
5.1.2.1.2.2.1.22	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	602.724.000,00	593.276.800,00	98,43	507.804.928,00
5.1.2.1.2.2.1.23	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	9.749.460.000,00	8.954.063.817,00	91,84	3.117.300.000,00
5.1.2.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.850.428.460,00	7.577.422.663,00	96,52	14.040.548.290,30
5.1.2.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	163.700.000,00	158.179.000,00	96,63	593.800.836,00
5.1.2.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.938.978.640,00	35.112.587.205,00	97,70	5.280.060.841,50
5.1.2.1.2.2.1.27	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.971.600.000,00	3.827.847.290,00	96,38	2.449.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.008.148.360,00	7.947.579.356,00	99,24	12.590.411.782,00
5.1.2.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.035.478.380,00	2.953.400.874,00	97,30	4.740.800.524,00
5.1.2.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Caraka	74.394.000,00	72.327.500,00	97,22	144.995.718,00
5.1.2.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.522.811.000,00	1.513.591.231,00	99,39	2.357.621.502,70
5.1.2.1.2.2.1.32	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	376.103.000,00	376.103.000,00	100,00	997.651.892,00
5.1.2.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	103.325.000,00	101.258.500,00	98,00	258.494.724,00
5.1.2.1.2.2.1.34	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.949.550.000,00	1.874.414.860,00	96,15	1.396.175.900,00
5.1.2.1.2.2.1.35	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	754.750.000,00	729.500.000,00	96,65	209.300.000,00
5.1.2.1.2.2.1.36	Belanja Jasa Tata Rias	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.188.247.080,00	1.127.379.787,00	94,88	63.919.805,00
5.1.2.1.2.2.1.38	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	-	-	-	662.178.114,00
5.1.2.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	109.000.000,00	102.339.114,00	93,89	122.409.600,00
5.1.2.1.2.2.1.40	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	13.200.000,00	2.000.000,00	15,15	-
5.1.2.1.2.2.1.41	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	27.000.000,00	21.005.500,00	77,80	245.398.500,00
5.1.2.1.2.2.1.42	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.475.175.000,00	1.453.963.435,00	98,56	2.541.907.628,00

5.1.2.1.2.2.1.43	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.405.025.140,00	6.313.203.683,00	98,57	4.521.026.827,00
5.1.2.1.2.2.1.44	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	146.000.000,00	133.250.000,00	91,27	100.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.45	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.700.000,00	28.227.250,00	98,35	106.592.400,00
5.1.2.1.2.2.1.46	Belanja Jasa Kalibrasi	226.840.000,00	199.514.150,00	87,95	125.349.000,00
5.1.2.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	829.750.000,00	750.393.408,00	90,44	45.524.767,00
5.1.2.1.2.2.1.48	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	40.125.000,00	39.105.000,00	97,46	350.285.400,00
5.1.2.1.2.2.1.49	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	277.250.000,00	203.587.925,00	73,43	-
5.1.2.1.2.2.1.50	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.294.350.000,00	6.111.713.353,00	97,10	4.201.454.417,00
5.1.2.1.2.2.1.51	Belanja Jasa Operator Kapal	2.019.600,00	2.019.600,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.1.52	Belanja Tagihan Telepon	429.850.000,00	331.490.804,00	77,12	320.934.899,00
5.1.2.1.2.2.1.53	Belanja Tagihan Air	702.200.000,00	405.079.600,00	57,69	483.324.700,00
5.1.2.1.2.2.1.54	Belanja Tagihan Listrik	43.908.700.000,00	41.449.997.319,00	94,40	36.108.486.410,00
5.1.2.1.2.2.1.55	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	271.075.000,00	257.893.000,00	95,14	266.540.500,00
5.1.2.1.2.2.1.56	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.751.490.000,00	6.395.350.240,00	94,73	7.388.222.471,00
5.1.2.1.2.2.1.57	Belanja Paket/Pengiriman	39.940.000,00	33.086.320,00	82,84	6.881.400,00
5.1.2.1.2.2.1.58	Belanja Penambahan Daya	170.450.000,00	169.948.854,00	99,71	288.629.050,00
5.1.2.1.2.2.1.59	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.284.317.780,00	1.322.206.962,00	57,88	3.109.241.036,00
5.1.2.1.2.2.1.60	Belanja Lembur	68.460.000,00	63.470.000,00	92,71	49.430.000,00
5.1.2.1.2.2.1.61	Belanja Medical Check Up	88.100.000,00	4.394.000,00	4,99	32.909.500,00
	Jumlah	225.167.173.300,00	213.520.511.547,00	5,237,76	191.788.675.916,50

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.063.772.435,00	36.266.542.449,30	92,84	27.802.145.276,00

Dasar hukum belanjanya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi menurut jenisnya sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	-	-	-	1.771.745.076,00
5.1.2.1.2.2.2.2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	33.285.168.000,00	31.205.871.000,00	93,75	24.595.500.900,00
5.1.2.1.2.2.2.3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.644.720.000,00	1.432.326.000,00	87,09	1.434.899.300,00
5.1.2.1.2.2.2.4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.386.607.200,00	2.908.047.852,00	85,87	-
5.1.2.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	410.030.060,00	396.671.476,80	96,74	-
5.1.2.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	337.247.175,00	323.626.120,50	95,96	-
	Jumlah	39.063.772.435,00	36.266.542.449,30	92,84	27.802.145.276,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	1.771.745.076,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2.2	33.285.168.000,00	31.205.871.000,00	93,75	24.595.500.900,00

Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
Dinkes UPT Jamkesda

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2.3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Dinkes UPT Jamkesda	1.644.720.000,00	1.432.326.000,00	87,09	1.434.899.300,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	3.202.928.606,00	2.901.283.509,50	90,58	2.003.283.140,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja sewa tanah Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	197.600.117,00	135.631.094,00	68,64	-
5.1.2.1.2.2.3.2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	566.242.920,00	566.043.800,00	99,96	570.705.301,00
5.1.2.1.2.2.3.3	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	30.100.000,00	30.008.000,00	99,69	-
5.1.2.1.2.2.3.4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	298.904.250,00	269.994.683,00	90,33	157.838.315,00
5.1.2.1.2.2.3.5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	663.881.000,00	602.881.000,00	90,81	778.635.156,00
5.1.2.1.2.2.3.6	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	72.884.787,00	44.199.223,00	60,64	16.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.7	Belanja Sewa Tanah Pertanian	1.299.940.532,00	1.181.155.954,50	90,86	130.303.020,00
5.1.2.1.2.2.3.8	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio alam	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.3.9	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	-	-	-	6.306.000,00
5.1.2.1.2.2.3.10	Belanja Sewa Tanah untuk Studio Alam	-	-	-	12.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.11	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	57.125.000,00	55.731.480,00	97,56	90.215.113,00
5.1.2.1.2.2.3.12	Belanja Sewa Tanah untuk Taman	4.000.000,00	3.388.275,00	84,71	3.052.500,00
5.1.2.1.2.2.3.13	Belanja Sewa Tanah untuk latihan	250.000,00	250.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.3.14	Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB	-	-	-	238.227.735,00
	Jumlah	3.202.928.606,00	2.901.283.509,50	90,58	2.003.283.140,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.787.764.503,00	8.066.724.720,00	91,79	4.555.506.182,00

Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.4.1	Belanja Sewa Electric Generating Set	49.764.000,00	42.900.000,00	86,21	-
5.1.2.1.2.2.4.2	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	204.900.000,00	202.500.000,00	98,83	-
5.1.2.1.2.2.4.3	Belanja Sewa Alat Pengangkat	-	-	-	29.166.670,00
5.1.2.1.2.2.4.4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.978.000.000,00	1.842.615.504,00	93,16	902.513.312,00
5.1.2.1.2.2.4.5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	230.500.000,00	223.000.000,00	96,75	190.550.000,00
5.1.2.1.2.2.4.6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	2.100.000,00
5.1.2.1.2.2.4.7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	1.900.000,00
5.1.2.1.2.2.4.8	Belanja Sewa Alat Pengolah Tanah dan Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.4.9	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	825.000,00
5.1.2.1.2.2.4.10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.779.980.003,00	1.563.008.293,00	87,81	135.220.000,00
5.1.2.1.2.2.4.11	Belanja Sewa Mebel	13.750.000,00	11.292.500,00	82,13	-
5.1.2.1.2.2.4.12	Belanja Sewa Alat Pendingin	18.400.000,00	9.057.600,00	49,23	4.000.000,00

5.1.2.1.2.2.4.13	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	851.450.000,00	808.260.000,00	94,93	2.005.871.000,00
5.1.2.1.2.2.4.14	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	4.960.000,00	4.460.000,00	89,92	-
5.1.2.1.2.2.4.15	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	47.244.500,00	42.094.500,00	89,10	-
5.1.2.1.2.2.4.16	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	713.495.000,00	602.456.000,00	84,44	-
5.1.2.1.2.2.4.17	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dan Film	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.4.18	Belanja Sewa Peralatan Cetak	50.000.000,00	48.500.000,00	97,00	49.800.000,00
5.1.2.1.2.2.4.19	Belanja Sewa alat studio lainnya	1.278.000.000,00	1.176.700.000,00	92,07	-
5.1.2.1.2.2.4.20	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.200.000,00	1.686.535,00	76,66	-
5.1.2.1.2.2.4.21	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	11.900.000,00	9.607.118,00	80,73	-
5.1.2.1.2.2.4.22	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	370.450.000,00	368.613.200,00	99,50	402.530.200,00
5.1.2.1.2.2.4.23	Belanja Sewa Sumber Tenaga	-	-	-	233.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.24	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	22.800.000,00	-	-	-
5.1.2.1.2.2.4.25	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	44.100.000,00	42.168.970,00	95,62	-
5.1.2.1.2.2.4.26	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	21.275.000,00	16.676.000,00	78,38	-
5.1.2.1.2.2.4.27	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	681.196.000,00	645.629.500,00	94,78	-
5.1.2.1.2.2.4.28	Belanja Sewa Peralatan Umum	185.000.000,00	181.790.000,00	98,26	586.030.000,00
5.1.2.1.2.2.4.29	Belanja Sewa Komputer Jaringan	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.4.30	Belanja Sewa Peralatan Personal Komputer	110.000.000,00	105.309.000,00	95,74	-
5.1.2.1.2.2.4.31	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.4.32	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	-	-	-	12.000.000,00
	Jumlah	8.787.764.503,00	8.066.724.720,00	91,79	4.555.506.182,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.575.631.000,00	2.372.965.000,00	92,13	1.755.510.000,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja sewa gedung dan bangunan Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 sebagai berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Uraian				
5.1.2.1.2.2.5.1	Belanja Sewa Bangunan Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.5.2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	30.100.000,00	30.000.000,00	99,67	28.000.000,00
5.1.2.1.2.2.5.3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.460.531.000,00	2.257.965.000,00	91,77	1.653.110.000,00
5.1.2.1.2.2.5.4	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	-	-	-	74.400.000,00
5.1.2.1.2.2.5.5	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	-	-	-
	Jumlah	2.575.631.000,00	2.372.965.000,00	92,13	1.755.510.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	874.275.000,00	791.725.000,00	90,56	269.500.000,00

Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya adalah :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Uraian				
5.1.2.1.2.2.7.1	Belanja Sewa Alat Musik	498.500.000,00	433.400.000,00	86,94	269.500.000,00

5.1.2.1.2.2.7.2	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	375.075.000,00	357.625.000,00	95,35	-
5.1.2.1.2.2.7.3	Belanja Sewa Tanaman	700.000,00	700.000,00	100,00	-
	Jumlah	874.275.000,00	791.725.000,00	90,56	269.500.000,00

5.1.2.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		6.292.714.180,00	6.080.719.758,00	96,63	7.323.179.025,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa konsultasi konstruksi adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.8.1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Kalurahanin Arsitektural	100.000.000,00	92.086.710,00	92,09	506.175.500,00
5.1.2.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Kalurahanin Arsitektural	-	-	-	960.192.150,00
5.1.2.1.2.2.8.3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	27.220.700,00
5.1.2.1.2.2.8.4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Kalurahanin Interior	-	-	-	12.820.000,00
5.1.2.1.2.2.8.5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-	-	-	367.952.100,00
5.1.2.1.2.2.8.6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Kalurahanin Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	285.000.000,00	282.827.375,00	99,24	-
5.1.2.1.2.2.8.7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	-	-	44.870.000,00
5.1.2.1.2.2.8.8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.598.379.280,00	1.546.212.900,00	96,74	-
5.1.2.1.2.2.8.9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.275.469.500,00	1.271.116.500,00	99,66	2.185.245.100,00
5.1.2.1.2.2.8.10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	-	211.961.325,00
5.1.2.1.2.2.8.11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	543.350.000,00	472.101.750,00	86,89	501.368.000,00
5.1.2.1.2.2.8.12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	-	-	-	16.772.100,00
5.1.2.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	-	-	-	48.057.450,00
5.1.2.1.2.2.8.14	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	-	-	-	49.940.000,00
5.1.2.1.2.2.8.15	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian	1.000.000,00	632.000,00	63,20	-
5.1.2.1.2.2.8.16	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.594.515.400,00	1.532.576.413,00	96,12	1.748.345.650,00
5.1.2.1.2.2.8.17	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	-	-	198.185.000,00
5.1.2.1.2.2.8.18	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	895.000.000,00	883.166.110,00	98,68	49.780.000,00
5.1.2.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	-	-	-	99.433.800,00
5.1.2.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	-	-	-	294.860.150,00
	Jumlah	6.292.714.180,00	6.080.719.758,00	96,63	7.323.179.025,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.208.731.300,00	9.787.953.799,00	95,88	5.610.289.368,00
Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagai berikut :					
	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.9.1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan PerKalurahan	-	-	-	247.267.900,00
5.1.2.1.2.2.9.2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	25.000.000,00	24.753.000,00	99,01	323.156.187,00
5.1.2.1.2.2.9.3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-	-	133.820.000,00
5.1.2.1.2.2.9.4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	510.000.000,00	505.403.400,00	99,10	545.195.081,00
5.1.2.1.2.2.9.5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	145.000.000,00	144.244.500,00	99,48	194.271.900,00
5.1.2.1.2.2.9.6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	100.000.000,00	98.770.020,00	98,77	49.833.450,00
5.1.2.1.2.2.9.7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	54.181.300,00	46.241.995,00	85,35	99.366.000,00
5.1.2.1.2.2.9.8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	-	-	-	-
5.1.2.1.2.2.9.9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	270.000.000,00	268.920.480,00	99,60	1.388.030.500,00
5.1.2.1.2.2.9.10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	7.106.950.000,00	6.827.274.914,00	96,06	792.204.750,00
5.1.2.1.2.2.9.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	245.650.000,00	242.653.950,00	98,78	-
5.1.2.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.751.950.000,00	1.629.691.540,00	93,02	1.698.503.100,00
5.1.2.1.2.2.9.16	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	-	-	-	39.904.500,00
5.1.2.1.2.2.9.17	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	-	-	-	98.736.000,00
	Jumlah	10.208.731.300,00	9.787.953.799,00	95,88	5.610.289.368,00
		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	87.750.000,00	86.833.947,00	98,96	-
Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi sebagai berikut:					
	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.10.1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	72.750.000,00	72.750.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.10.2	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	15.000.000,00	14.083.947,00	93,89	-
	Jumlah	87.750.000,00	86.833.947,00	98,96	-
		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.11	Belanja beasiswa pendidikan PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	-
		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.12	Belanja kursus/pelatihan,sosialisasi,Bimtek serta pendiddikan dan pelatihan	5.229.917.600,00	5.003.304.890,00	95,67	-

Rincian Belanja kursus/pelatihan,sosialisasi,Bimtek serta pendididkan dan pelatihan sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.12.1	Belanja Kursus singkat/pelatihan	4.592.243.600,00	4.404.279.890,00	95,91	-
5.1.2.1.2.2.12.2	Belanja Sosialisasi	102.505.000,00	101.010.000,00	98,54	-
5.1.2.1.2.2.12.3	Belanja Bimtek Teknis	86.125.000,00	78.235.000,00	90,84	-
5.1.2.1.2.2.12.4	Belanja Diklat Kepemimpinan	449.044.000,00	419.780.000,00	93,48	-
	Jumlah	5.229.917.600,00	5.003.304.890,00	95,67	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	55.000.000,00	50.397.469,00	91,63	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	769.200.000,00	724.154.421,00	94,14	-

Rincian Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.2.14.1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan / Kebersihan	726.000.000,00	680.954.421,00	93,80	-
5.1.2.1.2.2.14.2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	27.961.782.225,00	26.454.572.748,30	94,61	21.124.853.870,64

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.200.000,00	5.852.125,00	94,39	-
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.528.757.500,00	8.051.049.528,00	94,40	6.820.040.963,00
5.1.2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.844.057.929,00	13.131.950.227,35	94,86	8.386.549.818,64
5.1.2.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.396.731.796,00	5.081.867.904,00	94,17	5.918.263.089,00
5.1.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	186.035.000,00	183.852.963,95	98,83	-
	Jumlah	27.961.782.225,00	26.454.572.748,30	94,61	21.124.853.870,64

Adapun rincian dari jenis belanja pemeliharaan adalah sebagi berikut :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.200.000,00	5.852.125,00	94,39	-

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB tahun 2023 dan realisasi 2022 sebagai berikut :

	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	DKPP	6.200.000,00	5.852.125,00	94,39	-
	Jumlah	6.200.000,00	5.852.125,00	94,39	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.528.757.500,00	8.051.049.528,00	94,40	6.820.040.963,00

Rincian dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.1.1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	25.000.000,00	24.190.000,00	96,76	79.611.000,00
5.1.2.1.2.3.1.2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	-	-	-	11.841.090,00
5.1.2.1.2.3.1.3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	96.700.000,00	94.212.900,00	97,43	57.275.000,00
5.1.2.1.2.3.1.4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	685.295.000,00	635.835.668,00	92,78	-
5.1.2.1.2.3.1.5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.270.065.000,00	2.160.060.790,00	95,15	2.057.477.589,00
5.1.2.1.2.3.1.6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000,00	39.750.000,00	99,38	210.131.993,00
5.1.2.1.2.3.1.7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	405.252.500,00	294.945.900,00	72,78	518.427.568,00
5.1.2.1.2.3.1.8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.835.000,00	23.404.200,00	94,24	1.980.000,00
5.1.2.1.2.3.1.9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	336.000.000,00	335.981.000,00	99,99	177.972.000,00
5.1.2.1.2.3.1.10	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	490.000,00	-	-	-
5.1.2.1.2.3.1.11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	24.000.000,00	22.744.500,00	94,77	-
5.1.2.1.2.3.1.12	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.3.1.13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	-	-	-	15.000.000,00
5.1.2.1.2.3.1.14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	-	-	-	5.000.000,00
5.1.2.1.2.3.1.15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	-	99.948.000,00
5.1.2.1.2.3.1.16	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	-	-	625.000,00
5.1.2.1.2.3.1.17	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	-	-	-	4.000.000,00
5.1.2.1.2.3.1.18	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	-	-	-	10.500.000,00
5.1.2.1.2.3.1.19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	-	-
5.1.2.1.2.3.1.20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.159.000.000,00	3.072.531.790,00	97,26	1.354.733.145,00
5.1.2.1.2.3.1.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	-	177.247.150,00
5.1.2.1.2.3.1.22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	-
5.1.2.1.2.3.1.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	222.650.000,00	212.005.663,00	95,22	511.004.985,00
5.1.2.1.2.3.1.24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	182.140.000,00	167.257.600,00	-	-
5.1.2.1.2.3.1.25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	450.000,00
5.1.2.1.2.3.1.26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	450.000,00
5.1.2.1.2.3.1.27	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	11.500.000,00	9.693.500,00	84,29	-

5.1.2.1.2.3.1.28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35	105.080.000,00
5.1.2.1.2.3.1.29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	250.000.000,00	248.406.000,00	99,36	248.678.504,00
5.1.2.1.2.3.1.30	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	-	-	-	9.949.500,00
5.1.2.1.2.3.1.31	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	51.000.000,00	50.360.357,00	98,75	30.576.680,00
5.1.2.1.2.3.1.32	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	10.000.000,00
5.1.2.1.2.3.1.33	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	-	-	-	12.999.999,00
5.1.2.1.2.3.1.34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	185.040.000,00	171.260.000,00	92,55	574.216.850,00
5.1.2.1.2.3.1.35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	126.290.000,00	116.673.500,00	92,39	304.308.100,00
5.1.2.1.2.3.1.36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	6.000.000,00
5.1.2.1.2.3.1.37	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	185.000.000,00	128.186.000,00	69,29	140.326.020,00
5.1.2.1.2.3.1.38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00	58.185.000,00	96,98	-
5.1.2.1.2.3.1.39	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	75.000.000,00	72.580.160,00	96,77	79.730.790,00
5.1.2.1.2.3.1.40	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	12.000.000,00	11.940.000,00	99,50	-
5.1.2.1.2.3.1.41	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersua	-	-	-	4.500.000,00
	Jumlah	8.528.757.500,00	8.051.049.528,00	94,40	6.820.040.963,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.844.057.929,00	13.131.950.227,35	94,86	8.386.549.818,64

Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.2.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.557.147.953,00	11.129.031.736,35	96,30	8.386.549.818,64
5.1.2.1.2.3.2.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000,00	37.014.000,00	74,03	-
5.1.2.1.2.3.2.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan / Perikanan	1.955.999.976,00	1.687.230.000,00	86,26	-
5.1.2.1.2.3.2.4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	79.952.270,00	99,94	-
5.1.2.1.2.3.2.5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.050.000,00	20.039.000,00	99,95	-
5.1.2.1.2.3.2.6	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti Lainnya	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.3.2.7	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti- Tugu / Tanda Batas-Pilar / Tugu / Tanda Lainnya	110.000.000,00	108.418.000,00	98,56	-

5.1.2.1.2.3.2.8	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas-Pagar	24.160.000,00	24.153.721,00	99,97	-
5.1.2.1.2.3.2.9	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas-Tugu / Tanda Batas Lainnya	40.000.000,00	39.411.500,00	98,53	-
	Jumlah	13.844.057.929,00	13.131.950.227,35	94,86	8.386.549.818,64

5.1.2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		5.396.731.796,00	5.081.867.904,00	94,17	5.918.263.089,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.766.692.543,00	3.554.523.233,00	94,37	3.398.924.900,00
5.1.2.1.2.3.3.2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kalurahan	-	-	-	494.968.000,00
5.1.2.1.2.3.3.3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	-	-	-	207.116.000,00
5.1.2.1.2.3.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	-	-	-	24.093.260,00
5.1.2.1.2.3.3.5	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan jembatan pada Jalan Kabupaten	178.365.350,00	166.896.000,00	93,57	-
5.1.2.1.2.3.3.6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	-	-	-	21.243.060,00
5.1.2.1.2.3.3.7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	342.930.000,00	333.709.000,00	97,31	164.733.400,00
5.1.2.1.2.3.3.8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	-	-	-	-
5.1.2.1.2.3.3.9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	400.005,00	400.005,00	100,00	4.497.261,00
5.1.2.1.2.3.3.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	3.359.056,00
5.1.2.1.2.3.3.11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	299.576.474,00	223.383.940,00	74,57	-
5.1.2.1.2.3.3.12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	-	-	-	244.827.587,00
5.1.2.1.2.3.3.13	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.3.3.14	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	121.950.000,00	119.499.270,00	97,99	661.600.065,00
5.1.2.1.2.3.3.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	-	-	-	663.200.500,00
5.1.2.1.2.3.3.16	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	555.017.424,00	552.426.456,00	99,53	29.700.000,00
5.1.2.1.2.3.3.17	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas tanah	121.300.000,00	120.530.000,00	99,37	-
	Jumlah	5.396.731.796,00	5.081.867.904,00	94,17	5.918.263.089,00

5.1.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		186.035.000,00	183.852.963,95	98,83	-

Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya

5.1.2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		44.228.794.000,00	37.486.232.078,50	84,76	18.535.303.528,00

Rincian Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.136.794.000,00	37.396.866.803,50	84,73	18.535.303.528,00
5.1.2.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	92.000.000,00	89.365.275,00	97,14	-
	Jumlah	44.228.794.000,00	37.486.232.078,50	84,76	18.535.303.528,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 adalah:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.764.044.000,00	17.214.592.907,50	75,62	11.055.153.592,00
5.1.2.1.2.4.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	688.440.102,00
5.1.2.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.340.170.000,00	20.172.583.657,00	94,53	6.098.850.600,00
5.1.2.1.2.4.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	71.250.000,00
5.1.2.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.580.000,00	9.690.239,00	29,74	621.609.234,00
	Jumlah	44.136.794.000,00	37.396.866.803,50	84,73	18.535.303.528,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 adalah:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	92.000.000,00	89.365.275,00	97,14	-

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.880.226.940,00	47.456.831.343,00	89,74	59.904.754.429,00

Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.169.100.000,00	11.947.127.250,00	98,18	20.551.255.680,00
5.1.2.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.711.126.940,00	35.509.704.093,00	87,22	39.353.498.749,00
	Jumlah	52.880.226.940,00	47.456.831.343,00	89,74	59.904.754.429,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.169.100.000,00	11.947.127.250,00	98,18	20.551.255.680,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.386.700.000,00	2.358.210.000,00	98,81	2.663.850.000,00
5.1.2.1.2.5.1.2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.039.400.000,00	5.845.917.250,00	96,80	5.298.905.680,00
5.1.2.1.2.5.1.3	Belanja Beasiswa	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	418.000.000,00
5.1.2.1.2.5.1.4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	4.620.000.000,00
5.1.2.1.2.5.1.5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Kalurahan (TKDD)	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	100,00	7.550.500.000,00
	Jumlah	12.169.100.000,00	11.947.127.250,00	98,18	20.551.255.680,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.711.126.940,00	35.509.704.093,00	87,22	39.353.498.749,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
--	--------	--------------------	---------------------	---	---------------------

5.1.2.1.2.5.2.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.727.386.940,00	12.528.564.093,00	70,67	24.825.408.749,00
5.1.2.1.2.5.2.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	22.983.740.000,00	22.981.140.000,00	99,99	14.528.090.000,00
	Jumlah	40.711.126.940,00	35.509.704.093,00	87,22	39.353.498.749,00

5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		71.628.112.511,00	71.530.844.668,00	99,86	72.899.390.231,00

Rincian realisasi BelanjaBarang dan Jasa tahun 2023 adalah:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Belanja Bosda untuk SD Negeri	-	14.682.857.190,00	-	-
	Belanja Bosda untuk SMP Negeri	-	9.788.367.500,00	-	-
	Belanja BOSNAS SD	-	29.268.890.773,00	-	-
	Belanja BOSNAS SMP	-	17.206.665.075,00	-	-
	Belanja BOS Penddidikan non Formal	-	95.898.000,00	-	-
	Belanja BOS PAUD	-	241.863.130,00	-	-
	Belanja BOS Kesetaraan	-	246.303.000,00	-	-
	Jumlah	71.628.112.511,00	71.530.844.668,00	99,86	-

5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		222.698.021.762,00	219.717.180.868,02	98,66	205.264.413.445,10

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU Panembahan Senopati Bantul	168.820.318.157,00	166.533.337.656,00	98,65	161.047.521.702,00
	- Belanja bahan	68.229.644.359,00	67.710.968.147,00	99,24	62.699.278.547,00
	- Belanja Jasa Pelayanan	71.205.000.000,00	71.202.763.914,00	100,00	74.148.735.828,00
	- Belanja Pemeliharaan	6.983.355.680,00	6.400.642.837,00	91,66	4.874.864.854,00
	- Belanja administrasi Kantor	2.853.169.250,00	2.486.704.097,00	87,16	2.359.776.312,00
	- Belanja barang dan jasa	16.643.569.764,00	16.117.010.877,00	96,84	14.138.989.656,00
	- Belanja promosi	370.000.000,00	350.415.446,00	94,71	458.026.862,00
	- Belanja barang dan jasa lainnya	2.535.579.104,00	2.264.832.338,00	89,32	2.367.849.643,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU Saras Adyatma	177.000.000,00	33.710.000,02	19,05	-
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	53.700.703.605,00	53.150.133.212,00	98,97	44.216.891.743,10
	Jumlah	222.698.021.762,00	219.717.180.868,02	98,66	205.264.413.445,10

5.1.2.1.3	Belanja Bunga	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	-	-	-

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan Belanja Bunga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.1.4	Belanja Subsidi	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	-	-	-

Pada Tahun 20123 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengganggu Belanja Subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.1.5	Belanja Hibah	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		89.345.222.707,00	115.915.380.000,00	129,74	91.629.103.963,08

Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 untuk Belanja Hibah dikelola oleh OPD teknis sesuai dengan urusan kewenangannya.

Rincian Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun 2023 dan realisasi Tahun 2022 sebagai berikut :

Uraian		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.1	Hibah ke Pemerintah Pusat	21.091.668.400,00	21.071.194.400,00	99,90	980.556.000,00
5.1.2.1.5.2	Belanja Hibah kepada BUMD	3.994.650.000,00	3.710.000.000,00	92,87	4.110.289.000,00
5.1.2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	62.296.590.907,00	61.547.997.300,00	98,80	45.917.759.919,08
5.1.2.1.5.4	Belanja Hibah Dana BOS	-	27.623.874.900,00	-	38.658.185.644,00
5.1.2.1.5.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400,00	1.962.313.400,00	100,00	1.962.313.400,00
	Jumlah	89.345.222.707,00	115.915.380.000,00	129,74	91.629.103.963,08

5.1.2.1.5.1	Hibah ke Pemerintah Pusat	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		21.091.668.400,00	21.071.194.400,00	99,90	980.556.000,00

Rincian Hibah ke Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Uraian		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.888.718.400,00	20.888.718.400,00	100,00	-
5.1.2.1.5.1.2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	202.950.000,00	182.476.000,00	89,91	980.556.000,00
	Jumlah	21.091.668.400,00	21.071.194.400,00	99,90	980.556.000,00

Uraian		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
5.1.2.1.5.1.1.1	Kepada Bawaslu dalam rangka kegiatan pengawanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bantul tahun 2023	5.408.954.000,00	5.408.954.000,00	100,00	-
5.1.2.1.5.1.1.2	Kepada KPU dalam rangka kegiatan pengawanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bantul tahun 2023	15.479.764.400,00	15.479.764.400,00	100,00	-
	Jumlah	20.888.718.400,00	20.888.718.400,00	100,00	-

5.1.2.1.5.1.2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		202.950.000,00	182.476.000,00	89,91	980.556.000,00

Pembangunan Gedung Kantor (Rehap Gedung Dharmawangsa Kodim, Landcape gedung Kepanewon sanden)

OPD yang mengampu Belanja Hibah ke Pemerintah Pusat adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

5.1.2.1.5.2	Belanja Hibah kepada BUMD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		3.994.650.000,00	3.710.000.000,00	92,87	4.110.289.000,00

Belanja Hibah Barang kepada BUMD tahun 2023
Pembangunan Gedung Perumdam Tirto Projo tamansari

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.	62.296.590.907,00	61.547.997.300,00	98,80	45.917.759.919,08

	Rincian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.480.743.058,00	20.278.376.717,00	99,01	6.992.790.239,30
5.1.2.1.5.3.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.553.404.000,00	5.236.301.000,00	94,29	6.688.737.257,78
5.1.2.1.5.3.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.262.443.849,00	36.033.319.583,00	99,37	32.236.232.422,00
	Jumlah	62.296.590.907,00	61.547.997.300,00	98,80	45.917.759.919,08

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.777.056.400,00	17.649.009.717,00	99,28	3.878.910.374,00
5.1.2.1.5.3.1.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.703.686.658,00	2.629.367.000,00	97,25	3.113.879.865,30
	Jumlah	20.480.743.058,00	20.278.376.717,00	99,01	6.992.790.239,30

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3.1.1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.777.056.400,00	17.649.009.717,00	99,28	23.014.471.885,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per OPD pelaksana tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1	DISDIKPORA	16.732.056.400,00	16.619.103.024,00	99,32	3.233.910.374,00
2	DINKES	745.000.000,00	729.906.693,00	97,97	345.000.000,00
3	DPUPKP	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
	Jumlah	17.777.056.400,00	17.649.009.717,00	99,28	3.878.910.374,00

Realisasi penggunaan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per OPD pelaksana tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DISDIKPORA	16.732.056.400,00	16.619.103.024,00	99,32	3.233.910.374,00

	Belanja Operasional Pendidikan non Formal	3.857.200.000,00	3.744.246.624,00	97,07	3.167.780.974,00
	Hibah uang SD/MI swasta penyelenggara inklusi	8.419.830.000,00	8.419.830.000,00	100,00	66.129.400,00
	Hibah uang SMP Swasta, MTS Negeri	4.455.026.400,00	4.455.026.400,00	100,00	-
2	DINKES	745.000.000,00	729.906.693,00	97,97	-
	Hibah kepada PMI Bantul	545.000.000,00	529.906.693,00	97,23	345.000.000,00
	Hibah Kepada Yayasan Kanker Indonesia Cab Bantul th 2023	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
3	DPUPKP	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
	Hibah kepada Sekber Kartamantul	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
	Jumlah	17.777.056.400,00	17.649.009.717,00	99,28	3.878.910.374,00

5.1.2.1.5.3.1.2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian OPD Pelaksana	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	-	-	3.113.879.865,30
1	DISDIKPORA	-	-	-	385.072.349,30
2	DINKES	-	-	-	167.870.016,00
3	DPUPKP	-	-	-	1.988.937.500,00
4	DPMK	2.397.570.658,00	2.330.576.000,00	97,21	572.000.000,00
5	DINAS SOSIAL	276.641.000,00	269.910.000,00	97,57	-
6	DKUKMP	29.475.000,00	28.881.000,00	97,98	-
	Jumlah	2.703.686.658,00	2.629.367.000,00	97,25	3.113.879.865,30

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per OPD Pelaksana adalah sebagai berikut

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DINKES	-	-	-	385.072.349,30
	Hibah alat peraga edukatif kepada PAUD Swasta	-	-	-	138.871.700,00
	Pembangunan Toilet SMP Pangudi Luhur (DAK SMP)	-	-	-	126.700.364,30
	Reahap Bangunan gedung PAUD Swasta	-	-	-	119.500.285,00
2	DPUPKP	-	-	-	167.870.016,00
	Hibah barang ke PMI (pengadaan Blood Bank)	-	-	-	167.870.016,00
3	DPMK	2.397.570.658,00	2.330.576.000,00	102,87	572.000.000,00
	Hibah Air Minum PeKalurahan (HAMP) kepada beberapa Kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul	840.000.000,00	840.000.000,00	100,00	572.000.000,00
	Hibah Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah kepada beberapa kelurahan di wilayah Kabupaten Bantul	960.000.000,00	960.000.000,00	100,00	-
	Hibah pekerjaan penanganan kawasan kumuh di beberapa kelurahan di wilayah Kabupaten	597.570.658,00	530.576.000,00	112,63	-
4	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
	Hibah sumur Bor/PAB kepada kelompok masyarakat	-	-	-	-
5	DINAS SOSIAL	276.641.000,00	269.910.000,00	102,49	-
	Hibah barang kepada LKSA Tunas Harapan & LKSA Bina Putra Bantul	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	-
	Hibah barang kepada PUSKESOS GIRIREJO & PUSKESOS DONOTIRTO	196.641.000,00	189.910.000,00	103,54	-

6	DKUKMP	29.475.000,00	28.881.000,00	102,06	-
	Hibah barang DED pembangunan Taman Kuliner Wukirsari (berupa Jasa konsultasi perencanaan CV PADHAWA JAYA RESWARA)	29.475.000,00	28.881.000,00	102,06	-
	Jumlah	2.703.686.658,00	2.629.367.000,00	102,83	1.124.942.365,30

Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3.2.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.156.000.000,00	2.156.000.000,00	100,00	3.028.500.000,00
5.1.2.1.5.3.2.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.397.404.000,00	3.080.301.000,00	90,67	3.660.237.257,78
	Jumlah	5.553.404.000,00	5.236.301.000,00	94,29	6.688.737.257,78

5.1.2.1.5.3.2.1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per OPD pelaksanaan :

No	OPD Pelaksana	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DISPORA	-	-	-	195.000.000,00
2	Bagian Kesra	2.156.000.000,00	2.156.000.000,00	100,00	2.833.500.000,00
	Jumlah	2.156.000.000,00	2.156.000.000,00	100,00	3.028.500.000,00

Realisasi penggunaan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per OPD Pelaksana sebagai berikut :

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DISPORA	-	-	-	195.000.000,00
	Hibah uang untuk renovasi SD Muhammadiyah Karangtengah Imogiri	-	-	-	95.000.000,00
	Hibah uang untuk renovasi SMP Swasta	-	-	-	100.000.000,00
2	Bagian Kesra	2.156.000.000,00	2.156.000.000,00	100,00	2.638.500.000,00
	Hibah uang kepada Pondok pesantren dan tempat beribadah umat muslim di bantul	-	-	-	1.778.500.000,00
	Hibah uang kepada Muslimat NU Kabupaten Bantul	-	-	-	450.000.000,00
	Hibah uang untuk pembangunan gedung dakwah Selogedong Argodadi Sedayu Bantul	-	-	-	20.000.000,00
	Hibah rehap Pura Karanggede jl. Bantul 09 pendowoharjo Bantul	-	-	-	15.000.000,00
	hibah penyempurnaan gedung dakwah PCM Pleret	-	-	-	125.000.000,00
	Hibah pembangunan kantor dan rumah dinas pendeta	-	-	-	15.000.000,00
	Hibah uang untuk pemeliharaan Pura Eka Dharma Gonjen Kasihan	-	-	-	80.000.000,00
	Hibah ke PDM Bantul	-	-	-	40.000.000,00
	Hibah uang untuk Revitalisasi gedung GKJ Kaliurang Argomulyo sesayu bantul	-	-	-	100.000.000,00
	Hibah uang untuk pembangunan GPD di Immanuel Sedayu	-	-	-	15.000.000,00
	Hibah uang kepada Pengurus cabang NU Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kapanewon Pajangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	hibah uang kepada Takmir Masjid Maslakhatul Ummah Jabidan Banuntapan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Pengurus Majelis Wakil Cab NU Kapanewon Jetis	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Pengurus Majelis Wakil Cab NU Kapanewon Banguntapan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-

	Hibah uang kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kwasen, Srimartani, Piyungan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid NU Miftahul Huda Munggur Srimartani, Piyungan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada takmir masjid Al Huda Semen Krabrengan, Srimulyo, Piyungan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Al Maarif Ngabean, Triharjo, Pandak	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Al Barokah Mojosari sitimulyo, Piyungan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Mushola Al Falah Pondok Srandakan Trimurti Srandakan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Mushola Nurul Huda Triharjo Pandak	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada BADKO TKA-TPA Kabupaten Bantul	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatimulyo Dlingo	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Baiturrahman Plakaran Kidul, Baturetno Banguntapan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Baitulssalam Wijirejo Pandak	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid At Taqwa Kayuhan Kulon Triwidadi Pajangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Gereja Salib Suci Gunung Sempu Tamantirto Kasihan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Al Miftakh Srihardono Pundong	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Muqorrobin Gedongsari Wijirejo Pandak	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Pengurus Mushola Al Jihaad pijen Pandak	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah wonokromo pleret	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Al Muttaqin II Temuwuh Dlingo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Gereja Kristen Jawa SidomulyoDuwuran, Parangtritis Kretek	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Baitul Makmur Murtigading Sanden	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Hibah uang kepada Takmir Masjid Al Ikhlas Demangan Banguntapan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	2.156.000.000,00	2.156.000.000,00	100,00	2.833.500.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3.2.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.397.404.000,00	3.080.301.000,00	90,67	3.660.237.257,78

No	OPD Pelaksana	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DKPP	3.397.404.000,00	3.080.301.000,00	90,67	2.499.073.257,78
2	DLH	-	-	-	1.161.164.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kalurahan	-	-	-	-
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
	Jumlah	3.397.404.000,00	3.080.301.000,00	90,67	3.660.237.257,78

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2022 per OPD sebagai berikut :

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DKPP	3.397.404.000,00	3.080.301.000,00	90,67	3.821.820.000,00
	Hibah barang kepada kelompok tani antara lain berupa :	-	-	-	2.491.492.000
	Combine harvester satu unit, traktor roda dua, kendaraan roda tiga, mixer, chopper, hammer mill/disk mill dan jaringan irigasi	-	-	-	1.330.328.000
2	DLH	-	-	-	1.161.164.000,00

	Mesin pencacah sampah organik (MPSO) dan mesin pencacah sampah plastik (MPSP)	-	-	-	169.164.000,00
	Motor roda tiga	-	-	-	992.000.000,00
	Jumlah	3.397.404.000,00	3.080.301.000,00	90,67	4.982.984.000,00

5.1.2.1.5.3.3 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.3.3.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.639.943.849,00	34.423.499.583,00	99,38	29.276.244.422,00
5.1.2.1.5.3.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.622.500.000,00	1.609.820.000,00	99,22	2.959.988.000,00
	Jumlah	36.262.443.849,00	36.033.319.583,00	99,37	32.236.232.422,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	DIKPORA				
	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kabupaten Bantul	8.582.583.849,00	8.580.364.292,00	99,97	7.065.971.384,00
	Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	Hibah kepada Nasional Paralimpic Cpmmite (NPC) Kabupaten Bantul	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	750.000.000,00
	Hibah kepada Kwardcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul	300.000.000,00	211.550.000,00	70,52	500.000.000,00
	Belanja BOP PAUD Swasta	24.357.360.000,00	24.231.585.291,00	99,48	20.760.273.038,00
	Jumlah	34.639.943.849,00	34.423.499.583,00	99,38	29.276.244.422,00

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per OPD sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	DPUPKP	-	-	-	277.268.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-
	Gamelan Pelog Slendro jenis kuningan 5 (lima) set	1.622.500.000,00	1.492.500.000,00	91,99	2.682.720.000,00
	Barang perlengkapan sanggar 35 speaker aktif	-	117.320.000,00	-	-
	Jumlah	1.622.500.000,00	1.609.820.000,00	99,22	2.959.988.000,00

5.1.2.1.5.4	Belanja Hibah Dana BOS	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	27.623.874.900,00		38.658.185.644,00

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.4.1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta (SD)	-	18.867.111.504,00	-	1.568.757.500,00
5.1.2.1.5.4.2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta (SMP)	-	8.756.763.396,00	-	37.089.428.144,00
	Jumlah	-	27.623.874.900,00	-	38.658.185.644,00

5.1.2.1.5.4.1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	18.867.111.504,00	-	1.568.757.500,00

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	BOSP kepada SD swasta dan MIN se Kabupaten Bantul	-	-	-	423.442.000

BOSP SD Swasta	-	18.867.111.504,00	-	1.145.315.500
Jumlah	-	18.867.111.504,00	-	1.568.757.500,00

5.1.2.1.5.4.2 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
DISDIKORA	0,00	8.756.763.396,00	-	37.089.428.144,00
Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
SD Swasta	-	-	-	26.110.342.942,00
SMP Swasta	-	8.756.763.396,00	-	10.979.085.202,00
Jumlah	-	8.756.763.396,00	-	37.089.428.144,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.5.5 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400,00	1.962.313.400,00	100,00	1.962.313.400,00

Adapun rincian realisasi Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 . adalah sebagai berikut:

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DPC Partai Amanat Nasional	188.305.600,00	188.305.600,00	100,00	188.305.600,00
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	295.762.600,00	295.762.600,00	100,00	295.762.600,00
3	DPC Partai NASDEM	83.946.000,00	83.946.000,00	100,00	83.946.000,00
4	DPC Partai GERINDRA	293.675.000,00	293.675.000,00	100,00	293.675.000,00
5	DPC Partai Demokrat	126.350.800,00	126.350.800,00	100,00	126.350.800,00
6	DPC PDI Perjuangan	467.156.600,00	467.156.600,00	100,00	467.156.600,00
7	DPC PPP	111.217.400,00	111.217.400,00	100,00	111.217.400,00
8	DPD PKS	193.001.000,00	193.001.000,00	100,00	193.001.000,00
9	DPD Partai Golkar	154.278.400,00	154.278.400,00	100,00	154.278.400,00
10	DPC Partai Bulan Bintang	48.620.000,00	48.620.000,00	100,00	48.620.000,00
	Jumlah	1.962.313.400,00	1.962.313.400,00	100,00	1.962.313.400,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial	5.268.044.155,00	4.947.600.000,00	93,92	8.110.400.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja bansos tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.468.044.155,00	1.467.600.000,00	99,97	4.523.400.000,00
5.1.2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.800.000.000,00	3.480.000.000,00	91,58	3.357.000.000,00
5.1.2.1.6.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	-	-	-	230.000.000,00
	Jumlah	5.268.044.155,00	4.947.600.000,00	93,92	8.110.400.000,00

Rincian lebih lanjut dari Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan pengelompokannya dapat diuraikan sebagai berikut :

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.6.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.468.044.155,00	1.467.600.000,00	99,97	2.590.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	-

Perangkat Daerah Pelaksana asalah Dinas Sosial		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga				
1	DINKES	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	260.000.000,00
2	DPUPKP	3.400.000.000,00	3.080.000.000,00	90,59	2.920.000.000,00
3	DINSOS	-	-	-	177.000.000,00
	Jumlah	3.800.000.000,00	3.480.000.000,00	91,58	3.357.000.000,00
5.1.2.1.6.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	-		230.000.000,00
5.1.2.1.6.4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana asalah Dinas Sosial	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		-	-	-	230.000.000,00
5.1.2.2.	Belanja Modal	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		238.080.232.448,00	227.673.894.188,81	95,63	221.698.419.757,81

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya.

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	8.247.988.540,00
5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	78.668.947.076,00	76.046.486.634,86	96,67	70.206.003.149,45
5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	34.667.919.330,00	32.716.587.212,88	94,37	37.780.797.101,00
5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.300.437.687,00	110.642.014.782,07	95,13	98.155.322.270,36
5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.442.928.355,00	8.268.805.559,00	97,94	7.308.308.697,00
5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	238.080.232.448,00	227.673.894.188,81	95,63	221.698.419.757,81

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Tanah	-	-		8.247.988.540,00

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja tanah tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.1.1	Belanja Modal Tanah Persil	-	-	-	8.075.000.000,00
5.1.2.2.1.2	Belanja Modal Lapangan	-	-	-	172.988.540,00
	Jumlah	-	-	-	8.247.988.540,00

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.668.947.076,00	76.046.486.634,86	96,67	70.206.003.149,45

Rincian dari anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin adalah :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
--	--------	--------------------	---------------------	---	---------------------

5.1.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar	2.032.650.000,00	1.975.428.296,00	97,18	868.963.750,00
5.1.2.2.2.2	Pengadaan Alat Angkutan	7.100.152.000,00	6.565.735.716,86	92,47	22.153.616.706,00
5.1.2.2.2.3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	187.180.000,00	186.275.825,00	99,52	225.842.900,00
5.1.2.2.2.4	Belanja Modal Alat Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	129.958.000,00
5.1.2.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.578.685.752,00	7.220.019.852,00	95,27	5.512.148.287,00
5.1.2.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.319.532.000,00	1.291.281.590,00	97,86	949.531.875,00
5.1.2.2.2.7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.644.638.652,00	16.621.486.120,00	99,86	6.396.141.555,45
5.1.2.2.2.8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.116.950.000,00	3.103.142.800,00	99,56	769.361.000,00
5.1.2.2.2.9	Belanja Modal Komputer	11.297.185.050,00	10.890.988.945,00	96,40	8.507.552.170,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	13.500.000,00	13.499.708,00	100,00	223.033.109,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	248.600.000,00	247.376.000,00	99,51	3.000.000,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Alat Peraga	225.200.000,00	215.188.000,00	95,55	-
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Rambu-Rambu	100.000.000,00	99.678.000,00	99,68	235.009.110,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Peralatan Olahraga	56.000.000,00	55.311.000,00	98,77	23.680.000,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.631.433.906,00	18.622.275.605,00	99,95	17.489.906.749,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.107.239.716,00	8.928.799.177,00	88,34	6.718.257.938,00
	Jumlah	78.668.947.076,00	76.046.486.634,86	96,67	70.206.003.149,45

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	34.667.919.330,00	32.716.587.212,88	94,37	37.780.797.101,00

Belanja Gedung dan Bangunan terdiri dari:		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.3 .1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.555.249.330,00	32.618.382.552,88	94,39	37.557.092.705,00
5.1.2.2.3 .2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-
5.1.2.2.3 .3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	42.670.000,00	42.230.000,00	98,97	163.604.396,00
5.1.2.2.3 .4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	70.000.000,00	55.974.660,00	79,96	60.100.000,00
	Jumlah	34.667.919.330,00	32.716.587.212,88	94,37	37.780.797.101,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.300.437.687,00	110.642.014.782,07	95,13	98.155.322.270,36

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri :		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.4.1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	76.947.098.748,00	72.723.465.899,07	94,51	65.046.303.255,36
5.1.2.2.4.2	Belanja Modal Bangunan Air	15.830.321.939,00	14.937.726.904,00	94,36	14.945.051.400,00
5.1.2.2.4.3	Belanja Modal Instalasi	4.443.275.000,00	4.264.455.679,00	95,98	4.007.022.405,00
5.1.2.2.4.4	Belanja Modal Jaringan	19.079.742.000,00	18.716.366.300,00	98,10	14.156.945.210,00
5.1.2.2.4.5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD Puskesmas	-	-	-	-
	Jumlah	116.300.437.687,00	110.642.014.782,07	95,13	98.155.322.270,36

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.442.928.355,00	8.268.805.559,00	97,94	7.308.308.697,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah :

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	72.554.200,00
5.1.2.2.5.2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	49.100.000,00
5.1.2.2.5.3	Belanja Modal Tanaman	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
5.1.2.2.5.4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.165.900.000,00	1.011.013.569,00	86,72	-
5.1.2.2.5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.132.028.355,00	7.112.878.260,00	99,73	7.070.727.999,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	49.000.000,00	48.913.730,00	99,82	115.926.498,00
	Jumlah	8.442.928.355,00	8.268.805.559,00	97,94	7.308.308.697,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	26.547.857.146,00	1.122.989.975,00	4,23	19.683.697.169,00

Sebagai dasar penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Rincian penggunaan Belanja Tak Terduga Tahun 2023 sebagai berikut :

Nomor	URAIAN PENGGUNAAN	OPD PENGAMPU	JUMLAH	NOMOR SK BUPATI
1	Restitusi BPHTB atas nama Wulandari dan kawan-kawan	BPKPAD	42.654.125,00	SK Bupati Nomor 62 Tahun 2023
2	Restitusi BPHTB atas nama Wahyu Setyaningsih dan kawan-kawan (11 orang)	BPKPAD	69.313.275,00	SK Bupati Nomor 191 Tahun 2023
3	Restitusi BPHTB atas nama Dra. Kristin Agus Pratiwi	BPKPAD	281.510,00	SK Bupati Nomor 292 Tahun 2023
4	Restitusi BPHTB atas nama Chrisna Harimurti dan kawan-kawan (8 Orang)	BPKPAD	57.250.750,00	SK Bupati Nomor 292 Tahun 2023
5	Restitusi BPHTB atas nama Aziz Muslim dan kawan-kawan (6 Orang)	BPKPAD	117.193.100,00	SK Bupati Nomor 368 Tahun 2023
6	Restitusi BPHTB atas nama Emi Sugiarti	BPKPAD	1.086.665,00	SK Bupati Nomor 368 Tahun 2023
7	Restitusi BPHTB atas nama Ingenida Hadning dan kawan-kawan (16 orang)	BPKPAD	170.742.810,00	SK Bupati Nomor 515 Tahun 2023
8	Bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk memfasilitasi keberangkatan 9 orang guna mendampingi dan mengantar calon penerima bansos	Dinas Soaial	14.010.800,00	SK Bupati Nomor Tahun 2023
9	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan satu orang terlantar di RSUD Saras Adyatma selama 7 hari	Dinas Soaial	2.607.640,00	SK Bupati Nomor 110 Tahun 2023
10	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan rehabilitasi 2 orang pecandu narkoba dari bulan Oktober s/d Desember 2022	Dinas Soaial	16.920.000,00	SK Bupati Nomor 110 Tahun 2023
11	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya memfalitasi keberangkatan 4 orang guna mendampingi dan mengantar calon penerima bantuan	Dinas Soaial	2.304.600,00	SK Bupati Nomor 185 Tahun 2023

12	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi pembiayaan program pendampingan dan perawatan berjalan korban pecandu dan pengguna NAPZA	Dinas Soaial	6.000.000,00	SK Bupati Nomor 314 Tahun 2023
13	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya kebutuhan perawatan selama 3 bulan an Warsidi	Dinas Soaial	2.625.000,00	SK Bupati Nomor 330 Tahun 2023
14	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi keberangkatan 3 orang pendampingan dan penjemput penerima bansos	Dinas Soaial	5.607.000,00	SK Bupati Nomor 330 Tahun 2023
15	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi keberangkatan 3 orang pendampingan dan penjemput calon penerima bansos	Dinas Soaial	2.105.000,00	SK Bupati Nomor 385 Tahun 2023
16	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi keberangkatan 3 orang pendampingan dan mengantar calon penerima manfaat rehabilitasi sosial sebanyak satu orang ke Sentra Margo Laras Pati Jawa Tengah	Dinas Soaial	2.304.600,00	SK Bupati Nomor 405 Tahun 2023
17	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi keberangkatan 3 orang pendampingan dan penjemputan keputungan calon penerima manfaat rehabilitasi sosial sebanyak dua orang ke Sentra Margo Laras Pati Jawa Tengah	Dinas Soaial	2.718.000,00	SK Bupati Nomor 427 Tahun 2023
18	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi keberangkatan 3 orang pendampingan dan penjemput calon penerima bansos	Dinas Soaial	2.238.100,00	SK Bupati Nomor 257 Tahun 2023
19	Bansos jaring pengaman sosial untuk biaya perawatan memfasilitasi keberangkatan 3 orang pendampingan dan penjemput calon penerima bansos	Dinas Soaial	2.255.000,00	SK Bupati Nomor 282 Tahun 2023
20	Untuk pengelolaan sampah pada masa darurat sampah di Kabupaten Bantul	DLH	411.651.500,00	SK Bupati Nomor 355 Tahun 2023
21	Untuk pengelolaan sampah pada masa status darurat sampah di destinasi wisata di Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata	47.455.000,00	SK Bupati Nomor 363 Tahun 2023
22	Untuk patroli gabungan operasi sampah pada masa darurat sampah di Kabupaten Bantul	Sat Pol PP	110.092.500,00	SK Bupati Nomor 363 Tahun 2023
23	Untuk operasi tangkap tangan (OTT) sampah di Kabupaten Bantul	Sat Pol PP	31.300.000,00	SK Bupati Nomor 363 Tahun 2023
24	Biaya perawatan medis orang terlantar di RS Panembahan Senopati Bantul di RS Adyata selama 7 hari dan biaya pemulasaran jenazah terlantar di RSPS		2.273.000,00	SK Bupati Nomor 138 Tahun 2023
	Jumlah		1.122.989.975,00	

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	342.301.805.497,00	342.301.803.637,00	100,00	309.515.184.340,00

Rincian belanja transfer adalah :		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kalurahan	30.677.040.097,00	30.677.039.097,00	100,00	26.103.398.250,00
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Kalurahan	311.624.765.400,00	311.624.764.540,00	100,00	283.411.786.090,00
	Jumlah	342.301.805.497,00	342.301.803.637,00	100,00	309.515.184.340,00

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pos belanja transfer adalah :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kalurahan	30.677.040.097,00	30.677.039.097,00	100,00	26.103.398.250,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke seluruh Kalurahan selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berupa pembagian hasil pajak dan bagi hasil retribusi yang ditentukan oleh peraturan perundangan dan pembagiannya diformulasikan sesuai dengan hasil pendapatan perwilayah, rincian sebagai berikut:

	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kalurahan	26.764.871.787,00	26.764.870.787,00	100,00	22.191.229.940,00
5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kalurahan	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	100,00	3.912.168.310,00
	Jumlah	30.677.040.097,00	30.677.039.097,00	100,00	26.103.398.250,00

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 dan 2022 Kepada Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :

Nomor	KALURAHAN	BAGI HASIL PAJAK 2023		BAGI HASIL PAJAK 2022	
		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	Pundong				
	Seloharjo	234.116.000,00	234.116.000,00	205.989.200,00	205.989.200,00
	Panjangrejo	254.616.000,00	254.616.000,00	226.370.800,00	226.370.800,00
	Sri Hardono	281.616.000,00	281.616.000,00	218.582.100,00	218.582.100,00
2	Pandak				
	Catuharjo	243.964.000,00	243.964.000,00	210.397.700,00	210.397.700,00
	Triharjo	299.095.000,00	299.095.000,00	242.132.700,00	242.132.700,00
	Gilangharjo	331.710.000,00	331.710.000,00	264.061.800,00	264.061.800,00
3	Wijirejo	285.987.000,00	285.987.000,00	244.928.900,00	244.928.900,00
	Kasih				
	Bangujiwo	881.741.000,00	881.741.000,00	753.194.700,00	753.194.700,00
	Tirtonirmolo	536.905.000,00	536.905.000,00	427.862.100,00	427.862.100,00
4	Tamantirto	694.115.000,00	694.115.000,00	556.827.000,00	556.827.000,00
	Ngestiharjo	907.003.000,00	907.003.000,00	766.938.700,00	766.938.700,00
	Sanden				
	Gadingsari	233.796.000,00	233.796.000,00	216.462.900,00	216.462.900,00
5	Gadingharjo	253.712.000,00	253.712.000,00	196.523.400,00	196.523.400,00
	Srigading	292.022.000,00	292.022.000,00	235.251.400,00	235.251.400,00
	Murtigading	286.152.000,00	286.152.000,00	226.247.200,00	226.247.200,00
	Bantul				
6	Palbapang	330.602.000,00	330.602.000,00	278.638.300,00	278.638.300,00
	Ringinharjo	268.415.000,00	268.414.000,00	253.234.700,00	253.234.700,00
	Bantul	505.975.000,00	505.975.000,00	374.012.900,00	374.012.900,00
	Trirenggo	453.019.000,00	453.019.000,00	346.336.300,00	346.336.300,00
6	Sabdodadi	302.921.000,00	302.921.000,00	246.618.200,00	246.618.200,00
	Sewon				
	Pendowoharjo	510.769.787,00	510.769.787,00	384.950.240,00	384.950.240,00
	Timbulharjo	563.161.000,00	563.161.000,00	464.424.000,00	464.424.000,00

	Bangunharjo	795.317.000,00	795.317.000,00	658.356.200,00	658.356.200,00
	Panggungharjo	638.575.000,00	638.575.000,00	500.111.600,00	500.111.600,00
7	Banguntapan				
	Baturetno	593.603.000,00	593.603.000,00	474.117.300,00	474.117.300,00
	Banguntapan	1.003.493.000,00	1.003.493.000,00	856.833.400,00	856.833.400,00
	Jagalan	212.541.000,00	212.541.000,00	201.485.700,00	201.485.700,00
	Singosaren	287.681.000,00	287.681.000,00	217.184.300,00	217.184.300,00
	Jambitan	425.793.000,00	425.793.000,00	315.072.700,00	315.072.700,00
	Potorono	575.443.000,00	575.443.000,00	456.496.800,00	456.496.800,00
	Tamanan	521.982.000,00	521.982.000,00	401.024.100,00	401.024.100,00
	Wirokerten	541.472.000,00	541.472.000,00	413.377.500,00	413.377.500,00
8	Imogiri				
	Selopamioro	250.895.000,00	250.895.000,00	200.999.900,00	200.999.900,00
	Sriharjo	248.792.000,00	248.792.000,00	204.038.800,00	204.038.800,00
	Wukirsari	299.265.000,00	299.265.000,00	223.500.200,00	223.500.200,00
	Kebonagung	226.034.000,00	226.034.000,00	190.639.100,00	190.639.100,00
	Karangtengah	211.352.000,00	211.352.000,00	198.871.500,00	198.871.500,00
	Girirejo	213.217.000,00	213.217.000,00	194.422.100,00	194.422.100,00
	Karangtalun	231.617.000,00	231.617.000,00	200.608.600,00	200.608.600,00
	Imogiri	260.401.000,00	260.401.000,00	198.555.100,00	198.555.100,00
9	Dlingo				
	Mangunan	211.677.000,00	211.677.000,00	200.754.900,00	200.754.900,00
	Muntuk	200.380.000,00	200.380.000,00	189.353.200,00	189.353.200,00
	Dlingo	197.371.000,00	197.371.000,00	187.440.700,00	187.440.700,00
	Temuwuh	215.864.000,00	215.864.000,00	191.927.700,00	191.927.700,00
	Terong	208.075.000,00	208.075.000,00	197.536.500,00	197.536.500,00
	Jatimulyo	199.713.000,00	199.713.000,00	186.078.500,00	186.078.500,00
10	Srandakan				
	Poncosari	316.496.000,00	316.496.000,00	243.977.700,00	243.977.700,00
	Trimurti	254.758.000,00	254.758.000,00	236.484.300,00	236.484.300,00
11	Kretek				
	Tirtomulyo	218.979.000,00	218.979.000,00	198.502.000,00	198.502.000,00
	Parangtritis	254.734.000,00	254.734.000,00	217.552.200,00	217.552.200,00
	Donotirto	264.684.000,00	264.684.000,00	218.843.900,00	218.843.900,00
	Tirtosari	203.931.000,00	203.931.000,00	189.845.200,00	189.845.200,00
	Tirtohargo	205.225.000,00	205.225.000,00	193.406.200,00	193.406.200,00
12	Jetis				
	Patalan	299.301.000,00	299.301.000,00	232.666.200,00	232.666.200,00
	Canden	248.634.000,00	248.634.000,00	215.636.100,00	215.636.100,00
	Sumber Agung	296.023.000,00	296.023.000,00	254.702.300,00	254.702.300,00
	Trimulyo	311.101.000,00	311.101.000,00	259.636.000,00	259.636.000,00
13	Pajangan				
	Triwidadi	281.396.000,00	281.396.000,00	266.399.500,00	266.399.500,00

	Sendangsari	305.021.000,00	305.021.000,00	283.429.800,00	283.429.800,00
	Guwosari	293.380.000,00	293.380.000,00	271.795.600,00	271.795.600,00
14	Piyungan				
	Sitimulyo	486.484.000,00	486.484.000,00	370.296.700,00	370.296.700,00
	Srimulyo	428.029.000,00	428.029.000,00	319.400.900,00	319.400.900,00
	Srimartani	347.654.000,00	347.654.000,00	254.751.200,00	254.751.200,00
15	Sedayu				
	Argodadi	314.970.000,00	314.970.000,00	294.604.800,00	294.604.800,00
	Argorejo	471.329.000,00	471.329.000,00	378.728.500,00	378.728.500,00
	Argosari	317.543.000,00	317.543.000,00	271.250.200,00	271.250.200,00
	Argomulyo	564.391.000,00	564.391.000,00	451.979.100,00	451.979.100,00
16	Pleret				
	Wonokromo	481.989.000,00	481.989.000,00	310.306.800,00	310.306.800,00
	Pleret	345.085.000,00	345.085.000,00	327.020.700,00	327.020.700,00
	Segoroyoso	238.070.000,00	238.070.000,00	220.450.500,00	220.450.500,00
	Bawuran	286.891.000,00	286.891.000,00	243.772.800,00	243.772.800,00
	Wonolelo	205.460.000,00	205.460.000,00	193.388.900,00	193.388.900,00
17	Bambanglipuro				
	Sidomulyo	265.388.000,00	265.388.000,00	221.823.200,00	221.823.200,00
	Mulyodadi	251.500.000,00	251.500.000,00	217.610.400,00	217.610.400,00
	Sumber Mulyo	284.460.000,00	284.460.000,00	234.196.600,00	234.196.600,00
	Jumlah	26.764.871.787,00	26.764.870.787,00	22.191.229.940,00	22.191.229.940,00
	Kalurahan	BAGI HASIL RETRIBUSI		BAGI HASIL RETRIBUSI	
		ANGGARAN 2023(Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	Pundong				
	Seloharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Panjangrejo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sri Hardono	33.898.300,00	33.898.300,00	33.898.300,00	33.898.300,00
2	Pandak				
	Catuharjo	32.106.200,00	32.106.200,00	32.106.200,00	32.106.200,00
	Triharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Gilangharjo	33.568.300,00	33.568.300,00	33.568.300,00	33.568.300,00
	Wijirejo	36.676.300,00	36.676.300,00	36.676.300,00	36.676.300,00
3	Kasih				
	Bangujiwo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Tirtonirmolo	44.747.300,00	44.747.300,00	44.747.300,00	44.747.300,00
	Tamantirto	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Ngestiharjo	32.080.900,00	32.080.900,00	32.080.900,00	32.080.900,00
4	Sanden				
	Gadingsari	104.127.300,00	104.127.300,00	104.127.300,00	104.127.300,00
	Gadingharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Srigading	103.287.300,00	103.287.300,00	103.287.300,00	103.287.300,00

	Murtigading	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
5	Bantul				
	Palbapang	32.547.300,00	32.547.300,00	32.547.300,00	32.547.300,00
	Ringinharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Bantul	60.617.300,00	60.617.300,00	60.617.300,00	60.617.300,00
	Trirenggo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sabdodadi	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
6	Sewon				
	Pendowoharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Timbulharjo	35.098.300,00	35.098.300,00	35.098.300,00	35.098.300,00
	Bangunharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Panggungharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
7	Banguntapan				
	Baturetno	33.693.300,00	33.693.300,00	33.693.300,00	33.693.300,00
	Banguntapan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Jagalan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Singosaren	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Jambitan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Potorono	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Tamanan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Wirokerten	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
8	Imogiri				
	Selopamioro	32.924.300,00	32.924.300,00	32.924.300,00	32.924.300,00
	Sriharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Wukirsari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Kebonagung	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Karangtengah	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Girirejo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Karangtalun	33.711.300,00	33.711.300,00	33.711.300,00	33.711.300,00
	Imogiri	50.847.300,00	50.847.300,00	50.847.300,00	50.847.300,00
9	Dlingo				
	Mangunan	87.767.300,00	87.767.300,00	87.767.300,00	87.767.300,00
	Muntuk	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Dlingo	32.616.300,00	32.616.300,00	32.616.300,00	32.616.300,00
	Temuwuh	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Terong	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Jatimulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
10	Srandakan				
	Poncosari	101.937.300,00	101.937.300,00	101.937.300,00	101.937.300,00
	Trimurti	33.738.300,00	33.738.300,00	33.738.300,00	33.738.300,00
11	Kreték				
	Tirtomulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Parangtritis	1.181.297.300,00	1.181.297.300,00	1.181.297.300,00	1.181.297.300,00

	Donotirto	37.773.300,00	37.773.300,00	37.773.300,00	37.773.300,00
	Tirtosari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Tirtohargo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
12	Jetis				
	Patalan	31.338.210,00	31.338.210,00	31.338.210,00	31.338.210,00
	Canden	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sumber Agung	35.217.300,00	35.217.300,00	35.217.300,00	35.217.300,00
	Trimulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
13	Pajangan				
	Triwidadi	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sendangsari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Guwosari	40.523.300,00	40.523.300,00	40.523.300,00	40.523.300,00
14	Piyungan				
	Sitimulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Srimulyo	50.877.300,00	50.877.300,00	50.877.300,00	50.877.300,00
	Srimartani	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
15	Sedayu				
	Argodadi	32.347.300,00	32.347.300,00	32.347.300,00	32.347.300,00
	Argorejo	32.659.300,00	32.659.300,00	32.659.300,00	32.659.300,00
	Argosari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Argomulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
16	Pleret				
	Wonokromo	33.884.300,00	33.884.300,00	33.884.300,00	33.884.300,00
	Pleret	37.363.300,00	37.363.300,00	37.363.300,00	37.363.300,00
	Segoroyoso	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Bawuran	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Wonolelo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
17	Bambanglipuro				
	Sidomulyo	32.776.300,00	32.776.300,00	32.776.300,00	32.776.300,00
	Mulyodadi	31.582.700,00	31.582.700,00	31.582.700,00	31.582.700,00
	Sumber Mulyo	32.754.300,00	32.754.300,00	32.754.300,00	32.754.300,00
	Jumlah	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	311.624.765.400,00	311.624.764.540,00	100,00	283.411.786.090,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah :

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	100.152.000,00	100.151.140,00	100,00	99.707.090,00
5.1.2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan	97.236.088.400,00	97.236.088.400,00	100,00	94.047.000.000,00

5.1.2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan	214.288.525.000,00	214.288.525.000,00	100,00	189.265.079.000,00
	Jumlah	311.624.765.400,00	311.624.764.540,00	100,00	283.411.786.090,00

5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		100.152.000,00	100.151.140,00	100,00	99.707.090,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi tahun 2023 digunakan untuk sharing kontribusi pengelolaan IPAL Sewon

5.1.2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		97.236.088.400,00	97.236.088.400,00	100,00	94.047.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan tahun 2023 digunakan untuk pembayaran Alokasi Dana Kalurahan (ADD) bagi 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul

Adapun rincian dari Alokasi Dana Kalurahan tahun 2023 adalah :

Nomor	Nama Kalurahan	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
		97.236.088.400,00	97.236.088.400,00	100,00	94.047.000.000,00
1	- Kalurahan Poncosari Srandakan	1.700.949.100,00	1.700.949.100,00	100,00	1.650.794.000,00
2	- Kalurahan Trimurti	1.534.684.400,00	1.534.684.400,00	100,00	1.488.172.000,00
3	- Kalurahan Gadingasri	1.425.999.500,00	1.425.999.500,00	100,00	1.380.811.000,00
4	- Kalurahan Gadingharjo	935.697.900,00	935.697.900,00	100,00	898.973.000,00
5	- Kalurahan Srigading	1.397.943.500,00	1.397.943.500,00	100,00	1.351.516.000,00
6	- Kalurahan Murtigading	1.308.705.600,00	1.308.705.600,00	100,00	1.261.897.000,00
7	- Kalurahan Tirtomulyo	1.237.430.200,00	1.237.430.200,00	100,00	1.192.954.000,00
8	- Kalurahan Parangtritis	1.153.078.700,00	1.153.078.700,00	100,00	1.112.695.000,00
9	- Kalurahan Donotirto	1.184.353.900,00	1.184.353.900,00	100,00	1.141.099.000,00
10	- Kalurahan Tirtosari	939.581.300,00	939.581.300,00	100,00	902.252.000,00
11	- Kalurahan Tirtoharjo	935.138.600,00	935.138.600,00	100,00	899.883.000,00
12	- Kalurahan Seloharjo	1.439.744.300,00	1.439.744.300,00	100,00	1.394.490.000,00
13	- Kalurahan Panjangrejo	1.342.170.900,00	1.342.170.900,00	100,00	1.295.948.000,00
14	- Kalurahan Srihardono	1.470.597.800,00	1.470.597.800,00	100,00	1.422.729.000,00
15	- Kalurahan Sidomulyo	1.424.544.700,00	1.424.544.700,00	100,00	1.378.750.000,00
16	- Kalurahan Mulyodadi	1.299.540.300,00	1.299.540.300,00	100,00	1.255.708.000,00
17	- Kalurahan Sumbermulyo	1.455.381.700,00	1.455.381.700,00	100,00	1.408.299.000,00
18	- Kalurahan Caturharjo	1.332.715.000,00	1.332.715.000,00	100,00	1.291.149.000,00
19	- Kalurahan Triharjo	1.320.346.700,00	1.320.346.700,00	100,00	1.279.033.000,00
20	- Kalurahan Gilangharjo	1.508.878.900,00	1.508.878.900,00	100,00	1.463.945.000,00
21	- Kalurahan Wijirejo	1.174.178.300,00	1.174.178.300,00	100,00	1.134.491.000,00
22	- Kalurahan Triwidadi	1.689.878.600,00	1.689.878.600,00	100,00	1.642.406.000,00

23	- Kalurahan Sendangsari	1.602.297.900,00	1.602.297.900,00	100,00	1.556.260.000,00
24	- Kalurahan Guwosari	1.447.036.200,00	1.447.036.200,00	100,00	1.401.890.000,00
25	- Kalurahan Palbapang	1.198.424.100,00	1.198.424.100,00	100,00	1.156.283.000,00
26	- Kalurahan Ringinharjo	967.633.900,00	967.633.900,00	100,00	930.532.000,00
27	- Kalurahan BANTUL	1.130.505.600,00	1.130.505.600,00	100,00	1.088.403.000,00
28	- Kalurahan Trirenggo	1.481.301.900,00	1.481.301.900,00	100,00	1.434.138.000,00
29	- Kalurahan Sabdodadi	936.850.200,00	936.850.200,00	100,00	901.364.000,00
30	- Kalurahan Patalan	1.451.779.900,00	1.451.779.900,00	100,00	1.401.455.000,00
31	- Kalurahan Canden	1.345.857.800,00	1.345.857.800,00	100,00	1.301.509.000,00
32	- Kalurahan Sumberagung	1.436.451.900,00	1.436.451.900,00	100,00	1.389.952.000,00
33	- Kalurahan Trimulyo	1.403.241.300,00	1.403.241.300,00	100,00	1.358.478.000,00
34	- Kalurahan Selopamioro	1.855.031.600,00	1.855.031.600,00	100,00	1.806.233.000,00
35	- Kalurahan Sriharjo	1.239.801.500,00	1.239.801.500,00	100,00	1.197.461.000,00
36	- Kalurahan Wukirsari	1.602.417.600,00	1.602.417.600,00	100,00	1.556.912.000,00
37	- Kalurahan Kebonagung	934.399.200,00	934.399.200,00	100,00	899.883.000,00
38	- Kalurahan Karangtengah	979.544.400,00	979.544.400,00	100,00	942.146.000,00
39	- Kalurahan Girirejo	942.483.600,00	942.483.600,00	100,00	908.259.000,00
40	- Kalurahan Karangtalun	934.517.300,00	934.517.300,00	100,00	899.878.000,00
41	- Kalurahan Imogiri	936.142.700,00	936.142.700,00	100,00	902.669.000,00
42	- Kalurahan Mangunan	1.027.028.800,00	1.027.028.800,00	100,00	989.332.000,00
43	- Kalurahan Muntuk	1.344.571.000,00	1.344.571.000,00	100,00	1.302.586.000,00
44	- Kalurahan Dlingo	1.141.539.600,00	1.141.539.600,00	100,00	1.101.225.000,00
45	- Kalurahan Temuwuh	1.204.776.100,00	1.204.776.100,00	100,00	1.163.185.000,00
46	- Kalurahan Terong	1.071.273.200,00	1.071.273.200,00	100,00	1.031.650.000,00
47	- Kalurahan Jatimulyo	1.230.099.300,00	1.230.099.300,00	100,00	1.190.540.000,00
48	- Kalurahan Baturetno	1.135.586.400,00	1.135.586.400,00	100,00	1.094.842.000,00
49	- Kalurahan Banguntapan	1.533.047.700,00	1.533.047.700,00	100,00	1.487.521.000,00
50	- Kalurahan Jagalan	935.260.500,00	935.260.500,00	100,00	903.391.000,00
51	- Kalurahan Singosaren	935.211.300,00	935.211.300,00	100,00	903.274.000,00
52	- Kalurahan Jambidan	1.078.469.900,00	1.078.469.900,00	100,00	1.039.995.000,00
53	- Kalurahan Potorono	1.175.522.500,00	1.175.522.500,00	100,00	1.134.227.000,00
54	- Kalurahan Tamanan	1.070.868.100,00	1.070.868.100,00	100,00	1.029.880.000,00
55	- Kalurahan Wirokerten	1.159.416.600,00	1.159.416.600,00	100,00	1.120.037.000,00
56	- Kalurahan Wonokromo	1.261.138.200,00	1.261.138.200,00	100,00	1.218.904.000,00
57	- Kalurahan Pleret	1.269.087.100,00	1.269.087.100,00	100,00	1.226.087.000,00
58	- Kalurahan Segoroyoso	1.166.437.400,00	1.166.437.400,00	100,00	1.127.396.000,00

59	- Kalurahan Bawuran	1.073.401.000,00	1.073.401.000,00	100,00	1.035.983.000,00
60	- Kalurahan Wonolelo	975.783.200,00	975.783.200,00	100,00	938.883.000,00
61	- Kalurahan Sitimulyo	1.609.809.200,00	1.609.809.200,00	100,00	1.560.723.000,00
62	- Kalurahan Srimulyo	1.733.576.800,00	1.733.576.800,00	100,00	1.683.882.000,00
63	- Kalurahan Srimartani	1.544.863.300,00	1.544.863.300,00	100,00	1.498.861.000,00
64	- Kalurahan Pendowoharjo	1.486.792.100,00	1.486.792.100,00	100,00	1.439.992.000,00
65	- Kalurahan Timbulharjo	1.553.145.900,00	1.553.145.900,00	100,00	1.506.570.000,00
66	- Kalurahan Bangunharjo	1.583.296.800,00	1.583.296.800,00	100,00	1.535.968.000,00
67	- Kalurahan Panggungharjo	1.470.567.400,00	1.470.567.400,00	100,00	1.423.231.000,00
68	- Kalurahan Bangunjiwo	1.840.583.200,00	1.840.583.200,00	100,00	1.791.951.000,00
69	- Kalurahan Tirtonirmolo	1.397.316.200,00	1.397.316.200,00	100,00	1.354.307.000,00
70	- Kalurahan Tamantirto	1.352.088.600,00	1.352.088.600,00	100,00	1.310.123.000,00
71	- Kalurahan Ngestiharjo	1.470.768.900,00	1.470.768.900,00	100,00	1.427.608.000,00
72	- Kalurahan Argodadi	1.453.471.600,00	1.453.471.600,00	100,00	1.410.410.000,00
73	- Kalurahan Argorejo	1.307.970.200,00	1.307.970.200,00	100,00	1.263.741.000,00
74	- Kalurahan Argosari	1.215.330.100,00	1.215.330.100,00	100,00	1.174.355.000,00
75	- Kalurahan Argomulyo	1.390.731.700,00	1.390.731.700,00	100,00	1.344.641.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan	214.288.525.000,00	214.288.525.000,00	100,00	189.265.079.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan digunakan untuk :

Nomor	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara lomba Kalurahan	-	-	-	300.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus untuk 75 Kalurahan se Kabupaten Bantul	26.719.500.000,00	26.719.500.000,00	100,00	24.714.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus untuk Pedukuhan se Kabupaten Bantul	46.650.000.000,00	46.650.000.000,00	100,00	46.650.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.900.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Khusus P2MD	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Khusus PILURDES	-	-	-	4.893.382.000,00
7	Bantuan Keuangan Khusus TMMD	3.640.000.000,00	3.640.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Khusus Rehap Pasar Kalurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	860.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Khusus Dana Kalurahan	126.479.025.000,00	126.479.025.000,00	100,00	101.247.697.000,00
10	Bantuan Keuangan Khusus Dana Insentif Kalurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	250.000.000,00
11	Reward Dikal	-	-	-	1.250.000.000,00
12	Bantuan Sarpras Lapangan Desa Timbulharjo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	214.288.525.000,00	214.288.525.000,00	100,00	189.265.079.000,00

Penjelasan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan sebagai berikut :

Bantuan Keuangan Khusus tahun 2023 untuk 75 Kalurahan se Kabupaten Bantul

Dasar Pengeluaran belanjanya adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 20232 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Rincian Bantuan Keuangan Khusus tahun 2023 dan 2022 untuk 75 Kalurahan se Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023 BERDASARKAN SK	REALISASI 2022 BERDASARKAN SK
1	Kalurahan Poncosari	105.000.000	205.000.000
2	Kalurahan Trimurti	345.000.000	105.000.000
3	Kalurahan Gadingsari	162.500.000	152.500.000
4	Kalurahan Gadingharjo	-	30.000.000
5	Kalurahan Srigading	259.000.000	60.000.000
6	Kalurahan Murtigading	220.000.000	80.000.000
7	Kalurahan Tirtohargo	150.000.000	150.000.000
8	Kalurahan Parangtritis	100.000.000	90.000.000
9	Kalurahan Donotirto	260.000.000	310.000.000
10	Kalurahan Tirtomulyo	430.000.000	70.000.000
11	Kalurahan Tirtosari	60.000.000	130.000.000
12	Kalurahan Panjangrejo	155.000.000	250.000.000
13	Kalurahan Sidomulyo	500.000.000	460.000.000
14	Kalurahan Sumbermulyo	220.000.000	330.000.000
15	Kalurahan Mulyodadi	165.000.000	585.000.000
16	Kalurahan Caturharjo	180.000.000	260.000.000
17	Kalurahan Gilangharjo	565.000.000	445.000.000
18	Kalurahan Wijirejo	220.000.000	310.000.000
19	Kalurahan Palbapang	625.000.000	490.000.000
20	Kalurahan Tirirenggo	300.000.000	40.000.000
21	Kalurahan Sabdodadi	100.000.000	170.000.000
22	Kalurahan Patalan	125.000.000	450.000.000
23	Kalurahan Sumberagung	545.000.000	70.000.000
24	Kalurahan Selopamioro	920.000.000	535.000.000
25	Kalurahan Sriharjo	140.000.000	331.500.000
26	Kalurahan Karangtalun	120.000.000	30.000.000
27	Kalurahan Imogiri	350.000.000	280.000.000
28	Kalurahan Wukirsari	2.143.000.000	1.205.000.000

29	Kalurahan Jatimulyo	620.000.000	170.000.000
30	Kalurahan Mangunan	740.000.000	1.060.000.000
31	Kalurahan Temuwuh	400.000.000	780.000.000
32	Kalurahan Terong	260.000.000	195.000.000
33	Kalurahan Muntuk	1.105.000.000	508.500.000
34	Kalurahan Wonokromo	240.000.000	55.000.000
35	Kalurahan Pleret	630.000.000	455.000.000
36	Kalurahan Segoroyoso	210.000.000	190.000.000
37	Kalurahan Bawuran	120.000.000	120.000.000
38	Kalurahan Wonolelo	300.000.000	165.000.000
39	Kalurahan Sitimulyo	330.000.000	320.000.000
40	Kalurahan Srimulyo	350.000.000	355.000.000
41	Kalurahan Jagalan	-	55.000.000
42	Kalurahan Potorono	90.000.000	85.000.000
43	Kalurahan Banguntapan	275.000.000	320.000.000
44	Kalurahan Tamanan	270.000.000	495.000.000
45	Kalurahan Pendowoharjo	130.000.000	221.000.000
46	Kalurahan Panggungharjo	395.000.000	385.000.000
47	Kalurahan Tirtonirmolo	825.000.000	1.335.000.000
48	Kalurahan Bangunjiwo	1.170.000.000	895.000.000
49	Kalurahan Triwidadi	410.000.000	327.000.000
50	Kalurahan Sendangsari	280.000.000	595.000.000
51	Kalurahan Guwosari	340.000.000	185.000.000
52	Kalurahan Argodadi	355.000.000	130.000.000
53	Kalurahan Argosari	110.000.000	50.000.000
54	Kalurahan Argomulyo	665.000.000	680.000.000
55	Kalurahan Argorejo	150.000.000	155.000.000
56	Kalurahan Tamantirto	200.000.000	247.000.000
57	Kalurahan Karangtengah	280.000.000	400.000.000
58	Kalurahan Girirejo	120.000.000	185.000.000
59	Kalurahan Seloharjo	90.000.000	505.000.000
60	Kalurahan Timbulharjo	370.000.000	40.000.000
61	Kalurahan Ngestiharjo	505.000.000,00	552.000.000,00
62	Kalurahan Bangunharjo	830.000.000,00	1.066.000.000,00
63	Kalurahan Timbulharjo	370.000.000,00	200.000.000,00
64	Kalurahan Baturetno	270.000.000,00	227.000.000,00

65	Kalurahan Jambidan	395.000.000,00	230.000.000,00
66	Kalurahan Srimartani	180.000.000,00	747.500.000,00
67	Kalurahan Dlingo	180.000.000,00	840.000.000,00
68	Kalurahan Girirejo	120.000.000,00	30.000.000,00
69	Kalurahan Bantul	270.000.000,00	639.000.000,00
70	Kalurahan Trimulyo	793.000.000,00	100.000.000,00
71	Kalurahan Canden	497.000.000,00	205.000.000,00
72	Kalurahan Trharjo	340.000.000,00	210.000.000,00
73	Kalurahan Srihardono	425.000.000,00	130.000.000,00
74	Kalurahan Wirokerten	250.000.000,00	250.000.000,00
	Jumlah	26.719.500.000,00	24.714.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus tahun 2023 dan 2022 untuk Pedukuhan se Kabupaten Bantul

Daftar peneriman bantuan keuangan adalah :

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023 BERDASARKAN SK	REALISASI 2022 BERDASARKAN SK
1	Kalurahan Argodadi	300.000.000	420.000.000
2	Kalurahan Argorejo	400.000.000	390.000.000
3	Kalurahan Argosari	400.000.000	390.000.000
4	Kalurahan Argomulyo	300.000.000	420.000.000
5	Kalurahan Triwidadi	650.000.000	660.000.000
6	Kalurahan Sendangsari	550.000.000	540.000.000
7	Kalurahan Guwosari	450.000.000	450.000.000
8	Kalurahan Tamantirto	300.000.000	300.000.000
9	Kalurahan Bangunjiwo	400.000.000	570.000.000
10	Kalurahan Ngestiharjo	250.000.000	360.000.000
11	Kalurahan Tirtonirmolo	350.000.000	360.000.000
12	Kalurahan Bangunharjo	550.000.000	510.000.000
13	Kalurahan Panggungharjo	300.000.000	420.000.000
14	Kalurahan Pendowoharjo	450.000.000	480.000.000
15	Kalurahan Timbulharjo	450.000.000	480.000.000
16	Kalurahan Tamanan	250.000.000	270.000.000
17	Kalurahan Singosaren	100.000.000	90.000.000
18	Kalurahan Banguntapan	350.000.000	330.000.000
19	Kalurahan Jambidan	150.000.000	210.000.000
20	Kalurahan Potorono	250.000.000	270.000.000

21	Kalurahan Jagalan	50.000.000	60.000.000
22	Kalurahan Wirokerten	150.000.000	240.000.000
23	Kalurahan Baturetno	250.000.000	240.000.000
24	Kalurahan Srimartani	500.000.000	510.000.000
25	Kalurahan Srimulyo	650.000.000	660.000.000
26	Kalurahan Sitimulyo	600.000.000	630.000.000
27	Kalurahan Segoroyoso	250.000.000	270.000.000
28	Kalurahan Wonokromo	350.000.000	360.000.000
29	Kalurahan Wonolelo	250.000.000	240.000.000
30	Kalurahan Pleret	300.000.000	330.000.000
31	Kalurahan Bawuran	200.000.000	210.000.000
32	Kalurahan Terong	250.000.000	270.000.000
33	Kalurahan Mangunan	200.000.000	180.000.000
34	Kalurahan Temuwuh	350.000.000	360.000.000
35	Kalurahan Dlingo	300.000.000	300.000.000
36	Kalurahan Jatimulyo	300.000.000	300.000.000
37	Kalurahan Muntuk	300.000.000	330.000.000
38	Kalurahan Karangtengah	200.000.000	180.000.000
39	Kalurahan Imogiri	150.000.000	120.000.000
40	Kalurahan Karangtalun	150.000.000	150.000.000
41	Kalurahan Kebonagung	150.000.000	150.000.000
42	Kalurahan Sriharjo	400.000.000	390.000.000
43	Kalurahan Girirejo	150.000.000	150.000.000
44	Kalurahan Selopamioro	550.000.000	540.000.000
45	Kalurahan Wukirsari	450.000.000	480.000.000
46	Kalurahan Sumberagung	500.000.000	510.000.000
47	Kalurahan Patalan	600.000.000	600.000.000
48	Kalurahan Canden	450.000.000	450.000.000
49	Kalurahan Trimulyo	350.000.000	360.000.000
50	Kalurahan Ringinharjo	200.000.000	180.000.000
51	Kalurahan Trirenggo	500.000.000	510.000.000
52	Kalurahan Palbapang	300.000.000	300.000.000
53	Kalurahan Bantul	350.000.000	360.000.000
54	Kalurahan Sabdodadi	150.000.000	150.000.000
55	Kalurahan Gilangharjo	450.000.000	450.000.000
56	Kalurahan Triharjo	300.000.000	300.000.000

57	Kalurahan Wijirejo	300.000.000	300.000.000
58	Kalurahan Caturharjo	400.000.000	420.000.000
59	Kalurahan Sumbermulyo	450.000.000	480.000.000
60	Kalurahan Sidomulyo	450.000.000	450.000.000
61	Kalurahan Mulyodadi	400.000.000	420.000.000
62	Kalurahan Srihardono	500.000.000	510.000.000
63	Kalurahan Panjangrejo	450.000.000	480.000.000
64	Kalurahan Seloharjo	450.000.000	480.000.000
65	Kalurahan Donotirto	350.000.000	390.000.000
66	Kalurahan Tirtomulyo	450.000.000	450.000.000
67	Kalurahan Tirtohargo	200.000.000	180.000.000
68	Kalurahan Tirtosari	200.000.000	210.000.000
69	Kalurahan Parangtritis	300.000.000	330.000.000
70	Kalurahan Srigading	600.000.000	600.000.000
71	Kalurahan Gadingharjo	200.000.000	180.000.000
72	Kalurahan Murtigading	500.000.000	540.000.000
73	Kalurahan Gadingsari	500.000.000	540.000.000
74	Kalurahan Poncosari	700.000.000	720.000.000
75	Kalurahan Trimurti	550.000.000	570.000.000
76	Kalurahan Argodadi	400.000.000	280.000.000
77	Kalurahan Argomulyo	400.000.000	280.000.000
78	Kalurahan Triwidadi	450.000.000	440.000.000
79	Kalurahan Guwosari	300.000.000	300.000.000
80	Kalurahan Tamantirto	200.000.000	200.000.000
81	Kalurahan Bangunjiwo	350.000.000	380.000.000
82	Kalurahan Jambidan	250.000.000	140.000.000
83	Kalurahan Wirokerten	250.000.000	160.000.000
84	Kalurahan Srimartani	350.000.000	340.000.000
85	Kalurahan Bawuran	150.000.000	140.000.000
86	Kalurahan Wonolelo	150.000.000	160.000.000
87	Kalurahan Terong	200.000.000	180.000.000
88	Kalurahan Karangtalun	100.000.000	100.000.000
89	Kalurahan Karangtengah	100.000.000	120.000.000
90	Kalurahan Wukirsari	350.000.000	320.000.000
91	Kalurahan Patalan	400.000.000	400.000.000
92	Kalurahan Sumberagung	350.000.000	340.000.000

93	Kalurahan Trimulyo	250.000.000	240.000.000
94	Kalurahan Ringinharjo	100.000.000	120.000.000
95	Kalurahan Palbapang	200.000.000	200.000.000
96	Kalurahan Tirirenggo	350.000.000	340.000.000
97	Kalurahan Bantul	250.000.000	240.000.000
98	Kalurahan Wijirejo	200.000.000	200.000.000
99	Kalurahan Gilangharjo	300.000.000	300.000.000
100	Kalurahan Caturharjo	300.000.000	280.000.000
101	Kalurahan Triharjo	200.000.000	200.000.000
102	Kalurahan Mulyodadi	300.000.000	280.000.000
103	Kalurahan Sidomulyo	300.000.000	300.000.000
104	Kalurahan Tirtohargo	100.000.000	120.000.000
105	Kalurahan Srihardono	350.000.000	340.000.000
106	Kalurahan Panjangrejo	350.000.000	320.000.000
107	Kalurahan Srigading	400.000.000	400.000.000
108	Kalurahan Trimurti	400.000.000	380.000.000
109	Kalurahan Poncosari	500.000.000,00	480.000.000,00
110	Kalurahan Gadingharjo	100.000.000,00	120.000.000,00
111	Kalurahan Murtigading	400.000.000,00	360.000.000,00
112	Kalurahan Seloharjo	350.000.000,00	320.000.000,00
113	Kalurahan Tirtomulyo	300.000.000,00	300.000.000,00
114	Kalurahan Parangtritis	250.000.000,00	220.000.000,00
115	Kalurahan Donotirto	300.000.000,00	260.000.000,00
116	Kalurahan Tirtosari	150.000.000,00	140.000.000,00
117	Kalurahan Sumbermulyo	350.000.000,00	320.000.000,00
118	Kalurahan Sabdodadi	100.000.000,00	100.000.000,00
119	Kalurahan Canden	300.000.000,00	300.000.000,00
120	Kalurahan Selopamioro	350.000.000,00	360.000.000,00
121	Kalurahan Sriharjo	250.000.000	260.000.000,00
122	Kalurahan Girirejo	100.000.000,00	100.000.000,00
123	Kalurahan Kebonagung	100.000.000	100.000.000,00
124	Kalurahan Imogiri	50.000.000,00	80.000.000,00
125	Kalurahan Mangunan	100.000.000	120.000.000,00
126	Kalurahan Muntuk	250.000.000,00	220.000.000,00
127	Kalurahan Temuwuh	250.000.000,00	240.000.000,00
128	Kalurahan Jatimulyo	200.000.000,00	200.000.000,00

129	Kalurahan Wonokromo	250.000.000,00	240.000.000,00
130	Kalurahan Segoroyoso	200.000.000	180.000.000,00
131	Kalurahan Srimulyo	450.000.000	440.000.000,00
132	Kalurahan Baturetno	150.000.000,00	160.000.000,00
133	Kalurahan Banguntapan	200.000.000,00	220.000.000,00
134	Kalurahan Jagalan	50.000.000,00	40.000.000,00
135	Kalurahan Tamanan	200.000.000,00	180.000.000,00
136	Kalurahan Pendowoharjo	350.000.000	320.000.000,00
137	Kalurahan Tirtonirmolo	250.000.000	240.000.000,00
138	Kalurahan Sendangsari	350.000.000	360.000.000,00
139	Kalurahan Argorejo	250.000.000,00	260.000.000,00
140	Kalurahan Argosari	250.000.000,00	260.000.000,00
141	Kalurahan Gadingsari	400.000.000,00	360.000.000,00
142	Kalurahan Dlingo	200.000.000	200.000.000,00
143	Kalurahan Pleret	250.000.000,00	220.000.000,00
144	Kalurahan Sitimulyo	400.000.000,00	420.000.000,00
145	Kalurahan Singosaren	50.000.000,00	60.000.000,00
146	Kalurahan Potorono	200.000.000,00	180.000.000,00
147	Kalurahan Timbulharjo	350.000.000,00	320.000.000,00
148	Kalurahan Bangunharjo	500.000.000	340.000.000,00
149	Kalurahan Panggungharjo	400.000.000	280.000.000,00
150	Kalurahan Ngestiharjo	350.000.000,00	240.000.000,00
	Jumlah	46.650.000.000	46.650.000.000

Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Tanah Kas Kalurahan Tahun 2023 berdasarkan Perbup Nomor 36 tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan tanah kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi tahun anggaran 2023.

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023 BERDASARKAN SK No 36	REALISASI 2022 BERDASARKAN SK
1	Kalurahan Seloharjo	7.040.000,00	7.040.000,00
2	Kalurahan Bantul	61.421.800,00	73.735.000,00
3	Kalurahan Tirirenggo	58.229.150,00	78.124.200,00
4	Kalurahan Sumberagung	44.517.000,00	49.662.500,00
5	Kalurahan Trimulyo	28.175.000,00	37.950.000,00
6	Kalurahan Girirejo	9.960.000,00	9.900.000,00
7	Kalurahan Imogiri	12.968.000,00	12.968.000,00

8	Kalurahan Karangtalun	15.496.000,00	15.496.000,00
9	Kalurahan Sriharjo	28.740.000,00	29.410.000,00
10	Kalurahan Wukirsari	31.768.000,00	33.837.500,00
11	Kalurahan Karangtengah	5.594.000,00	5.726.800,00
12	Kalurahan Keboangung	13.638.000,00	13.562.000,00
13	Kalurahan Selopamioro	44.305.800,00	44.212.500,00
14	Kalurahan Trimurti	27.764.000,00	34.362.500,00
15	Kalurahan Poncosari	20.462.400,00	27.561.600,00
16	Kalurahan Pleret	8.536.000,00	9.700.000,00
17	Kalurahan Bawuran	16.170.000,00	18.375.000,00
18	Kalurahan Wonolelo	5.660.150,00	4.716.000,00
19	Kalurahan Segoroyoso	23.405.800,00	26.597.500,00
20	Kalurahan Wonokromo	30.278.600,00	39.392.500,00
21	Kalurahan Muntuk	32.774.000,00	25.468.000,00
22	Kalurahan Dlingo	37.754.000,00	37.754.000,00
23	Kalurahan Terong	27.330.000,00	20.130.000,00
24	Kalurahan Temuwuh	60.844.000,00	60.844.000,00
25	Kalurahan Mangunan	23.920.000,00	23.920.000,00
26	Kalurahan Jambidan	10.989.000,00	12.487.500,00
27	Kalurahan Jagalan	2.330.000,00	1.375.000,00
28	Kalurahan Potorono	21.253.750,00	28.132.500,00
29	Kalurahan Singosaren	5.460.000,00	6.752.000,00
30	Kalurahan Wirokerten	16.627.600,00	17.992.500,00
31	Kalurahan Ngestiharjo	35.145.250,00	47.338.500,00
32	Kalurahan Bangunjiwo	63.870.400,00	72.580.000,00
33	Kalurahan Timbulharjo	78.608.250,00	105.880.500,00
34	Kalurahan Panggungharjo	36.686.300,00	50.476.800,00
35	Kalurahan Sidomulyo	94.410.750,00	127.165.500,00
36	Kalurahan Srimartani	50.715.000,00	68.310.000,00
37	Kalurahan Srimulyo	60.098.500,00	80.949.000,00
38	Kalurahan Sitimulyo	33.649.000,00	57.487.500,00
39	Kalurahan Caturharjo	31.852.000,00	31.198.000,00
40	Kalurahan Triharjo	29.472.000,00	17.816.000,00
41	Kalurahan Gilangharjo	126.123.550,00	136.369.200,00
42	Kalurahan Wijirejo	49.630.000,00	43.740.000,00
43	Kalurahan Donotirto	46.327.600,00	52.645.000,00

44	Kalurahan Tirtosari	11.814.000,00	13.425.000,00
45	Kalurahan Tamantirto	45.887.600,00	51.895.000,00
46	Kalurahan Tirtonirmolo	34.874.400,00	39.487.500,00
47	Kalurahan Sabdodadi	13.213.200,00	15.015.000,00
48	Kalurahan Palbapang	34.118.700,00	50.433.900,00
49	Kalurahan Jatimulyo	29.558.000,00	28.258.000,00
50	Kalurahan Baturetno	35.858.200,00	48.315.300,00
51	Kalurahan Banguntapan	45.503.850,00	64.132.200,00
52	Kalurahan Tamanan	21.863.800,00	21.786.600,00
53	Kalurahan Argodadi	35.134.000,00	35.410.000,00
54	Kalurahan Argorejo	15.300.000,00	15.754.000,00
55	Kalurahan Argosari	10.397.200,00	11.815.000,00
56	Kalurahan Argomulyo	54.100.900,00	71.266.800,00
57	Kalurahan Bangunharjo	65.905.000,00	77.500.500,00
58	Kalurahan Sumbermulyo	23.789.500,00	32.043.000,00
59	Kalurahan Mulyodadi	34.232.000,00	38.900.000,00
60	Kalurahan Srihardono	81.338.400,00	92.705.000,00
61	Kalurahan Panjangrejo	11.550.000,00	12.325.000,00
62	Kalurahan Canden	28.468.000,00	24.850.000,00
63	Kalurahan Patalan	46.650.450,00	61.155.600,00
64	Kalurahan Guwosari	18.718.000,00	22.228.000,00
65	Kalurahan Triwidadi	26.000.000,00	26.000.000,00
66	Kalurahan Sendangsari	56.320.000,00	56.320.000,00
67	Kalurahan Pendowoharjo	35.525.000,00	47.025.000,00
68	Kalurahan Ringinharjo	10.560.000,00	15.340.000,00
69	Kalurahan Parangtritis	22.862.000,00	21.328.000,00
70	Kalurahan Tirtoharjo	9.604.000,00	12.936.000,00
71	Kalurahan Gadingsari	38.354.750,00	43.743.500,00
72	Kalurahan Srigading	17.208.400,00	26.675.000,00
73	Kalurahan Murtigading	86.614.000,00	99.800.000,00
74	Kalurahan Gadingharjo	13.540.000,00	12.540.000,00
75	Kalurahan Tirtomulyo	15.136.000,00	10.450.000,00
	Jumlah	2.500.000.000,00	2.900.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus P2MD

Realisasi 'Bantuan Keuangan Khusus P2MD tahun 2023 dan 2022 per Kalurahan sebagai berikut :

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023 BERDASARKAN SK	REALISASI 2022 BERDASARKAN SK
1	Kalurahan Triwidadi	255.000.000	30.000.000
2	Kalurahan Bangunjiwo	170.000.000	122.500.000
3	Kalurahan Tamantirto	100.000.000	332.500.000
4	Kalurahan Pendowoharjo	90.000.000	52.500.000
5	Kalurahan Potorono	-	37.500.000
6	Kalurahan Jagalan	-	75.000.000
7	Kalurahan Pleret	40.000.000	30.000.000
8	Kalurahan Imogiri	130.000.000	15.000.000
9	Kalurahan Karangtengah	-	40.000.000
10	Kalurahan Selopamioro	-	15.000.000
11	Kalurahan Tirenggo	210.000.000	30.000.000
12	Kalurahan Caturharjo	-	15.000.000
13	Kalurahan Sumbermulyo	50.000.000	135.000.000
14	Kalurahan Srihardono	40.000.000	15.000.000
15	Kalurahan Panjangrejo	190.000.000	245.000.000
16	Kalurahan Srigading	70.000.000	40.000.000
17	Kalurahan Gading Sari	100.000.000	20.000.000
18	Kalurahan Poncosari	220.000.000	205.000.000
19	Kalurahan Guwosari	160.000.000	295.000.000
20	Kalurahan Trimurti	45.000.000,00	30.000.000,00
21	Kalurahan Murtigading	50.000.000,00	30.000.000,00
22	Kalurahan Gadingharjo	140.000.000,00	15.000.000,00
23	Kalurahan Parangtritis	-	125.000.000,00
24	Kalurahan Tirtomulyo	115.000.000,00	15.000.000,00
25	Kalurahan Tirtosari	-	15.000.000,00
26	Kalurahan Donotirto	-	30.000.000,00
27	Kalurahan Seloharjo	20.000.000,00	195.000.000,00
28	Kalurahan Mulyodadi	20.000.000,00	15.000.000,00
29	Kalurahan Sidomulyo	110.000.000,00	15.000.000,00
30	Kalurahan Triharjo	-	190.000.000,00
31	Kalurahan Gilangharjo	40.000.000,00	100.000.000,00
32	Kalurahan Palbapang	-	15.000.000,00
33	Kalurahan Bantul	-	130.000.000,00
34	Kalurahan Sabdodadi	-	15.000.000,00

35	Kalurahan Ringinharjo	60.000.000,00	15.000.000,00
36	Kalurahan Sumberagung	120.000.000,00	110.000.000,00
37	Kalurahan Kebonagung	-	15.000.000,00
38	Kalurahan Sriharjo	60.000.000,00	40.000.000,00
39	Kalurahan Wukirsari	-	120.000.000,00
40	Kalurahan Girirejo	-	15.000.000,00
41	Kalurahan Karangtalun	-	30.000.000,00
42	Kalurahan Jatimulyo	20.000.000,00	135.000.000,00
43	Kalurahan Mangunan	20.000.000,00	15.000.000,00
44	Kalurahan Dlingo	453.000.000,00	135.000.000,00
45	Kalurahan Temuwuh	60.000.000,00	50.000.000,00
46	Kalurahan Terong	60.000.000,00	45.000.000,00
47	Kalurahan Muntuk	132.000.000,00	170.000.000,00
48	Kalurahan Segoroyoso	-	15.000.000,00
49	Kalurahan Srimartani	455.000.000,00	175.000.000,00
50	Kalurahan Srimulyo	310.000.000,00	225.000.000,00
51	Kalurahan Sitimulyo	-	45.000.000,00
52	Kalurahan Wirokerten	-	15.000.000,00
53	Kalurahan Jambidan	-	50.000.000,00
54	Kalurahan Singosaren	-	215.000.000,00
55	Kalurahan Panggungharjo	-	15.000.000,00
56	Kalurahan Bangunharjo	-	105.000.000,00
57	Kalurahan Timbulharjo	210.000.000,00	40.000.000,00
58	Kalurahan Ngesriharjo	-	15.000.000,00
59	Kalurahan Sendangsari	335.000.000,00	415.000.000,00
60	Kalurahan Argosari	-	15.000.000,00
61	Kalurahan Argorejo	20.000.000,00	30.000.000,00
62	Kalurahan Argomulyo	-	15.000.000,00
63	Kalurahan Argodadi	-	15.000.000,00
64	Kalurahan Tirtohargo		15.000.000,00
65	Kalurahan Argosari	20.000.000,00	-
66	Kalurahan Banguntapan	40.000.000,00	-
67	Kalurahan Tamanan	80.000.000,00	-
68	Kalurahan Wonokromo	80.000.000,00	-
	Jumlah	4.900.000.000,00	5.000.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus TMMD tahun 2023 dan 2022

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Kalurahan Wonokromo	-	40.000.000
2	Kalurahan Sriharjo	120.000.000	40.000.000
3	Kalurahan Selopamiro	500.000.000	20.000.000
4	Kalurahan Wukirsari	120.000.000	20.000.000
5	Kalurahan Sidomulyo	-	20.000.000
6	Kalurahan Srihardono	-	20.000.000
7	Kalurahan Caturharjo	-	20.000.000
8	Kalurahan Srimartani	-	20.000.000
9	Kalurahan Argorejo	-	20.000.000
10	Kalurahan Tirtonirmolo	-	20.000.000
11	Kalurahan Jagalan	-	40.000.000
12	Kalurahan Wirokerten	-	20.000.000
13	Kalurahan Terong	80.000.000	20.000.000
14	Kalurahan Tirtomulyo	20.000.000	60.000.000
15	Kalurahan Banguntapan	-	20.000.000
16	Kalurahan Guwosari	-	250.000.000
17	Kalurahan Terong	-	300.000.000
18	Kalurahan Girirejo	-	250.000.000
19	Kalurahan Bangunjiwo	250.000.000	-
20	Klurahan Argodadi	20.000.000	-
21	Kalurahan Sendangsari	80.000.000	-
22	Kalurahan Guwosari	60.000.000	-
23	Kalurahan Bangunjiwo	100.000.000	-
24	Kalurahan Tirtonirmolo	100.000.000	-
25	Kalurahan Tamantirto	20.000.000	-
26	Kalurahan Pendowoharjo	20.000.000	-
27	Kalurahan Potorono	160.000.000	-
28	Kalurahan Tamanan	20.000.000	-
29	Kalurahan Banguntapan	40.000.000	-
30	Kalurahan Baturetno	160.000.000	-
31	Kalurahan Jambidan	40.000.000	-
32	Kalurahan Sitimulyo	40.000.000	-
33	Kalurahan Wonikromo	60.000.000	-
34	Kalurahan Segoroyoso	20.000.000	-

35	Kalurahan Muntuk	20.000.000	-
36	Kalurahan Jatimulyo	80.000.000	-
37	Kalurahan Tewmuwuh	40.000.000	-
38	Kalurahan Mangunan	120.000.000	-
39	Kalurahan Kebonagung	20.000.000	-
40	Kalurahan Karangtalun	40.000.000	-
41	Kalurahan Patalan	40.000.000	-
42	Kalurahan Tirenggo	20.000.000	-
43	Kalurahan Palbapang	20.000.000	-
44	Kalurahan Gilangharjo	60.000.000	-
45	Kalurahan sumbermulyo	20.000.000	-
46	Kalurahan Srihardono	20.000.000	-
47	Kalurahan Panjangrejo	100.000.000	-
48	Kalurahan Tirtomulyo	40.000.000	-
49	Kalurahan Tirtoharjo	20.000.000	-
50	Kalurahan Parangtritis	20.000.000	-
51	Kalurahan Murtigading	100.000.000	-
52	Kalurahan Srigading	20.000.000	-
53	Kalurahan Gaadingsari	20.000.000	-
54	Kalurahan Triwidadi	80.000.000	-
55	Kalurahan Panggungharjo	20.000.000	-
56	Kalurahan Timbulharjo	20.000.000	-
57	Kalurahan Wirokerten	80.000.000	-
58	Kalurahan Imogiri	20.000.000	-
59	KalurahanSelopamioro	140.000.000	-
60	Kalurahan Girirejo	60.000.000	-
61	Kalurahan Palbapang	20.000.000	-
62	Kalurahan Ringinharjo	40.000.000	-
63	Belanja TMMD	60.000.000	-
		250.000.000	-
	Jumlah	3.640.000.000,00	1.200.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus Rehap Pasar Kalurahan tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 160 tahun 2023 tentang Besaran alokasi bantuan keuangan kepada Kalurahan untuk rehabilitasi pasar kalurahan tahun 2023

Bantuan Keuangan Khusus Rehap Pasar Kalurahan tahun 2023 dan 2022

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	- Kalurahan Bangunharjo	-	200.000.000,00
2	- Kalurahan Jatimulyo	-	100.000.000,00
3	- Kalurahan Mangunan	200.000.000,00	180.000.000,00
4	- Kalurahan Timbulharjo	200.000.000,00	180.000.000,00
5	- Kalurahan Wukirsari	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah	600.000.000,00	860.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus Dana Insentif Kalurahan tahun 2023 dan 2022

Nomor	NAMA KALURAHAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Kalurahan Sumberagung	100.000.000	200.000.000
2	Kalurahan Pendowoharjo	50.000.000	200.000.000
3	Kalurahan Murtigading	150.000.000	200.000.000
4	Kalurahan Panjangrejo	150.000.000	200.000.000
5	Kalurahan Guwosari	150.000.000	200.000.000
6	Kalurahan Mulyodadi	100.000.000	300.000.000
7	Kalurahan Sumbermulyo	150.000.000	200.000.000
8	Kalurahan Potorono	50.000.000	-
9	Kalurahan Srimartani	50.000.000	-
10	Kalurahan Srimulyo	50.000.000	-
11	Kalurahan Terong	50.000.000	-
12	Kalurahan Timbulharjo	50.000.000	-
13	Kalurahan Wukirsari	50.000.000	-
14	Kalurahan Karangtengah	100.000.000	-
15	Kalurahan Parangtritis	50.000.000	-
16	Kalurahan Tirtoharjo	100.000.000	-
17	Kalurahan Donotirto	100.000.000	-
18	Kalurahan Patalan	50.000.000	-
19	Kalurahan Tamantirto	100.000.000	-
20	Kalurahan Tirtonirmolo	100.000.000	-
21	Kalurahan Bangunjiwo	100.000.000	-
22	Kalurahan Triharjo	50.000.000	-
23	Kalurahan Wijirejo	50.000.000	-
24	Kalurahan Caturharjo	150.000.000	-
25	Kalurahan Gadingsari	50.000.000	-

26	Kalurahan Srigading	50.000.000	-
27	Kalurahan Srihardono	50.000.000	-
28	Kalurahan Sidulmulyo	100.000.000	-
29	Kalurahan Pleret	50.000.000	-
30	Kalurahan Bawuran	150.000.000	-
31	Kalurahan Segoroyoso	50.000.000	-
	Jumlah	2.600.000.000,00	1.500.000.000,00

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2023 disandingkan dengan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan.	216.631.865.733,00	215.631.865.732,74	99,54	259.029.014.734,33

Komponen Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 terdiri dari SiLPA, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan daerah dari lembaga keuangan bank dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang dana bergulir terealisasi.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.4.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	215.631.865.733,00	215.631.865.732,74	100,00	240.503.861.658,33

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2022 sebesar Rp215.631.865.732,74

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kelebihan pencapaian target pendapatan	2.260.577.439.195,54
Anggaran yang tidak direalisasikan	2.272.474.588.197,13
Surplus/defisit	(11.897.149.001,59)
Selisih pembiayaan netto	227.529.014.734,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	215.631.865.732,74

SiLPA pada Tahun 2022 sebesar Rp215.631.865.732,74 terdiri dari

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	186.937.014.179,24
Kas di Bendahara Pengeluaran	39.974,00
Kas di Bendahara Penerimaan	212.692.566,00
Kas di Pengelola Dana Bergulir	20.000,00
Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	28.290.251.443,50
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	191.847.570,00
Jumlah Kas	215.631.865.732,74

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.4.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	18.362.654.076,00
5.1.4.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5.1.4.1.4	Penerimaan kembali pinjaman	1.000.000.000,00	-	-	162.499.000,00
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah.	-	-	-	31.500.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023 dan TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	24.051.093.800,00	24.051.093.800,00	100,00	31.500.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan (investasi jangka panjang) ke Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp24.051.093.800,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi penyertaan modal sampai 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a)	BPD DIY	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	100,00	20.200.000.000,00
b)	Aneka Dharma	351.093.800,00	351.093.800,00	100,00	1.300.000.000,00
c)	PD BPR Bank Bantul	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
d)	PDAM	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	24.051.093.800,00	24.051.093.800,00	100,00	31.500.000.000,00

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.4.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-

Pembayaran Pokok utang untuk Tahun Anggaran 2021 realisasinya nol karena Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai pinjaman daerah.

		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.4.2.3	Pemberian Pinjaman	1.000.000.000,00	-	-	-

Realisasi Pemberian Pinjaman TA 2023 dan 2022 digunakan untuk pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir. Sedangkan rincian realisasinya adalah sebagai berikut :

	Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dana Bergulir KUPK				
2	Dana Bergulir Pedagang Pasar	1.000.000.000,00	-	-	-
3	Dana Bergulir PEKM				
	Jumlah	1.000.000.000,00	-		-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kelebihan pencapaian target pendapatan	2.416.084.417.354,57	2.260.577.439.195,54
Anggaran yang tidak direalisasikan	2.411.425.977.527,72	2.272.474.588.197,13
Surplus/defisit	4.658.439.826,85	(11.897.149.001,59)
Selisih pembiayaan netto	191.580.771.932,74	227.529.014.734,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74

SiLPA pada tahun 2023 sebesar Rp196.239.211.760,59 terdiri dari

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	171.064.455.774,11	186.937.014.179,24	(15.872.558.405,13)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	39.974,00	(39.974,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	699.567.547,00	212.692.566,00	486.874.981,00
Kas di Pengelola Dana Bergulir	-	20.000,00	(20.000,00)
Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	23.947.680.740,48	28.290.251.443,50	(4.342.570.703,02)
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	527.507.698,00	191.847.570,00	335.660.128,00
Jumlah Kas	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	(19.392.653.973,15)

Kas di Kas Daerah sebesar Rp171.064.455.774,11 didalamnya terdapat

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1.	Pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA	16.929.430.622,95	Setoran dari pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA, sebesar Rp740.952.250,00, Rp69.478.200,00 dan Rp11.689.669.550,00. Perkembangan saldo sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.929.430.622,95

2.	Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi DIY untuk Padat Karya Insfrastruktur	156.487.571,00	Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi DIY untuk Padat Karya Insfrastruktur sebesar Rp156.487.571,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam pasal 6 ayat (5) diamatkan bahwa dalam hal bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi/sisa disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi DIY.
3	Saldo kelebihan pelimpahan Jaminan Bongkar Reklame pada tahun 2022	2.990.500,00	Saldo kelebihan pelimpahan Jaminan Bongkar Reklame pada tahun 2022 sebesar Rp8.400.000,00 . Kewajiban setor Jaminan Bongkar Reklame tahun 2023 sebesar Rp5.409.500,00 sehingga sisa kelebihan pelimpahan Jaminan Bongkar Reklame pada tahun 2023 sebesar Rp2.990.500,00

4	Setoran dari satuan pendidikan anak usia dini dan biaya operasional kesetaraan	41.635.005,00	Setoran dari satuan pendidikan anak usia dini dan biaya operasional kesetaraan sebesar Rp41.635.005,00 dengan rincian BOP PAUD sebesar Rp21.420.005,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp20.215.000,00.
---	--	---------------	--

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.2 POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	215.631.865.732,74	240.503.861.658,33
<p>Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun pada 2023 sebesar Rp215.631.865.732,74 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -10,34% atau sebesar Rp24.871.995.925,59.</p>		
	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	215.631.865.732,74	240.503.861.658,33
<p>Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan saldo akhir tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai tahun berjalan, tahun 2023 dan tahun 2022</p>		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74
<p>Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59 atau turun -8,99% atau sebesar Rp19.392.653.973,15 dari tahun 2022</p>		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	-	-
<p>Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.</p>		
Saldo Anggaran Lebih Akhir	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74
<p>Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59 atau mengalami penurunan -8,99% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp19.392.653.973,15</p>		
<p>Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2023 dan 2022 sebesar SAL awal tahun yang bersangkutan digunakan untuk menutup defisit dan mendanai pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berkenaan.</p>		

Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SILPA) TA 2023 dan 2022 adalah :

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Peningkatan/Penurunan (Rp)
Pendapatan dan Belanja			
Realisasi Pendapatan	2.416.084.417.354,57	2.260.577.439.195,54	155.506.978.159,03
Realisasi Belanja	2.411.425.977.527,72	2.272.474.588.197,13	138.951.389.330,59
Surplus(Defisit) anggaran	4.658.439.826,85	(11.897.149.001,59)	16.555.588.828,44
 Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	-	-	-
Pengeluaran Daerah	24.051.093.800,00	31.500.000.000,00	(7.448.906.200,00)
Pembiayaan Netto	(24.051.093.800,00)	(31.500.000.000,00)	7.448.906.200,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(19.392.653.973,15)	(43.397.149.001,59)	24.004.495.028,44

5 RINCIAN dan PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.3 NERACA

5.3.1 Aset

Perbandingan Aset Tetap Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Jenis Akun	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1	Aset Lancar	310.838.379.833,23	329.101.417.024,63	(18.263.037.191,41)
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	414.947.814.428,82	399.768.641.572,71	15.179.172.856,11
5.3.1.3	Aset Tetap	2.880.650.606.330,87	2.843.087.291.989,14	37.563.314.341,73
5.3.1.4	Dana Cadangan	-	-	-
5.3.1.5	Aset Lainnya	10.470.525.532,63	13.982.875.144,43	(3.512.349.611,80)
	Jumlah Aset	3.616.907.326.125,54	3.585.940.225.730,90	30.967.100.394,64

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1	Aset Lancar	310.838.379.833,23	329.101.417.024,63	(18.263.037.191,41)

	Rincian Aset Lancar adalah:	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1	Kas	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	(19.392.653.973,15)
5.3.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
5.3.1.1.3	Piutang Pajak	148.876.031.658,50	149.648.052.721,50	(772.021.063,00)
5.3.1.1.4	Piutang Retribusi	1.956.864.393,85	1.737.998.367,85	218.866.026,00
5.3.1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
5.3.1.1.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.745.498.769,00	63.839.339.439,94	(93.840.670,94)
5.3.1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
5.3.1.1.8	Piutang Transfer Antar Daerah	366.750.338,00	1.745.092.380,00	(1.378.342.042,00)
5.3.1.1.9	Piutang Lainnya	10.665.494.879,00	10.707.993.879,00	(42.499.000,00)
5.3.1.1.10	Penyisihan Piutang	(162.819.467.672,52)	(160.493.824.565,70)	(2.325.643.106,82)
5.3.1.1.11	Beban dibayar dimuka	1.674.397.002,09	552.101.334,28	1.122.295.667,81
5.3.1.1.12	Persediaan	50.133.598.705,71	45.732.797.735,02	4.400.800.970,69
5.3.1.1.13	Aset untuk dikonsolidasikan	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar	310.838.379.833,23	329.101.417.024,63	(18.263.037.191,41)

Penjelasan terkait aset lancar sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.	Kas	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	(19.392.653.973,15)

Rincian Kas sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	171.064.455.774,11	186.937.014.179,24	(15.872.558.405,13)
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	39.974,00	(39.974,00)
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	699.567.547,00	212.692.566,00	486.874.981,00
5.3.1.1.1.4	Kas di Pengelola Dana Bergulir	-	20.000,00	(20.000,00)
5.3.1.1.1.5	Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	23.947.680.740,48	28.290.251.443,50	(4.342.570.703,02)
5.3.1.1.1.6	Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	527.507.698,00	191.847.570,00	335.660.128,00
	Jumlah Kas	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	(19.392.653.973,15)

Penjelasan dari masing-masing komponen Kas adalah:

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	171.064.455.774,11	186.937.014.179,24	(15.872.558.405,13)

Jumlah tersebut merupakan kas pemerintah daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang terdiri atas Saldo Kas di Kas Daerah yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul Nomor Rekening 004.111.000207

Dalam Saldo Kas di Kas Daerah termasuk Saldo :

1. Setoran dari pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA, sebesar Rp740.952.250,00 , Rp69.478.200,00 Rp11.689.669.550,00. Perkembangan saldo sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.929.430.622,95
2. Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi DIY untuk Padat Karya Infrastruktur sebesar Rp156.487.571,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam pasal 6 ayat (5) diamatkan bahwa dalam hal bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi/sisa disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi DIY.
3. Saldo kelebihan pelimpahan Jaminan Bongkar Reklame pada tahun 2022 sebesar Rp8.400.000,00 . Kewajiban setor Jaminan Bongkar Reklame tahun 2023 sebesar Rp5.409.500,00 sehingga sisa kelebihan pelimpahan Jaminan Bongkar Reklame pada tahun 2023 sebesar Rp2.990.500,00
4. Setoran dari satuan pendidikan anak usia dini dan biaya operasional kesetaraan sebesar Rp41.635.005,00 dengan rincian BOP PAUD sebesar Rp21.420.005,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp20.215.000,00.
 Sesuai dengan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, pasal 30 yang mengamanatkan bahwa:
 Ayat (1) Sekolah penerima Dana BOS yang mengalami penggabungan, penutupan, atau tidak bersedia menerima Dana BOS, mengembalikan Dana BOS yang telah diterima ke RKUD.
 Ayat (2) Pengembalian Dana BOS dari RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara dilakukan oleh bendahara umum Daerah setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah.

- Ayat (3) Pengembalian Dana BOS ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan karena penggabungan/penutupan Sekolah penerima Dana BOS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan.
- Ayat (4) Pengembalian Dana BOS ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan karena Sekolah tidak bersedia menerima Dana BOS dilaksanakan berdasarkan surat pernyataan tidak bersedia menerima Dana BOS yang ditandatangani oleh kepala Sekolah atau ketua yayasan.

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	39.974,00	(39.974,00)

Jumlah tersebut merupakan sisa Uang Persediaan (UP)/saldo kas di bendahara pengeluaran pada Unit Organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum disetor ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Setoran UP Kepanewon Sewon yang belum disetorkan di bulan Januari 2023	-	39.974,00	(39.974,00)

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	699.567.547,00	212.692.566,00	486.874.981,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang masih ada pada bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang disetorkan ke Kasda pada Tahun Anggaran berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Saldo pendapatan Retribusi Jasa Umum pada obyek pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2023 dan Tahun 2022	664.012.500,00	196.189.500,00	467.823.000,00
2	Saldo pendapatan Retribusi Jasa Umum pada obyek pariwisata Kebun Buah Mangunan, tempat rekreasi dan olah raga, penjualan produksi daerah yang dikelola Dinas Pertanian yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2023 dan Tahun 2022	11.926.750,00	6.075.000,00	5.851.750,00
3	Saldo pendapatan Pajak Air Tanah yang diterima Rekening Penampungan per 31 Desember 2022 dan baru dilimpahkan ke rekening Kas Daerah Tahun 2023	-	315.706,00	(315.706,00)

4	Saldo pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perdagangan yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2023 dan Tahun 2022	18.951.110,00	2.647.980,00	16.303.130,00
5	Retribusi Rusunawa DPUPKP	4.213.880,00	6.652.380,00	(2.438.500,00)
6	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan	-	812.000,00	(812.000,00)
7	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	463.307,00	-	463.307,00
	Jumlah	699.567.547,00	212.692.566,00	486.874.981,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp699.567.547,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024 oleh masing-masing OPD dengan nomor STS sebagai berikut:

Nomor	OPD	Tanggal Setor	Nomor STS
1	DPUPKP	02 Januari 2024	04
2	Dinas Pariwisata	02 Januari 2024	52
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	02 Januari 2024	06,32,87
4	DKUKMP	02 Januari 2024	01,03,08,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,33,35,38,39,45,46,58,59,60,61.62
5	DLH	02 Januari 2024	04, 09

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.4	Kas di Pengelola Dana Bergulir		20.000,00	(20.000,00)
<hr/>				
		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.5	Kas di BLUD	23.947.680.740,48	28.290.251.443,50	(5.431.485.700,02)

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di RSUD Panembahan Senopati , RSUD Saras Adhyatma, dan saldo kas di Puskesmas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

RSUD Panembahan Senopati Bantul telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan SK Bupati Nomor 195 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati. Pada tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 tahun 2021 RSUD Panembahan Senopati status kelembagaan menjadi UOBK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan dan untuk Puskesmas berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah

RSUD Saras Adyatma Rumah Sakit tipe D yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 dan telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 597 tahun 2022.

Rincian saldo kas BLUD:		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.5.1	Kas di RS Panembahan Senopati Bantul	17.049.925.348,52	26.079.920.030,52	(9.029.994.682,00)
5.3.1.1.1.5.2	Kas di RS Saras Adhyatma	1.088.914.997,00	-	1.088.914.997,00
5.3.1.1.1.5.3	Kas di 27 Puskesmas	5.808.840.394,96	2.210.331.412,98	3.598.508.981,98
		23.947.680.740,48	28.290.251.443,50	(4.342.570.703,02)

5.3.1.1.1.5.1 BLUD RSUD PANEMBAHAN SENOPATI		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	BPD Rekening Nomor 004.111.000424	16.968.085.288,00	25.960.854.342,00	(8.992.769.054,00)
2	Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-0534188-4	2.267.266,00	16.598.848,00	(14.331.582,00)
3	BRI Bantul Nomor Rek 00000236-01-000931-30-3	79.572.794,52	102.466.840,52	(22.894.046,00)
		17.049.925.348,52	26.079.920.030,52	(9.029.994.682,00)

Keterangan saldo bank:

Saldo bank RSUD Panembahan Senopati per 31 Desember 2023 pada Bank Mandiri dan BRI belum nihil karena terdapat dana pendapatan per 31 Desember 2023 di Bank Mandiri sebesar Rp2.267.266,00 dan di BRI sebesar Rp79.572.794,52.

Pembayaran pasien atau layanan yang dilakukan oleh pasien masih dibuka secara sistem (EDC, Qris, transfer) melalui Bank Mandiri maupun BRI sehingga masih terdapat transaksi penerimaan kas, sedangkan pemindahan kas dari bank tersebut ke BPD dilakukan secara manual (layanan internet banking masih dalam proses).

5.3.1.1.1.5.2	Kas di RS Saras Adhyatma			
	Silpa			
	Rincian Silpa RS Saras Adhyatma per 31 Desember 2023 terdiri dari :			
1	BPD Rekening Nomor 004.111.001953	1.088.909.195,00		
2	Saldo kas di Bendahara Pengeluaran	5.800,00		
	Pembulatan Pajak	2,00		
		1.088.914.997,00		

5.3.1.1.1.5.2 Kas di 27 Puskesmas		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		5.808.840.394,96	2.210.331.412,98	3.598.508.981,98

Saldo Kas Blud Puskesmas tahun 2023 sebesar Rp5.808.840.394,96 tidak termasuk temuan BPK pada saat kas opname di Puskesmas Srandakan sebesar Rp26.504.000,00 yang merupakan sisa kegiatan Danais tahun 2022 sebesar Rp7.011.200,00 dan tahun 2023 sebesar Rp19.492.800,00.

NOMOR	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING BLUD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Srandakan	4.111.001.190	154.642.513,00	122.839.040,00	31.803.473,00
2	Sanden	4.111.001.189	88.726.748,00	26.216.575,00	62.510.173,00
3	Kretek	4.111.001.194	56.336.773,46	27.608.511,46	28.728.262,00
4	Pundong	4.111.001.191	34.374.852,00	36.697.385,00	(2.322.533,00)
5	Bambanglipuro	4.111.001.205	369.559.817,36	124.527.530,36	245.032.287,00
6	Pandak I	4.111.001.197	78.580.007,00	15.761.583,00	62.818.424,00
7	Pandak II	4.111.001.192	159.922.987,00	77.517.296,00	82.405.691,00
8	Bantul I	4.111.001.201	309.752.526,30	85.130.066,32	224.622.459,98
9	Bantul II	4.111.001.212	241.341.161,00	73.340.526,00	168.000.635,00
10	Jetis I	4.111.001.208	105.312.607,49	40.118.926,49	65.193.681,00
11	Jetis II	4.111.001.196	305.722.246,85	40.891.891,85	264.830.355,00
12	Imogori I	4.111.001.211	279.962.160,00	144.443.836,00	135.518.324,00
13	Imogiri II	4.111.001.188	586.810.626,00	46.451.721,00	540.358.905,00
14	Dlingo I	4.111.001.200	15.824.610,00	14.193.346,00	1.631.264,00
15	Dlingo II	4.111.001.204	223.119.859,00	66.326.848,00	156.793.011,00
16	Pleret	4.111.001.209	451.548.658,00	123.201.973,00	328.346.685,00
17	Piyungan	4.111.001.210	143.253.257,00	66.565.713,00	76.687.544,00
18	Banguntapan I	4.111.001.206	218.122.697,00	8.207.846,00	209.914.851,00
19	Banguntapan II	4.111.001.195	447.634.745,00	68.728.649,00	378.906.096,00
20	Banguntapan III	4.111.001.213	153.369.510,00	154.333.332,00	(963.822,00)
21	Sewon I	4.111.001.207	138.658.309,00	127.027.423,00	11.630.886,00
22	Sewon II	4.111.001.202	162.535.932,00	46.510.803,00	116.025.129,00
23	Kasihani I	4.111.001.203	85.793.043,00	25.517.678,00	60.275.365,00
24	Kasihani II	4.111.001.198	327.632.712,00	506.486.141,00	(178.853.429,00)
25	Pajangan	4.111.001.214	190.730.100,00	29.722.552,00	161.007.548,00
26	Sedayu I	4.111.001.193	154.688.918,00	45.330.233,00	109.358.685,00
27	Sedayu II	4.111.001.199	324.883.019,50	66.633.987,50	258.249.032,00
	Jumlah		5.808.840.394,96	2.210.331.412,98	3.598.508.981,98

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.6	Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOSP dan BOK	527.507.698,00	191.847.570,00	335.660.128,00
	Kas di Bendahara BOSNAS SD	22.475.482,00	96.765.607,00	(74.290.125,00)
	Kas di Bendahara BOSNAS SMP	12.054.655,00	43.453.659,00	(31.399.004,00)
	Kas di Bendahara BOP PAUD	25.211.118,00	41.509.278,00	(16.298.160,00)
	Kas di Bendahara BOSNAS Kesetaraan	103.398.376,00	10.119.026,00	93.279.350,00
	Kas di Bendahara BOK di Puskesmas	364.368.067,00	-	364.368.067,00
	Jumlah	527.507.698,00	191.847.570,00	335.660.128,00

Rekening operasional BOSNAS SD, BOSNAS SMP, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan di rekening giro di PT Bank BPD DIY Cabang bantul

Mulai tahun anggaran 2023 BOK Puskesmas mekanisme penyalurannya langsung ke Rekening Giro Puskesmas.

Rekening operasional BOK Kesehatan Puskesmas di rekening giro pada BNI Cabang Bantul sesuai dengan amanat dari Kemenkes Republik Indonesia. Penetapan rekening giro dituangkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2023 tentang Rekening Giro dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Bantul.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai investasi Jangka Pendek				
		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2	PIUTANG	225.610.640.038,35	227.678.476.788,29	(2.067.836.749,94)

Rekapitulasi Piutang Bruto dengan rician sebagai berikut:

Nomor	Jenis piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Piutang Pajak	148.876.031.658,50	149.648.052.721,50	(772.021.063,00)
2	Piutang Retribusi	1.956.864.393,85	1.737.998.367,85	218.866.026,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.745.498.769,00	63.839.339.439,94	(93.840.670,94)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
6	Piutang Transfer Antar Daerah	366.750.338,00	1.745.092.380,00	(1.378.342.042,00)

7	Piutang Lainnya	10.665.494.879,00	10.707.993.879,00	(42.499.000,00)
	Jumlah	225.610.640.038,35	227.678.476.788,29	(2.067.836.749,94)

Rekapitulasi Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Jenis piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Piutang Pajak	101.279.537.629,04	99.886.885.770,62	1.392.651.858,42
2	Piutang Retribusi	1.674.873.753,23	1.471.348.150,24	203.525.602,99
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.301.120.041,25	48.618.395.295,84	682.724.745,41
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
6	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-
7	Piutang Lainnya	10.563.936.249,00	10.517.195.349,00	46.740.900,00
	Jumlah	162.819.467.672,52	160.493.824.565,70	2.325.643.106,82

Rekapitulasi Piutang Netto dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Jenis piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Piutang Pajak	47.596.494.029,46	49.761.166.950,88	(2.164.672.921,42)
2	Piutang Retribusi	281.990.640,63	266.650.217,61	15.340.423,02
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.444.378.727,75	15.220.944.144,10	(776.565.416,35)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
6	Piutang Transfer Antar Daerah	366.750.338,00	1.745.092.380,00	(1.378.342.042,00)
7	Piutang Lainnya	101.558.630,00	190.798.530,00	(89.239.900,00)
	Jumlah	62.791.172.365,83	67.184.652.222,59	(4.393.479.856,76)

Rincian dari masing-masing piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	148.876.031.658,50	149.648.052.721,50	(772.021.063,00)

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	148.876.031.658,50	149.648.052.721,50	-772.021.063,00
Penyisihan Piutang	101.279.537.629,04	99.886.885.770,62	1.392.651.858,42

Piutang Netto	47.596.494.029,46	49.761.166.950,88	620.630.795,42
---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan tersebut. Piutang ini diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh Bidang PP3 BPKPAD dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Rincian Piutang Bruto Pajak Daerah sebagai berikut:

	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	Pajak Restoran	697.181.467,00	689.904.259,00	7.277.208,00
5.3.1.1.2.2	Pajak Hotel	114.381.798,50	86.806.769,50	27.575.029,00
5.3.1.1.2.3	Pajak Hiburan	122.503.723,10	122.503.723,10	-
5.3.1.1.2.4	Pajak Parkir	5.994.503,90	4.223.303,90	1.771.200,00
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Bawah Tanah	129.460.575,00	131.028.803,00	(1.568.228,00)
5.3.1.1.2.6	PBB P2	141.883.569.033,00	143.570.985.166,00	(1.687.416.133,00)
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	413.969.475,00	407.462.541,00	6.506.934,00
5.3.1.1.2.8	Pajak Penerangan Jalan	5.508.971.083,00	4.635.138.156,00	873.832.927,00
	Jumlah	148.876.031.658,50	149.648.052.721,50	(772.021.063,00)

Rincian Mutasi Piutang Pajak tahun 2023 sebagai berikut:

	Jenis Pajak Daerah	Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1	Pajak Restoran	689.904.259,00	42.991.628,00	35.714.420,00	697.181.467,00
5.3.1.1.2.2	Pajak Hotel	86.806.769,50	40.935.829,00	13.360.800,00	114.381.798,50
5.3.1.1.2.3	Pajak Hiburan	122.503.723,10	-	-	122.503.723,10
5.3.1.1.2.4	Pajak Parkir	4.223.303,90	1.771.200,00	-	5.994.503,90
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Bawah Tanah	131.028.803,00	36.931.713,00	38.499.941,00	129.460.575,00
5.3.1.1.2.6	PBB P2	143.570.985.166,00	15.336.951.643,00	17.024.367.776,00	141.883.569.033,00
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	407.462.541,00	35.406.234,00	28.899.300,00	413.969.475,00
5.3.1.1.2.8	Pajak Penerangan Jalan	4.635.138.156,00	5.508.971.083,00	4.635.138.156,00	5.508.971.083,00
	Jumlah	149.648.052.721,50	21.003.959.330,00	21.775.980.393,00	148.876.031.658,50

Penyisihan Piutang Pajak Daerah

	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	Pajak Restoran	629.227.902,14	642.537.468,85	(13.309.566,71)

5.3.1.1.2.2	Pajak Hotel	56.619.240,64	68.260.532,10	(11.641.291,46)
5.3.1.1.2.3	Pajak Hiburan	118.253.723,10	118.253.723,10	-
5.3.1.1.2.4	Pajak Parkir	3.728.099,90	3.564.995,90	163.104,00
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Bawah Tanah	89.502.602,37	88.922.726,59	579.875,78
5.3.1.1.2.6	PBB P2	100.104.211.274,42	98.712.951.980,89	1.391.259.293,53
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	277.994.786,47	252.394.343,19	25.600.443,28
5.3.1.1.2.8	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
	Jumlah	101.279.537.629,04	99.886.885.770,62	1.392.651.858,42

Piutang Netto Pajak Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

	Jenis Piutang Pajak	Per 31 Desember 2023		
		Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
5.3.1.1.2.1	Pajak Restoran	697.181.467,00	629.227.902,14	67.953.564,86
5.3.1.1.2.2	Pajak Hotel	114.381.798,50	56.619.240,64	57.762.557,86
5.3.1.1.2.3	Pajak Hiburan	122.503.723,10	118.253.723,10	4.250.000,00
5.3.1.1.2.4	Pajak Parkir	5.994.503,90	3.728.099,90	2.266.404,00
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Bawah Tanah	129.460.575,00	89.502.602,37	39.957.972,63
5.3.1.1.2.6	PBB P2	141.883.569.033,00	100.104.211.274,42	41.779.357.758,58
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	413.969.475,00	277.994.786,47	135.974.688,53
5.3.1.1.2.8	Pajak Penerangan Jalan	5.508.971.083,00	-	5.508.971.083,00
	Jumlah	148.876.031.658,50	101.279.537.629,04	47.596.494.029,46

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1

Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	42.991.628,00	0,50%	214.958,14	42.776.669,86
>1 Tahun s/d 2 Tahun	20.433.550,00	10%	2.043.355,00	18.390.195,00
>2 tahun s/d 5 Tahun	13.573.400,00	50%	6.786.700,00	6.786.700,00
>5 tahun	620.182.889,00	100%	620.182.889,00	-
Jumlah	697.181.467,00		629.227.902,14	67.953.564,86

5.3.1.1.2.2

Pajak Hotel

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	40.935.829,00	0,50%	204.679,14	40.731.149,86
>1 Tahun s/d 2 Tahun	1.427.720,00	10%	142.772,00	1.284.948,00
>2 tahun s/d 5 Tahun	31.492.920,00	50%	15.746.460,00	15.746.460,00
>5 tahun	40.525.329,50	100%	40.525.329,50	-
Jumlah	114.381.798,50		56.619.240,64	57.762.557,86

5.3.1.1.2.3

Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 2 Tahun	-	10%	-	-
>2 tahun s/d 5 Tahun	8.500.000,00	50%	4.250.000,00	4.250.000,00
>5 tahun	114.003.723,10	100%	114.003.723,10	-
Jumlah	122.503.723,10		118.253.723,10	4.250.000,00

5.3.1.1.2.4

Pajak Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	1.771.200,00	0,50%	8.856,00	1.762.344,00
>1 Tahun s/d 2 Tahun	398.400,00	10%	39.840,00	358.560,00
>2 tahun s/d 5 Tahun	291.000,00	50%	145.500,00	145.500,00
>5 tahun	3.533.903,90	100%	3.533.903,90	-
Jumlah	5.994.503,90		3.728.099,90	2.266.404,00

5.3.1.1.2.5

Pajak Air Bawah Tanah

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	36.856.133,00	0,50%	184.280,67	36.671.852,33
>1 Tahun s/d 2 Tahun	3.117.902,00	10%	311.790,20	2.806.111,80
>2 tahun s/d 5 Tahun	960.017,00	50%	480.008,50	480.008,50
>5 tahun	88.526.523,00	100%	88.526.523,00	-
Jumlah	129.460.575,00		89.502.602,37	39.957.972,63

5.3.1.1.2.6

PBB P2

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	15.336.951.643,00	0,50%	76.684.758,22	15.260.266.884,78
>1 Tahun s/d 2 Tahun	11.662.994.802,00	10%	1.166.299.480,20	10.496.695.321,80
>2 tahun s/d 5 Tahun	32.044.791.104,00	50%	16.022.395.552,00	16.022.395.552,00
>5 tahun	82.838.831.484,00	100%	82.838.831.484,00	-
Jumlah	141.883.569.033,00		100.104.211.274,42	41.779.357.758,58

5.3.1.1.2.7

Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	35.406.234,00	0,50%	177.031,17	35.229.202,83
>1 Tahun s/d 2 Tahun	20.799.038,00	10%	2.079.903,80	18.719.134,20
>2 tahun s/d 5 Tahun	164.052.703,00	50%	82.026.351,50	82.026.351,50
>5 tahun	193.711.500,00	100%	193.711.500,00	-
Jumlah	413.969.475,00		277.994.786,47	135.974.688,53

5.3.1.1.2.2

Piutang Retribusi

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	281.990.640,63	266.650.217,61	15.340.423,02

Piutang Retribusi merupakan penerimaan terhadap pendapatan retribusi. Piutang Retribusi diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait dan sampai dengan tanggal Neraca belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.

Rekapitulasi saldo piutang bruto, penyisihan piutang dan piutang Netto tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	1.956.864.393,85	1.737.998.367,85	218.866.026,00
Penyisihan Piutang	1.674.873.753,23	1.471.348.150,24	203.525.602,99
Piutang Netto	281.990.640,63	266.650.217,61	15.340.423,02

Nama OPD dan jenis Piutang Retribusi yang dikelola tahun 2023 sebagai berikut:

Nomor	Nama OPD	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Komunikasi & Informatika	Retribusi Menara Telekomunikasi	361.502.967,00	347.102.967,00

2	Dinas Perhubungan	Retribusi Khusus Parkir	80.500.000,00	73.815.000,00
		Retribusi Parkir Tepi Jalan	88.090.500,00	55.935.500,00
		Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00
3	DPUPKP	Retribusi Rusunawa	26.573.060,00	38.293.100,00
		Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85
4	Badan Lingkungan Hidup	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00
		Retribusi Sampah	55.678.375,00	44.428.800,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	1.203.525.062,00	1.051.875.771,00
		Retribusi Kebersihan Pasar	52.000.070,00	46.312.870,00
		Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00
6	DKPP	Retribusi Benih Padi	13.380.000,00	4.620.000,00
Jumlah			1.956.864.393,85	1.737.998.367,85

Mutasi Piutang Retribusi tahun 2023 sebagai berikut:

	Jenis Piutang Retribusi	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Retribusi Menara Telekomunikasi	347.102.967,00	14.400.000,00	-	361.502.967,00
5.3.1.1.2.2.2	Retribusi Khusus Parkir	73.815.000,00	33.815.000,00	27.130.000,00	80.500.000,00
5.3.1.1.2.2.3	Retribusi Parkir Tepi Jalan	55.935.500,00	46.935.000,00	14.780.000,00	88.090.500,00
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	-	-	700.000,00
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Rusunawa	38.293.100,00	15.895.680,00	27.615.720,00	26.573.060,00
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi IMB	29.626.639,85	-	-	29.626.639,85
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	-	-	19.534.720,00
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Sampah	44.428.800,00	33.438.275,00	22.188.700,00	55.678.375,00
5.3.1.1.2.2.9	Retribusi Pelayanan Pasar	1.051.875.771,00	1.549.909.384,00	1.398.260.093,00	1.203.525.062,00
5.3.1.1.2.2.10	Retribusi Kebersihan Pasar	46.312.870,00	122.383.200,00	116.696.000,00	52.000.070,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	-	-	25.753.000,00
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi benih padi	4.620.000,00	13.380.000,00	4.620.000,00	13.380.000,00
Jumlah		1.737.998.367,85	1.830.156.539,00	1.611.290.513,00	1.956.864.393,85

Rincian piutang bruto per jenis piutang retribusi daerah sebagai berikut:

	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Retribusi Menara Telekomunikasi	361.502.967,00	347.102.967,00	14.400.000,00
5.3.1.1.2.2.2	Retribusi Khusus Parkir	80.500.000,00	73.815.000,00	6.685.000,00
5.3.1.1.2.2.3	Retribusi Parkir Tepi Jalan	88.090.500,00	55.935.500,00	32.155.000,00
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00	-
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Rusunawa	26.573.060,00	38.293.100,00	(11.720.040,00)
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85	-
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00	-
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Sampah	55.678.375,00	44.428.800,00	11.249.575,00
5.3.1.1.2.2.9	Retribusi Pelayanan Pasar	1.203.525.062,00	1.051.875.771,00	151.649.291,00
5.3.1.1.2.2.10	Retribusi Kebersihan Pasar	52.000.070,00	46.312.870,00	5.687.200,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00	-
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi benih padi	13.380.000,00	4.620.000,00	8.760.000,00
	Jumlah	1.956.864.393,85	1.737.998.367,85	218.866.026,00

Rincian Penyisihan piutang per jenis piutang retribusi daerah sebagai berikut:

	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Retribusi Menara Telekomunikasi	351.273.567,00	347.102.967,00	4.170.600,00
5.3.1.1.2.2.2	Retribusi Khusus Parkir	80.500.000,00	73.815.000,00	6.685.000,00
5.3.1.1.2.2.3	Retribusi Parkir Tepi Jalan	88.090.500,00	55.935.500,00	32.155.000,00
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00	-
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Rusunawa	10.756.858,40	6.244.169,90	4.512.688,50
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85	-
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00	-
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Sampah	26.309.520,50	23.596.189,50	2.713.331,00
5.3.1.1.2.2.9	Retribusi Pelayanan Pasar	992.318.237,48	852.840.993,99	139.477.243,49
5.3.1.1.2.2.10	Retribusi Kebersihan Pasar	43.320.710,00	36.198.970,00	7.121.740,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00	-
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi benih padi	6.690.000,00	-	6.690.000,00
	Jumlah	1.674.873.753,23	1.471.348.150,24	203.525.602,99

Piutang Netto Retribusi Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Nomor	Jenis piutang retribusi daerah:	Per 31 Desember 2023		
		Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Retribusi Menara Telekomunikasi	361.502.967,00	351.273.567,00	10.229.400,00
5.3.1.1.2.2.2	Retribusi Khusus Parkir	80.500.000,00	80.500.000,00	-
5.3.1.1.2.2.3	Retribusi Parkir Tepi Jalan	88.090.500,00	88.090.500,00	-
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00	-
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Rusunawa	26.573.060,00	10.756.858,40	15.816.201,60
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85	-
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00	-
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Sampah	55.678.375,00	26.309.520,50	29.368.854,50
5.3.1.1.2.2.9	Retribusi Pelayanan Pasar	1.203.525.062,00	992.318.237,48	211.206.824,53
5.3.1.1.2.2.10	Retribusi Kebersihan Pasar	52.000.070,00	43.320.710,00	8.679.360,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00	-
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi benih padi	13.380.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
	Jumlah	1.956.864.393,85	1.674.873.753,23	281.990.640,63

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.2.1 Retribusi Menara Telekomunikasi

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	6.120.000,00	0,50%	30.600,00	6.089.400,00
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	8.280.000,00	50%	4.140.000,00	4.140.000,00
> 12 bulan	347.102.967,00	100%	347.102.967,00	-
Jumlah	361.502.967,00		351.273.567,00	10.229.400,00

5.3.1.1.2.2.2 Retribusi Khusus Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	80.500.000,00	100%	80.500.000,00	-
Jumlah	80.500.000,00		80.500.000,00	-

5.3.1.1.2.2.3 Retribusi Parkir Tepi Jalan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	88.090.500,00	100%	88.090.500,00	-
Jumlah	88.090.500,00		88.090.500,00	-

5.3.1.1.2.2.4 Retribusi Ijin Trayek

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	700.000,00	100%	700.000,00	-
Jumlah	700.000,00		700.000,00	-

5.3.1.1.2.2.5 Retribusi Rusunawa

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	15.895.680,00	0,50%	79.478,40	15.816.201,60
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-

>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	10.677.380,00	100%	10.677.380,00	-
Jumlah	26.573.060,00		10.756.858,40	15.816.201,60

5.3.1.1.2.2.6 Retribusi IMB

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	29.626.639,85	100%	29.626.639,85	-
Jumlah	29.626.639,85		29.626.639,85	-

5.3.1.1.2.2.7 Retribusi Ijin Gangguan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	19.534.720,00	100%	19.534.720,00	-
Jumlah	19.534.720,00		19.534.720,00	-

5.3.1.1.2.2.8 Retribusi Sampah

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	21.802.600,00	0,50%	109.013,00	21.693.587,00
>1 s/d 3 bulan	4.643.575,00	10%	464.357,50	4.179.217,50
>2 s/d 12 bulan	6.992.100,00	50%	3.496.050,00	3.496.050,00
> 12 bulan	22.240.100,00	100%	22.240.100,00	-
Jumlah	55.678.375,00		26.309.520,50	29.368.854,50

5.3.1.1.2.2.9 Retribusi Pelayanan Pasar

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	106.267.095,00	0,50%	531.335,48	105.735.759,53
>1 s/d 3 bulan	90.051.495,00	10%	9.005.149,50	81.046.345,50
>2 s/d 12 bulan	48.849.439,00	50%	24.424.719,50	24.424.719,50
> 12 bulan	958.357.033,00	100%	958.357.033,00	-
Jumlah	1.203.525.062,00		992.318.237,48	211.206.824,53

5.3.1.1.2.2.10 Retribusi Kebersihan Pasar

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	4.788.000,00	0,50%	23.940,00	4.764.060,00
>1 s/d 3 bulan	3.624.000,00	10%	362.400,00	3.261.600,00
>2 s/d 12 bulan	1.307.400,00	50%	653.700,00	653.700,00
> 12 bulan	42.280.670,00	100%	42.280.670,00	-
Jumlah	52.000.070,00		43.320.710,00	8.679.360,00

5.3.1.1.2.2.11 Retribusi Ijin Minuman Beralkohol

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	25.753.000,00	100%	25.753.000,00	-
Jumlah	25.753.000,00		25.753.000,00	-

5.3.1.1.2.2.12 Retribusi benih padi

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-

>2 s/d 12 bulan	13.380.000,00	50%	6.690.000,00	6.690.000,00
> 12 bulan	-	100%	-	-
Jumlah	13.380.000,00		6.690.000,00	6.690.000,00

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.444.378.727,75	15.220.944.144,10	(776.565.416,35)

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	63.745.498.769,00	63.839.339.439,94	(93.840.670,94)
Penyisihan piutang	49.301.120.041,25	48.618.395.295,84	682.724.745,41
Piutang Netto	14.444.378.727,75	15.220.944.144,10	(776.565.416,35)

Mutasi Piutang PAD Lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
5.3.1.1.2.4.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	2.455.814.876,00	165.381.994.617,00	165.012.105.769,00	2.825.703.724,00
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembangunan Kios	94.287.500,00	-	-	94.287.500,00
5.3.1.1.2.4.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	182.641.000,00	137.129.250,00	182.641.000,00	137.129.250,00
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	60.393.068.858,00	1.107.082.314,00	1.567.807.625,00	59.932.343.547,00
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	40.447.370,00	2.997.268,00	5.760.000,00	37.684.638,00
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	314.974.264,00	7.977.540,00	9.936.000,00	313.015.804,00
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	-	-	58.801.797,00
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	1.872.462,00	215.212,00	-	2.087.674,00
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	46.034.466,00	2.013.981,00	1.921.203,00	46.127.244,00
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	167.159.895,00	12.074.096,00	-	179.233.991,00

5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	-	-	83.210.400,00
5.3.1.1.2.4.12	Saldo remunerasi atas pendapatan Transfer pemerintah pusat Dana perimbangan yang ada di rekening BI karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan TDF	1.026.551,94	-	1.026.551,94	-
5.3.1.1.2.4.13	Piutang Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	-	108.000.000,00	72.126.800,00	35.873.200,00
	Jumlah	63.839.339.439,94	166.759.484.278,00	166.853.324.948,94	63.745.498.769,00

Rincian piutang bruto per jenis piutang PAD lainnya sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.4.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	2.825.703.724,00	2.455.814.876,00	369.888.848,00
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembangunan Kios	94.287.500,00	94.287.500,00	-
5.3.1.1.2.4.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	137.129.250,00	182.641.000,00	(45.511.750,00)
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	59.932.343.547,00	60.393.068.858,00	(460.725.311,00)
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	37.684.638,00	40.447.370,00	(2.762.732,00)
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	313.015.804,00	314.974.264,00	(1.958.460,00)
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	58.801.797,00	-
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	2.087.674,00	1.872.462,00	215.212,00
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	46.127.244,00	46.034.466,00	92.778,00
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	179.233.991,00	167.159.895,00	12.074.096,00
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	83.210.400,00	-
5.3.1.1.2.4.12	Saldo remunerasi atas pendapatan Transfer pemerintah pusat Dana perimbangan yang ada di rekening BI karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan TDF	-	1.026.551,94	(1.026.551,94)
5.3.1.1.2.4.13	Piutang Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	35.873.200,00	-	35.873.200,00
	Jumlah	63.745.498.769,00	63.839.339.439,94	(93.840.670,94)

Rincian penyisihan piutang per jenis piutang PAD lainnya sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.4.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	907.962.619,88	748.289.578,65	159.673.041,23
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembangunan Kios	94.287.500,00	94.287.500,00	-
5.3.1.1.2.4.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	-	-	-
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	47.827.036.628,57	47.130.333.571,42	696.703.057,15
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	27.065.167,43	32.758.956,06	(5.693.788,63)
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	301.704.202,65	308.139.068,99	(6.434.866,34)
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	56.761.797,00	56.761.797,00	-
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	1.785.553,57	1.705.477,86	80.075,71
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	230.636,21	42.587.552,23	(42.356.916,02)
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	896.169,94	120.321.393,63	(119.425.223,69)
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	83.210.400,00	-
5.3.1.1.2.4.13	Piutang Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	179.366,00	-	179.366,00
	Jumlah	49.301.120.041,25	48.618.395.295,84	682.724.745,41

Piutang Netto PAD Lainnya tahun 2023 sebagai berikut

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023		
		Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
5.3.1.1.2.4.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	2.825.703.724,01	907.962.619,88	1.917.741.104,13
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembangunan Kios	94.287.500,00	94.287.500,00	-
5.3.1.1.2.4.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	137.129.250,00	-	137.129.250,00
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	59.932.343.547,00	47.827.036.628,57	12.105.306.918,43
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	37.684.638,00	27.065.167,43	10.619.470,57
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	313.015.804,00	301.704.202,65	11.311.601,35
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	56.761.797,00	2.040.000,00
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	2.087.674,00	1.785.553,57	302.120,43
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	46.127.244,00	230.636,21	45.896.607,79

5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	179.233.991,00	896.169,94	178.337.821,06
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transit Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	83.210.400,00	-
5.3.1.1.2.4.12	Piutang Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	35.873.200,00	179.366,00	35.693.834,00
	Jumlah	63.745.498.769,01	49.301.120.041,25	14.444.378.727,76

Penyisihan piutang PAD lainnya yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.4.1

Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d jatuh tempo	1.549.905.215,01	0,50%	7.749.526,08	1.542.155.688,93
>1 s/d 2 tahun	225.630.138,00	10%	22.563.013,80	203.067.124,20
>2 s/d 5 Tahun	345.036.582,00	50%	172.518.291,00	172.518.291,00
> 5 tahun	705.131.789,00	100%	705.131.789,00	-
Jumlah	2.825.703.724,01	-	907.962.619,88	1.917.741.104,13

5.3.1.1.2.4.2

Partisipasi Pembangunan Kios

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 Tahun	-	50%	-	-
> 12 tahun	94.287.500,00	100%	94.287.500,00	-
Jumlah	94.287.500,00	-	94.287.500,00	-

5.3.1.1.2.4.4

Piutang Denda PBB P2

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	1.107.082.314,00	0,50%	5.535.411,57	1.101.546.902,43
>1 s/d 3 bulan	3.681.122.390,00	10%	368.112.239,00	3.313.010.151,00
>2 s/d 12 Tahun	15.381.499.730,00	50%	7.690.749.865,00	7.690.749.865,00
> 12 tahun	39.762.639.113,00	100%	39.762.639.113,00	-
Jumlah	59.932.343.547,00	-	47.827.036.628,57	12.105.306.918,43

5.3.1.1.2.4.5

Piutang Denda Pajak Hotel

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	2.704.025,00	0,50%	13.520,13	2.690.504,87
>1 s/d 3 bulan	411.848,00	10%	41.184,80	370.663,20
>2 s/d 12 Tahun	15.116.605,00	50%	7.558.302,50	7.558.302,50
> 12 tahun	19.452.160,00	100%	19.452.160,00	-
Jumlah	37.684.638,00	-	27.065.167,43	10.619.470,57

5.3.1.1.2.4.6

Piutang Denda Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	1.289.289,00	0,50%	6.446,45	1.282.842,55
>1 s/d 3 bulan	7.523.492,00	10%	752.349,20	6.771.142,80
>2 s/d 12 Tahun	6.515.232,00	50%	3.257.616,00	3.257.616,00
> 12 tahun	297.687.791,00	100%	297.687.791,00	-
Jumlah	313.015.804,00	-	301.704.202,65	11.311.601,35

5.3.1.1.2.4.7

Piutang Denda Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 Tahun	4.080.000,00	50%	2.040.000,00	2.040.000,00
> 12 tahun	54.721.797,00	100%	54.721.797,00	-
Jumlah	58.801.797,00	-	56.761.797,00	2.040.000,00

5.3.1.1.2.4.8

Piutang Denda Pajak Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	60.474,00	0,50%	302,37	60.171,63
>1 s/d 3 bulan	191.232,00	10%	19.123,20	172.108,80
>2 s/d 12 Tahun	139.680,00	50%	69.840,00	69.840,00
> 12 tahun	1.696.288,00	100%	1.696.288,00	-
Jumlah	2.087.674,00	-	1.785.553,57	302.120,43

5.3.1.1.2.4.9

Piutang Denda Pajak ABT

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	2.013.981,00	0,50%	10.069,90	2.003.911,10
>1 s/d 3 bulan	1.159.351,00	10%	5.796,75	1.153.554,25
>2 s/d 12 Tahun	460.812,00	50%	2.304,06	458.507,94
> 12 tahun	42.493.100,00	100%	212.465,50	42.280.634,50
Jumlah	46.127.244,00	-	230.636,21	45.896.607,79

5.3.1.1.2.4.10

Piutang Denda Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	866.891,00	0,50%	4.334,45	862.556,55
>1 s/d 3 bulan	6.640.281,00	10%	33.201,40	6.607.079,60
>2 s/d 12 Tahun	78.745.299,00	50%	393.726,49	78.351.572,51
> 12 tahun	92.981.520,00	100%	464.907,60	92.516.612,40
Jumlah	179.233.991,00	-	896.169,94	178.337.821,06

5.3.1.1.2.4.11

Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul ulama (UNU) Yogyakarta

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 Tahun	-	50%	-	-
> 12 tahun	83.210.400,00	100%	83.210.400,00	-
Jumlah	83.210.400,00	-	83.210.400,00	-

5.3.1.1.2.4.12

Piutang Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	35.873.200,00	0,50%	179.366,00	35.693.834,00
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>2 s/d 12 Tahun	-	50%	-	-
> 12 tahun	-	100%	-	-
Jumlah	35.873.200,00	-	179.366,00	35.693.834,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
	Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai piutang transfer Pemerintah Pusat			
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	366.750.338,00	1.745.092.380,00	(1.378.342.042,00)

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	281.139.270,00	1.169.942.100,00	- 888.802.830,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70.623.960,00	571.545.700,00	- 500.921.740,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-
4	Pajak Air Permukaan	14.987.108,00	3.604.580,00	11.382.528,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	-	-	-
6	Bagi Laba dari BUKP Sanden yang salah transfer	-	-	-
	Jumlah	366.750.338,00	1.745.092.380,00	(1.378.342.042,00)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Tahun 2023 atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

5.3.1.1.2.7 Piutang Lainnya

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	101.558.630,00	190.798.530,00	(89.239.900,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Piutang Lainnya dari berbagai bentuk pinjaman pemerintah yang diberikan kepada masyarakat baik kepada kelompok maupun perorangan di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Rekapitulasi saldo piutang bruto, nama OPD dan jenis Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat) yang di kelola tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Nomor	Nama OPD	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
			Rp	Rp
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Industri Kecil (PIK)	271.004.856,00	274.938.856,00
		Pasar Seni Gabusan (PSG)	570.078.567,00	570.078.567,00
		Usaha Ekonomi produktif Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)	287.244.990,00	287.244.990,00
		Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.672.000,00	704.177.000,00

2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK)	399.686.676,00	399.686.676,00
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM)	4.205.334.305,00	4.205.734.305,00
		Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD)	156.772.650,00	156.772.650,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<i>Revolving</i> Ternak Sapi	2.037.545.000,00	2.058.005.000,00
		Alih Profesi Penambang Pasir bagi petani peternak	60.800.000,00	60.800.000,00
		Piutang Pasca Panen	1.680.456.835,00	1.680.456.835,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penguatan modal usaha perikanan/Budidaya Ikan Gurami	300.899.000,00	305.099.000,00
5	Bagian Perekonomian PSDA	Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah			10.665.494.879,00	10.707.993.879,00

Piutang yang berasal dari perikatan khususnya dana bergulir sesuai dengan tata pengelolaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 7 Standart Akuntansi Pemerintahan pada pos neraca tercantum dan ditempatkan pada aset lancar pos piutang lainnya

Penjelasan dari masing-masing jenis piutang lainnya (pinjaman yang diberikan kepada masyarakat):

1. Pengembangan Industri Kecil (PIK)
Penerima Dana Bergulir PIK warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan memiliki usaha industri kecil.
Jangka waktu pengembalian dana bergulir PIK selama 24 (dua puluh empat) bulan
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM)
Penerima dana adalah warga Kabupaten Bantul (dibuktikan dengan KTP) yang membentuk kelompok yang beranggotakan 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) keluarga miskin dan mempunyai rencana kegiatan usaha di bidang peningkatan ekonomi.
Jangka waktu pengembalian dana bergulir PEKM selama 12 (dua belas) bulan
Jasa dana bergulir PEKM yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3% dari total dana bergulir yang diterima.
3. Pasar Seni Gabusan (PSG)
Penerima Dana bergulir PSG adalah pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan menempati Pasar seni Gabusan
Jangka waktu pengembalian dana bergulir PSG selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa tenggang selama 3 (tiga) bulan
4. Usaha Ekonomi produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Penerima dana bergulir UMKM adalah pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan mempunyai usaha ekonomi produktif
Jangka waktu pengembalian dana bergulir UMKM selama 12 (dua belas) bulan
5. Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK)
Penerima dana bergulir KUPK adalah warga bantul yang dibuktikan dengan KTP dengan membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan masing-masing anggota kelompok mempunyai usaha ekonomi produktif
Jangka waktu pengembalian dana bergulir KUPK selama 12 (dua belas) bulan dengan masa tenggang selama 1 (satu) bulan

6. *Revolving* Ternak Sapi
Penerima dana bergulir *Revolving* ternak sapi adalah warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan merupakan petani peternak dengan penghasilan rendah.
Jangka waktu pengembalian dana bergulir *revolving* ternak sapi selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran selama 6 (enam) bulan
7. Alih Profesi Penambang Pasir bagi petani peternak (Dinas Pertanian)
Penerima dana bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak adalah warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP, bertempat tinggal tetap dan bersedia menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik
Jangka waktu pengembalian dana bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran selama 6 (enam) bulan
8. Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD)
Penerima dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD) adalah warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP yang merupakan warga miskin dan membentuk kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) keluarga
Jangka waktu pengembalian dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD) adalah 12 (dua belas) bulan
9. Penguatan modal usaha perikanan/Budidaya Ikan Gurami
Penerima dan bergulir Penguatan modal usaha perikanan/Budidaya Ikan Gurami adalah kelompok tani
Jangka waktu pengembalian Penguatan Modal Usaha Perikanan/Budidaya Ikan Gurami selama 2 (dua) tahun dengan masa angsuran 6 (enam) bulan sekali
10. Pemberdayaan Pedagang Pasar
Program pemberdayaan pedagang melalui dana bergulir ini dimaksudkan untuk menambah modal usaha pedagang agar dapat meningkatkan usahanya melalui penguatan modal untuk berdagang serta terlepas dari jeratan rentenir. Selain hal tersebut diatas, dana bergulir juga bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa masih banyak pedagang yang menggunakan jasa rentenir dalam menambah modal usahanya, dimana dana dapat diperoleh dengan mudah dan cepat serta tanpa persyaratan yang berbelit-belit meskipun dengan bunga yang tinggi.

Pada awalnya dana bergulir ditujukan untuk pedagang arahan yang lemah dalam permodalannya, namun seiring berjalannya waktu serta sesuai dengan dasar hukum yang digunakan, dana bergulir ditujukan untuk pedagang tetap yang berjualan di pasar tradisional.

Guna pemerataan pengguna dana bergulir untuk pedagang pasar, maka pada saat ini nominal pinjaman yang diterima oleh pedagang maksimal Rp1.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran 100 kali angsuran dengan bunga 2 % yang dibayar di depan dan dengan syarat yang mudah yaitu fotocopy KTP pedagang.

Kondisi piutang lainnya pada saat ini hampir semua jenis piutang masuk dalam kategori piutang macet, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	10.665.494.879,00	10.707.993.879,00	(42.499.000,00)
Penyisihan Piutang	10.563.936.249,00	10.517.195.349,00	46.740.900,00
Piutang Netto	101.558.630,00	190.798.530,00	(89.239.900,00)

Mutasi Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat) tahun 2023 sebagai berikut:

	Uraian	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
5.3.1.1.2.7.1	Piutang PIK	274.938.856,00	-	3.934.000,00	271.004.856,00
5.3.1.1.2.7.2	Piutang PEKM	4.205.734.305,00	-	400.000,00	4.205.334.305,00

5.3.1.1.2.7.3	Piutang PSG	570.078.567,00	-	-	570.078.567,00
5.3.1.1.2.7.4	Piutang Kelompok UMKM	287.244.990,00	-	-	287.244.990,00
5.3.1.1.2.7.5	Piutang Kelompok KUPK	399.686.676,00	-	-	399.686.676,00
5.3.1.1.2.7.6	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.058.005.000,00	-	20.460.000,00	2.037.545.000,00
5.3.1.1.2.7.7	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	60.800.000,00	-	-	60.800.000,00
5.3.1.1.2.7.8	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKBPMMD)	156.772.650,00	-	-	156.772.650,00
5.3.1.1.2.7.9	Piutang Budi Daya Ikan	305.099.000,00	-	4.200.000,00	300.899.000,00
5.3.1.1.2.7.10	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
5.3.1.1.2.7.11	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	704.177.000,00	-	13.505.000,00	690.672.000,00
5.3.1.1.2.7.12	Piutang Pasca Panen	1.680.456.835,00	-	-	1.680.456.835,00
	Jumlah	10.707.993.879,00	-	42.499.000,00	10.665.494.879,00

Piutang Bruto Piutang Lainnya sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.7.1	Piutang PIK	271.004.856,00	274.938.856,00	(3.934.000,00)
5.3.1.1.2.7.2	Piutang PEKM	4.205.334.305,00	4.205.734.305,00	(400.000,00)
5.3.1.1.2.7.3	Piutang PSG	570.078.567,00	570.078.567,00	-
5.3.1.1.2.7.4	Piutang Kelompok UMKM	287.244.990,00	287.244.990,00	-
5.3.1.1.2.7.5	Piutang Kelompok KUPK	399.686.676,00	399.686.676,00	-
5.3.1.1.2.7.6	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.037.545.000,00	2.058.005.000,00	(20.460.000,00)
5.3.1.1.2.7.7	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	60.800.000,00	60.800.000,00	-
5.3.1.1.2.7.8	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKBPMMD)	156.772.650,00	156.772.650,00	-
5.3.1.1.2.7.9	Piutang Budi Daya Ikan	300.899.000,00	305.099.000,00	(4.200.000,00)
5.3.1.1.2.7.10	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.3.1.1.2.7.11	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.672.000,00	704.177.000,00	(13.505.000,00)
5.3.1.1.2.7.12	Piutang Pasca Panen	1.680.456.835,00	1.680.456.835,00	-
	Jumlah	10.665.494.879,00	10.707.993.879,00	(42.499.000,00)

Rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.7.1	Piutang PIK	271.004.856,00	274.938.856,00	(3.934.000,00)
5.3.1.1.2.7.2	Piutang PEKM	4.142.020.275,00	4.142.059.675,00	(39.400,00)
5.3.1.1.2.7.3	Piutang PSG	570.078.567,00	570.078.567,00	-
5.3.1.1.2.7.4	Piutang Kelompok UMKM	287.244.990,00	287.244.990,00	-

5.3.1.1.2.7.5	Piutang Kelompok KUPK	361.442.076,00	337.192.676,00	24.249.400,00
5.3.1.1.2.7.6	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.037.545.000,00	2.058.005.000,00	(20.460.000,00)
5.3.1.1.2.7.7	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	60.800.000,00	60.800.000,00	-
5.3.1.1.2.7.8	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKBPMMD)	156.772.650,00	156.772.650,00	-
5.3.1.1.2.7.9	Piutang Budi Daya Ikan	300.899.000,00	305.099.000,00	(4.200.000,00)
5.3.1.1.2.7.10	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.3.1.1.2.7.11	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.672.000,00	639.547.100,00	51.124.900,00
5.3.1.1.2.7.12	Piutang Pasca Panen	1.680.456.835,00	1.680.456.835,00	-
	Jumlah	10.563.936.249,00	10.517.195.349,00	46.740.900,00

Penyisihan Piutang Lainnya yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.7.1 Piutang PIK

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	271.004.856,00	100%	271.004.856,00	-
Jumlah	271.004.856,00	-	271.004.856,00	-

5.3.1.1.2.7.2 Piutang PEKM

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	69.886.000,00	10%	6.988.600,00	62.897.400,00
>3 tahun s/d 5 Tahun	833.260,00	50%	416.630,00	416.630,00
>5 tahun	4.134.615.045,00	100%	4.134.615.045,00	-
Jumlah	4.205.334.305,00	-	4.142.020.275,00	63.314.030,00

5.3.1.1.2.7.3 Piutang PSG

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	570.078.567,00	100%	570.078.567,00	-
Jumlah	570.078.567,00	-	570.078.567,00	-

5.3.1.1.2.7.4

Piutang Kelompok UMKM

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	287.244.990,00	100%	287.244.990,00	-
Jumlah	287.244.990,00	-	287.244.990,00	-

5.3.1.1.2.7.5

Piutang Kelompok KUPK

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	17.494.000,00	10%	1.749.400,00	15.744.600,00
>3 tahun s/d 5 Tahun	45.000.000,00	50%	22.500.000,00	22.500.000,00
>5 tahun	337.192.676,00	100%	337.192.676,00	-
Jumlah	399.686.676,00	-	361.442.076,00	38.244.600,00

5.3.1.1.2.7.6

Piutang Penguatan Modal Sapi

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	2.037.545.000,00	100%	2.037.545.000,00	-
Jumlah	2.037.545.000,00	-	2.037.545.000,00	-

5.3.1.1.2.7.7

Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	60.800.000,00	100%	60.800.000,00	-
Jumlah	60.800.000,00	-	60.800.000,00	-

5.3.1.1.2.7.8

Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKBPMMD)

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-

>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	156.772.650,00	100%	156.772.650,00	-
Jumlah	156.772.650,00	-	156.772.650,00	-

5.3.1.1.2.7.9

Piutang Budi Daya Ikan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	300.899.000,00	100%	300.899.000,00	-
Jumlah	300.899.000,00	-	300.899.000,00	-

5.3.1.1.2.7.10

Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	-
Jumlah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-

5.3.1.1.2.7.11

Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	690.672.000,00	100%	690.672.000,00	-
Jumlah	690.672.000,00	-	690.672.000,00	-

5.3.1.1.2.7.12

Piutang Pasca Panen

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun	-	10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	1.680.456.835,00	100%	1.680.456.835,00	-
Jumlah	1.680.456.835,00	-	1.680.456.835,00	-

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.8	Penyisihan Piutang	162.819.467.672,52	160.493.824.565,70	2.325.643.106,82
	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.8.1	Penyisihan Piutang Pajak	101.279.537.629,04	99.886.885.770,62	1.392.651.858,42
5.3.1.1.2.8.2	Penyisihan Piutang Retribusi	1.674.873.753,23	1.471.348.150,24	203.525.602,99
5.3.1.1.2.8.3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.301.120.041,25	48.618.395.295,84	682.724.745,41
5.3.1.1.2.8.4	Penyisihan Piutang Lainnya	10.563.936.249,00	10.517.195.349,00	46.740.900,00
	Jumlah	162.819.467.672,52	160.493.824.565,70	2.325.643.106,82
		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	1.674.397.002,09	552.101.334,28	1.122.295.667,81

Piutang Lain-lain / Belanja Dibayar dimuka/Piutang Sewa Lahan

Jumlah tersebut merupakan piutang lain-lain yang belum diselesaikan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	OPD Pelaksana	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.091.444.158,33	156.545.310,83	934.898.847,50
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.174.842,00	82.372.795,00	802.047,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	48.469.328,01	46.225.134,01	2.244.194,00
4	RSUD Panembahan Senopati	26.000.000,00	26.000.000,00	-
5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	24.577.880,83	15.375.681,00	9.202.199,83
6	DPUPKP	251.880.052,67	169.404.896,27	82.475.156,40
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	55.664.062,50	7.031.250,00	48.632.812,50
8	DLH	19.708.187,75	19.341.098,17	367.089,58
9	DINHUB	16.281.250,00	18.188.750,00	(1.907.500,00)
10	DINKES	57.197.240,00	11.616.419,00	45.580.821,00
	Jumlah	1.674.397.002,09	552.101.334,28	1.122.295.667,81

Rincian belanja dibayar dimuka per OPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.091.444.158,33	156.545.310,83	934.898.847,50

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Dlingo untuk Kebun Buah Mangunan Dlingo	-	35.235.675,00	(35.235.675,00)
2	Warga desa Dlingo untuk Kebun Buah Mangunan Dlingo	1.088.812.500,00	116.127.040,00	972.685.460,00
3	Pemdes Argorejo untuk gedung Balai Penyuluhan Pertanian	122.500,00	122.500,00	-
4	Pemdes Donotirto untuk Balai Penyuluhan Pertanian	89.425,00	89.425,00	-
5	Pemdes Gilangharjo untuk Balai Penyuluhan Pertanian	122.500,00	122.500,00	-
6	Pemdes Kebon Agung untuk Balai Penyuluhan Pertanian	38.500,00	38.500,00	-
7	Pemdes Srihardono untuk Balai Penyuluhan Pertanian	76.475,00	76.475,00	-
8	Pemdes Poncosari untuk Balai Penyuluhan Pertanian	148.925,00	148.925,00	-
9	Pemdes Tirtonirmolo untuk Puskesmas	250.000,00	250.000,00	-
10	Pemdes Gadingharjo untuk pabrik pupuk Organik	-	2.550.937,50	(2.550.937,50)
11	Pemdes Terong untuk Balai Penyuluhan Pertanian	770.000,00	770.000,00	-
12	Pemdes Tamanan untuk Balai Penyuluhan Pertanian	513.333,33	513.333,33	-
13	Pemdes Tlirenggo untuk Balai Penyuluhan Pertanian	500.000,00	500.000,00	-
	Jumlah	1.091.444.158,33	156.545.310,83	934.898.847,50

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	83.174.842,00	82.372.795,00	802.047,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Srihardono untuk BAT	55.350.000,00	55.350.000,00	-
2	Pemdes Sumbermulyo untuk BAT	10.981.850,00	10.981.850,00	-
3	Pemdes Panggungharjo untuk BBI Krapyak	16.842.992,00	16.040.945,00	802.047,00
	Jumlah	83.174.842,00	82.372.795,00	802.047,00

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	48.469.328,01	46.225.134,01	2.244.194,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Dlingo untuk Pasar Dlingo	4.166.666,67	4.166.666,67	-
2	Pemdes Bantul Pasar Unggas Bantul	4.859.375,00	4.859.375,00	-

3	Argosari (Terminal Darat)	35.078.286,34	33.199.092,34	1.879.194,00
4	Pasar Piyungan	4.365.000,00	4.000.000,00	365.000,00
	Jumlah	48.469.328,01	46.225.134,01	2.244.194,00

RSUD Panembahan Senopati	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	26.000.000,00	26.000.000,00	-

Tanah kas desa Trirenggo Kec Bantul dan Gudang Barang

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	24.577.880,83	15.375.681,00	9.202.199,83

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Triharjo untuk TKN 1 Pandak	4.134.375,00	2.362.500,00	1.771.875,00
2	Pemdes Tirtonirmolo untuk SD Winongo	3.621.990,00	2.088.806,00	1.533.184,00
3	Pemdes Trimurti untuk TKN Srandakan	3.750.000,00	2.625.000,00	1.125.000,00
4	Pemdes Sidomulyo untuk TKN Bambanglipuro	6.511.640,83	4.134.375,00	2.377.265,83
5	Pemdes Triwidadi untuk TKN Pajangan	6.559.875,00	4.165.000,00	2.394.875,00
	Jumlah	24.577.880,83	15.375.681,00	9.202.199,83

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	251.880.052,67	169.404.896,27	82.475.156,40

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Penggunaan Tanah Kas Desa Ngestiharjo utk Rusunawa	19.305.625,00	29.378.125,00	(10.072.500,00)
2	Penggunaan tanah Kas Desa Banguntapan untuk Rusunawa	85.696.875,33	111.405.937,93	(25.709.062,60)
3	Penggunaan Tanah Kas Desa Tamanan untuk Rusunawa	27.882.708,34	24.245.833,34	3.636.875,00
4	Penggunaan Tanah Kas Desa Panggungharjo untuk Rusunawa	105.213.594,00		105.213.594,00
5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	13.781.250,00	4.375.000,00	9.406.250,00
	Jumlah	251.880.052,67	169.404.896,27	82.475.156,40

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	55.664.062,50	7.031.250,00	48.632.812,50

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	19.708.187,75	19.341.098,17	367.089,58

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Sewa tanah untul IPAL	19.425.831,50	18.857.556,50	568.275,00
2	Sewa tanah untuk RTH	282.356,25	483.541,67	(201.185,42)
3	Sewa Tanah untuk TPST Modalan	7.502.000,00	-	7.502.000,00
	Jumlah	19.708.187,75	19.341.098,17	367.089,58

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Perhubungan	16.281.250,00	18.188.750,00	(1.907.500,00)

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Sewa tanah dan gedung milik PT KAI untuk gudang	5.625.000,00	5.827.500,00	(202.500,00)
2	Sewa tanah untuk terminal Parangtritis	10.656.250,00	12.361.250,00	(1.705.000,00)
	Jumlah	16.281.250,00	18.188.750,00	(1.907.500,00)

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Kesehatan	57.197.240,00	11.616.419,00	45.580.821,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Sumbermulyo untuk Puskesmas Bambanglipuro	5.634.740,00	5.366.419,00	268.321,00
2	Pemdes Banguntapan untuk Puskesmas Banguntapan III	6.562.500,00	6.250.000,00	312.500,00
3	Pemdes Timbulharjo untuk Puskesmas Sewon I	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4	Pemdes Palbapang untuk Puskesmas Bantul I	42.000.000,00	-	42.000.000,00
	Jumlah	57.197.240,00	11.616.419,00	45.580.821,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.4	Persediaan	50.133.598.706	45.732.797.735,02	4.400.800.971

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Mutasi persediaan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Saldo awal 2022	45.732.797.735,02	60.367.722.354,00	(14.634.924.618,98)
2	Penambahan	332.861.933.143,98	265.029.953.337,59	67.831.979.806,39
3	Penggunaan /pengurangan	328.461.132.173,29	279.664.877.956,57	48.796.254.216,72
4	Reklasifikasi akun barang yang diserahkan			
5	Saldo akhir	50.133.598.705,71	45.732.797.735,02	4.400.800.970,69

Nilai persediaan merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bahan	1.690.616.251,73	1.068.130.029,51	622.486.222,22
2	Suku Cadang	17.860.980,00	29.060.980,00	(11.200.000,00)
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	14.739.408.745,20	14.095.372.462,09	644.036.283,11
4	Obat-obatan	27.501.860.624,28	23.070.375.139,42	4.431.485.484,86
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.395.868.807,90	6.936.448.509,00	(1.540.579.701,10)
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	164.469.158,60	183.366.215,00	(18.897.056,40)
7	Natura dan Pakan	584.910.138,00	275.879.420,00	309.030.718,00
8	Persediaan Penelitian	36.052.000,00	68.262.300,00	(32.210.300,00)
9	Persediaan dalam Proses	2.531.000,00	4.906.000,00	(2.375.000,00)
10	Komponen	21.000,00	321.000,00	(300.000,00)
11	Pipa	-	675.680,00	(675.680,00)
	Jumlah	50.133.598.705,71	45.732.797.735,02	4.400.800.970,69

Rincian mutasi Persediaan per OPD tahun 2023 sebagai berikut:

Nomor	Nama Instansi	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-
2	Bagian Tata Pemerintahan	7.203.100,00	576.391.740,00	582.238.340,00	1.356.500,00

3	Bagian Hukum	5.435.680,00	611.422.400,00	610.524.980,00	6.333.100,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.130.600,00	321.770.700,00	321.388.300,00	2.513.000,00
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	650.900,00	3.127.997.668,00	3.128.022.488,00	626.080,00
6	Bagian Organisasi	320.700,00	656.034.730,00	655.176.190,00	1.179.240,00
7	Bagian Umum dan Protokol	9.605.100,00	3.925.386.853,00	3.927.811.653,00	7.180.300,00
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2.795.300,00	288.931.250,00	287.724.050,00	4.002.500,00
9	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	836.600,00	329.431.400,00	329.456.500,00	811.500,00
10	Sekretariat DPRD	58.791.450,00	2.871.397.127,00	2.892.010.077,00	38.178.500,00
11	Inspektorat Daerah	33.457.600,00	1.053.688.020,00	1.032.702.700,00	54.442.920,00
12	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	5.255.612.139,52	43.200.221.521,57	42.989.779.756,01	5.466.053.905,08
13	Dinas Kesehatan	12.587.376.568,50	48.543.782.438,67	49.206.903.063,83	11.924.255.943,34
14	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.429.737.600,00	10.725.205.062,00	12.327.315.523,00	4.827.627.139,00
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	626.000,00	1.958.432.247,00	1.957.123.797,00	1.934.450,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	896.000,00	1.076.059.675,00	1.069.008.175,00	7.947.500,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.911.250,00	28.645.296.830,00	28.642.917.180,00	6.290.900,00
18	Dinas Perhubungan	546.068.594,00	2.717.948.483,00	2.852.519.822,00	411.497.255,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.363.076.498,00	3.312.116.970,00	3.488.193.200,00	2.187.000.268,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	413.748.125,00	6.071.464.135,00	6.051.609.360,00	433.602.900,00
21	Dinas Kebudayaan	112.941.707,00	3.075.685.175,00	3.076.190.702,00	112.436.180,00
22	Dinas Pariwisata	3.288.757.470,00	12.140.112.961,00	11.820.772.961,00	3.608.097.470,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	135.120.600,00	892.053.809,00	1.003.059.719,00	24.114.690,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.626.950,00	1.802.777.796,00	1.803.314.356,00	1.090.390,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.282.200,00	811.168.713,00	813.689.213,00	7.761.700,00
26	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	16.362.700,00	4.298.953.053,00	4.299.818.453,00	15.497.300,00
27	Dinas Sosial	197.376.500,00	8.815.020.610,00	8.842.992.348,00	169.404.762,00
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.086.402.801,00	15.132.228.666,00	13.747.923.066,00	2.470.708.401,00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	145.865.305,00	5.179.784.490,00	5.158.776.680,90	166.873.114,10

30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.704.100,00	5.320.305.831,00	5.318.881.601,00	3.128.330,00
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	152.358.505,00	4.408.460.007,16	4.369.937.282,16	190.881.230,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.934.350,00	2.289.021.338,00	2.296.765.888,00	16.189.800,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	258.314.700,00	6.088.839.943,00	6.108.896.243,00	238.258.400,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.905.325,00	2.487.503.612,00	2.479.073.102,00	11.335.835,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	629.083.684,00	3.757.599.286,00	3.538.598.365,00	848.084.605,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	280.000,00	1.622.755.950,00	1.619.871.600,00	3.164.350,00
37	Rsud. Panembahan Senopati	11.905.500.758,00	84.069.565.560,52	80.629.546.081,52	15.345.520.237,00
38	RSUD Saras Adhyatma	-	2.706.018.821,06	1.216.708.959,87	1.489.309.861,19
39	Kapanewon Srandakan	1.309.700,00	405.959.950,00	406.065.750,00	1.203.900,00
40	Kapanewon Sanden	896.300,00	501.995.430,00	501.441.870,00	1.449.860,00
41	Kapanewon Pajangan	1.150.160,00	466.811.540,00	466.447.210,00	1.514.490,00
42	Kapanewon Sedayu	11.532.800,00	362.468.050,00	372.978.250,00	1.022.600,00
43	Kapanewon Pandak	2.500.400,00	563.999.600,00	564.981.450,00	1.518.550,00
44	Kapanewon Kasihan	534.400,00	424.155.350,00	424.309.650,00	380.100,00
45	Kapanewon Bantul	2.278.575,00	429.893.300,00	431.129.875,00	1.042.000,00
46	Kapanewon Bambanglipuro	1.565.300,00	535.037.476,00	535.686.086,00	916.690,00
47	Kapanewon Kretek	1.572.600,00	513.396.900,00	512.811.620,00	2.157.880,00
48	Kapanewon Pundong	4.147.890,00	394.589.758,00	391.496.118,00	7.241.530,00
49	Kapanewon Sewon	2.626.400,00	377.776.625,00	380.198.425,00	204.600,00
50	Kapanewon Jetis	630.400,00	544.692.220,00	544.565.100,00	757.520,00
51	Kapanewon Imogiri	876.700,00	415.684.809,00	415.438.729,00	1.122.780,00
52	Kapanewon Dlingo	508.800,00	520.694.030,00	520.292.030,00	910.800,00
53	Kapanewon Pleret	1.051.500,00	522.351.600,00	522.271.200,00	1.131.900,00
54	Kapanewon Banguntapan	8.236.450,00	562.343.069,00	564.401.569,00	6.177.950,00
55	Kapanewon Piyungan	281.900,00	409.248.565,00	409.375.465,00	155.000,00
56	PPKD	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	45.732.797.735,02	332.861.933.143,98	328.461.132.173,29	50.133.598.705,71

Dalam laporan persediaan per 31 Desember 2023 khususnya persediaan obat tidak termasuk obat yang telah kadaluarsa /rusak di RSUD sebesar Rp176.279.885,00, obat kadaluarsa di Dinas Kesehatan (gudang farmasi) sebesar Rp381.663.297,54, RSSA sebesar Rp97.872.930,00 dan di Puskesmas sebesar Rp160.820.263,65 dengan rincian sebagai berikut

Nomor	PUSKESMAS	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bambanglipuro	7.113.962,00	40.108.922,00	(32.994.960,00)
2	Banguntapan I	12.293.996,56	16.801.608,65	(4.507.612,09)
3	Banguntapan II	10.809.004,00	47.931.479,50	(37.122.475,50)
4	Banguntapan III	2.668.841,00	14.451.515,00	(11.782.674,00)
5	Bantul I	1.695.157,00	4.770.534,00	(3.075.377,00)
6	Bantul II	4.670.145,72	9.780.383,00	(5.110.237,28)
7	Dlingo I	7.659.155,60	6.381.316,00	1.277.839,60
8	Dlingo II	5.913.232,95	18.964.683,00	(13.051.450,05)
9	Imogiri I	3.488.439,00	10.517.259,00	(7.028.820,00)
10	Imogiri II	6.753.188,00	18.044.682,00	(11.291.494,00)
11	Jetis I	3.893.391,30	12.194.157,00	(8.300.765,70)
12	Jetis II	4.743.159,10	10.576.832,00	(5.833.672,90)
13	Kasih I	7.329.143,40	10.390.960,00	(3.061.816,60)
14	Kasih II	5.377.765,70	19.910.473,57	(14.532.707,87)
15	Kretek	5.084.637,00	19.844.687,00	(14.760.050,00)
16	Pajangan	6.225.172,00	17.124.977,00	(10.899.805,00)
17	Pandak I	8.005.288,54	26.113.979,27	(18.108.690,73)
18	Pandak II	2.015.598,84	5.585.788,84	(3.570.190,00)
19	Piyungan	6.833.862,40	10.836.200,90	(4.002.338,50)
20	Pleret	5.826.081,00	19.032.127,00	(13.206.046,00)
21	Pundong	6.233.037,28	25.084.548,00	(18.851.510,72)
22	Sanden	8.567.965,16	32.704.915,00	(24.136.949,84)
23	Sedayu I	8.312.663,70	8.117.100,15	195.563,55
24	Sedayu II	2.210.038,00	4.411.756,00	(2.201.718,00)
25	Sewon I	5.566.431,00	20.512.858,10	(14.946.427,10)
26	Sewon II	6.766.828,00	22.288.901,00	(15.522.073,00)
27	Srandakan	4.764.079,40	16.752.802,00	(11.988.722,60)
	Jumlah total Puskesmas	160.820.263,65	469.235.444,98	(308.415.181,33)
	RSLKC/RSSA	97.872.930,00	85.571.460,73	12.301.469,27
	Gudang Farmasi Kab. Bantul	381.663.297,54	1.599.181.237,52	(1.217.517.939,98)
	RSUD Panembahan Senopati	176.279.885,00	598.408.951,00	(422.129.066,00)
	JUMLAH	816.636.376,19	2.752.397.094,23	(1.935.760.718,04)

Mutasi obat kedaluwarsa tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Jumlah obat kedaluwarsa (awal)	2.752.397.094,23	911.509.177,25	1.840.887.916,98
2	Koreksi pencatatan atas tahun-tahun sebelumnya	-	-	-
3	Penambahan tahun berjalan	839.743.746,93	1.840.887.917	(1.001.144.170,05)
4	Jumlah obat yang dihapuskan tahun 2023	(2.775.504.464,97)	-	(2.775.504.464,97)
	Jumlah saldo obat kedaluwarsa	816.636.376,19	2.752.397.094,23	(1.935.760.718,04)

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	414.947.814.428,82	399.768.641.572,71	15.179.172.856,11
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai Investasi Non Permanen	-	-	-
5.3.1.2.2	Investasi Permanen	414.947.814.428,82	399.768.641.572,71	15.179.172.856,11

Investasi Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rincian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	219.538.404.519,25	219.587.929.796,59	(49.525.277,34)
5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	195.409.409.909,57	180.180.711.776,12	15.228.698.133,45
	Jumlah	414.947.814.428,82	399.768.641.572,71	15.179.172.856,11

Penjelasan dari masing-masing Investasi Permanen sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	219.538.404.519,25	219.587.929.796,59	(49.525.277,34)

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kepemilikan saham lebih dari 51%. Penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas

Nomor	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Perseroda Bank Bantul	126.515.322.850,00	125.006.662.761,00	1.508.660.089,00
2	Perumda Aneka Dharma	8.543.245.063,00	7.978.563.357,00	564.681.706,00
3	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	84.479.836.606,25	86.602.703.678,59	(2.122.867.072,34)
	Jumlah	219.538.404.519,25	219.587.929.796,59	(49.525.277,34)

Saldo penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Projotamansari per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.479.836.606,25 tidak sesuai dengan saldo ekuitas yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audited Perumda Air Minum Tirta Projotamansari per 31 Desember 2023 karena terdapat double catat atas penyertaan modal barang sebesar Rp22.336.502.880,00

Kebijakan penentuan penempatan Investasi permanen berupa penyetoran penyertaan modal untuk masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- Batasan kewajiban Penyetoran Modal (Modal Disetor) yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing BUMD.
- Situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelangsungan BUMD.
- Ketersediaan dana untuk Pengeluaran Pembiayaan dari APBD.
- Regulasi peraturan yang lebih tinggi yang mendasari operasional masing-masing BUMD

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	195.409.409.909,57	180.180.711.776,12	15.228.698.133,45

Saldo tersebut merupakan saldo investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul kepada:

Nomor	Investasi Permanen Lainnya	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Perseroan Terbatas Bank BPDDIY	190.441.000.000,00	177.241.000.000,00	13.200.000.000,00
2	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	825.999.833,99	825.999.833,99	-
3	PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM):	4.142.410.075,58	2.113.711.942,13	2.028.698.133,45
	Jumlah	195.409.409.909,57	180.180.711.776,12	15.228.698.133,45

Perseroan Terbatas Bank BPD DIY

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sejak tahun 2012 berubah status badan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT Bank BPD DIY) yang sebelumnya adalah Perusahaan Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD DIY menjadi PT BPD DIY.

Dasar hukum penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bantul kepada PT BPD DIY adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPD DIY.

Metode penghitungan investasinya menggunakan metode biaya

Saldo Investasi Permanen pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2023 dan 2022

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
190.441.000.000,00	177.241.000.000,00	13.200.000.000,00

Mutasi penyertaan modal ke PT. BPD DIY tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2022 dan 2021

Penambahan Penyertaan Modal TA 2023 dan 2022

Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 dan 2022

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
177.241.000.000,00	157.041.000.000,00	20.200.000.000,00
13.200.000.000,00	20.200.000.000,00	(7.000.000.000,00)
190.441.000.000,00	177.241.000.000,00	13.200.000.000,00

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah.

BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan dengan wilayah usaha yang terbatas pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan, sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan.

Metode penghitungan investasinya menggunakan metode biaya

Saldo Investasi Permanen pada BUKP per 31 Desember 2023 dan 2022

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
825.999.833,99	825.999.833,99	-

Untuk tahun 2023 tidak ada penyertaan modal kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sehingga penyertaan modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp825.999.833,99 untuk 17 BUKP se Kabupaten Bantul

PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM):

Pada tanggal 28 November 2023 telah terjadi perikatan jual beli antara Tim Likuidasi dengan PT. Soerja Agoeng Kentjana berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat atas sebidang tanah milik PT BKM (Dalam likuidasi) sertifikat HGB Nomor 00014/Sendangsari seluas 6.916 meter persegi yang tertuang dalam Akta Notaris Agustinus Janarko Sigit Prasetyo, SH.,M.Kn dengan Perikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 28 November 2023

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perikatan untuk jual beli dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jual beli sebidang tanah tersebut seharga Rp1.729.000.000,00
2. sesuai dengan kesepakatan para pihak pembayarannya disepakati sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pertama sebesar 10% dari harga transaksi sebesar Rp172.900.000,00 telah dibayarkan pada tanggal 28 November 2023

- b. Pembayaran kedua sebesar 40% dari harga transaksi sebesar Rp691.600.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2023
- c. Pembayaran ketiga sebesar 50% dari harga transaksi sebesar Rp864.500.000,00 akan dibayarkan saat penandatanganan Akta Pernyataan Lunas dan setelah proses pengecekan sertifikat dan validasi pajak PPH telah selesai dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2024.

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Investasi Permanen Lainnya pada PT. BKM (dalam likuidasi) per 31 Desember 2023 dan 2022:	4.142.410.075,58	2.113.711.942,13	2.028.698.133,45

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang
Saldo Kas	416.751,00	416.751,00	-
Saldo Bank	1.100.991.438,47	259.924.793,47	841.066.645,00
Kekurang pembayaran atas penjualan tanah (HGB 00014)	864.500.000,00	-	864.500.000,00
Sisa tanah sesuai dengan nilai laporan <i>appraisal</i>	4.824.928.000,00	3.204.760.000,00	1.620.168.000,00
	6.790.836.189,47	3.465.101.544,47	3.325.734.645,00
Pembagian hasil penjualan tanah tahun 2023	-	-	-
Jumlah uang yang dibagi	6.790.836.189,47	3.465.101.544,47	3.325.734.645,00
Jumlah Nilai investasi	4.142.410.075,58	2.113.711.942,13	2.028.698.133,45

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	2.880.650.606.330,87	2.843.087.291.989,14	37.563.314.341,73

Akun ini menggambarkan aset berwujud milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 .

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3	Aset Tetap	6.016.122.696.480,00	5.778.683.830.804,99	237.438.865.675,01
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(3.135.472.090.149,13)	(2.935.596.538.815,85)	(199.875.551.333,28)
	Nilai Buku Aset Tetap	2.880.650.606.330,87	2.843.087.291.989,14	37.563.314.341,73

Rincian Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.1	Tanah	579.954.608.048,00	580.066.622.548,00	(112.014.500,00)
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.069.346.685.886,79	1.000.913.175.629,20	68.433.510.257,59

5.3.1.3.3	Gedung & Bangunan	1.495.787.606.833,84	1.439.781.255.131,43	56.006.351.702,41
5.3.1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.785.233.822.699,23	2.675.892.391.386,40	109.341.431.312,83
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	85.799.973.012,14	82.030.386.109,96	3.769.586.902,18
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(3.135.472.090.149,13)	(2.935.596.538.815,85)	(199.875.551.333,28)
	Jumlah	2.880.650.606.330,87	2.843.087.291.989,14	37.563.314.341,73

Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Tahun 2022 Rp	Mutasi Tahun 2023		Saldo Tahun 2023 Rp
		Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
5.3.1.3.1 Tanah	580.066.622.548,00	4.519.584.420,00	(4.631.598.920,00)	579.954.608.048,00
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	1.000.913.175.629,20	120.713.772.513,87	(52.280.262.256,28)	1.069.346.685.886,79
5.3.1.3.3 Gedung & Bangunan	1.439.781.255.131,43	133.847.841.694,41	(77.841.489.992,00)	1.495.787.606.833,84
5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan	2.675.892.391.386,40	263.876.949.894,07	(154.535.518.581,24)	2.785.233.822.699,23
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	82.030.386.109,96	15.001.684.629,01	(11.232.097.726,83)	85.799.973.012,14
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	5.778.683.830.804,99	(300.520.967.476,35)	6.016.122.696.480,00

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.1 Tanah	579.954.608.048,00	580.066.622.548,00	-112.014.500,00

Mutasi Tanah:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang
Saldo awal Tanah	580.066.622.548,00	574.701.276.878,00	5.365.345.670,00
Penambahan:	4.519.584.420,00	8.432.708.620,00	(3.913.124.200,00)
Realisasi Belanja Modal tahun 2022 dan 2021	-	8.247.988.540,00	(8.247.988.540,00)
Mutasi antar OPD	4.519.584.420,00	-	4.519.584.420,00
Penerimaan Hibah Barang	-	-	-
Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	-	184.720.080,00	-
Pengurangan:	(4.631.598.920,00)	(3.067.362.950,00)	(1.564.235.970,00)
Pemberian Hibah Barang ke Propinsi	-	(46.472.000,00)	46.472.000,00
Penghapusan	-	(3.020.890.950,00)	3.020.890.950,00
Penyertaan modal barang ke Perumdam Tirta Projotamansari	(112.014.500,00)	-	-
Mutasi antar OPD	(4.519.584.420,00)	-	(4.519.584.420,00)
Saldo akhir Tanah	579.954.608.048,00	580.066.622.548,00	-112.014.500,00

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah sebagai aset tetap tanah ada yang dikuasai atau di dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan bentuk pemanfaatan secara sewa dan pinjam pakai. Barang milik daerah tersebut tetap di catat sebagai barang milik daerah (Aset Tetap) kabupaten.

Untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul juga menggunakan tanah yang bukan milik daerah dengan sistem sewa, pinjam pakai atau kompensasi, yang terdiri dari tanah milik pemda lain, Tanah Kas Desa dan Tanah Kasultanan.

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.925.465.000,00	2.925.465.000,00	-
2	Inspektorat Daerah	26.113.580,00	26.113.580,00	-
3	Dinas Pendidikan Kepumudaaan dan Olah Raga	14.195.696.493	14.971.492.493,00	(775.796.000,00)
4	Dinas Kesehatan	606.376.500,00	3.013.248.920,00	(2.406.872.420,00)
5	DPUPKP	420.877.946.496,00	420.877.946.496,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	248.624.000,00	(248.624.000,00)
7	DISNAKERTRANS	97.800.000,00	97.800.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.150.511.250,00	2.150.511.250,00	-
10	Dinas Kedudayaan	26.095.675.000,00	26.095.675.000,00	-
11	Dinas Pariwisata	44.772.000,00	44.772.000,00	-
12	BPKPAD	50.566.209.271,00	49.966.299.771,00	599.909.500,00
13	RSUD Panembahan Senopati	45.000.000,00	45.000.000,00	-
14	RSUD Saras Adyatma	2.406.872.420,00	-	2.406.872.420,00
15	BPBD	377.421.375,00	377.421.375,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	788.025.000,00	788.025.000,00	-
17	Kapanewon Kretek	187.975.000,00	187.975.000,00	-
18	Kapanewon Imogiri	648.200.000,00	648.200.000,00	-
19	Bagian Umum dan Protokol	9.013.350.000,00	9.013.350.000,00	-
20	DKUKMP	44.172.451.514,00	44.172.451.514,00	-
21	Dinas Sosial	155.833.400,00	155.833.400,00	-
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	219.092.749,00	219.092.749,00	-
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	248.624.000,00	-	248.624.000,00

24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.997.000,00	16.125.000,00	63.872.000,00
	JUMLAH	579.954.608.048,00	580.066.622.548,00	(112.014.500,00)

Daftar Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dan daftar Tanah milik pihak lain yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Bab VI

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.069.346.685.886,79	1.000.913.175.629,20	68.433.510.257,59

Mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Peralatan dan Mesin	1.000.913.175.629,20	944.028.237.113,99	56.884.938.515,21
Mutasi tambah	120.713.772.513,87	150.103.628.791,78	(29.389.856.277,91)
Realisasi Belanja modal	76.046.486.634,86	70.206.003.149,45	5.840.483.485,41
Penerimaan Hibah Barang	7.169.852.460,00	3.291.713.304,00	3.878.139.156,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	1.276.510.060,01	80.710.000,00	1.195.800.060,01
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	79.513.500,00	696.293.249,03	(616.779.749,03)
Kapitalisasi dari Belanja DAK	4.062.498,00	5.816.722.288,00	(5.812.659.790,00)
Kapitalisasi dari Belanja DANAIS	-	370.583.200,00	(370.583.200,00)
Mutasi antar OPD (Droping Masuk)	35.408.658.421,00	45.232.419.236,30	(9.823.760.815,29)
Barang ditemukan (Koreksi penambahan)	-	52.261.000,00	(52.261.000,00)
Kapitalisasi dari Persediaan	39.157.140,00	103.922.300,00	(64.765.159,99)
Kapitalisasi dari Ekstracomptable	-	25.323.901,00	(25.323.901,00)
Kapitalisasi dari Belanja BLUD	-	4.680.309.711,00	(4.680.309.711,00)
Kapitalisasi dari Belanja BOSNAS	677.281.800,00	13.784.354.881,01	(13.107.073.081,01)
Kapitalisasi dari Belanja Danais	12.250.000,00	5.201.759.101,00	(5.189.509.101,00)
Reklasifikasi akun	-	561.253.471,00	(561.253.471,00)
Mutasi kurang	(52.280.262.256,28)	(93.218.690.276,57)	40.938.428.020,29
Reklasifikasi ke persediaan	(1.649.329.096,00)	-	(1.649.329.096,00)
Pemberiaan Hibah	(24.200.000,00)	(534.723.000,00)	510.523.000,00
Penghapusan	(23.789.827.825,00)	(24.885.321.664,69)	1.095.493.839,69

Mutasi antar OPD	(25.939.732.883,00)	(66.791.791.623,35)	40.852.058.740,35
Kurang catat	(402.577.100,88)	(184.582.054,00)	(217.995.046,88)
Reklas anggaran	(355.978.680,40)	(124.999.000,00)	(230.979.680,40)
Ekstracomptable	(118.616.671,00)	(697.272.934,53)	578.656.263,53
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	1.069.346.685.886,79	1.000.913.175.629,20	79.982.081.999,97

Sebagian aset tetap peralatan dan mesin di pinjam oleh pihak lain (Instansi Vertikal) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT), Rumah Tahanan Negara, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0729 Bantul, KPU dan BPN (Kantor Pertanahan dan Bawaslu).

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul perihal pencatatan aset tetap Peralatan dan mesin, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mencatat aset tetap peralatan mesin dengan nilai di bawah Rp300.000,00 sebesar Rp31.390.904.952,73

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp15.283.022.064,00 berupa kendaraan ros 2, roda 3, roda 4 dan roda 6 serta barang inventaris kantor .

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	648.317.840,04	611.212.806,04	37.105.034,00
2	Bagian Hukum	598.718.680,00	577.467.680,00	21.251.000,00
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.754.720.827,16	2.492.168.384,32	262.552.442,84
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.997.051.595,00	1.987.284.035,00	9.767.560,00
5	Bagian Organisasi	963.201.614,00	865.144.614,00	98.057.000,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.087.066.464,32	16.118.320.464,32	1.968.746.000,00
7	Inspektorat Daerah	3.668.900.460,01	3.324.694.460,01	344.206.000,00
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	254.838.970.104,67	238.218.225.567,07	16.620.744.537,61
9	Dinas Kesehatan	140.051.365.726,00	140.837.457.658,23	(786.091.932,23)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17.034.016.544,00	17.659.978.394,00	(625.961.850,00)
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3.814.272.437,00	2.966.930.437,00	847.342.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	6.915.601.903,00	6.634.993.429,00	280.608.474,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.266.994.781,36	4.075.719.123,46	191.275.657,90
14	Dinas Perhubungan	27.041.027.848,83	26.412.409.568,82	628.618.280,01
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.495.732.335,34	9.814.678.166,01	(318.945.830,67)
16	Dinas Lingkungan Hidup	39.868.621.516,62	36.865.399.260,61	3.003.222.256,01
17	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1.962.930.258,01	1.882.707.418,01	80.222.840,00
18	Dinas Pariwisata	6.178.972.042,88	5.460.806.596,02	718.165.446,86
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.066.054.541,11	4.849.757.745,50	216.296.795,61
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.638.661.307,82	39.609.953.625,82	3.028.707.682,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.506.738.774,50	7.462.562.944,50	44.175.830,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.079.672.864,00	6.264.341.021,00	(184.668.157,00)
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	28.556.345.209,00	26.794.289.290,05	1.762.055.918,95
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.060.856.567,01	5.321.196.466,01	(260.339.899,00)
25	RSUD Panempahan Senopati	296.072.520.662,81	273.819.696.654,82	22.252.824.007,99
26	RSUD Saras Adyatma	7.277.726.864,95	-	7.277.726.864,95
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.539.689.998,00	14.634.379.828,00	5.905.310.170,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.808.006.293,00	1.520.535.293,00	287.471.000,00
29	Kapanewon Srandakan	1.363.345.844,50	1.320.801.104,50	42.544.740,00
30	Kapanewon Sanden	1.205.026.342,00	1.090.070.810,00	114.955.532,00
31	Kapanewon Pajangan	1.217.261.022,00	1.204.773.842,00	12.487.180,00
32	Kapanewon Sedayu	1.349.971.987,50	1.331.755.987,50	18.216.000,00
33	Kapanewon Pandak	1.362.064.897,00	1.294.704.417,00	67.360.480,00
34	Kapanewon Kasihan	1.573.450.773,00	1.567.083.858,00	6.366.915,00
35	Kapanewon Bantul	1.290.689.008,00	1.227.689.008,00	63.000.000,00
36	Kapanewon Bambanglipuro	1.144.947.600,00	1.109.822.600,00	35.125.000,00
37	Kapanewon Kretek	1.247.693.380,00	1.194.480.880,00	53.212.500,00
38	Kapanewon Pundong	1.460.024.914,00	1.401.494.914,00	58.530.000,00
39	Kapanewon Sewon	1.261.972.531,00	1.272.435.531,00	(10.463.000,00)
40	Kapanewon Jetis	1.359.172.696,00	1.408.127.569,00	(48.954.873,00)
41	Kapanewon Imogiri	1.324.758.995,00	1.316.551.315,00	8.207.680,00
42	Kapanewon Dlingo	1.366.248.037,50	1.355.371.037,50	10.877.000,00
43	Kapanewon Pleret	1.290.814.050,00	1.259.066.550,00	31.747.500,00
44	Kapanewon Banguntapan	1.589.735.833,50	1.516.305.623,50	73.430.210,00
45	Kapanewon Piyungan	1.225.217.221,17	1.160.869.626,17	64.347.595,00
46	Bagian Umum dan Protokol	24.874.320.851,38	22.562.665.046,38	2.311.655.805,00
47	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.198.265.193,55	972.078.133,55	226.187.060,00
48	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	656.582.000,00	681.620.000,00	(25.038.000,00)
49	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	15.729.490.155,12	15.542.492.901,36	186.997.253,75
50	Dinas Sosial	7.221.748.620,80	6.752.815.139,80	468.933.481,00
51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.414.054.161,02	16.615.659.791,02	798.394.370,00
52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.996.979.394,51	10.074.458.690,51	(1.077.479.296,00)
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2.697.859.352,50	1.965.651.767,50	732.207.585,00
54	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.132.234.955,30	6.632.018.555,30	500.216.400,00
	JUMLAH	1.069.346.685.876,79	1.000.913.175.629,20	68.433.510.247,60

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.495.787.606.833,84	1.439.781.255.131,43	56.006.351.702,41

Mutasi Gedung dan Bangunan adalah:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Gedung dan Bangunan	1.439.781.255.131,43	1.394.672.601.555,26	45.108.653.576,17
Mutasi tambah	133.847.841.694,41	84.986.457.990,17	48.861.383.704,24
Realisasi Belanja Modal	32.716.587.212,88	37.780.797.101,00	-5.064.209.888,12
Penerimaan Hibah Barang	27.666.474.056,00	13.456.171.100,75	14.210.302.955,25
Mutasi antar OPD	69.996.958.710,00	27.918.657.440,30	42.078.301.269,70
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-	1.274.785.731,00	-1.274.785.731,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	3.432.831.715,53	2.497.623.243,00	935.208.472,53
Reklas akun	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Penggunaan Kembali bongkaran	9.990.000,00	-	9.990.000,00
Koreksi penambahan	-	80.871.999,12	-80.871.999,12
Kapitalisasi dari Belanja DAK	-	1.977.551.375,00	-1.977.551.375,00
Lebih catat	-	547.606.133,00	-547.606.133,00
Reklasifikasi akun	-	238.368.000,00	-238.368.000,00
Kapitalisasi dari Belanja BOSNAS	-	108.945.133,00	-108.945.133,00
Kapitalisasi dari Belanja BOSDA	-	52.816.000,00	-52.816.000,00
Kapitalisasi dari Belanja BOS KINERJA	-	13.997.100,00	-13.997.100,00
Kapitalisasi dari Belanja BTT	-	50.000.000,00	-50.000.000,00
Koreksi Penilaian	-	301.079.986,30	-301.079.986,30
Mutasi Kurang	(77.841.489.992,00)	(39.877.804.414,00)	-37.963.685.578,00
Pemberian Hibah Barang	(2.778.248.255,00)	(4.060.964.617,00)	1.282.716.362,00
Penghapusan	(5.788.908.941,00)	(4.804.624.878,00)	-984.284.063,00
Persediaan	-	(70.800.600,00)	70.800.600,00
Kurang Catat	(195.280.139,00)	(649.518.574,00)	454.238.435,00
Reklas ke belanja barjas	-	-	-
Reklasifikasi akun	(10.003.062,00)	(1.071.409.282,00)	1.061.406.220,00

Pemeliharaan	-	-	-
Mutasi antar OPD	(69.069.049.595)	(29.220.486.463)	-39.848.563.132,00
Droping	-	-	-
BLUD	-	-	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-	-	-
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-	-	-
Atribusi yang belum tercatat	-	-	-
Saldo akhir Gedung dan Bangunan	1.495.787.606.833,84	1.439.781.255.131,43	65.591.237.476,35

Saldo akhir Gedung dan Bangunan per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	301.277.000,00	301.277.000,00	-
2	Bagian Hukum	-	-	-
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.583.048.159,24	2.583.048.159,24	-
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.221.423.000,00	7.256.073.000,00	(34.650.000)
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.939.729.583,00	1.939.729.583,00	-
6	Inspektorat Daerah	203.257.000,00	185.157.000,00	18.100.000
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	582.637.867.014,99	579.242.580.071,99	3.395.286.943
8	Dinas Kesehatan	128.972.823.208,10	136.545.932.656,22	(7.573.109.448)
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	141.277.606.110,00	115.661.081.196,00	25.616.524.914
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.826.249.337,00	2.281.812.785,00	544.436.552
11	Satuan Polisi Pamong Praja	120.916.350,00	1.591.615.350,00	(1.470.699.000)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	526.042.700,00	528.800.700,00	(2.758.000)
13	Dinas Perhubungan	13.313.765.620,00	13.182.648.123,00	131.117.497
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.439.353.805,00	2.439.353.805,00	-
15	Dinas Lingkungan Hidup	26.566.551.707,65	25.263.154.845,65	1.303.396.862
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	6.208.378.650,46	6.117.799.650,46	90.579.000
17	Dinas Pariwisata	54.704.426.851,59	54.027.423.096,29	677.003.755
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.309.797.418,00	3.462.765.118,00	3.847.032.300
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.182.246.596,00	1.182.246.596,00	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.406.776.650,00	5.936.077.650,00	1.470.699.000
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12.754.593.215,20	18.512.365.684,20	(5.757.772.469)
22	RSUD Panempahan Senopati	78.670.387.770,79	78.347.266.886,79	323.120.884

23	RSUD Saras Adyatma	8.256.665.029,00	-	8.256.665.029
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.795.626.797,00	5.771.725.897,00	10.023.900.900
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	704.063.000,00	669.413.000,00	34.650.000
26	Kapanewon Srandakan	2.760.767.739,00	2.760.767.739,00	-
27	Kapanewon Sanden	3.124.881.097,00	2.916.456.897,00	208.424.200
28	Kapanewon Pajangan	3.251.098.188,00	3.251.098.188,00	-
29	Kapanewon Sedayu	1.456.835.797,00	1.456.835.797,00	-
30	Kapanewon Pandak	2.003.816.087,00	1.983.652.127,00	20.163.960
31	Kapanewon Kasihan	2.239.586.484,00	2.239.586.484,00	-
32	Kapanewon Bantul	2.219.096.284,00	2.219.096.284,00	-
33	Kapanewon Bambanglipuro	1.705.602.372,00	1.705.602.372,00	-
34	Kapanewon Kretek	1.116.205.687,00	1.116.205.687,00	-
35	Kapanewon Pundong	2.428.387.578,00	2.418.387.578,00	10.000.000
36	Kapanewon Sewon	2.815.513.759,00	2.617.197.859,00	198.315.900
37	Kapanewon Jetis	2.242.085.565,00	2.242.085.565,00	-
38	Kapanewon Imogiri	2.433.766.358,00	2.311.315.858,00	122.450.500
39	Kapanewon Dlingo	2.694.977.017,00	2.750.977.017,00	(56.000.000)
40	Kapanewon Pleret	2.241.945.869,00	2.225.775.989,00	16.169.880
41	Kapanewon Banguntapan	1.288.512.200,00	1.288.512.200,00	-
42	Kapanewon Piyungan	2.914.305.438,00	2.852.126.234,00	62.179.204
43	Bagian Umum dan Protokol	45.867.646.226,48	34.274.541.886,48	11.593.104.340
44	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	235.415.432.490,31	235.303.155.145,31	112.277.345
45	Dinas Sosial	7.274.916.349,78	6.683.239.449,78	591.676.900
46	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.658.046.691,02	26.572.783.292,02	1.085.263.399
47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.428.698.634,00	7.428.698.634,00	-
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2.758.320.666,00	2.279.387.450,00	478.933.216
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	26.524.289.684,23	25.854.421.545,00	669.868.139
	Jumlah	1.495.787.606.833,84	1.439.781.255.131,43	56.006.351.702,41

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.524.157.196,00.

Sebagian Aset Tetap Gedung dan Bangunan ada yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan bentuk Pemanfaatan Sewa, Pinjam Pakai, atau Penggunaan untuk dioperasikan pihak lain.

Terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan telah diterapkan Penyusutan, termasuk Gedung dan Bangunan yang dimanfaatkan oleh Pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Bab VI.

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.785.233.822.699,23	2.675.892.391.386,40	109.341.431.312,83

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan Jalan,Irigasi dan jaringan sebesar Rp6.067.036.352,00.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.675.892.391.386,40	2.574.516.256.456,05	101.376.134.930,35
Mutasi tambah	263.876.949.894,07	169.478.535.012,50	94.398.414.881,57
Realisasi Belanja Modal	110.642.014.782,07	98.155.322.270,36	12.486.692.511,71
Penerimaan Hibah Barang	24.511.444.900,00	5.952.252.250,00	18.559.192.650,00
Kapitalisasi dari BelanjaPemeliharaan	20.039.000,00	-	20.039.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	30.458.000,00	(28.158.000,00)
Mutasi antar OPD	128.316.605.212,00	277.030.000,00	128.039.575.212,00
Reklasifikasi akun	384.546.000,00	547.587.921,00	(163.041.921,00)
Koreksi penambahan	-	18.997.999,14	(18.997.999,14)
Kapitalisasi dari Belanja BOSNAS	-	13.200.000,00	(13.200.000,00)
Kapitalisasi dari Belanja BOS KINERJA	-	7.500.000,00	(7.500.000,00)
Kapitalisasi dari Belanja DAK	-	100.242.300,00	(100.242.300,00)
Barang ditemukan	-	64.375.944.272,00	(64.375.944.272,00)
Mutasi kurang	(154.535.518.581,24)	(68.102.400.082,15)	(86.433.118.499,09)
Pemberian Hibah	(1.992.325.360,00)	(95.434.750,00)	(1.896.890.610,00)
Penghapusan	(6.393.756.355,24)	(965.892.900,00)	(5.427.863.455,24)
Reklasifikasi akun	-	(1.842.616.410,00)	1.842.616.410,00
Kurang Catat	(22.111.982.654,00)	(3.375.000,00)	(22.108.607.654,00)
Mutasi antar OPD	(124.037.454.212,00)	(819.136.750,00)	(123.218.317.462,00)
Tahap pendataan kembali	-	(64.375.944.272,15)	64.375.944.272,15
Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.785.233.822.699,23	2.675.892.391.386,40	109.341.431.312,83

Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Hukum	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2	Inspektorat Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	-
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.271.556.086,77	13.034.580.586,99	236.975.499,78
4	Dinas Kesehatan	1.907.305.467,00	1.950.312.967,00	(43.007.500,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.504.547.456.119,44	2.360.944.480.777,54	143.602.975.341,90
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	220.000.000,00	-	220.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	8.800.000,00	(8.800.000,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.300.000,00	21.300.000,00	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

9	Dinas Perhubungan	147.103.141.303,08	126.619.746.083,07	20.483.395.220,01
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	191.298.000,00	191.298.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	13.187.081.779,17	10.079.933.488,17	3.107.148.291,00
12	Dinas Pariwisata	12.998.523.342,07	12.824.472.069,00	174.051.273,07
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.075.000,00	22.075.000,00	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	934.270.500,00	533.695.500,00	400.575.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.191.800,00	155.391.800,00	8.800.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	59.304.473.568,33	55.249.451.109,11	4.055.022.459,22
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	-	2.750.000,00	(2.750.000,00)
18	RSUD Panempahan Senopati	17.057.152.679,00	17.057.152.679,00	-
19	RSUD Saras Adyatma	43.007.500,00	-	43.007.500,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	959.267.500,00	64.529.418.272,15	(63.570.150.772,15)
21	Kapanewon Srandakan	2.200.000,00	2.200.000,00	-
22	Kapanewon Sanden	7.782.800,00	7.782.800,00	-
23	Kapanewon Pajangan	10.470.000,00	10.470.000,00	-
24	Kapanewon Sedayu	2.500.000,00	2.500.000,00	-
25	Kapanewon Pandak	8.743.900,00	8.743.900,00	-
26	Kapanewon Kasihan	1.700.000,00	1.700.000,00	-
27	Kapanewon Bantul	6.990.000,00	6.990.000,00	-
28	Kapanewon Kretek	1.100.000,00	1.100.000,00	-
29	Kapanewon Pundong	30.000,00	30.000,00	-
30	Kapanewon Sewon	26.850.000,00	26.850.000,00	-
31	Kapanewon Jetis	5.412.750,00	5.412.750,00	-
32	Kapanewon Imogiri	30.200.000,00	30.200.000,00	-
33	Kapanewon Dlingo	11.362.000,00	11.362.000,00	-
34	Kapanewon Pleret	2.500.000,00	2.500.000,00	-
35	Kapanewon Banguntapan	8.000.000,00	8.000.000,00	-
36	Bagian Umum dan Protokol	2.969.613.368,00	2.969.613.368,00	-
37	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	691.809.896,00	691.809.896,00	-
38	Dinas Sosial	20.039.000,00	-	20.039.000,00
39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.857.524.949,37	4.175.024.949,37	(317.500.000,00)
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.678.478,00	113.678.478,00	-
41	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan	931.650.000,00	-	931.650.000,00
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.571.264.913,00	4.571.264.913,00	-
	Jumlah	2.785.233.822.699,23	2.675.892.391.386,40	109.341.431.312,83

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	85.799.973.012,14	82.030.386.109,96	3.769.586.902,18

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan terhadap jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp2.968.520.723,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Aset Tetap Lainnya	82.030.386.109,96	79.576.885.504,48	2.453.500.605,48
Mutasi tambah	15.001.684.629,01	12.853.389.417,99	2.148.295.211,02
Realisasi Belanja Modal	8.268.805.559,00	7.308.308.697,00	960.496.862,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	893.750,00	397.685.312,00	(396.791.562,00)
Hasil inventarisasi ulang	-	247.500,00	(247.500,00)
Mutasi antar OPD	6.731.985.320,01	90.931.580,00	6.641.053.740,01
Kapitalisasi dari Belanja BOSNAS	-	3.826.061.399,98	(3.826.061.399,98)
Kapitalisasi dari Belanja BOSDA	-	1.091.269.962,01	(1.091.269.962,01)
Kapitalisasi dari Belanja BOS Kinerja	-	135.340.967,00	(135.340.967,00)
Kapitalisasi dari Belanja BTT	-	64.000,00	(64.000,00)
Kapitalisasi dari Belanja BLUD	-	3.480.000,00	(3.480.000,00)
Mutasi kurang	(11.232.097.726,83)	(10.399.888.812,52)	(832.208.914,32)
Mutasi antar OPD		(7.086.476.199,00)	7.086.476.199,00
Penghapusan	(2.969.292.167,83)	(3.148.386.115,52)	179.093.947,68
Reklas ke ATB	(1.011.013.569,00)	-	(1.011.013.569,00)
BOS	(7.112.878.260)	-	(7.112.878.260,00)
BLUD	(48.913.730,00)	-	(48.913.730,00)
Reklasifikasi akun	(90.000.000,00)	(165.026.498,00)	75.026.498,00
Saldo akhir Aset Tetap Lainnya	85.799.973.012,14	82.030.386.109,96	3.769.586.902,18

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	64.756.833,00	64.756.833,00	-
2	Bagian Hukum	107.829.500,00	107.829.500,00	-
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	452.700,00	452.700,00	-
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-
5	Bagian Organisasi	8.740.832,96	8.740.832,96	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	182.128.008,00	170.628.008,00	11.500.000,00
7	Inspektorat Daerah	44.262.091,32	44.012.091,32	250.000,00
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	75.976.142.025,00	72.219.379.490,28	3.756.762.534,72
9	Dinas Kesehatan	206.857.726,00	209.107.726,00	(2.250.000,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	30.052.857,00	32.452.857,00	(2.400.000,00)
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	242.857,00	242.857,00	-
12	Satuan Polisi Pamong Praja	7.729.190,00	7.479.190,00	250.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	492.857,00	242.857,00	250.000,00
14	Dinas Perhubungan	2.816.767.252,32	2.816.395.002,32	372.250,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.372.190,00	2.372.190,00	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	422.157.027,00	422.157.027,00	-
17	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	467.512.057,00	467.512.057,00	-
18	Dinas Pariwisata	680.690,32	680.690,32	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.246.570,32	54.246.570,32	-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.880.357,00	49.880.357,00	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.891.535.992,90	3.889.535.992,90	2.000.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.670,00	12.000.670,00	-
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.930.857,00	4.680.857,00	250.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	23.102.357,00	28.420.907,00	(5.318.550,00)
25	RSUD Panempahan Senopati	22.499.251,00	22.499.251,00	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.099.077,00	50.099.077,00	-
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.461.057,00	14.461.057,00	-
28	Kapanewon Srandakan	909.357,00	659.357,00	250.000,00
29	Kapanewon Sanden	492.857,00	242.857,00	250.000,00
30	Kapanewon Pajangan	492.857,00	242.857,00	250.000,00
31	Kapanewon Sedayu	1.178.190,32	928.190,32	250.000,00
32	Kapanewon Pandak	1.865.690,32	1.615.690,32	250.000,00
33	Kapanewon Kasihan	2.184.190,32	1.934.190,32	250.000,00
34	Kapanewon Bantul	4.443.690,32	4.193.690,32	250.000,00
35	Kapanewon Bambanglipuro	786.875,00	786.875,00	-
36	Kapanewon Kretek	1.568.190,32	1.318.190,32	250.000,00
37	Kapanewon Pundong	1.940.357,00	1.690.357,00	250.000,00
38	Kapanewon Sewon	19.834.190,00	19.584.190,00	250.000,00
39	Kapanewon Jetis	27.273.440,32	27.023.440,32	250.000,00
40	Kapanewon Imogiri	1.643.690,32	1.393.690,32	250.000,00
41	Kapanewon Dlingo	1.427.190,02	1.177.190,02	250.000,00
42	Kapanewon Pleret	1.815.690,32	1.565.690,32	250.000,00

43	Kapanewon Banguntapan	11.737.440,32	11.487.440,32	250.000,00
44	Kapanewon Piyungan	740.357,00	490.357,00	250.000,00
45	Bagian Umum dan Protokol	215.780.733,32	211.780.733,32	4.000.000,00
46	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.205.000,00	1.205.000,00	-
47	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.703.630,32	6.453.630,32	250.000,00
48	Dinas Sosial	242.857,00	1.072.190,00	(829.333,00)
49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.032.592.965,00	1.032.592.965,00	-
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	492.857,00	242.857,00	250.000,00
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	687.833,00	437.833,00	250.000,00
	Jumlah	85.799.973.011,68	82.030.386.109,96	3.769.586.901,73

5.4.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
-	-	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
3.135.472.090.149,13	2.935.596.538.815,85	199.875.551.333,28

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penghitungan penyusutan Aset Tetap telah menggunakan aplikasi SIMAS. Nilai penyusutan yang disajikan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai penyusutan aset tetap.

Rincian Akumulasi Penyusutan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi Penyusutan dari Pengungkapan Saldo awal berdasarkan pencatatan SIMAS	2.935.596.538.815,85	2.731.082.314.804,04	204.514.224.011,81
Penyusutan Tahun berjalan	-	-	-
Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.610.108.703,40	79.694.250.246,73	(6.084.141.543,33)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.257.046.626,12	31.550.296.306,25	4.706.750.319,87
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.008.396.003,76	93.269.677.458,83	(3.261.281.455,07)
Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun	3.135.472.090.149,13	2.935.596.538.815,85	199.875.551.333,28

Akumulasi Penyusutan dari Pengungkapan Saldo awal berdasarkan pencatatan Simda BMD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	888.892.626.080,56	815.349.271.830,36	73.543.354.250,20

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	378.825.073.285,87	342.577.273.379,75	36.247.799.906,12
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.867.754.390.782,70	1.777.745.994.778,94	90.008.396.003,76
	3.135.472.090.149,13	2.935.672.539.989,05	199.799.550.160,08

Perhitungan penyusutan aset :

1	Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Saldo Awal	815.349.271.830,36	735.655.021.583,63	(79.694.250.246,73)
	Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	87.016.499.949,70	98.247.066.413,65	11.230.566.463,95
	Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	902.365.771.780,06	833.902.087.997,28	(68.463.683.782,78)
	Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	888.892.626.080,56	815.349.271.830,36	(73.543.354.250,20)
	koreksi penyusutan tahun berjalan	(13.473.145.699,50)	(18.552.816.166,92)	(5.079.670.467,42)
	Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	73.543.354.250,20	79.694.250.246,73	6.150.895.996,53
	koreksi penyusutan tahun lalu	66.754.453,20		
	Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan setelah koreksi	73.610.108.703,40		
2	Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Saldo Awal	342.577.273.379,75	311.026.977.073,50	(31.550.296.306,25)
	Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	29.768.789.161,15	28.700.531.647,15	(1.068.257.514,00)
	Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	372.346.062.540,90	339.727.508.720,65	(32.618.553.820,25)
	Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	378.825.073.285,87	342.577.273.379,75	(36.247.799.906,12)
	koreksi penyusutan tahun berjalan	6.479.010.744,97	2.849.764.659,10	(3.629.246.085,87)
	Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	36.247.799.906,12	31.550.296.306,25	(4.697.503.599,87)
	koreksi penyusutan tahun lalu	9.246.720,00		
	Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan setelah koreksi	36.257.046.626,12		
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Saldo Awal	1.777.745.994.778,94	1.684.476.317.320,11	(93.269.677.458,83)
	Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	90.609.154.608,57	94.007.497.321,66	3.398.342.713,09
	Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	1.868.355.149.387,51	1.778.483.814.641,77	(89.871.334.745,74)
	Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	1.867.754.390.782,70	1.777.745.994.778,94	(90.008.396.003,76)
	koreksi penyusutan tahun berjalan	(600.758.604,81)	(737.819.862,83)	(137.061.258,02)
	Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	90.008.396.003,76	93.269.677.458,83	3.261.281.455,07

Akumulasi penyusutan mengalami penyesuaian dikarenakan terjadi perubahan cara penilaian aset yang disusutkan antara lain:

- 1 Untuk penambahan masa manfaat yang diakibatkan adanya pemeliharaan maka masa manfaat aset tetap tersebut tidak melebihi masa manfaat awal, sehingga dalam penghitungan penyusutan pembagi untuk masa manfaat tidak melebihi masa manfaat awal;

2 Penghitungan penyusutan setelah pemeliharaan berdasarkan dari nilai buku terakhir.

5.4.1.4 Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak mempunyai dana cadangan

5.4.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, maupun Dana Cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.5.1	Tagihan Piutang (Piutang pajak pemnfaatan ABT, piutang kepada PO Jatayu, Piutang UMK dana SO)	15.311.414,00	15.311.414,00	-
5.4.1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
5.4.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	30.036.435.380,43	24.175.510.060,43	5.860.925.320,00
5.4.1.5.4	Aset Lain-Lain	-	4.232.673.062,00	(4.232.673.062,00)
5.4.1.5.5	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.888.802.321,00	1.893.318.146,00	(4.515.825,00)
5.4.1.5.6	Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud	(21.470.023.582,80)	(16.333.937.538,00)	(5.136.086.044,80)
	Jumlah Aset Lainnya	10.470.525.532,63	13.982.875.144,43	(3.512.349.611,80)

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.5.1 Tagihan Piutang	15.311.414,00	15.311.414,00	-

Tagihan Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Pajak Pemanfaatan ABT			
Piutang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan piutang yang disebabkan adanya pengalihan penanggungjawab pengelolaan pajak ABT dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi tahun 2006	8.232.414,00	8.232.414,00	-
Piutang kepada PO Jatayu			
Piutang yang diakibatkan adanya tunggakan retribusi pariwisata dari PO Jatayu yang belum dibayarkan per 31 Desember 2005 dan belum dilunasi karena PO Jatayu sudah tidak melayani jalur reguler ke Pantai Parangtritis	800.000,00	800.000,00	-
Piutang UMK Dana SO			

Piutang tersebut merupakan koreksi LHP BPK atas LKD Tahun 2004 dari Pos Aset Tetap hasil pembelian dari Kegiatan Supporting Organisasi di reklasifikasi ke piutang	6.279.000,00	6.279.000,00	-
Jumlah	15.311.414,00	15.311.414,00	-

Per 31 Desember 2023 (Rp) Per 31 Desember 2022 (Rp) Bertambah/Berkurang (Rp)

5.4.1.5.2 TGR

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai saldo Tuntutan Ganti Rugi

- - -

5.4.1.5.3 Aset Tak berwujud

Aset tersebut merupakan aset berupa Program/software yang ada dibereskan SKPD yang dulunya ada di ast tetap dengan perincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2023 (Rp) Per 31 Desember 2022 (Rp) Bertambah/Berkurang (Rp)

30.036.435.380,43 24.175.510.060,43 5.860.925.320,00

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Nilai Aset Tak Berwujud awal	24.175.510.060,43	25.046.927.422,43	(871.417.362,00)
Penambahan	6.811.961.020,00	4.416.124.944,00	2.395.836.076,00
Penghapusan	951.035.700,00	5.287.542.306,00	(4.336.506.606,00)
Saldo akhir Aset Tak berwujud	30.036.435.380,43	24.175.510.060,43	(2.812.087.892,00)

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Organisasi	108.775.950,00	65.115.850,00	43.660.100,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	134.024.000,00	134.024.000,00	-
3	Inspektorat Daerah	211.031.800,00	211.031.800,00	-
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.023.023.648,00	1.005.974.138,43	17.049.509,57
5	Dinas Kesehatan	739.826.000,00	698.326.000,00	41.500.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.693.075.400,00	9.296.546.250,00	2.396.529.150,00
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	862.035.700,00	0	862.035.700,00
8	Dinas Perhubungan	1.021.377.800,00	580.562.000,00	440.815.800,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103.790.400,00	94.200.000,00	9.590.400,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	225.781.000,00	60.336.000,00	165.445.000,00
11	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan)	1.667.814.865,00	1.241.485.865,00	426.329.000,00
12	Dinas Pariwisata	793.266.000,00	767.512.500,00	25.753.500,00

13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	380.764.000,00	380.764.000,00	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.552.168.030,00	2.972.917.520,00	579.250.510,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	430.502.900,00	430.502.900,00	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.180.056.700,00	3.180.056.700,00	-
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.482.527.887,00	1.321.704.887,00	160.823.000,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	314.013.500,00	214.118.400,00	99.895.100,00
19	RSUD Panempahan Senopati	74.467.950,00	25.134.000,00	49.333.950,00
20	RSUD Saras Adyatma	78.321.600,00	-	78.321.600,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.586.000,00	-	149.586.000,00
22	Bagian Umum dan Protokol	34.650.000,00	34.650.000,00	-
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	729.116.250,00	729.116.250,00	-
24	Dinas Sosial	161.757.500,00	161.757.500,00	-
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.015.000,00	114.015.000,00	-
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.550.000,00	64.550.000,00	-
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	290.244.000,00	72.140.000,00	218.104.000,00
28	Kepanewon Pleret	96.903.000,00	-	96.903.000,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	318.968.500,00	318.968.500,00	-
	Jumlah	30.036.435.380,00	24.175.510.060,43	5.860.925.319,57

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.5.4	Aset Lain-lain	-	4.232.673.062,00	(4.232.673.062,00)

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.232.673.062,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitasi TDF sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas Deposit Facility (TDF) dan Surat Edaran dari Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.232.673.062,00 telah dicairkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2023. Untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai saldo Aset Lain-lain.

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.5.5 Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.888.802.321,00	1.893.318.146,00	(4.515.825,00)

Aset lainnya yang dibatasi merupakan kas yang ada di pengelola kegiatan yang tersimpan dalam rekening pengelola yang penggunaannya (pemasukan dan pengeluaran) melalui mekanisme yang telah diatur dalam kegiatan tersebut dan dimungkinkan dapat menjadi potensi pendapatan daerah.

Rincian Aset lain yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame	44.942.168,00	38.357.993,00	6.584.175,00

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengelola uang titipan biaya bongkar reklame pada rekening penampungan jaminan pembongkaran di Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor 004.111.001274 atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu QQ Eka Purnamasari, yang merupakan uang titipan penyelenggaraan reklame yang belum jatuh tempo dan belum menjadi hak Pemda. sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Mutasi dari Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal	38.357.993,00	43.094.243,00	(4.736.250,00)
Kas Masuk	23.811.925,00	45.654.000,00	(21.842.075,00)
Diambil Wajib Pajak	(17.227.750,00)	(27.454.500,00)	10.226.750,00
Dilimpahkan ke Kas Daerah	-	(22.935.750,00)	22.935.750,00
Jumlah	44.942.168,00	38.357.993,00	6.584.175,00

Saldo Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame di RC sebesar Rp45.118.620,00. Dalam saldo tersebut terdapat jasa giro yang belum dilimpahkan ke Kas Daerah sebesar Rp176.452.

Saldo Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame yang seharusnya sebesar Rp47.932.668,00 yang terdiri dari saldo di Rekening Koran sebesar Rp44.942.168,00 dan saldo kelebihan setor ke Kasda sebesar Rp2.990.500,00

Rincian Penyeteroran jaminan bongkar reklame ke Kas daerah:

Uraian	Setor ke Kasda		Kelebihan
	Seharusnya	Telah disetor	
Jaminan Bongkar Tahun Anggaran 2022	14.535.750,00	22.935.750,00	8.400.000,00
Jaminan Bongkar Tahun Anggaran 2023	5.409.500,00	-	(5.409.500,00)
Jumlah kelebihan setor			2.990.500,00

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Pengelola Jasa Bongkar Menara Telekomunikasi	1.687.160.153,00	1.687.160.153,00	-

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengelola uang titipan biaya bongkar Menara Telekomunikasi pada rekening penampungan jaminan pembongkaran di Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor 004.111. 001601 atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu QQ Eka Purnamasari, yang merupakan uang titipan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang belum jatuh tempo dan belum menjadi hak Pemda.sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Untuk tahun anggaran 2023 tidak ada mutasi di Rekening tampungan.

Kas di Pengelola Jasa Bongkar Menara Telekomunikasi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Salso awal	1.687.160.153,00	1.687.160.153,00	-
Kas Masuk	-	-	-
Diambil Wajib Pajak	-	-	-
Dilimpahkan ke Kas Daerah	-	-	-
Saldo akhir	1.687.160.153,00	1.687.160.153,00	-

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Pengelola Rusunawa	156.700.000,00	167.800.000,00	(11.100.000,00)

Pada Pengelolaan Rusunawa di DPU terdapat kebijakan yang bertujuan untuk menghindari kerugian akibat tidak terbayarnya uang sewa dengan cara penyimpanan uang jaminan sewa selama 2 bulan dan jaminan tersebut akan dikembalikan setelah penyewa tidak menempati Rusunawa. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdapat kas pada rekening giro no. 004.111.001021

Mutasi Kas di Pengelola Rusunawa	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Salso awal	167.800.000,00	180.050.000,00	(12.250.000,00)
Kas Masuk	37.200.000,00	35.900.000,00	1.300.000,00
Diambil Wajib Pajak	(48.300.000,00)	(48.150.000,00)	(150.000,00)
Dilimpahkan ke Kas Daerah	-	-	-
Jumlah	156.700.000,00	167.800.000,00	-11.100.000,00

	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.5.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(21.470.023.582,80)	(16.333.937.538,00)	(5.136.086.044,80)

Nilai dari akumulasi amortisasi merupakan hasil perhitungan secara sistematis yang berasal dari seluruh aset tidak berwujud yang sudah diatur amortisasinya secara umur dan teknis penyusutannya.

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi amortisasi dari Pengungkapan Saldo awal berdasarkan pencatatan SIMAS	16.333.937.538,00	16.208.789.124,40	125.148.413,60
Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun berjalan	5.136.086.044,80	125.148.413,60	5.010.937.631,20
Akumulasi amortisasi Tahun lalu dari hibah Lektura ICT	-	-	-
Akumulasi amortisasi Akhir	21.470.023.582,80	16.333.937.538,00	5.136.086.044,80

Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Awal	16.333.937.538,00	16.208.789.124,40	125.148.413,60
Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	4.181.750.345,20	3.675.653.385,00	506.096.960,20
Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	20.515.687.883,20	19.884.442.509,40	631.245.373,80
Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	21.470.023.582,80	16.333.937.538,00	5.136.086.044,80
koreksi penyusutan tahun berjalan	954.335.699,60	(3.550.504.971,40)	4.504.840.671,00
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	5.136.086.044,80	125.148.413,60	5.010.937.631,20

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2	KEWAJIBAN	62.510.161.243,30	45.977.461.789,24	16.532.699.454,06

Akun ini merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan perincian sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	62.510.161.243,30	45.977.461.789,24	16.532.699.454,06

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja RSUD Panembahan Senopati, Utang Beban Listrik, Telepon, Air dan langganan lainnya serta kekurangan pembayaran Belanja Pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.1	Utang PFK	-	-	-
5.3.2.1.2	Utang Bunga	-	-	-
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
5.3.2.1.4	Pendapatan diterima dimuka	774.944.782,30	932.423.864,37	(157.479.082,07)
5.3.2.1.5	Utang belanja	61.735.216.461,00	45.045.037.924,87	16.690.178.536,13
	Jumlah	62.510.161.243,30	45.977.461.789,24	16.532.699.454,06

Penjelasan dari masing-masing pos hutang jangka pendek adalah:

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.1	Utang PFK	-	-	-
	Untuk tahun 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Utang PFK			
5.3.2.1.2	Utang Bunga	-	-	-
	Untuk tahun 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai utang bunga			

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-

Untuk tahun 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.4	Pendapatan diterima dimuka	774.944.782,30	932.423.864,37	-157.479.082,07

Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh Pendapatan yang diterima dimuka yaitu:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Air Bawah Tanah dan Parkir	49.221.813,80	49.221.813,80	-
2	waktu sewa selama lima tahun dari 15 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2024	2.682.750,00	6.259.750,00	(3.577.000,00)
3	Pendapatan diterima dimuka pada BKAD atas sewa berupa Gedung Eks DIKMENOF di Jl. Juanda No 103 Bantul oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kab Bantul dalam rangka penyelenggaraan SMPUA	43.083.333,33	54.083.333,33	(11.000.000,00)
4	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa berupa sebagian tanah dan bangunan yang digunakan untuk bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY (Komplek Parasamya) dengan jangka waktu 5 tahun dari tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2022	144.000.000,00	180.000.000,00	(36.000.000,00)
5	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa berupa sebagian tanah yang digunakan untuk bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY (Komplek perkantoran Manding) dengan janka waktu selama 3 tahun dari tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 3 Mei 2023	38.000.000,00	2.500.000,00	35.500.000,00
6	Pendapatan diterima dimuka pada DPUPKP atas sewa berupa tanah, bangunan dan worksop Asphalt Mixing Plant, Tangki Aspal, Pompa Aspal, Tangki Solar, Pompa Solar, Stone Crusher dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023	-	117.750.000,00	(117.750.000,00)
7	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa lahan untuk pembangunan dan pengoperasian industri daging olahan dan rumah potong ayam di desa argosari dengan jangka waktu selama 17 tahun dari tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan 10 Agustus 2028	235.135.906,00	27.743.246,40	207.392.659,60

8	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa lahan untuk pembangunan waterboom dan sarpras penunjang pariwisata lainnya di Desa Timbulharjo Kapanewon Sewon dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun	14.727.212,50	44.181.637,50	(29.454.425,00)
9	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa tanah dan bangunan Menara Telekomunikasi milik Pemda Bantul yang terletak di Kompleks Parasamya Jl. RW Monginsidi no 1 Bantul oleh PT XL AXIATA, TBK	104.047.500,00	242.777.500,00	(138.730.000,00)
10	Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perdagangan atas sebagian area pasar seni gabusan utk kegiatan perbankan berupa anjungan tunai mandiri (ATM) PT Bank BPD Cabang Bantul dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 6 Agustus 2023	-	865.600,00	(865.600,00)
11	sebagian lahan pasar unggas Bantul dalam rangka penyelenggaraan pasar rakyat melalui kegiatan latihan dan lomba burung berkicau dengan jangka waktu selama 3 tahun dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2024	1.715.000,00	5.573.750,00	(3.858.750,00)
12	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa lahan untuk pembangunan mesin ATM Bank BPD DIY di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2026	36.250.000,00	51.250.000,00	(15.000.000,00)
13	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa sebagian bangunan yang digunakan untuk pembangunan kantor kas kompleks 2 pemda Bantul PT Bank BPD DIY dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2026	42.525.000,00	61.425.000,00	(18.900.000,00)
14	Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perdagangan atas sewa sebagian lahan di Pasar Seni Gabusan untuk penyelenggaraan promosi Pasar Rakyat melalui kegiatan latihan dan lomba burung berkicau di PSG dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung mulai 10 Desember 2021 sd 9 Desember 2023	-	3.557.400,00	(3.557.400,00)
15	lahan di Pasar Unggas Bantul untuk penyelenggaraan promosi Pasar Rakyat melalui kegiatan latihan dan lomba burung berkicau di Pasar Unggas dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai 18 Oktober 2021 sd 18 Oktober 2024	325.000,00	1.029.166,67	(704.166,67)
16	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa Eks Kantor Pengawas UPT Piyungan Kabupaten Bantul untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keluarga kurang mampu di wilayah Kalurahan Sitimulyo	1.916.666,67	2.416.666,67	(500.000,00)
17	Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bantul	6.509.250,00	45.564.750,00	(39.055.500,00)

18	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Bantul	20.888.600,00	27.485.000,00	(6.596.400,00)
19	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul	4.705.750,00	8.739.250,00	(4.033.500,00)
20	Pendapatan diterima dimuka pada BKAD atas sewa berupa sebagian tanah yang digunakan untuk bangunan ATM PT Bank Mandiri (Komplek perkantoran Manding)	29.211.000,00	-	29.211.000,00
	Jumlah	774.944.782,30	932.423.864,37	-157.479.082,07

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.5	Utang Belanja	61.735.216.461,00	45.045.037.924,87	16.690.178.536,13

Jumlah tersebut adalah utang/kewajiban di beberapa dinas instansi yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri atas: utang karena kelebihan penerimaan dan utang karena belum terselesaikannya kewajiban dari hak yang sudah diterima.

Nomor	Utang Belanja	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
I	Utang Belanja Pegawai	873.455.060,00	1.044.581.260,00	(171.126.200,00)
1	Hutang Belanja Pegawai pada BLUD RS Panembahan senopati	863.505.560,00	1.044.581.260,00	(181.075.700,00)
2	Puskesmas Srandakan	9.949.500,00	-	9.949.500,00
II	Utang Barang dan Jasa	39.861.485.957,00	25.936.538.465,00	13.924.947.492,00
1	Utang Pembelian obat, alkes, habis pakai pada RSUD Panembahan senopati dan Puskesmas	39.861.485.957,00	25.936.538.465,00	13.924.947.492,00
III	Utang Jasa	21.000.275.444,00	18.063.918.199,87	2.936.357.244,13
1	Utang Pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tahun 2023 kepada Pihak ketiga (RSU) yang memiliki kerjasama dengan UPT Jamkesda	33.084.750,00	354.597.032,00	(321.512.282,00)
2	Utang Tagihan Rekening Listrik dan PJU dan Gedung-gedung Perkantoran	3.798.327.486,00	3.489.716.863,00	308.610.623,00
3	Utang Tagihan Rekening Telepon di SKPD di Kabupaten Bantul	32.421.138,00	41.273.678,00	(8.852.540,00)
4	Utang Tagihan Rekening AIR/PDAM di SKPD di Kabupaten Bantul	37.582.500,00	14.906.806,00	22.675.694,00
5	Utang Tagihan Internet di SKPD di Kabupaten Bantul	12.079.364,00	8.865.122,00	3.214.242,00
6	Utang Tagihan langganan surat kabar di SKPD di Kabupaten Bantul	250.000,00	515.000,00	(265.000,00)
7	Utang Belanja jasa layanan pada BLUD Puskesmas	15.433.769.203,00	12.832.825.524,00	2.600.943.679,00
8	Utang terhadap pihak ketiga pada BLUD Puskesmas	1.626.747.312,00	26.022.705,00	1.600.724.607,00
9	Utang Tagihan sampah di SKPD di Kabupaten Bantul	7.263.691,00	190.700,00	7.072.991,00
10	Utang sewa lahan (Puskesmas)	-	39.705.151,87	(39.705.151,87)

11	Utang sewa lahan (RSPS)	18.750.000,00	1.255.299.618,00	(1.236.549.618,00)
	Jumlah total utang belanja	61.735.216.461,00	45.045.037.924,87	16.690.178.536,13

Rincian utang jasa per OPD sebagai berikut :

1	Utang pembelian pembelian obat, alkes dan bahan habis pakai	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		39.861.485.957,00	27.191.838.083,00	12.669.647.874,00

NO	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Puskesmas Bambanglipuro	18.998.205,00	-	18.998.205,00
2	Puskesmas Sewon I	4.679.205,00	-	4.679.205,00
3	Puskesmas Sedayu I	3.079.140,00	-	3.079.140,00
4	RSUD Panembahan Senopati	39.834.729.407,00	27.191.838.083,00	12.642.891.324,00
		39.861.485.957,00	27.191.838.083,00	12.669.647.874,00

2	Hutang Pelaksanaan Jamkesda di Dinas Kesehatan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		33.084.750,00	354.597.032,00	(321.512.282,00)

Nomor	Rumah Sakit	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	RS. Santa Elisabeth	-	17.570.426,00	-17.570.426,00
2	RSI. Hidayatullah	-	18.536.700,00	-18.536.700,00
3	RSUD. Panembahan Senopati Bantul	-	51.951.300,00	-51.951.300,00
4	RSJ Grhasia	-	393.706,00	-393.706,00
5	RS Sarjito	-	25.572.800,00	-25.572.800,00
6	RS Kota Yogyakarta	-	7.939.900,00	-7.939.900,00
7	Rs Khusus Bedah Ringroad Selatan Yogyakarta	5.000.000,00	-	5.000.000,00
8	RS PKU Bantul	-	64.894.000,00	-64.894.000,00
9	RS Ludira Husada Tama	-	787.200,00	-787.200,00
10	Puskesmas Srandakan	-	6.011.550,00	-6.011.550,00
11	Puskesmas Kretek	11.597.200,00	19.489.350,00	-7.892.150,00
12	Puskesmas Pundong	-	4.171.100,00	-4.171.100,00
13	Puskesmas Bantul I	-	1.875.750,00	-1.875.750,00
14	Puskesmas Bantul II	-	14.825.000,00	-14.825.000,00
15	Puskesmas Jetis I	-	7.448.850,00	-7.448.850,00
16	Puskesmas Jetis II	-	6.524.150,00	-6.524.150,00
17	Puskesmas Bambanglipuro	5.747.550,00	-	5.747.550,00
18	Puskesmas Dlingo I	-	1.740.700,00	-1.740.700,00

19	Puskesmas Dlingo II	-	4.506.900,00	-4.506.900,00
20	Puskesmas Pleret	-	59.438.200,00	-59.438.200,00
21	Puskesmas Piyungan	2.701.650,00	-	2.701.650,00
22	Puskesmas Banguntapan II	-	8.021.150,00	-8.021.150,00
23	Puskesmas Pajangan	4.829.600,00	-	4.829.600,00
24	Puskesmas Sewon I	-	12.091.650,00	-12.091.650,00
25	Puskesmas Sewon II	3.208.750,00	-	3.208.750,00
26	Puskesmas Kasihan I	-	17.045.650,00	-17.045.650,00
27	Puskesmas Sedayu II	-	3.761.000,00	-3.761.000,00
	Jumlah	33.084.750,00	354.597.032,00	-321.512.282,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
3	Utang Tagihan Rekening Listrik di SKPD di Kabupaten Bantul Bulan Desember 2023 dan 2022	3.798.327.486,00	3.489.716.863,00	308.610.623,00

Hutang Tagihan Rekening Listrik di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan listrik bulan Desember 2022 dan 2021 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2023 dan 2022. Antara lain ada pada OPD

No	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Umum	-	-	-
2	Dinas Pariwisata	1.277.907,00	1.292.200,00	(14.293,00)
3	Dinas Pertanahan & Tata Ruang	-	-	-
4	RS Panembahan Senopati	224.799.760,00	205.816.180,00	18.983.580,00
5	Dinas Perhubungan	3.102.662,00	2.898.160,00	204.502,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.148.124,00	6.704.776,00	443.348,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.794.931,00	3.807.524,00	(1.012.593,00)
8	BKPAD	3.490.245.387,00	3.224.217.385,00	266.028.002,00
9	DIKPORA	1.226.716,00	10.908.105,00	(9.681.389,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	10.012.709,00	(10.012.709,00)
11	BPBD	-	-	-
12	Dinas Kesehatan	10.785.728,00	-	10.785.728,00
13	DPUPKP	24.645.435,00	610.926,00	24.034.509,00
14	Dinas Kebudayaan	54.066,00	54.066,00	-
	Dinas Kominfo	55.740,00	-	55.740,00
15	Kepanewon Piyungan	4.335.402,00	3.327.582,00	1.007.820,00
16	Kepanewon Banguntapan	1.741.119,00	1.625.551,00	115.568,00
17	Kepanewon Pandak	-	-	-
18	Kepanewon Imogri	959.762,00	-	959.762,00

19	Kepanewon Pleret	2.850.105,00	2.607.228,00	242.877,00
20	Kepanewon Pajangan	664.740,00	625.504,00	39.236,00
21	Kepanewon Jetis	3.191.982,00	3.226.668,00	(34.686,00)
22	Kepanewon Kasihan	3.309.499,00	-	3.309.499,00
23	Kepanewon Sedayu	3.096.904,00	2.666.379,00	430.525,00
24	Kepanewon Dlingo	2.167.244,00	1.853.490,00	313.754,00
25	Kepanewon Bantul	3.540.823,00	2.589.086,00	951.737,00
26	Kepanewon Kretek	876.058,00	1.074.103,00	(198.045,00)
	Kepanewon Sewon	3.277.794,00	-	3.277.794,00
27	Kepanewon Srandakan	2.179.598,00	3.799.241,00	(1.619.643,00)
	Jumlah	3.798.327.486,00	3.489.716.863,00	308.610.623,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
4	Hutang Tagihan Rekening Telepon pada OPD Pemerintah Kabupaten Bantul bulan Desember 2022	32.421.138,00	41.273.678,00	(8.852.540,00)

Hutang Tagihan Rekening Telepon di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2023 dan 2022 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2023 dan 2022 . Antara lain ada pada SKPD

No	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.640.919,00	(2.640.919,00)
2	DKUKMP	-	1.113.748,00	(1.113.748,00)
3	Dinas Kebudayaan	391.000,00	391.000,00	-
4	Dinas Pariwisata	2.169.475,00	1.864.528,00	304.947,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200.158,00	245.444,00	(45.286,00)
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69.264,00	68.986,00	278,00
7	Inspektorat Daerah	99.436,00	87.861,00	11.575,00
8	BKPSDM	34.634,00	-	34.634,00
9	Dinas Sosial	81.965,00	93.092,00	(11.127,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.581,00	137.956,00	(73.375,00)
11	DINKES dan PUSKESMAS	9.369.457,00	15.122.903,00	(5.753.446,00)
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.468.359,00	5.677.701,00	(209.342,00)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendu	213.569,00	266.488,00	(52.919,00)
14	RSUD Panempahan Senopati	7.730.923,00	9.185.617,00	(1.454.694,00)
15	Dinas Perhubungan	593.191,00	618.571,00	(25.380,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	173.112,00	317.856,00	(144.744,00)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.478,00	43.134,00	3.344,00
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	127.913,00	93.882,00	34.031,00

19	Dinas Lingkungan Hidup	-	867.444,00	(867.444,00)
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	947.448,00	972.428,00	(24.980,00)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	105.836,00	138.375,00	(32.539,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.302.121,00	-	2.302.121,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	928.378,00	-	928.378,00
24	Kapanewon Piyungan	102.735,00	123.370,00	(20.635,00)
25	Kapanewon Pundong	70.546,00	89.171,00	(18.625,00)
26	Kapanewon Banguntapan	82.351,00	87.140,00	(4.789,00)
27	Kapanewon Pandak	75.929,00	77.594,00	(1.665,00)
28	Kapanewon Imogiri	39.907,00	443.018,00	(403.111,00)
29	Kapanewon Pleret	68.714,00	78.857,00	(10.143,00)
30	Kapanewon Pajangan	68.714,00	63.714,00	5.000,00
31	Kapanewon Kasihan	91.413,00	-	91.413,00
32	Kapanewon Sedayu	69.968,00	74.006,00	(4.038,00)
33	Kapanewon Dlingo	55.500,00	-	55.500,00
34	Kapanewon Bantul	77.039,00	79.297,00	(2.258,00)
35	Kapanewon Jetis	66.600,00	66.600,00	-
36	Kapanewon Sewon	290.891,00	-	290.891,00
37	Kapanewon Kretek	74.819,00	74.264,00	555,00
38	Kapanewon Srandakan	68.714,00	68.714,00	-
	Jumlah	32.421.138,00	41.273.678,00	(8.852.540,00)

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5	Hutang Tagihan Rekening Air/PDAM pada OPD Pemerintah Kabupaten Bantul bulan Desember 2023	37.582.500,00	14.906.806,00	22.675.694,00

Hutang Tagihan Rekening Air/PDAM di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2023 dan 2022 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2023 dan 2022. Antara lain ada pada SKPD

No	Nama OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	954.100,00	727.300,00	226.800,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	361.500,00	232.900,00	128.600,00
4	Inspektorat Daerah	242.300,00	60.300,00	182.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.183.000,00	902.500,00	280.500,00
6	RSUD Panempahan Senopati	8.747.400,00	11.215.806,00	(2.468.406,00)

7	RSUD Saras Adhyatma	1.165.000,00	-	1.165.000,00
8	Dinas Sosial	209.700,00	122.500,00	87.200,00
9	DP3APP & KB	71.200,00	-	71.200,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	23.727.000,00	65.600,00	23.661.400,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000,00	512.900,00	(452.900,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	60.500,00	(60.500,00)
13	Kapanewon Piyungan	71.200,00	185.300,00	(114.100,00)
14	JETIS	401.500,00	340.800,00	60.700,00
15	Kapanewon Dlingo	388.600,00	300.400,00	88.200,00
16	Bagian Umum dan Protokol	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	180.000,00	(180.000,00)
	Jumlah	37.582.500,00	14.906.806,00	22.675.694,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
6	Hutang Tagihan Layanan Internet di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul bulan Desember 2023	12.079.364,00	8.865.122,00	3.214.242,00

Hutang Tagihan Layanan Internet di OPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2023 dan 2022 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2023 dan 2022. yaitu di OPD:

No	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	-	979.300,00	(979.300,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	766.180,00	766.180,00	-
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.480.850,00	3.122.430,00	(641.580,00)
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	979.300,00	-	-
6	Dinas Kesehatan	6.513.700,00	3.363.455,00	3.150.245,00
7	RSUD Saras Adhyatma	328.177,00	-	328.177,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	311.857,00	311.857,00	-
9	BKPSDM	377.400,00	-	377.400,00
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	321.900,00	321.900,00	-
	Jumlah	12.079.364,00	8.865.122,00	2.234.942,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
7	Hutang Tagihan Langgan Surat Kabar di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul bulan Desember 2023	250.000,00	515.000,00	(265.000,00)

NO	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	DPUPKP	250.000,00	250.000,00	-
2	Kepanewon Pajangan	-	90.000,00	(90.000)
3	Kepanewon Srandakan	-	175.000,00	(175.000)
	Jumlah	250.000,00	515.000,00	(265.000,00)

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
8	Utang Jasa Layanan	15.433.769.203,00	12.832.825.524,00	2.600.943.679,00

NO	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Puskesmas Srandakan	285.783.493,00	91.265.990,00	194.517.503
2	Puskesmas Kretek	4.317.365,00	54.622.050,00	(50.304.685)
	Puskesmas Pundong	-	112.395.398,00	(112.395.398)
3	Puskesmas Bambanglipuro	261.527.954,00	-	261.527.954
4	Puskesmas Pandak I	6.518.575,00	4.179.000,00	2.339.575
5	Puskesmas Pandak II	18.916.700,00	7.858.050,00	11.058.650
6	Puskesmas Bantul I	27.401.650,00	10.716.150,00	16.685.500
7	Puskesmas Bantul II	226.491.400,00	-	226.491.400
8	Puskesmas Jetis I	99.483.330,00	14.365.305,00	85.118.025
9	Puskesmas Jetis II	179.501.210,00	-	179.501.210
10	Puskesmas Imogiri I	106.567.063,00	3.147.115,00	103.419.948
11	Puskesmas Imogiri II	465.761.728,00	18.139.125,00	447.622.603
12	Puskesmas Dlingo I	38.332.662,00	-	38.332.662
13	Puskesmas Dlingo II	98.490.503,00	-	98.490.503
14	Puskesmas Pleret	217.547.375,00	22.264.575,00	195.282.800

	Puskesmas Piyungan	-	8.116.200,00	(8.116.200)
15	Puskesmas Banguntapan I	176.608.505,00	-	176.608.505
16	Puskesmas Banguntapan II	250.152.015,00	-	250.152.015
17	Puskesmas Banguntapan III	82.195.550,00	127.031.930,00	(44.836.380)
18	Puskesmas Sewon I	35.811.800,00	-	35.811.800
	Puskesmas Kasihan I	-	8.399.300,00	(8.399.300)
19	Puskesmas Pajangan	150.611.050,00	106.338.303,00	44.272.747
20	Puskesmas Sedayu I	125.873.166,00	-	125.873.166
21	Puskesmas Sedayu II	288.831.551,00	-	288.831.551
22	RSUD Panembahan Senopati	12.287.044.558,00	12.243.987.033,00	43.057.525
	Jumlah	15.433.769.203,00	12.832.825.524,00	2.600.943.679,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
9	Utang Pihak Ketiga	1.626.747.312,00	26.022.705,00	1.600.724.607,00

NO	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Puskesmas Srandakan	4.133.000,00	-	-
2	Puskesmas Bantul I	-	-	-
3	Puskesmas Bantul II	9.250.000,00	-	-
4	Puskesmas Jetis I	45.300,00	-	-
5	Puskesmas Imogiri I	2.404.200,00	-	-
6	Puskesmas Imogiri II	-	-	-
7	Puskesmas Banguntapan I	21.689.400,00	-	-
8	Puskesmas Sewon I	270.000,00	-	-
9	Puskesmas Sedayu I	450.000,00	-	-
10	RSUD Panembahan Senopati	1.564.243.802,00	26.022.705,00	1.538.221.097,00
11	RSUD Saras Adyatma	24.261.610,00	-	24.261.610,00
	Jumlah	1.626.747.312,00	26.022.705,00	1.600.724.607,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
10	Hutang Tagihan Langganan sampah di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul bulan Desember 2023 dan 2022	7.263.691,00	190.700,00	7.072.991,00

NO	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	DIKPORA	90.700,00	90.700,00	-
2	DINKES	7.172.991,00	-	7.172.991,00
3	Kepanewon Bambanglipuro	-	-	-
4	Kepanewon Srandakan	-	100.000,00	(100.000,00)
	Jumlah	7.263.691,00	190.700,00	7.072.991,00

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
11	Hutang sewa lahan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	18.750.000,00	39.705.151,87	(20.955.151,87)

NO	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	DINKES	-	403.636,00	(403.636)
2	DKUKMP	-	21.301.515,87	(21.301.516)
3	RSUD PS	18.750.000,00	18.000.000,00	750.000
	Jumlah	18.750.000,00	39.705.151,87	(20.955.151,87)

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
6)	Utang Jangka Pendek Lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	-	-	-

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
b.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.3	EKUITAS	3.554.397.164.882,24	3.539.962.763.941,67	14.434.400.940,58
5.4.3.1	Ekuitas Dana Lancar	248.328.218.589,93	283.123.955.235,39	-34.795.736.645,47

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.3.1.1	SILPA	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	(19.392.653.973,15)
5.4.3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-
5.4.3.1.3	Cadangan Piutang	227.285.037.040,44	228.230.578.122,57	(945.541.082,13)
5.4.3.1.4	Cadangan Persediaan	50.133.598.705,71	45.732.797.735,02	4.400.800.970,69
5.4.3.1.5	Dana Lancar Lainnya (Dana lancar diluar SILPA)	-	-	-
5.4.3.1.6	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(62.510.161.243,30)	(45.977.461.789,24)	(16.532.699.454,06)
5.4.3.1.7	Dana yang harus disediakan untuk penyisihan aset	(162.819.467.672,52)	(160.493.824.565,70)	(2.325.643.106,82)
5.4.3.1.8	Dana yang harus disediakan untuk amortisasi aset	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	248.328.218.589,93	283.123.955.235,39	(34.795.736.645,47)

5.4.3.1.1	Saldo SILPA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Kas di Kas Daerah	171.064.455.774,11	186.937.014.179,24	(15.872.558.405,13)
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	39.974,00	(39.974,00)
	Kas di Bendahara Penerimaan	699.567.547,00	212.692.566,00	486.874.981,00
	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00	20.000,00	(20.000,00)
	Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	23.947.680.740,48	28.290.251.443,50	(4.342.570.703,02)
	Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	527.507.698,00	191.847.570,00	335.660.128,00
	Jumlah	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	(19.392.653.973,15)

5.4.3.1.3	Cadangan Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Piutang Pajak Daerah	148.876.031.658,50	149.648.052.721,50	(772.021.063,00)
	Piutang Retribusi	1.956.864.393,85	1.737.998.367,85	218.866.026,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.745.498.769,00	63.839.339.439,94	(93.840.670,94)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-

	Piutang Transfer Antar Daerah	366.750.338,00	1.745.092.380,00	(1.378.342.042,00)
	Piutang Lainnya	10.665.494.879,00	10.707.993.879,00	(42.499.000,00)
	Beban Dibayar Dimuka	1.674.397.002,09	552.101.334,28	1.122.295.667,81
	Jumlah	227.285.037.040,44	228.230.578.122,57	(945.541.082,13)

	Dana yang harus disediakan untuk penyisihan aset	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Penyisihan Piutang Pajak	101.279.537.629,04	99.886.885.770,62	1.392.651.858,42
	Penyisihan Piutang Retribusi	1.674.873.753,23	1.471.348.150,24	203.525.602,99
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.301.120.041,25	48.618.395.295,84	682.724.745,41
	Penyisihan Piutang Lainnya	10.563.936.249,00	10.517.195.349,00	46.740.900,00
	Jumlah	162.819.467.672,52	160.493.824.565,70	2.325.643.106,82

		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.3.2	Ekuitas Dana Investasi	3.306.068.946.292,32	3.256.838.808.706,27	49.230.137.586,04

Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	414.947.814.428,82	399.768.641.572,71	15.179.172.856,11
5.4.3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.016.122.696.480,00	5.778.683.830.804,99	237.438.865.675,01
5.4.3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	10.470.525.532,63	13.982.875.144,43	(3.512.349.611,80)
5.4.3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-
5.4.3.2.5	Akumulasi Penyusutan	(3.135.472.090.149,13)	(2.935.596.538.815,85)	(199.875.551.333,28)
	Jumlah Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	3.306.068.946.292,32	3.256.838.808.706,27	49.230.137.586,04

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari – 31 Desember 2023. Pengakuan pendapatan maupun beban dalam LO menggunakan basis akrual.

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1	Pendapatan-LO	2.468.004.109.589,63	2.286.391.299.805,50	181.612.809.784,13

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD atau realisasi penerimaan kas di kasda, tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD atau penerimaan yang tidak melalui rekening Kas Daerah.

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Pendapatan - LO Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 sebagai berikut:

	Jenis Pendapatan	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	586.028.976.953,98	554.159.239.636,76	31.869.737.317,22
5.4.1.2.	Pendapatan Transfer	1.821.833.893.156,65	1.718.015.500.045,00	103.818.393.111,65
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.141.239.479,00	14.216.560.123,74	45.924.679.355,26
	Jumlah	2.468.004.109.589,63	2.286.391.299.805,50	181.612.809.784,13

Rincian lebih lanjut Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	586.028.976.953,98	554.159.239.636,76	31.869.737.317,22

	Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri atas :	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.1	Pajak Daerah - LO	269.146.516.123,00	261.630.329.239,01	7.516.186.883,99
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah - LO	42.601.372.586,80	41.979.230.670,07	622.141.916,73
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	20.515.070.732,29	37.689.050.611,78	(17.173.979.879,49)
5.4.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah - LO	253.766.017.511,89	212.860.629.115,90	40.905.388.395,99
	Jumlah	586.028.976.953,98	554.159.239.636,76	31.869.737.317,22

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO lebih tinggi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	Jenis Pendapatan Asli Daerah - LO	REALISASI 2023		
		LO	LRA	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri atas :			
5.4.1.1.1	Pajak Daerah - LO	269.146.516.123,00	269.918.537.186,00	(772.021.063,00)
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah - LO	42.601.372.586,80	42.382.506.560,80	218.866.026,00
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	20.515.070.732,29	20.515.070.732,29	-
5.4.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah - LO	253.766.017.511,89	254.618.924.193,83	(852.906.681,94)
	Jumlah	586.028.976.953,98	587.435.038.672,92	(1.406.061.718,94)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional tahun 2023 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Perbedaan perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah - LRA tahun 2023	269.918.537.186,00
Piutang Pajak tahun 2023	148.876.031.658,50
Piutang Pajak Tahun 2023	<u>(149.648.052.721,50)</u>
Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2023	<u>269.146.516.123,00</u>

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp269.146.516.123,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.516.186.883,99 atau 2,79% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.1	Pajak Daerah-LO	<u>269.146.516.123,00</u>	<u>261.630.329.239,01</u>	<u>7.516.186.883,99</u>

	Pendapatan Pajak :	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.1.1	Pajak Hotel	9.573.476.074,00	7.294.504.222,00	2.278.971.852,00
5.4.1.1.1.2	Pajak Restoran	31.143.128.944,00	22.735.354.082,60	8.407.774.861,40

5.4.1.1.1.3	Pajak Hiburan	985.113.818,00	582.618.635,00	402.495.183,00
5.4.1.1.1.4	Pajak Reklame	3.718.112.735,00	3.345.619.552,00	372.493.183,00
5.4.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	58.650.214.017,00	54.309.083.910,00	4.341.130.107,00
5.4.1.1.1.6	Pajak Parkir	292.842.169,00	296.414.530,00	(3.572.361,00)
5.4.1.1.1.7	Pajak Air Tanah	1.283.796.194,00	228.177.098,00	1.055.619.096,00
5.4.1.1.1.8	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.243.178.513,01	(1.241.678.513,01)
5.4.1.1.1.9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	186.696.450,00	1.500.000,00	185.196.450,00
5.4.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	67.818.594.654,00	67.374.924.540,00	443.670.114,00
5.4.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	95.493.041.068,00	104.218.954.156,40	(8.725.913.088,40)
	Jumlah Pajak Daerah	269.146.516.123,00	261.630.329.239,01	7.516.186.883,99

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Perbedaan perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2023	42.382.506.560,80
Piutang Retribusi tahun 2023	1.956.864.393,85
Piutang Retribusi tahun 2022	1.737.998.367,85
Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023	<u>42.601.372.586,80</u>

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp42.601.372.586,80 mengalami peningkatan sebesar Rp622.141.916,73 atau 1,46% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO	<u>42.601.372.586,80</u>	<u>41.979.230.670,07</u>	<u>622.141.916,73</u>

	Pendapatan Retribusi Daerah :	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.787.772.815,00	2.261.910.000,00	(474.137.185,00)
5.4.1.1.2.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	297.610.000,00	201.010.000,00	96.600.000,00
5.4.1.1.2.3	Retribusi Kebersihan Pasar	283.786.600,00	252.085.000,00	31.701.600,00
5.4.1.1.2.4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.563.687.380,00	4.034.859.659,00	528.827.721,00
5.4.1.1.2.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	910.708.000,00	913.468.000,00	(2.760.000,00)
5.4.1.1.2.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.775.000,00	21.607.500,00	167.500,00
5.4.1.1.2.7	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	351.928.000,00	387.942.000,00	(36.014.000,00)

5.4.1.1.2.8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	145.327.000,00	152.137.000,00	(6.810.000,00)
5.4.1.1.2.9	Retribusi Pelayanan Pendidikan	13.729.000,00	11.817.000,00	1.912.000,00
5.4.1.1.2.10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.135.800.000,00	1.097.827.500,00	37.972.500,00
5.4.1.1.2.11	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	96.856.500,00	79.671.400,00	17.185.100,00
5.4.1.1.2.12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.636.058.160,00	1.672.481.606,00	(36.423.446,00)
5.4.1.1.2.13	Retribusi Tempat Pelelangan	72.576.993,00	54.677.028,00	17.899.965,00
5.4.1.1.2.14	Retribusi Terminal	231.057.700,00	180.004.400,00	51.053.300,00
5.4.1.1.2.15	Retribusi Tempat Khusus Parkir	274.680.000,00	265.980.000,00	8.700.000,00
5.4.1.1.2.16	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.380.000,00	29.220.000,00	8.160.000,00
5.4.1.1.2.17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	27.446.416.750,00	27.513.197.250,00	(66.780.500,00)
5.4.1.1.2.18	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.251.560.110,00	1.232.790.750,00	18.769.360,00
5.4.1.1.2.19	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vill	11.300.000,00	7.700.000,00	3.600.000,00
5.4.1.1.2.20	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	774.360.000,00	305.430.000,00	468.930.000,00
5.4.1.1.2.21	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.257.002.578,80	1.303.557.577,07	(46.554.998,27)
5.4.1.1.2.22	Retribusi Ijin Gangguan	-	(143.000,00)	143.000,00
	Jumlah	42.601.372.586,80	41.979.230.670,07	622.141.916,73

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pencatatan atas penerimaan yang berasal dari pengakuan laba /rugi pada 3 BUMD tahun 2024 (*audited*) yang metode pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas.

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari	20.515.070.732,29	37.689.050.611,78	(17.173.979.879,49)

Realisasi Pendaapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO sama dengan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
PT BPD DIY	15.865.045.674,00	16.680.395.988,35	-815.350.314,35
PD BPR Bank Bantul	3.627.482.239,00	11.432.066.643,52	-7.804.584.404,52
BUKP	221.928.458,29	370.546.683,85	-148.618.225,56
PD Aneka Dharma	19.112.119,00	1.382.003.115,50	-1.362.890.996,50
PDAM	781.502.242,00	7.824.038.180,56	-7.042.535.938,56
Jumlah	20.515.070.732,29	37.689.050.611,78	(17.173.979.879,49)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah - LO	253.766.017.511,89	212.860.629.115,90	40.905.388.395,99

Perbedaan perhitungan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebagai berikut:

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah -LRA tahun 2023	254.618.924.193,83
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	(759.066.011,00)
Piutang Lain-lain PAD yang sahtahun 2023	63.745.498.769,00
Piutang Lain-lain PAD yang sahtahun 2022	(63.839.339.439,94)
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2023	253.766.017.511,89

	Rincian pendapatan Lain-lain PAD_LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-
5.4.1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	739.600.383,00	671.987.100,00	67.613.283,00
5.4.1.1.4.3	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.505.146.050,00	1.492.562.528,00	12.583.522,00
5.4.1.1.4.4	Pendapatan Bunga - LO	6.209.253.125,36	8.139.194.653,33	(1.929.941.527,97)
5.4.1.1.4.5	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	38.299.000,00	5.455.000,00	32.844.000,00
5.4.1.1.4.6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	30.257.637,75	6.500.000,00	23.757.637,75
5.4.1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak - LO	4.847.234.390,06	6.810.435.461,13	(1.963.201.071,07)
5.4.1.1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi - LO	47.302.784,00	25.120.846,00	22.181.938,00
5.4.1.1.4.9	Pendapatan BLUD - LO	239.816.997.335,00	195.513.236.421,00	44.303.760.914,00
5.4.1.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	505.698.155,55	150.762.305,00	354.935.850,55
5.4.1.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	26.228.651,17	44.348.249,50	(18.119.598,33)
5.4.1.1.4.12	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LO	-	1.026.551,94	(1.026.551,94)
	Jumlah	253.766.017.511,89	212.860.629.115,90	40.905.388.395,99

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO	1.821.833.893.156,65	1.718.015.500.045,00	103.818.393.111,65

Pendapatan Transfer-LO dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi .

Rincian dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 dan 2022 adalah :

5.4.1.2.	Pendapatan Transfer-LO	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.541.171.838.737,00	1.473.484.315.843,00	67.687.522.894,00
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	280.662.054.419,65	244.531.184.202,00	36.130.870.217,65
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.821.833.893.156,65	1.718.015.500.045,00	103.818.393.111,65

Adapun rincian dari masing-masing pos pendapatan transfer adalah :

5.4.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
		1.541.171.838.737,00	1.473.484.315.843,00	67.687.522.894,00

Rincian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.355.883.247.737,00	1.313.669.934.843,00	42.213.312.894,00
5.4.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	185.288.591.000,00	159.814.381.000,00	25.474.210.000,00
	Jumlah	1.541.171.838.737,00	1.473.484.315.843,00	67.687.522.894,00

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.766.685.062,00	40.996.827.969,00	(6.230.142.907,00)
5.4.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	954.626.878.777,00	902.030.732.566,00	52.596.146.211,00
5.4.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	366.489.683.898,00	370.642.374.308,00	(4.152.690.410,00)
	Jumlah	1.355.883.247.737,00	1.313.669.934.843,00	42.213.312.894,00

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-
5.4.1.2.1.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.924.979.783,00	7.219.199.178,00	(5.294.219.395,00)
5.4.1.2.1.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	24.225.546.734,00	23.938.340.052,00	287.206.682,00

5.4.1.2.1.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	2.179.495.000,00	3.403.490.282,00	(1.223.995.282,00)
5.4.1.2.1.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.863.841.615,00	4.212.615.465,00	651.226.150,00
5.4.1.2.1.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.390.193,00	-	4.390.193,00
5.4.1.2.1.1.1.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.000,00	14.729.193,00	(14.722.193,00)
5.4.1.2.1.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.280.526,00	38.389.588,00	890.938,00
5.4.1.2.1.1.1.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-	-	-
5.4.1.2.1.1.1.9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.529.144.211,00	2.170.064.211,00	(640.920.000,00)
Jumlah		34.766.685.062,00	40.996.827.969,00	(6.230.142.907,00)

Jika dibandingkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO dengan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	REALISASI 2023		Selisih
		LO	LRA	
5.4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-
5.4.1.2.1.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.924.979.783,00	1.924.979.783,00	-
5.4.1.2.1.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	24.225.546.734,00	24.225.546.734,00	-
5.4.1.2.1.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	2.179.495.000,00	2.179.495.000,00	-
5.4.1.2.1.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.863.841.615,00	4.863.841.615,00	-
5.4.1.2.1.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.390.193,00	4.390.193,00	-
5.4.1.2.1.1.1.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.000,00	7.000,00	-
5.4.1.2.1.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.280.526,00	39.280.526,00	-
5.4.1.2.1.1.1.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-	-	-
5.4.1.2.1.1.1.9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.529.144.211,00	1.529.144.211,00	-
Jumlah		34.766.685.062,00	34.766.685.062,00	-

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :

	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.576.626.350,00	77.408.558.243,00	(20.831.931.893,00)
5.4.1.2.1.1.3.1	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	3.065.880.000,00	-	3.065.880.000,00
5.4.1.2.1.1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	1.043.846.125,00	(1.043.846.125,00)
5.4.1.2.1.1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.267.225.850,00	4.038.766.558,00	(2.771.540.708,00)

5.4.1.2.1.1.3.4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.856.048.500,00	4.249.325.413,00	(2.393.276.913,00)
5.4.1.2.1.1.3.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	3.670.274.489,00	(3.670.274.489,00)
5.4.1.2.1.1.3.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	391.690.000,00	2.339.578.900,00	(1.947.888.900,00)
5.4.1.2.1.1.3.7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	2.763.750.000,00	(2.763.750.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	1.119.893.536,00	(1.119.893.536,00)
5.4.1.2.1.1.3.9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.513.006.000,00	3.825.148.273,00	6.687.857.727,00
5.4.1.2.1.1.3.10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.254.487.000,00	6.716.573.000,00	16.537.914.000,00
5.4.1.2.1.1.3.11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	13.420.623.000,00	(13.420.623.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	7.085.480.000,00	(7.085.480.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	5.020.951.200,00	(5.020.951.200,00)
5.4.1.2.1.1.3.14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	3.111.601.000,00	(3.111.601.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.15	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	4.615.122.720,00	(4.615.122.720,00)
5.4.1.2.1.1.3.16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	6.607.609.171,00	(6.607.609.171,00)
5.4.1.2.1.1.3.17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	-	-	-
5.4.1.2.1.1.3.18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	-	3.151.566.000,00	(3.151.566.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	359.500.000,00	(359.500.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	693.289.000,00	1.715.319.063,00	(1.022.030.063,00)
5.4.1.2.1.1.3.21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.535.000.000,00	2.553.629.795,00	12.981.370.205,00
5.4.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	309.913.057.548,00	293.233.816.065,00	16.679.241.483,00
5.4.1.2.1.1.4.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	102.590.252.271,00	100.341.041.812,00	2.249.210.459,00
5.4.1.2.1.1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.027.500.000,00	2.360.000.000,00	2.667.500.000,00
5.4.1.2.1.1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	140.587.086.560,00	130.241.259.027,00	10.345.827.533,00
5.4.1.2.1.1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.826.210.000,00	2.401.795.000,00	424.415.000,00
5.4.1.2.1.1.4.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.537.329.664,00	21.114.867.000,00	3.422.462.664,00
5.4.1.2.1.1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.322.385.974,00	3.770.700.000,00	551.685.974,00
5.4.1.2.1.1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.390.425.337,00	22.242.870.072,00	(1.852.444.735,00)
5.4.1.2.1.1.4.8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
5.4.1.2.1.1.4.9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.198.102.072,00	7.066.489.918,00	(868.387.846,00)

5.4.1.2.1.1.4.10	DAK Non Fisik-PK2UKM	407.482.240,00	399.904.080,00	7.578.160,00
5.4.1.2.1.1.4.11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-
5.4.1.2.1.1.4.12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	200.000.000,00	787.947.000,00	(587.947.000,00)
5.4.1.2.1.1.4.13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	331.892.430,00	233.267.656,00	98.624.774,00
5.4.1.2.1.1.4.14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	525.178.500,00	300.725.500,00	224.453.000,00
5.4.1.2.1.1.4.15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.969.212.500,00	659.100.000,00	1.310.112.500,00
5.4.1.2.1.1.4.16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	1.313.849.000,00	(1.313.849.000,00)
Jumlah		366.489.683.898,00	370.642.374.308,00	(4.152.690.410,00)

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-
5.4.1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	58.809.566.000,00	58.566.684.000,00	242.882.000,00
5.4.1.2.1.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
5.4.1.2.1.2.3	Dana Keistimewaan	-	-	-
5.4.1.2.1.2.4	Dana Kalurahan	126.479.025.000,00	101.247.697.000,00	25.231.328.000,00
Jumlah		185.288.591.000,00	159.814.381.000,00	25.474.210.000,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar Daerah pada Laporan Operasional seluruhnya berasal dari realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pemerintah Kabupaten Bantul mengakui piutang kepada Pemerintah Propinsi atas kurang bayar Pendapatan transfer.

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	201.955.211.813,00	193.768.436.607,00	8.186.775.206,00
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	78.706.842.606,65	50.762.747.595,00	27.944.095.011,65
Jumlah		280.662.054.419,65	244.531.184.202,00	36.130.870.217,65

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	201.955.211.813,00	193.768.436.607,00	8.186.775.206,00

Rincian realisasi pendapatan Bagi hasil pajak tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	67.118.442.790,00	57.066.200.577,00	10.052.242.213,00
5.4.1.2.2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.378.789.476,00	22.036.458.104,00	7.342.331.372,00
5.4.1.2.2.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.946.328.116,00	49.839.088.450,00	8.107.239.666,00
5.4.1.2.2.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	103.951.513,00	14.019.593.260,00	(13.915.641.747,00)
5.4.1.2.2.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	47.407.699.918,00	49.062.003.836,00	(1.654.303.918,00)
	Kurang Bayar tahun 2022	-	1.745.092.380,00	(1.745.092.380,00)
	Jumlah	201.955.211.813,00	193.768.436.607,00	8.186.775.206,00

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	78.706.842.606,65	50.762.747.595,00	27.944.095.011,65

	Rincian bantuan keuangan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-
5.4.1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	78.317.260.606,65	50.367.423.595,00	27.949.837.011,65
5.4.1.2.2.2.3	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	389.582.000,00	395.324.000,00	(5.742.000,00)
	Jumlah	78.706.842.606,65	50.762.747.595,00	27.944.095.011,65

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	60.141.239.479,00	14.216.560.123,74	45.924.679.355,26

	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebagai berikut :	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1)	Pendapatan Hibah - LO	7.164.398.619,00	6.725.000.000,00	439.398.619,00
2)	Dana Darurat - LO	-	-	-
3)	Pendapatan Lainnya - LO	52.976.840.860,00	7.491.560.123,74	45.485.280.736,26
	Jumlah	60.141.239.479,00	14.216.560.123,74	45.924.679.355,26

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional berasal dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Lainnya yang berasal dari dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi berbentuk dana blockgrant serta hibah barang yang langsung diberikan ke sekolah tanpa melalui Kas Daerah, yang dilaksanakan oleh OPD atau unit dibawah OPD. Dana hibah tersebut berupa dana atau langsung barang yang dinilai dengan uang. Dana tersebut terdapat pada OPD antara lain:

Dana dan atau barang yang bersumber dari hibah

	OPD	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hibah barang dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (PPKD)	52.959.003.616,00	6.249.278.904,00	46.709.724.712,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	17.837.244,00	1.242.281.219,74	(1.224.443.975,74)
Jumlah		52.976.840.860,00	7.491.560.123,74	45.485.280.736

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2 Beban-LO	2.069.801.844.213,24	1.919.711.583.133,16	150.090.261.080,08

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Perbedaan Beban dan Belanja terutama pada beban operasi dan belanja operasi, untuk belanja modal pada laporan keuangan berbasis akrual langsung diakui sebagai aset tetap/aset lainnya pada laporan neraca, Pengalokasian nilai aset tetap/aset lainnya secara sistematis dibebankan pada beban penyusutan dan amortisasi sesuai masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan untuk pengungkapan beban transfer, beban bantuan keuangan yang masuk kedalam belanja operasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri atas beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing jenis Beban, sebagai berikut :

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1	BEBAN OPERASI			
5.4.2.1.1	Beban Pegawai - LO	860.407.416.528,00	853.528.493.948,00	6.878.922.580,00
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	881.270.168.373,54	745.158.212.049,70	136.111.956.323,84
5.4.2.1.3	Beban Bunga	-	-	-
5.4.2.1.4	Beban Subsidi	-	-	-
5.4.2.1.5	Beban Hibah	115.915.380.000,00	91.860.271.963,96	24.055.108.036,04
5.4.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	4.947.600.000,00	8.110.400.000,00	(3.162.800.000,00)
5.4.2.1.7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.543.354.250,20	79.694.250.246,73	(6.150.895.996,53)
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.247.799.906,12	31.559.543.026,25	4.688.256.879,87
5.4.2.1.9	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.008.396.003,76	93.269.677.458,83	(3.261.281.455,07)
5.4.2.1.10	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.136.086.044,80	125.148.413,60	5.010.937.631,20

5.4.2.1.11	Beban Penyisihan Piutang	2.325.643.106,82	16.405.586.026,09	(14.079.942.919,28)
5.4.2.1.12	Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah		2.069.801.844.213,24	1.919.711.583.133,16	150.090.261.080,08

Perbedaan antara Beban Operasi dan Belanja Operasi terdapat pada komponen Belanja Bantuan Keuangan, dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi komponen Belanja Operasi sedangkan dalam Laporan Operasional menjadi komponen Beban transfer.

Penjelasan dari masing-masing beban operasi adalah :

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	860.407.416.528,00	853.528.493.948,00	6.878.922.580,00

Rincian Beban Pegawai - LO

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.1.1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	520.281.693.331,00	523.530.261.836,00	(3.248.568.505,00)
5.4.2.1.1.2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	113.953.212.449,00	100.622.293.986,00	13.330.918.463,00
5.4.2.1.1.3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.697.139.482,00	163.275.037.910,00	(4.577.898.428,00)
5.4.2.1.1.4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.927.229.561,00	22.524.045.381,00	403.184.180,00
5.4.2.1.1.5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.004.900,00	168.028.996,00	975.904,00
5.4.2.1.1.6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00	1.093.120.000,00	-
5.4.2.1.1.7	Beban Pegawai BOS	28.372.820.500,00	26.553.563.603,00	1.819.256.897,00
5.4.2.1.1.8	Beban Pegawai BLUD	14.913.196.305,00	15.762.142.236,00	(848.945.931,00)
Jumlah		860.407.416.528,00	853.528.493.948,00	6.878.922.580,00

Jika dibandingkan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	REALISASI 2023		
		LO	LRA	Selisih
5.4.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	520.281.693.331,00	520.281.693.331,00	-
5.4.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	113.953.212.449,00	113.953.212.449,00	-
5.4.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.697.139.482,00	158.697.139.482,00	-
5.4.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.927.229.561,00	22.927.229.561,00	-
5.4.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.004.900,00	169.004.900,00	-

5.4.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00	1.093.120.000,00	-
5.4.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	28.372.820.500,00	28.372.820.500,00	-
5.4.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	14.913.196.305,00	15.084.322.505,00	(171.126.200,00)
Jumlah		860.407.416.528,00	860.578.542.728,00	-171.126.200,00

Penjelasan dari selisih Beban Belanja Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA sebagai berikut :

Belanja Pegawai-LRA	860.578.542.728,00
Utang Beban belanja Pegawai (utang beban) 2023	873.455.060,00
Utang Beban belanja Pegawai (utang beban) 2022	1.044.581.260,00
	<u>(171.126.200,00)</u>
Beban Belanja Pegawai-LO	<u>860.407.416.528,00</u>

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	881.270.168.373,54	745.158.212.049,70	136.111.956.323,84

Jika dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa sebagai berikut :

	Uraian	REALISASI 2023		
		LO	LRA	Selisih
	Belanja Barang dan Jasa-LRA	881.270.168.373,54	858.885.766.998,91	22.384.401.374,63

Belanja Barang dan Jasa-LRA	858.885.766.998,91
Beban Utang Belanja tahun 2023	60.861.761.401,00
Beban Utang Belanja tahun 2022	(44.000.456.664,87)
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2023	1.674.397.002,09
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022	(552.101.334,28)
Persediaan Barang Tahun 2023	50.133.598.705,71
Persediaan Barang Tahun 2022	(45.732.797.735,02)
	<u>22.384.401.374,63</u>
Beban barang dan jasa -LO	<u>881.270.168.373,54</u>

Rincian beban barang dan jasa sebagai berikut :

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.1	Beban Barang	170.584.238.783,29	132.201.693.888,00	38.382.544.895,29

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	308.040.267.884,43	235.227.802.657,96	72.812.465.226,47
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	26.454.572.748,30	21.124.853.870,64	5.329.718.877,66
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	37.486.232.078,50	18.535.303.528,00	18.950.928.550,50
5.4.2.1.2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.456.831.343,00	59.904.754.429,00	-12.447.923.086,00
5.4.2.1.2.6	Beban Barang dan Jasa BOS	71.530.844.668,00	72.899.390.231,00	-1.368.545.563,00
5.4.2.1.2.7	Beban Barang dan Jasa BLUD	219.717.180.868,02	205.264.413.445,10	14.452.767.422,92
Jumlah		881.270.168.373,54	745.158.212.049,70	136.111.956.323,84

Rincian dari Beban Barang sebagai berikut :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.1	Beban Barang	-	-	-
5.4.2.1.2.1.1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.946.738.267,00	19.021.748.248,00	10.924.990.019,00
5.4.2.1.2.1.2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.749.632.320,00	236.335.492,00	1.513.296.828,00
5.4.2.1.2.1.3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.291.653.236,00	10.460.153.837,00	1.831.499.399,00
5.4.2.1.2.1.4	Beban Bahan-Bahan Baku	5.590.000,00	-	5.590.000,00
5.4.2.1.2.1.5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.391.260.700,00	1.076.795.700,00	314.465.000,00
5.4.2.1.2.1.6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	51.763.725,00	41.441.000,00	10.322.725,00
5.4.2.1.2.1.7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	124.324.100,00	50.596.200,00	73.727.900,00
5.4.2.1.2.1.8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	295.128.900,00	267.250.000,00	27.878.900,00
5.4.2.1.2.1.9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.070.786.986,12	3.574.028.626,00	7.496.758.360,12
5.4.2.1.2.1.10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	289.251.750,00	142.882.900,00	146.368.850,00
5.4.2.1.2.1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	84.792.466,00	-	84.792.466,00
5.4.2.1.2.1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	11.000.000,00	-	11.000.000,00
5.4.2.1.2.1.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	36.396.000,00	-	36.396.000,00
5.4.2.1.2.1.14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.321.355.353,00	41.562.191,00	11.279.793.162,00
5.4.2.1.2.1.15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.439.800,00	7.189.316.080,00	-7.141.876.280,00
5.4.2.1.2.1.16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.718.159.682,00	10.174.211.941,00	-3.456.052.259,00
5.4.2.1.2.1.17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	262.878.000,00	310.644.000,00	-47.766.000,00
5.4.2.1.2.1.18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	769.718.514,00	253.731.000,00	515.987.514,00
5.4.2.1.2.1.19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	108.422.000,00	143.289.252,00	-34.867.252,00
5.4.2.1.2.1.20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.765.272.778,00	1.861.999.100,00	-96.726.322,00
5.4.2.1.2.1.21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Dinas	-	76.792.000,00	-76.792.000,00

5.4.2.1.2.1.22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.725.000,00	86.060.000,00	-84.335.000,00
5.4.2.1.2.1.23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.249.111.828,00	791.100.600,00	458.011.228,00
5.4.2.1.2.1.24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.452.231.681,00	7.185.870.868,00	-1.733.639.187,00
5.4.2.1.2.1.25	Beban Obat-Obatan-Obat	3.809.767.242,17	4.415.308.022,00	-605.540.779,83
5.4.2.1.2.1.26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	507.121.500,00	1.240.542.630,00	-733.421.130,00
5.4.2.1.2.1.27	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.329.116.550,00	961.002.875,00	5.368.113.675,00
5.4.2.1.2.1.28	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga	2.088.644.500,00	281.576.762,00	1.807.067.738,00
5.4.2.1.2.1.29	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	297.460.000,00	-	297.460.000,00
5.4.2.1.2.1.30	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga lainnya	133.750.000,00	-	133.750.000,00
5.4.2.1.2.1.31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	293.018.700,00	-	293.018.700,00
5.4.2.1.2.1.32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	530.396.800,00	44.850.000,00	485.546.800,00
5.4.2.1.2.1.33	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.550.000,00	-	2.550.000,00
5.4.2.1.2.1.34	Beban Makanan dan Minuman Rapat	21.745.881.850,00	426.731.000,00	21.319.150.850,00
5.4.2.1.2.1.35	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.514.944.700,00	169.543.599,00	2.345.401.101,00
5.4.2.1.2.1.36	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.840.000,00	20.095.953.458,00	-20.089.113.458,00
5.4.2.1.2.1.37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	548.582.250,00	1.749.995.200,00	-1.201.412.950,00
5.4.2.1.2.1.38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.540.862.500,00	526.662.000,00	6.014.200.500,00
5.4.2.1.2.1.39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	397.928.150,00	195.355.500,00	202.572.650,00
5.4.2.1.2.1.40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.993.078.956,00	6.196.504.800,00	25.796.574.156,00
5.4.2.1.2.1.41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	169.041.325,00	26.777.796.005,00	-26.608.754.680,00
5.4.2.1.2.1.42	Belanja Pakaian Dinas dan atribut Pimpinnan dan Anggota DPRD	4.500.000,00	-	4.500.000,00
5.4.2.1.2.1.43	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	132.000.000,00	146.178.450,00	-14.178.450,00
5.4.2.1.2.1.44	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	74.960.000,00	133.751.000,00	-58.791.000,00
5.4.2.1.2.1.45	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	126.028.000,00	123.440.000,00	2.588.000,00
5.4.2.1.2.1.46	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	206.630.000,00	62.387.207,00	144.242.793,00
5.4.2.1.2.1.47	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	66.000.000,00	703.197.700,00	-637.197.700,00
5.4.2.1.2.1.48	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	766.805.475,00	8.000.000,00	758.805.475,00
5.4.2.1.2.1.49	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	46.015.200,00	-46.015.200,00
5.4.2.1.2.1.50	Beban Pakaian Teknik	620.784.200,00	195.975.495,00	424.808.705,00

5.4.2.1.2.1.51	Beban Pakaian Adat Daerah	443.410.000,00	585.563.000,00	-142.153.000,00
5.4.2.1.2.1.52	Beban Pakaian Batik Tradisional	736.245.000,00	286.698.500,00	449.546.500,00
5.4.2.1.2.1.53	Beban Pakaian Olahraga	3.099.001.949,00	2.618.362.950,00	480.638.999,00
5.4.2.1.2.1.54	Beban Pakaian Paskibraka	25.600.000,00	537.855.000,00	-512.255.000,00
5.4.2.1.2.1.55	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.328.656.050,00	686.638.500,00	642.017.550,00
Jumlah		170.584.238.783,29	132.201.693.888,00	38.382.544.895,29

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	308.040.267.884,43	235.227.802.657,96	72.812.465.226,47

Rincian dari Beban Jasa Sebagai berikut :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.2.1	Beban Jasa Kantor	235.904.912.921,63	168.451.478.346,96	67.453.434.574,67
5.4.2.1.2.2.2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.266.542.449,30	27.802.145.276,00	8.464.397.173,30
5.4.2.1.2.2.3	Beban Sewa Tanah	2.901.283.509,50	2.003.283.140,00	898.000.369,50
5.4.2.1.2.2.4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.066.724.720,00	4.555.506.182,00	3.511.218.538,00
5.4.2.1.2.2.5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.372.965.000,00	1.755.510.000,00	617.455.000,00
5.4.2.1.2.2.6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
5.4.2.1.2.2.7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	791.725.000,00	-	791.725.000,00
5.4.2.1.2.2.8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.080.719.758,00	269.500.000,00	5.811.219.758,00
5.4.2.1.2.2.9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.787.953.799,00	7.323.179.025,00	2.464.774.774,00
5.4.2.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	86.833.947,00	-	86.833.947,00
5.4.2.1.2.2.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.750.000,00	5.610.289.368,00	-5.607.539.368,00
5.4.2.1.2.2.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.003.304.890,00	263.850.000,00	4.739.454.890,00
5.4.2.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	50.397.469,00	-	50.397.469,00
5.4.2.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	724.154.421,00	-	724.154.421,00
5.4.2.1.2.2.15	Belanja Operasional Pendidikan	-	17.193.061.320,00	-17.193.061.320,00
Jumlah		308.040.267.884,43	235.227.802.657,96	72.812.465.226,47

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	26.454.572.748,30	21.124.853.870,64	5.329.718.877,66

Rincian Beban Pemeliharaan		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	5.852.125,00	-	5.852.125,00
5.4.2.1.2.3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.051.049.528,00	6.820.040.963,00	1.231.008.565,00
5.4.2.1.2.3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.131.950.227,35	8.386.549.818,64	4.745.400.408,71
5.4.2.1.2.3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.081.867.904,00	5.918.263.089,00	-836.395.185,00
5.4.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	183.852.963,95	-	183.852.963,95
Jumlah		26.454.572.748,30	21.124.853.870,64	5.329.718.877,66

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	37.486.232.078,50	18.535.303.528,00	18.950.928.550,50

Rincian Beban Perjalanan Dinas		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.214.592.907,50	11.055.153.592,00	6.159.439.315,50
5.4.2.1.2.4.2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	-	688.440.102,00	-688.440.102,00
5.4.2.1.2.4.3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.172.583.657,00	6.098.850.600,00	14.073.733.057,00
5.4.2.1.2.4.4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	71.250.000,00	-71.250.000,00
5.4.2.1.2.4.5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.690.239,00	621.609.234,00	-611.918.995,00
5.4.2.1.2.4.6	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	89.365.275,00	-	89.365.275,00
Jumlah		37.486.232.078,50	18.535.303.528,00	18.950.928.550,50

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.456.831.343,00	59.904.754.429,00	-12.447.923.086,00

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.947.127.250,00	20.551.255.680,00	-8.604.128.430,00
5.4.2.1.2.5.2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.509.704.093,00	39.353.498.749,00	-3.843.794.656,00
Jumlah		47.456.831.343,00	59.904.754.429,00	-12.447.923.086,00

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.6	Beban Barang dan Jasa BOS	71.530.844.668,00	72.899.390.231,00	-1.368.545.563,00

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.7	Beban Barang dan Jasa BLUD	219.717.180.868,02	205.264.413.445,10	14.452.767.422,92
5.4.2.1.3	Beban Bunga	-	-	-
5.4.2.1.4	Beban Subsidi	-	-	-
5.4.2.1.5	Beban Hibah	115.915.380.000,00	91.860.271.963,96	24.055.108.036,04

Rincian dari beban Hibah adalah :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.5.1	Hibah ke Pemerintah Pusat	21.071.194.400,00	980.556.000,00	20.090.638.400,00
5.4.2.1.5.2	Beban Hibah kepada BUMD	3.710.000.000,00	4.110.289.000,00	(400.289.000,00)
5.4.2.1.5.3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.547.997.300,00	45.917.759.919,08	15.630.237.380,92
5.4.2.1.5.4	Beban Hibah Dana BOS	27.623.874.900,00	38.658.185.644,00	(11.034.310.744,00)
5.4.2.1.5.5	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400,00	1.962.313.400,00	-
5.4.2.1.5.6	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk sekolah swasta (koreksi gedung dan Bangunan)	-	231.168.000,88	(231.168.000,88)
Jumlah		115.915.380.000,00	91.860.271.963,96	24.055.108.036,04

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	4.947.600.000,00	8.110.400.000,00	(3.162.800.000,00)

Beban bantuan sosial diberikan kepada masyarakat tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan dan dalam proses penganggaran telah sesuai dan dalam Laporan Operasional sesuai dengan aturan yang berlaku tidak memperhitungkan utang piutang, perangkaan sama dengan realisasi belanja LRA.

Rincian dari Beban Bantuan Sosial adalah:		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.6.1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	1.467.600.000,00	4.523.400.000,00	(3.055.800.000,00)
5.4.2.1.6.2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.480.000.000,00	3.357.000.000,00	123.000.000,00
5.4.2.1.6.3	Beban sosial kepada Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-

5.4.2.1.6.4	Beban sosial kepada Anggota Masyarakat (Dinas Sosial)	-	230.000.000,00	(230.000.000,00)
5.4.2.1.6.5	Beban Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	-	-	-
Jumlah		4.947.600.000,00	8.110.400.000,00	(3.162.800.000,00)
		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		204.935.636.204,88	204.648.619.145,41	287.017.059,47

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Beban Penyusutan Tahun berjalan	199.799.550.160,08	204.523.470.731,81	(4.723.920.571,73)
5.4.2.1.10	Beban Amortisasi Tahun berjalan	5.136.086.044,80	125.148.413,60	5.010.937.631,20
Jumlah		204.935.636.204,88	204.648.619.145,41	287.017.059,47

Rincian Beban Penyusutan Tahun berjalan :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.543.354.250,20	79.694.250.246,73	(6.150.895.996,53)
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.247.799.906,12	31.559.543.026,25	4.688.256.879,87
5.4.2.1.9	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.008.396.003,76	93.269.677.458,83	(3.261.281.455,07)
Jumlah		199.799.550.160,08	204.523.470.731,81	(4.723.920.571,73)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11	Beban Penyisihan Piutang	2.325.643.106,82	16.405.586.026,09	-14.079.942.919,28

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan besaran dan formulasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 81 Tahun 2022 terdiri dari:

Rincian dari Beban Penyisihan Piutang adalah :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.392.651.858,42	9.752.166.239,63	(8.359.514.381,21)
5.4.2.1.11.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	203.525.602,99	1.399.518.827,24	(1.195.993.224)
5.4.2.1.11.3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	682.724.745,41	5.006.637.992,22	(4.323.913.247)
5.4.2.1.11.4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	46.740.900,00	247.262.967,00	(200.522.067)
Jumlah		2.325.643.106,82	16.405.586.026,09	(14.079.942.919,28)

Adapun rincian lebih lanjut dari masing-masing beban penyisihan piutang adalah :

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.392.651.858,42	9.752.166.239,63	(8.359.514.381,21)

Beban Penyisihan Piutang Pajak terdiri dari :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.1.1	Beban Penyisihan Pajak Restoran	(13.309.566,71)	(167.972.480,15)	154.662.913,44
5.4.2.1.11.1.2	Beban Penyisihan Pajak Hotel	(11.641.291,46)	(622.278,10)	(11.019.013,36)
5.4.2.1.11.1.3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	-	2.125.000,00	(2.125.000,00)
5.4.2.1.11.1.4	Beban Penyisihan Pajak Parkir	163.104,00	31.092,00	132.012,00
5.4.2.1.11.1.5	Beban Penyisihan Pajak Air Bawah Tanah	579.875,78	8.715.471,30	(8.135.595,52)
5.4.2.1.11.1.6	Beban Penyisihan Pajak PBB P2	1.391.259.293,53	9.830.255.892,14	(8.438.996.598,61)
5.4.2.1.11.1.7	Beban Penyisihan Pajak Reklame	25.600.443,28	79.633.542,44	(54.033.099,16)
Jumlah		1.392.651.858,42	9.752.166.239,63	(8.359.514.381,21)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	203.525.602,99	1.399.518.827,24	(1.195.993.224,26)

Beban Penyisihan Piutang Retribusi terdiri dari :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.2.1	Retribusi Menara Telekomunikasi	4.170.600,00	347.102.967,00	(342.932.367,00)
5.4.2.1.11.2.2	Retribusi Khusus Parkir	6.685.000,00	73.815.000,00	(67.130.000,00)
5.4.2.1.11.2.3	Retribusi Parkir Tepi Jalan	32.155.000,00	55.935.500,00	(23.780.500,00)
5.4.2.1.11.2.4	Retribusi Rusunawa	-	-	-
5.4.2.1.11.2.5	Retribusi IMB	4.512.688,50	6.244.169,90	(1.731.481,40)
5.4.2.1.11.2.6	Retribusi Ijin Gangguan	-	2.246.836,85	(2.246.836,85)
5.4.2.1.11.2.7	Retribusi Sampah	-	1.538.200,00	(1.538.200,00)
5.4.2.1.11.2.8	Retribusi Pelayanan Pasar	2.713.331,00	23.596.189,50	(20.882.858,50)
5.4.2.1.11.2.9	Retribusi Kebersihan Pasar	139.477.243,49	852.840.993,99	(713.363.750,51)
5.4.2.1.11.2.10	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	7.121.740,00	36.198.970,00	(29.077.230,00)
5.4.2.1.11.2.11	Retribusi benih padi	6.690.000,00	-	6.690.000,00
Jumlah		203.525.602,99	1.399.518.827,24	(1.195.993.224,26)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	682.724.745,41	5.006.637.992,22	(4.323.913.246,81)

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD terdiri dari :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.3.1	Beban Penyisihan Piutang Pasien RSUD	159.673.041,23	(9.284.413,35)	168.957.454,58
5.4.2.1.11.3.2	Kantor Pengelolaan Pasar	-	-	-
5.4.2.1.11.3.3	DPPKAD	-	-	-
5.4.2.1.11.3.4	Beban penyisihan piutang denda pajak PBB-P2	696.703.057,15	4.998.508.214,42	(4.301.805.157,27)
5.4.2.1.11.3.5	Beban penyisihan piutang denda pajak Hotel	(5.693.788,63)	(304.795,19)	(5.388.993,44)
5.4.2.1.11.3.6	Beban penyisihan piutang denda pajak Restoran	(6.434.866,34)	(80.905.711,01)	74.470.844,67
5.4.2.1.11.3.7	Beban penyisihan piutang denda pajak Hiburan	-	(26.123.112,75)	26.123.112,75
5.4.2.1.11.3.8	Beban penyisihan piutang denda pajak Parkir	80.075,71	9.203,99	70.871,72
5.4.2.1.11.3.9	Beban penyisihan piutang denda pajak Air Bawah Tanah	(42.356.916,02)	4.091.722,23	(46.448.638,25)
5.4.2.1.11.3.10	Beban penyisihan piutang denda pajak Reklame	(119.425.223,69)	37.436.483,88	(156.861.707,57)
5.4.2.1.11.3.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul ulama (UNU) Yogyakarta	-	83.210.400,00	(83.210.400,00)
5.4.2.1.11.3.12	Piutang Dinas Kelautan dan Perikanan dengan omah lele	179.366,00	-	179.366,00
Jumlah		682.724.745,41	5.006.637.992,22	(4.323.913.246,81)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	46.740.900,00	247.262.967,00	-200.522.067,00

Beban Penyisihan Piutang Lainnya per jenis piutang lainnya sebagai berikut :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.11.4.1	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman PIK	(3.934.000,00)	-	(3.934.000,00)
5.4.2.1.11.4.2	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman PEKM	(39.400,00)	71.229.037,00	(71.268.437,00)
5.4.2.1.11.4.3	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman PSG	-	-	-
5.4.2.1.11.4.4	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman UKM	-	2.918.750,00	(2.918.750,00)
5.4.2.1.11.4.5	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman KUPK	24.249.400,00	53.107.580,00	(28.858.180,00)
5.4.2.1.11.4.6	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Sapi	(20.460.000,00)	115.725.000,00	(136.185.000,00)
5.4.2.1.11.4.7	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Penambang Pasir (Dipertahut)	-	(1.000.000,00)	1.000.000,00
5.4.2.1.11.4.8	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Penambang Pasir BKK,PP,KB)	-	-	-
5.4.2.1.11.4.9	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Gurameh	(4.200.000,00)	(10.750.000,00)	6.550.000,00
5.4.2.1.11.4.10	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman BMT	-	-	-
5.4.2.1.11.4.11	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Pedagang Pasar	51.124.900,00	16.032.600,00	35.092.300,00

5.4.2.1.11.4.12	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Pasca Panen	-	-	-
Jumlah		46.740.900,00	247.262.967,00	(200.522.067,00)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.12	Beban Lain-lain	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai Beban Lain-lain				

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.2	BEBAN TRANSFER	342.301.803.637,00	309.515.184.340,00	32.786.619.297,00

Beban Transfer terdiri dari :		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	26.764.870.787,00	22.191.229.940,00	4.573.640.847,00
5.4.2.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	-
5.4.2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.151.140,00	99.707.090,00	444.050,00
5.4.2.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	311.524.613.400,00	283.312.079.000,00	28.212.534.400,00
Jumlah		342.301.803.637,00	309.515.184.340,00	32.786.619.297,00

Beban transfer di Kabupaten terdiri dari:

- 5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk memenuhi amanat perundangan yaitu dengan membagi hasil Pajak daerah yang diperoleh tahun sebelumnya dengan menggunakan formula yang telah ditentukan, besaran beban operasional sama dengan transfer LRA dan belum memperhitungkan utang piutang
- 5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya / bagi hasil retribusi merupakan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk memenuhi amanat perundangan yaitu dengan membagi Pendapatan Lainnya / bagi hasil retribusi daerah dengan menggunakan formula yang telah ditentukan, besaran beban operasional sama dengan transfer LRA dan belum memperhitungkan utang piutang
- 5.4.2.2.3 Beban Transfer bantuan keuangan ke Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada Pemerintah Propinsi DIY sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Piyungan yang dilaksanakan oleh Propinsi DIY dhi Kartamantul yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Prop DIJ, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah desa dan belum memperhitungkan utang piutang
- 5.4.2.2.4 Beban transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa merupakan konsekwensi dari pelaksanaan UU Desa no tahun 2014 yang berupa antara lain Dana Desa (DD) yang merupakan penerusan transfer dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten yang harus dibagi ke Desa yang sudah ditentukan formulasinya dan transfer bantuan keuangan lain berupa kegiatan yang diprakarsai oleh SKPD dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.3	Surplus/defisit dari kegiatan non Operasional	759.066.011,00	1.060.040.143,00	(300.974.132,00)

Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional merupakan kenaikan/penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional, diantaranya surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/defisit dari kegiatan non Operasional tersebut merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar,

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.4	BEBAN LUAR BIASA	1.122.989.975,00	19.683.697.169,00	(18.560.707.194,00)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	SURPLUS/DEFISIT- LO	55.536.537.775,39	38.540.875.306,34	16.995.662.469,05

Surplus/defisit -LO adalah selisih antara pendapatan- Lo dan beban. Surplus/defisit-Lo akan dicatat dan disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.5 **Laporan Arus Kas**

Pos-pos pada Laporan Arus Kas secara umum sudah disajikan dan diuraikan dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan No. 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasi paragraf 21 dengan diterbitkannya PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun di luar pengelolaan BUD termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

Informasi ini bertujuan untuk:

- a. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
- b. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Komponen laporan arus kas yang disajikan terdiri dari:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	2.415.325.351.343,57	2.259.517.399.052,54	155.807.952.291,03

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama tahun anggaran 2023 dan 2022 terdiri atas:

Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	269.918.537.186,00	252.857.438.493,70	17.061.098.692,30
5.5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	42.382.506.560,80	42.178.624.886,07	203.881.674,73
5.5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.515.070.732,29	20.839.915.416,20	(324.844.683,91)
5.5.1.1.4 Lain – Lain PAD yang Sah	253.859.858.182,83	223.636.404.433,83	30.223.453.749,00
5.5.1.1.5 Dana Bagi Hasil	34.766.685.062,00	36.764.154.907,00	(1.997.469.845,00)
5.5.1.1.6 Dana Alokasi Umum	954.626.878.777,00	902.030.732.566,00	52.596.146.211,00
5.5.1.1.7 Dana Alokasi Khusus Fisik	56.576.626.350,00	77.408.558.243,00	(20.831.931.893,00)
5.5.1.1.8 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	309.913.057.548,00	293.233.816.065,00	16.679.241.483,00
5.5.1.1.9 Dana Insentif Daerah	58.809.566.000,00	58.566.684.000,00	242.882.000,00
5.5.1.1.10 Dana Otonomi Khusus	-	-	-
5.5.1.1.11 Dana Keistimewaan	-	-	-
5.5.1.1.12 Dana Desa	126.479.025.000,00	101.247.697.000,00	25.231.328.000,00
5.5.1.1.13 Dana Bagi Hasil dari Propinsi	201.588.461.475,00	192.023.344.227,00	9.565.117.248,00
5.5.1.1.14 Dana Bantuan Keuangan	78.706.842.606,65	50.762.747.595,00	27.944.095.011,65
5.5.1.1.15 Penerimaan Hibah	7.164.398.619,00	6.725.000.000,00	439.398.619,00
5.5.1.1.16 Dana Darurat	-	-	-
5.5.1.1.17 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	17.837.244,00	1.242.281.219,74	(1.224.443.975,74)
Jumlah Arus Kas Masuk	2.415.325.351.343,57	2.259.517.399.052,54	155.807.952.291,03

5.5.1.2	Arus Kas Keluar aktivitas Operasi	2.183.752.083.338,91	2.050.776.168.439,32	132.975.914.899,59
---------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran untuk belanja operasi, transfer dan belanja tak terduga selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022, terdiri atas:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.1.2.1	Belanja Pegawai	860.578.542.728,00	853.342.373.348,00	7.236.169.380,00
5.5.1.2.2	Belanja Barang	858.885.766.998,91	768.495.409.619,24	90.390.357.379,67
5.5.1.2.3	Bunga	-	-	-
5.5.1.2.4	Hibah	115.915.380.000,00	91.629.103.963,08	24.286.276.036,92
5.5.1.2.5	Bantuan Sosial	4.947.600.000,00	8.110.400.000,00	(3.162.800.000,00)
5.5.1.2.6	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah Desa	311.624.764.540,00	283.411.786.090,00	28.212.978.450,00
5.5.1.2.7	Belanja tak Terduga	1.122.989.975,00	19.683.697.169,00	(18.560.707.194,00)
5.5.1.2.8	Belanja Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	30.677.039.097,00	26.103.398.250,00	4.573.640.847,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.183.752.083.338,91	2.050.776.168.439,32	132.975.914.899,59

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	231.573.268.004,66	208.741.230.613,22	22.832.037.391,44
---	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun anggaran 2023 dan 2022

5.5.2	Aliran Kas dari Aktivitas Investasi	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.2.1	Aliran Kas masuk dari Aktivitas Investasi	759.066.011,00	19.422.694.219,00	(18.663.628.208,00)

Aliran Kas masuk dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022, terdiri atas:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.2.1.1	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
5.5.2.1.2	Penjualan atas Tanah	-	-	-
5.5.2.1.3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	672.806.511,00	955.040.143,00	(282.233.632,00)
5.5.2.1.4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	52.250.000,00	105.000.000,00	(52.750.000,00)
5.5.2.1.5	Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-
5.5.2.1.6	Pendapatan Penjualan Aset Tetap	-	-	-
5.5.2.1.7	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	25.500.000,00		25.500.000,00
5.5.2.1.8	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	8.509.500,00		8.509.500,00
5.5.2.1.9	Penjualan atas Penjualan Hasil Peternakan	-	-	-
5.5.2.1.10	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	18.362.654.076,00	(18.362.654.076,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	759.066.011,00	19.422.694.219,00	(18.663.628.208,00)

5.5.2.2	Arus Kas Keluar aktivitas investasi	251.724.987.988,81	253.198.419.757,81	-1.473.431.769,00
---------	-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi tersebut merupakan pengeluaran untuk belanja aset tetap dan aset lainnya selama tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
5.5.2.2.2	Belanja Tanah	-	8.247.988.540,00	(8.247.988.540,00)
5.5.2.2.3	Belanja Peralatan dan Mesin	76.046.486.634,86	70.206.003.149,45	5.840.483.485,41
5.5.2.2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	32.716.587.212,88	37.780.797.101,00	(5.064.209.888,12)
5.5.2.2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.	110.642.014.782,07	98.155.322.270,36	12.486.692.511,71
5.5.2.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.268.805.559,00	7.308.308.697,00	960.496.862,00
5.5.2.2.7	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
5.5.2.2.8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.051.093.800,00	31.500.000.000,00	(7.448.906.200,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	251.724.987.988,81	253.198.419.757,81	-1.473.431.769,00

	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(250.965.921.977,81)	(233.775.725.538,81)	(17.190.196.439,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun anggaran 2023 dan 2022

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.3.1	Arus Kas Masuk dari aktivitas pendanaan	-	162.499.000,00	(162.499.000,00)

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan merupakan penerimaan kas yang antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, selama tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.3.1.1	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-	-
5.5.3.1.2	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	162.499.000,00	(162.499.000,00)

5.5.3.2	Arus Kas Keluar dari aktivitas pendanaan	-	-	-
---------	--	---	---	---

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tersebut merupakan pengeluaran untuk pemberian pinjaman (dana bergulir) dan pembayaran pokok hutang selama tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
5.5.3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-	-
5.5.3.2.3	Pemberian Pinjaman	-	-	-
5.5.3.2.4	Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	-	-	-
5.5.3.2.5	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan	0,00	162.499.000,00	(162.499.000,00)
--	-------------	-----------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun anggaran 2023 dan 2022

5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.4.1	Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris	153.850.670.636,39	139.937.422.374,00	13.913.248.262,39

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan kas brutto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan pembiayaan selama tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	134.639.673.636,39	120.650.633.324,00	13.989.040.312,39
5.5.4.1.1.1	Iuran Wajib Pegawai	-	-	-
5.5.4.1.1.2	PPH Pasal 21	29.671.356.012,50	25.843.152.726,00	3.828.203.286,50
5.5.4.1.1.3	PPH Pasal 22	1.813.186.464,61	1.253.163.394,00	560.023.070,61
5.5.4.1.1.4	PPH Pasal 23	3.076.777.844,16	832.122.643,00	2.244.655.201,16
5.5.4.1.1.5	PPH Pasal 25	581.000,00	4.895.339,00	(4.314.339,00)
5.5.4.1.1.6	PPH Pasal 4(2)	2.893.116.510,54	2.407.956.339,00	485.160.171,54
5.5.4.1.1.7	PPN Pusat	35.269.501.049,58	26.814.679.955,00	8.454.821.094,58
5.5.4.1.1.17	Uang Taspem	26.033.322.219,00	32.495.363.894,00	(6.462.041.675,00)
5.5.4.1.1.18	Iuran Jaminan Kesehatan	32.625.135.908,00	27.722.941.059,00	4.902.194.849,00
5.5.4.1.1.19	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	814.176.339,00	819.091.626,00	(4.915.287,00)
5.5.4.1.1.20	Iuran Jaminan Kematian	2.442.520.289,00	2.457.266.349,00	(14.746.060,00)
5.5.4.1.1.21	Pajak daerah	-	-	-
5.5.4.1.1.22	pajak yang belum disetor di bendahara bosnas	-	-	-
5.5.4.1.2	Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil untuk Penggunaan Uang Persediaan Tahun 2023 dan 2022	14.345.497.699,34	14.536.203.903,20	(190.706.203,86)
5.5.4.1.2	Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2023 dan 2022	4.865.499.300,66	4.750.585.146,80	114.914.153,86
	Jumlah	153.850.670.636,39	139.937.422.374,00	13.913.248.262,39

5.5.4.2	Arus Kas Keluar aktivitas transitoris	153.850.670.636,39	139.937.422.374,00	13.913.248.262,39
---------	---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi belanja dan pembiayaan selama tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

	Uraian	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (Potongan Wajib PNS)	134.639.673.636,39	120.650.633.324,00	13.989.040.312,39
5.5.4.2.1.1	Iuran Wajib Pegawai	-	-	-
5.5.4.2.1.2	PPH Pasal 21	29.671.356.012,50	25.843.152.726,00	3.828.203.286,50
5.5.4.2.1.3	PPH Pasal 22	1.813.186.464,61	1.253.163.394,00	560.023.070,61
5.5.4.2.1.4	PPH Pasal 23	3.076.777.844,16	832.122.643,00	2.244.655.201,16
5.5.4.2.1.5	PPH Pasal 25	581.000,00	4.895.339,00	(4.314.339,00)

5.5.4.2.1.6	PPH Pasal 4(2)	2.893.116.510,54	2.407.956.339,00	485.160.171,54
5.5.4.2.1.7	PPN Pusat	35.269.501.049,58	26.814.679.955,00	8.454.821.094,58
5.5.4.2.1.18	Uang Taspen	26.033.322.219,00	32.495.363.894,00	(6.462.041.675,00)
5.5.4.2.1.19	Iuran Jaminan Kesehatan	32.625.135.908,00	27.722.941.059,00	4.902.194.849,00
5.5.4.2.1.20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	814.176.339,00	819.091.626,00	(4.915.287,00)
5.5.4.2.1.21	Iuran Jaminan Kematian	2.442.520.289,00	2.457.266.349,00	(14.746.060,00)
5.5.4.2.2	Pengeluaran Uang Persediaan Tahun 2023 dan 2022	19.210.997.000,00	19.286.789.050,00	(75.792.050,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	153.850.670.636,39	139.937.422.374,00	13.913.248.262,39

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dan Pembiayaan

- - -

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran selama tahun 2023 dan 2022.

Kenaikan (Penurunan) Kas

(19.392.653.973,15) (24.871.995.925,59) 5.479.341.952,44

Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)

215.631.865.732,74 240.503.861.658,33 279.201.069.180,40

Saldo Awal Kas BOS

Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)

196.239.211.759,59 215.631.865.732,74 284.680.411.132,84

Penjelasan saldo akhir kas Pemerinatah Kabupaten Bantul

Saldo akhir kas terdiri dari :

Saldo Silpa

196.239.211.759,59 215.631.865.732,74 -19.392.653.973,15

Saldo Akhir Kas di BUD

171.064.455.774,11 186.937.014.179,24 (15.872.558.405,13)

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor tahun 2022

0,00 39.974,00 (39.974,00)

Kas Dibendahara Dana Bergulir

0,00 20.000,00 (20.000,00)

Kas di Pengelola Dana Bosnas

527.507.698,00 191.847.570,00 335.660.128,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember yang disetor Tahun berikutnya tetapi merupakan bagian dari Pendapatan tahun 2023 dan 2022

699.567.547,00 212.692.566,00 486.874.981,00

Saldo Akhir Kas di BLUD

23.947.680.740,48 28.290.251.443,50 (4.342.570.703,02)

Saldo Akhir Kas

196.239.211.759,59 215.631.865.732,74 (19.392.653.973,15)

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

		REALISASI 2023(Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.1	EKUITAS AWAL	3.539.962.763.941,66	3.568.360.228.031,25	(28.397.464.089,59)

Saldo Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp3.539.962.763.941,66 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp3.568.360.228.031,25 terdapat penurunan sebesar Rp28.397.464.089,59 atau 0,80%.

		REALISASI 2023(Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.2	SURPLUS/DEFISIT-LO	55.536.537.775,39	38.540.875.306,34	16.995.662.469,05

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat surplus sebesar Rp55.536.537.775,39 dan apabila dibandingkan dengan saldo surplus - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.540.875.306,34 terdapat penurunan sebesar Rp16.995.662.469,05

		REALISASI 2023(Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-	-
5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
5.6.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
5.6.3.3	Koreksi ekuitas lainnya	(41.102.136.834,81)	(66.938.339.395,93)	25.836.202.561,12
5.6.3.4	Pengungkapan atas koreksi ekuitas untuk beban penyusutan tahun sebelumnya	-	-	-
		(41.102.136.834,81)	(66.938.339.395,93)	25.836.202.561,12

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar SKPD tahun 2023

No	Nama SKPD	REALISASI 2023(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(5.578.413.493,69)
2	Dinas Kesehatan	(13.934.467.391,18)
3	RSUD Panembahan Senopati	(10.693.550.939,02)
4	RSUD Saras Adyatma	14.952.346.426,46
5	DPUPKP	52.891.652.775,55
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.379.634.815,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(46.059.116.596,04)
8	Dinas Sosial	513.322.903,66
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(44.291.046,86)
10	DP3APP & KB	10.054.545,64

11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.077.169.264,17
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	977.599.201,48
13	Dinas Lingkungan Hidup	717.292.027,74
14	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	(180.322.867,00)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	219.096.638,95
16	Dinas Perhubungan	3.002.537.183,30
17	Dinas Komunikasi dan Informasi	(208.014.207,19)
18	DKUKMPP	(2.814.473.961,47)
19	DPMPTSP	3.630.276.898,10
20	Dinas Kebudayaan	319.091.182,99
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.486.648.258,07
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.089.057,71
23	Dinas Pariwisata	251.722.146,39
24	Sekretariat Daerah	12.470.541.226,16
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.897.704.107,43
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(168.468,33)
27	BPKPAD	(56.243.302.980,61)
28	BKPSDM	(6.021.574,00)
29	Inspektorat Daerah	21.041.745,00
30	Kepanewon Piyungan	78.752.475,85
31	Kepanewon Dlingo	(34.031.704,50)
32	Kepanewon Imogiri	145.622.387,00
33	Kepanewon Pandak	136.033.883,00
34	Kepanewon Bantul	4.157.696,00
35	Kepanewon Kretek	16.810.895,00
36	Kepanewon Bambanglipuro	5.354.440,00
37	Kepanewon Jetis	9.535.481,00
38	Kepanewon Kasihan	(1.061.462,00)
39	Kepanewon Pleret	(177.282.351,20)
40	Kepanewon Pajangan	9.485.452,00
41	Kepanewon Sanden	205.059.276,00
42	Kepanewon Sedayu	(4.592.937,50)
43	Kepanewon Sewon	194.702.847,00
44	Kepanewon Srandakan	9.783.486,50
45	Kepanewon Banguntapan	45.627.480,50
46	Kepanewon Pundong	9.421.364,99
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(65.922.792,86)
Jumlah		(41.102.136.834,81)

		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.4	EKUITAS AKHIR	3.554.397.164.882,24	3.539.962.763.941,66	14.434.400.940,58

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.554.397.164.882,24 berasal dari penjumlahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023.



BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan amanat SAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, maka pada BAB VI ini disajikan informasi lainnya yang belum disajikan pada laporan keuangan, yaitu :

6.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul

SOTK pada tahun 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan – Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada masing-masing perangkat daerah tersebut.

6.2.2 OPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan -Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati

RSUD Panembahan Senopati sejak tahun 2009 menerapkan PPK- BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 195 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati.

2. Rumah Sakit Umum Saras Adyatma

RSUD Saras Adyatma sejak Tahun 2022 menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Penerapan PPK BLUD dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan baik dalam tata kelola pengelolaan maupun aturan-aturan yang membawahi pelaksanaan penerapan PPK-BLUD

3. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan tentang jaminan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat antara lain Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dan Permenkes Nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan merubah fungsi Puskesmas menjadi BLUD Puskesmas sebagai unit kerja dibawah Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati Nomor 5240 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Penerapan PPK-BLUD pada UPT Puskesmas.

6.2.3 Jenis-Jenis transaksi Non Rekening Kas Umum Daerah (Non RKUD)

Jenis transaksi non RKUD dalam LKPD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2023 yaitu :

1. penerimaan unit organisasi bersifat khusus dan unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD
2. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, unit organisasi bersifat khusus



dan unit perangkat teknis daerah, serta disajikan juga dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. yaitu :

- a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri dari Bosnas, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
- b. Dana Desa; dan
- c. BOK Puskesmas.

6.2.4 Laporan Perkembangan Aset PT BKM (dalam likuidasi)

PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM) merupakan perusahaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bantul bersama PT Perwita Karya (PT PK) pada tahun 2002 berdasarkan akta notaris Nomor 13 tanggal 21 Agustus 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-76934.AH.01.02 tahun 2008 pada tanggal 28 Oktober 2008.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah di aktakan melalui Akta Notaris Rosevia Herlijanta. S.H. Nomor 06 tanggal 18 Agustus 2011 maka para pemegang saham memutuskan pembubaran dan likuidasi PT BKM (dalam likuidasi) karena belum adanya investor dan stagnan. Pembubaran dan likuidasi PT BKM (dalam likuidasi) disetujui dengan Nomor Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tertanggal 19 April 2011.

Selanjutnya dibentuk Tim Likuidasi yang bertugas untuk melakukan penjualan aset/kekayaan perusahaan berupa tanah dan membagikan hasilnya kepada para pemegang saham.

Dasar hukum pembagian hasil penjualan aset/kekayaan PT BKM (dalam likuidasi) kepada para pemegang saham, yaitu 61% untuk Pemda Bantul dan 39% untuk Perwita Karya. Pembagian tersebut berdasarkan Akte Nomor 05 tertanggal 09 Agustus 2012 dengan notaris Rosevia Herijanta.SH dan Berita Acara Kesepakatan Pemegang Saham PT BKM (dalam likuidasi) tertanggal 29 Mei 2015.

Rekapitulasi Jumlah bagi hasil penjualan yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel Hasil Penjualan PT BKM Yang Telah Disetorkan Ke Kas Daerah

No	Uraian	Tanggal Setor ke Kasda	Jumlah (Rp)
1	Setoran I	06 Juni 2015	2.767.668.110,00
2	Setoran II	02 September 2015	4.610.333.280,00
3	Setoran III	29 Januari 2016	1.341.873.800,00
4	Setoran IV	04 Maret 2019	2.973.750.000,00
5	Setoran V	2 Oktober 2020	713.337.205,00
6	Setoran VI	27 Januari 2021	1.070.550.000,00
7	Setoran VII	29 Maret 2021	2.676.375.000,00
8	Setoran VIII	03 Januari 2022	14.675.204.076,00
9	Setoran IX	27 Desember 2022	3.687.450.000,00
		Jumlah	34.516.541.471,00

Pada tahun 2023 terjadi pergantian susunan tim likuidasi PT BKM (dalam likuidasi) bedasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis para Pemegang Saham di luar Rapat Pemegang Saham (SIRKULER) Perseroan Terbatas Bantul Kota Mandiri (dalam likuidasi) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2023 dengan susunan sebagai berikut :

1. Agus Budi Raharja, SKM. Mkes sebagai koordinator (Unsur Pemda Bantul)
2. Drs. Fauzan Mu'arifin sebagai Sekretaris (Unsur Pemda Bantul)
3. Yossy Covalina sebagai Bendahara (Unsur Perwita Karya)



4. Andhy Soelistyo, SH., MH sebagai anggota (Unsur PT Perwita Karya)
5. Drs. Trisna Manurung, Msi sebagai anggota (Unsur Pemda Bantul)
6. Suparman, SIP., MH sebagai anggota (Unsur Pemda Bantul)

Pada tanggal 28 November 2023 telah terjadi perikatan jual beli antara Tim Likuidasi dengan PT. Soerja Agoeng Kentjana berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat atas sebidang tanah milik PT BKM (dalam likuidasi) sertifikat HGB Nomor 00014/Sendangsari seluas 6.916 meter persegi yang tertuang dalam Akta Notaris Agustinus Janarko Sigit Prasetyo, SH., M.Kn dengan Perikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 28 November 2023.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perikatan untuk jual beli dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jual beli sebidang tanah tersebut seharga Rp1.729.000.000,00;
2. sesuai dengan kesepakatan para pihak pembayarannya disepakati sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pertama sebesar 10% dari harga transaksi sebesar Rp172.900.000,00 telah dibayarkan pada tanggal 28 November 2023;
 - b. Pembayaran kedua sebesar 40% dari harga transaksi sebesar Rp691.600.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2023;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar 50% dari harga transaksi sebesar Rp864.500.000,00 akan dibayarkan saat penandatanganan Akta Pernyataan Lunas dan setelah proses pengecekan sertifikat dan validasi pajak PPH telah selesai dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2024.

Sisa tanah yang belum terjual per 31 Desember 2023 sebanyak 7 (tujuh) bidang/sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Sisa Tanah PT BKM yang Belum Terjual per 31 Desember 2023

No	Desa	NO HGB	Luas (m) berdasar sertifikat	Nilai Apraisal (Rp)
1	Sendangsari	15	14.998	1.904.746.000,00
2	Sendangsari	16	3.058	232.408.000,00
3	Sendangsari	17	2.531	372.057.000,00
4	Sendangsari	19	1.991	173.217.000,00
5	Sendangsari	25	841	77.372.000,00
6	Sendangsari	30	5.886	894.672.000,00
7	Sendangsari	35	6.967	1.170.456.000,00
		Jumlah	36.272	4.824.928.000,00

Nilai Apraisal berdasarkan apraisal yang dilakukan pada tahun 2023.

Posisi saldo kas operasional Tim Likuidasi adalah:

- a. Saldo Kas sebesar Rp416.751,00; dan
- b. Saldo bank di BPD Nomor Rekening 004.211.025151 sebesar Rp1.100.981.058,47.

6.2.5 Pengungkapan Tindak Lanjut LHP BPK terhadap audit Danais tahun 2020 sampai dengan 2023

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bantul melaksanakan Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melalui kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi identifikasi, verifikasi pemberkasan, pengukuran, dan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta tanah desa.



Pada tahun 2020 DPTR melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemberkasan tanah desa dengan capaian 1.000 bidang tanah desa dengan capaian pengukuran sebanyak 1.000 bidang tanah dan 1.000 berkas persyaratan pendaftaran pengukuran tanah dan peta kadastral.

Atas kegiatan pengukuran tersebut, pada tahun 2020 DPTR telah membayarkan biaya Transportasi Akomodasi dan Konsumsi (TAK) sebesar Rp225.000.000,00 (1.000 bidang tanah x 3 Orang x Rp75.000,00) untuk 1.000 bidang tanah ke rekening juru ukur.

Dari target 1000 (seribu) bidang tanah yang telah diajukan baru selesai sebanyak 433 bidang tanah sehingga masih kurang 567 yang belum terselesaikan. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menyatakan bahwa sanggup menyelesaikan secara bertahap pekerjaan pengukuran tanah kasultanan sebanyak 567 bidang tunggakan kegiatan tahun 2020 yang biaya transportasi akomodasi dan konsumsi (TAK) petugas ukurnya telah dibayarkan dengan cacatan berkas permohonan dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat teknis dan yuridis dan telah di daftarkan ke Kantor Petanahan Kabupaten Bantul.

Progres penyelesaian pekerjaan pengukuran tanah kasultanan sebanyak 567 bidang tunggakan kegiatan tahun 2020 pada tahun 2023 dapat terselesaikan sebanyak 55 bidang tanah. Sehingga ada sisa sebanyak 512 bidang tanah yang belum terselesaikan.

6.2.6 Realisasi Dana Kalurahan/Dana Desa

Dana Kalurahan merupakan pendapatan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pendapatan tersebut dari Pemerintah pusat langsung di tranfer ke rekenening Pemerintah Kalurahan. Pedoman terkait pengelolaan Dana Kalurahan berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Kalurahan. Rekapitulasi pencairan Dana Kalurahan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Kalurahan sebagai berikut :



Tabel Realisasi Dana Kalurahan/Dana Desa Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6-7)	9
1	KAB. BANTUL (0401)	3402172001 - Argodadi (Sedayu)	004111001074 REKENING KAS DESA ARGODADI BPD YOGYAKARTA	2.586.921.000,00		42.456.760,00	-	2.629.377.760,00	2.586.921.000,00
2	KAB. BANTUL (0401)	3402172004 - Argomulyo (Sedayu)	004111001089 REKENING KAS DESA ARGOMULYO BPD YOGYAKARTA	1.348.711.000,00		94.685.200,00	-	1.443.396.200,00	1.348.711.000,00
3	KAB. BANTUL (0401)	3402172002 - Argorejo (Sedayu)	004111001075 REKENING KAS DESA ARGOREJO BPD YOGYAKARTA	1.491.661.000,00		175.185.807,00	-	1.666.846.807,00	1.491.661.000,00
4	KAB. BANTUL (0401)	3402172003 - Argosari (Sedayu)	004111001085 REKENING KAS DESA ARGOSARI BPD YOGYAKARTA	1.316.921.000,00		121.700.510,00	-	1.438.621.510,00	1.316.921.000,00
5	KAB. BANTUL (0401)	3402152003 - Bangunharjo (Sewon)	004111001069 REKENING KAS DESA BANGUNHARJO BPD YOGYAKARTA	2.172.143.000,00	139.642.000,00	81.772.419,00	-	2.393.557.419,00	2.311.785.000,00
6	KAB. BANTUL (0401)	3402162001 - Bangunjiwo (Kasih)	004111001071 REKENING KAS DESA BANGUNJIWO BPD YOGYAKARTA	2.182.580.000,00	139.642.000,00	66.371.174,00	-	2.388.593.174,00	2.322.222.000,00
7	KAB. BANTUL (0401)	3402122002 - Banguntapan (Banguntapan)	004111001080 REKENING KAS DESA BANGUNTAPAN BPD YOGYAKARTA	2.015.875.000,00		181.237.184,00	-	2.197.112.184,00	2.015.875.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
8	KAB. BANTUL (0401)	3402082003 - Bantul (Bantul)	004111001040 REKENING KAS DESA BANTUL BPD YOGYAKARTA	1.228.872.000,00		278.561.000,00	-	1.507.433.000,00	1.228.872.000,00
9	KAB. BANTUL (0401)	3402122001 - Baturetno (Banguntapan)	004111001057 REKENING KAS DESA BATURETNO BPD YOGYAKARTA	1.371.756.000,00	139.642.000,00	16.772.272,00	-	1.528.170.272,00	1.511.398.000,00
10	KAB. BANTUL (0401)	3402132004 - Bawuran (Pleret)	004111001064 REKENING KAS DESA BAWURAN BPD YOGYAKARTA	1.858.835.000,00		43.445.670,00	-	1.902.280.670,00	1.858.835.000,00
11	KAB. BANTUL (0401)	3402092002 - Canden (Jetis)	004111001023 REKENING KAS DESA CANDEN BPD YOGYAKARTA	1.583.684.000,00		148.012.680,00	-	1.731.696.680,00	1.583.684.000,00
12	KAB. BANTUL (0401)	3402062001 - Catuharjo (Pandak)	004111001035 REKENING KAS DESA CATURHARJO BPD YOGYAKARTA	1.996.879.000,00		175.645.775,00	-	2.172.524.775,00	1.996.879.000,00
13	KAB. BANTUL (0401)	3402112003 - Dlingo (Dlingo)	004111001050 REKENING KAS DESA DLINGO BPD YOGYAKARTA	1.662.111.000,00		46.045.038,00	-	1.708.156.038,00	1.662.111.000,00
14	KAB. BANTUL (0401)	3402032003 - Donotirto (Kretek)	004111001091 REKENING KAS DESA DONOTIRTO BPD YOGYAKARTA	1.003.193.000,00		58.999.850,00	-	1.062.192.850,00	1.003.193.000,00
15	KAB. BANTUL (0401)	3402022002 - Gadingharjo (Sanden)	004111001027 REKENING KAS DESA GADINGHARJO BPD YOGYAKARTA	1.312.212.000,00		67.704.959,00	-	1.379.916.959,00	1.312.212.000,00
16	KAB. BANTUL (0401)	3402022001 - Gadingsari (Sanden)	004111001026 REKENING KAS DESA GADINGSARI BPD YOGYAKARTA	1.511.490.000,00		205.234.760,00	-	1.716.724.760,00	1.511.490.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
17	KAB. BANTUL (0401)	3402062003 - Gilangharjo (Pandak)	004111001081 REKENING KAS DESA GILANGHARJO BPD YOGYAKARTA	1.847.635.000,00		220.472.200,00	-	2.068.107.200,00	1.847.635.000,00
18	KAB. BANTUL (0401)	3402102006 - Girirejo (Imogiri)	004111001079 REKENING KAS DESA GIRIREJO BPD YOGYAKARTA	1.342.823.000,00		94.432.660,00	-	1.437.255.660,00	1.342.823.000,00
19	KAB. BANTUL (0401)	3402072003 - Guwosari (Pajangan)	004111001054 REKENING KAS DESA GUWOSARI BPD YOGYAKARTA	1.776.307.000,00		53.460.100,00	-	1.829.767.100,00	1.776.307.000,00
20	KAB. BANTUL (0401)	3402102008 - Imogiri (Imogiri)	004111001047 REKENING KAS DESA IMOGIRI BPD YOGYAKARTA	857.012.000,00		53.987.130,00	-	910.999.130,00	857.012.000,00
21	KAB. BANTUL (0401)	3402122003 - Jagalan (Banguntapan)	004111001058 REKENING KAS DESA JAGALAN BPD YOGYAKARTA	815.285.000,00		117.612.368,00	-	932.897.368,00	815.285.000,00
22	KAB. BANTUL (0401)	3402122005 - Jambidan (Banguntapan)	004111001059 REKENING KAS DESA JAMBIDAN BPD YOGYAKARTA	1.461.057.000,00	139.642.000,00	90.801.879,00	-	1.691.500.879,00	1.600.699.000,00
23	KAB. BANTUL (0401)	3402112006 - Jatimulyo (Dlingo)	004111001053 REKENING KAS DESA JATIMULYO BPD YOGYAKARTA	1.712.370.000,00	139.642.000,00	80.149.009,00	-	1.932.161.009,00	1.852.012.000,00
24	KAB. BANTUL (0401)	3402102007 - Karangtalun (Imogiri)	004111001046 REKENING KAS DESA KARANGTALUN BPD YOGYAKARTA	856.180.000,00		123.013.902,00	-	979.193.902,00	856.180.000,00
25	KAB. BANTUL (0401)	3402102005 - Karangtengah (Imogiri)	004111001045 REKENING KAS DESA KARANGTENGGAH BPD YOGYAKARTA	1.447.714.000,00		75.675.314,00	-	1.523.389.314,00	1.447.714.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
26	KAB. BANTUL (0401)	3402102004 - Kebonagung (Imogiri)	004111001076 REKENING KAS DESA KEBONAGUNG BPD YOGYAKARTA	1.133.045.000,00		133.656.758,00	-	1.266.701.758,00	1.133.045.000,00
27	KAB. BANTUL (0401)	3402112001 - Mangunan (Dlingo)	004111001048 REKENING KAS DESA MANGUNAN BPD YOGYAKARTA	1.268.250.000,00	139.642.000,00	90.357.250,00	-	1.498.249.250,00	1.407.892.000,00
28	KAB. BANTUL (0401)	3402052002 - Mulyodadi (Bambanglipuro)	004111001088 REKENING KAS DESA MULYODADI BPD YOGYAKARTA	1.645.016.000,00	139.642.000,00	94.594.250,00	-	1.879.252.250,00	1.874.658.000,00
29	KAB. BANTUL (0401)	3402112002 - Muntuk (Dlingo)	004111001049 REKENING KAS DESA MUNTUK BPD YOGYAKARTA	2.077.345.000,00		133.369.031,00	-	2.210.714.031,00	2.077.345.000,00
30	KAB. BANTUL (0401)	3402022004 - Murtigading (Sanden)	004111001086 REKENING KAS DESA MURTIGADING BPD YOGYAKARTA	1.350.341.000,00		95.112.841,00	-	1.445.453.841,00	1.350.341.000,00
31	KAB. BANTUL (0401)	3402162004 - Ngestiharjo (Kasihah)	004111001073 REKENING KAS DESA NGESTIHARJO BPD YOGYAKARTA	2.053.803.000,00		210.341.550,00	-	2.264.144.550,00	2.053.803.000,00
32	KAB. BANTUL (0401)	3402082001 - Palbapang (Bantul)	004111001038 REKENING KAS DESA PALBAPANG BPD YOGYAKARTA	1.666.515.000,00		242.005.199,00	-	1.908.520.199,00	1.666.515.000,00
33	KAB. BANTUL (0401)	3402152004 - Panggungharjo (Sewon)	004111001070 REKENING KAS DESA PANGGUNG HARJO BPD YOGYAKARTA	2.327.131.000,00	35.000.000,00	64.164.870,00	-	2.426.295.870,00	2.362.131.000,00
34	KAB. BANTUL (0401)	3402042002 - Panjangrejo (Pundong)	004111001032 REKENING KAS DESA PANJANGREJO BPD YOGYAKARTA	1.531.301.000,00	139.642.000,00	126.976.000,00	-	1.797.919.000,00	1.670.943.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
35	KAB. BANTUL (0401)	3402032002 - Parangtritis (Kretek)	004111001028 REKENING KAS DESA PARANGTRITIS BPD YOGYAKARTA	1.194.865.000,00		14.528.915,00	-	1.209.393.915,00	1.194.865.000,00
36	KAB. BANTUL (0401)	3402092001 - Patalan (Jetis)	004111001087 REKENING KAS DESA PATALAN BPD YOGYAKARTA	1.840.374.000,00		62.476.345,00	-	1.902.850.345,00	1.840.374.000,00
37	KAB. BANTUL (0401)	3402152001 - Pendowoharjo (Sewon)	004111001068 REKENING KAS DESA PENDOWOHARJO BPD YOGYAKARTA	2.112.657.000,00		36.707.534,00	-	2.149.364.534,00	2.112.657.000,00
38	KAB. BANTUL (0401)	3402132002 - Pleret (Pleret)	004111001093 REKENING KAS DESA PLERET BPD YOGYAKARTA	1.571.642.000,00	139.642.000,00	168.052.361,00	-	1.879.336.361,00	1.711.284.000,00
39	KAB. BANTUL (0401)	3402012001 - Poncosari (Srandakan)	004111001024 REKENING KAS DESA PONCOSARI BPD YOGYAKARTA	1.720.486.000,00	139.642.000,00	160.229.500,00	-	2.020.357.500,00	1.860.128.000,00
40	KAB. BANTUL (0401)	3402122006 - Potorono (Banguntapan)	004111001060 REKENING KAS DESA POTORONO BPD YOGYAKARTA	1.349.665.000,00		128.186.035,00	-	1.477.851.035,00	1.349.665.000,00
41	KAB. BANTUL (0401)	3402082002 - Ringinharjo (Bantul)	004111001039 REKENING KAS DESA RINGINHARJO BPD YOGYAKARTA	1.408.611.000,00		43.601.700,00	-	1.452.212.700,00	1.408.611.000,00
42	KAB. BANTUL (0401)	3402082005 - Sabdodadi (Bantul)	004111001042 REKENING KAS DESA SABDODADI BPD YOGYAKARTA	1.151.230.000,00		42.065.350,00	-	1.193.295.350,00	1.151.230.000,00
43	KAB. BANTUL (0401)	3402132003 - Segoroyoso (Pleret)	004111001063 REKENING KAS DESA SEGOROYOSO BPD YOGYAKARTA	1.751.687.000,00		177.628.920,00	-	1.929.315.920,00	1.751.687.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
44	KAB. BANTUL (0401)	3402042001 - Seloharjo (Pundong)	004111001031 REKENING KAS DESA SELOHARJO BPD YOGYAKARTA	1.999.817.000,00	139.642.000,00	258.961.000,00	-	2.398.420.000,00	2.139.459.000,00
45	KAB. BANTUL (0401)	3402102001 - Selopamioro (Imogiri)	004111001044 REKENING KAS DESA SELOPAMIORO BPD YOGYAKARTA	3.018.140.000,00		331.058.130,00	-	3.349.198.130,00	3.018.140.000,00
46	KAB. BANTUL (0401)	3402072002 - Sendangsari (Pajangan)	004111001084 REKENING KAS DESA SENDANGSARI BPD YOGYAKARTA	2.743.259.000,00		167.986.852,00	-	2.911.245.852,00	2.743.259.000,00
47	KAB. BANTUL (0401)	3402052001 - Sidomulyo (Bambanglipuro)	004111001034 REKENING KAS DESA SIDOMULYO BPD YOGYAKARTA	1.531.166.000,00		36.559.500,00	-	1.567.725.500,00	1.531.166.000,00
48	KAB. BANTUL (0401)	3402122004 - Singosaren (Banguntapan)	004111001078 REKENING KAS DESA SINGOSAREN BPD YOGYAKARTA	913.297.000,00	139.642.000,00	70.716.844,00	-	1.123.655.844,00	1.052.939.000,00
49	KAB. BANTUL (0401)	3402142001 - Sitimulyo (Piyungan)	004111001065 REKENING KAS DESA SITIMULYO BPD YOGYAKARTA	1.683.410.000,00		211.867.661,00	-	1.895.277.661,00	1.683.410.000,00
50	KAB. BANTUL (0401)	3402022003 - Srigading (Sanden)	004111001077 REKENING KAS DESA SRIGADING BPD YOGYAKARTA	1.266.933.000,00		118.613.477,00	-	1.385.546.477,00	1.266.933.000,00
51	KAB. BANTUL (0401)	3402042003 - Srihardono (Pundong)	004111001033 REKENING KAS DESA SRIHARDONO BPD YOGYAKARTA	1.489.326.000,00	139.642.000,00	171.364.798,00	-	1.800.332.798,00	1.628.968.000,00
52	KAB. BANTUL (0401)	3402102002 - Sriharjo (Imogiri)	004111001056 REKENING KAS DESA SRIHARJO BPD YOGYAKARTA	1.916.696.000,00		221.766.922,00	-	2.138.462.922,00	1.916.696.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
53	KAB. BANTUL (0401)	3402142003 - Srimartani (Piyungan)	004111001067 REKENING KAS DESA SRIMARTANI BPD YOGYAKARTA	1.835.723.000,00		141.609.005,00	-	1.977.332.005,00	1.835.723.000,00
54	KAB. BANTUL (0401)	3402142002 - Srimulyo (Piyungan)	004111001099 REKENING KAS DESA SRIMULYO BPD YOGYAKARTA	1.617.942.000,00		176.052.041,00	-	1.793.994.041,00	1.617.942.000,00
55	KAB. BANTUL (0401)	3402092003 - Sumberagung (Jetis)	004111001043 REKENING KAS DESA SUMBERAGUNG BPD YOGYAKARTA	1.622.698.000,00		118.940.600,00	-	1.741.638.600,00	1.622.698.000,00
56	KAB. BANTUL (0401)	3402052003 - Sumbermulyo (Bambanglipuro)	004111001055 REKENING KAS DESA SUMBERMULYO BPD YOGYAKARTA	1.548.224.000,00	139.642.000,00	47.483.591,00	-	1.735.349.591,00	1.687.866.000,00
57	KAB. BANTUL (0401)	3402122007 - Tamanan (Banguntapan)	004111001061 REKENING KAS DESA TAMANAN BPD YOGYAKARTA	1.410.645.000,00		270.325.790,00	-	1.680.970.790,00	1.410.645.000,00
58	KAB. BANTUL (0401)	3402162003 - Tamantirto (Kasih)	004111001098 REKENING KAS DESA TAMANTIRTO BPD YOGYAKARTA	1.914.628.000,00		258.560.577,00	-	2.173.188.577,00	1.914.628.000,00
59	KAB. BANTUL (0401)	3402112004 - Temuwuh (Dlingo)	004111001051 REKENING KAS DESA TEMUWUH BPD YOGYAKARTA	1.336.118.000,00		231.778.500,00	-	1.567.896.500,00	1.336.118.000,00
60	KAB. BANTUL (0401)	3402112005 - Terong (Dlingo)	004111001052 REKENING KAS DESA TERONG BPD YOGYAKARTA	1.249.407.000,00	139.642.000,00	96.541.405,00	-	1.485.590.405,00	1.389.049.000,00
61	KAB. BANTUL (0401)	3402152002 - Timbulharjo (Sewon)	004111001083 REKENING KAS DESA TIMBULHARJO BPD YOGYAKARTA	2.142.679.000,00		158.085.884,00	-	2.300.764.884,00	2.142.679.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
62	KAB. BANTUL (0401)	3402032005 - Tirtohargo (Kretek)	004111001030 REKENING KAS DESA TIRTOHARGO BPD YOGYAKARTA	1.269.318.000,00		70.585.446,00	-	1.339.903.446,00	1.269.318.000,00
63	KAB. BANTUL (0401)	3402032001 - Tirtomulyo (Kretek)	004111001095 REKENING KAS DESA TIRTOMULYO BPD YOGYAKARTA	1.424.698.000,00		13.254.500,00	-	1.437.952.500,00	1.424.698.000,00
64	KAB. BANTUL (0401)	3402162002 - Tirtonirmolo (Kasihah)	004111001072 REKENING KAS DESA TIRTONIRMOLO BPD YOGYAKARTA	2.344.501.000,00		109.139.775,00	-	2.453.640.775,00	2.344.501.000,00
65	KAB. BANTUL (0401)	3402032004 - Tirtosari (Kretek)	004111001029 REKENING KAS DESA TIRTOSARI BPD YOGYAKARTA	1.111.602.000,00		63.747.525,00	-	1.175.349.525,00	1.111.602.000,00
66	KAB. BANTUL (0401)	3402062002 - Triharjo (Pandak)	004111001097 REKENING KAS DESA TRIHARJO BPD YOGYAKARTA	1.921.834.000,00		335.457.574,00	-	2.257.291.574,00	1.921.834.000,00
67	KAB. BANTUL (0401)	3402092004 - Trimulyo (Jetis)	004111001090 REKENING KAS DESA TRIMULYO BPD YOGYAKARTA	2.386.968.000,00		237.354.750,00	-	2.624.322.750,00	2.386.968.000,00
68	KAB. BANTUL (0401)	3402012002 - Trimurti (Srandakan)	004111001025 REKENING KAS DESA TRIMURTI BPD YOGYAKARTA	2.132.213.000,00		198.242.048,00	-	2.330.455.048,00	2.132.213.000,00
69	KAB. BANTUL (0401)	3402082004 - Trirenggo (Bantul)	004111001041 REKENING KAS DESA TRIRENGGO BPD YOGYAKARTA	1.628.190.000,00		198.451.880,00	-	1.826.641.880,00	1.628.190.000,00
70	KAB. BANTUL (0401)	3402072001 - Triwidadi (Pajangan)	004111001037 REKENING KAS DESA TRIWIDADI BPD YOGYAKARTA	2.654.107.000,00		213.304.900,00	-	2.867.411.900,00	2.654.107.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Kabupaten / Kota	Nama Desa	No Rek Desa	Pagu					Penyaluran (Rp)
				Pagu Dana Desa sesuai PMK (Rp)	Pagu Tambahan (Rp)	Alokasi DD yg berasal dari sisa di RKD tahun sebelumnya (Rp)	Sisa di RKD yang dialokasikan untuk tahun berikutnya (Rp)	Dana Desa 2023 (Rp)	
71	KAB. BANTUL (0401)	3402062004 - Wijirejo (Pandak)	004111001036 REKENING KAS DESA WIJIREJO BPD YOGYAKARTA	1.537.705.000,00		29.326.750,00	-	1.567.031.750,00	1.537.705.000,00
72	KAB. BANTUL (0401)	3402122008 - Wirokerten (Banguntapan)	004111001094 REKENING KAS DESA WIROKERTEN BPD YOGYAKARTA	1.478.285.000,00		239.538.661,00	-	1.717.823.661,00	1.478.285.000,00
73	KAB. BANTUL (0401)	3402132001 - Wonokromo (Pleret)	004111001062 REKENING KAS DESA WONOKROMO BPD YOGYAKARTA	1.795.043.000,00	139.642.000,00	116.262.024,00	-	2.050.947.024,00	1.934.685.000,00
74	KAB. BANTUL (0401)	3402132005 - Wonolelo (Pleret)	004111001066 REKENING KAS DESA WONOLELO BPD YOGYAKARTA	1.407.925.000,00		129.532.729,00	-	1.537.547.729,00	1.407.925.000,00
75	KAB. BANTUL (0401)	3402102003 - Wukirsari (Imogiri)	004111001082 REKENING KAS DESA WUKIRSARI BPD YOGYAKARTA	1.963.065.000,00		62.055.266,00	-	2.025.120.266,00	1.963.065.000,00



6.2.7 Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Yang Digunakan Pihak Ketiga

Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul yang digunakan pihak ketiga selama tahun 2023 baik dalam bentuk pinjam pakai maupun sewa adalah sebagai berikut:

6.2.7.1 Daftar BMD yang Dipinjam Pakai oleh Pihak Ketiga

Pinjam Pakai Tanah dan Gedung

No	Pemohon	Nama Tanah Dan Gedung	Alamat	Pemanfaatan	Masa Berlaku	Keterangan
1	Pemda DIY	Tanah	Wijirejo. Pandak. Bantul	Pembibitan Pertanian	01 Mei 2020 s/d 31 April 2025	No Perjanjian 590/04336/BKAD ; 38/Perj/Sekda/x/2020
2	Kodim	Gedung Eks Disperindagkop	Jl. Pramuka No. 3 Bantul	Sekretariat Fepabri	21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2026	No perjanjian 0028/0015/BKAD
3	Rupbasan Bantul	Gedung Eks Tuti Barat	Jl. Srandakan. Pandak Bantul	Kantor Rupbasan	17 Mei 2021 s/d 16 Mei 2026	No Perjanjian 04/KEPT/SEKDA/2022
4	Pemda DIY	Gedung Eks Kantor Pora	Jl. RA Kartini Bantul	Kantor Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul	26 Januari 2022 s/d 26 Januari 2027	No Perjanjian 0028/0015/BKAD
5	Kejaksaan Negeri Bantul	Tanah dan Gedung	Jalan RA Kartini Trirenggo Bantul	Rumah Dinas Kejaksaan Negri Bantul	12 Juni 2023 s/d 11 Juni 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/000951/BPKPAD
6	BNNK Bantul	Tanah	Jalan Bantul Km 9 Karanggede Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul	Kantor BNNK Bantul	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian B/000.1.4/0011/BPKPAD
		Gedung Eks Transito	Jalan Bantul Km 9 Karanggede Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul	Kantor BNNK Bantul	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian B/000.1.4/0011/BPKPAD
7	KPUD Bantul	Tanah	Jl. Wachid Hasyim Sumuran. Palbapang. Bantul	Kantor KPUD Bantul	02 Oktober 2023 s/d 30 September 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/0042/BPKPAD
		Gedung Eks Kantor Tuti Tengah	Jl. Wachid Hasyim Sumuran. Palbapang. Bantul	Kantor KPUD Bantul	02 Oktober 2023 s/d 30 September 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/0042/BPKPAD
8	BAWASLU Bantul	Gedung	Dukuh Sabdodadi Bantul	Kantor BAWASLU	20 Juni 2022 s/d 19 Juni 2027	640/02589/BPKPAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pinjam Pakai Kendaraan Dinas

No	Pemohon	Nama Barang	Merk/Type	No Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Pembuatan	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan
1	Kejaksanaan Negeri Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 1139 UB / AB 4 B	MHFJW8EMXJ2356026	1TR-A500884	2018	1	06 Maret 2019 s/d 05 Maret 2024	Nomor Perjanjian 024/01041/BKAD B-523/04.13/B/2019
			Kijang Avanza Veloz	AB 1315 UB	MHKM1CA4JEK067917	DEG1348	2014	1		
2	Kantor BPN Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova G Lux	AB 1310 UB	MHFJW42G0E227834	1 TR7709838	2014	1	11 Maret 2019 s/d 30 Maret 2024	Nomor Perjanjian 024/01086/BKAD 552/SKB-34.02.UP/II/2019
3	Polres Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang STD KF 70 Short	AB 1011 BV	MHF11KF7030040471	7K0607184	2023	1	04 Februari 2020 s/d 03 Februari 2025	Nomor Perjanjian 024/0034/BKAD B/2208/XI/2020
4	Kantor Pelayanan pajak (Samsat)	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota New Avanza	AB 86 B	MIBA2J6 K 0017889	K 3DB7 3565	2006	1	01 November 2020 s/d 31 Oktober 2025	Nomor Perjanjian 024/04508 024/07982
5	Kodim 0729 Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda GL 200 CW RI	AB 2380 UB	NHIMC22119KO21011	MC22E1021129	2009	1	25 November 2020 s/d 24 November 2025	Nomor Perjanjian 024/04509 858/XI/2020
			Honda GL 200 CW RI	AB 2381 UB	NHIMC22149KO21018	MC22E1021130	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2382 UB	NHIMC22199KO21015	MC22E1021134	2009	1		
6	Polres Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda GL 200 CW RI	AB 2383 UB	NHIMC22129KO17291	MC22E17237	2009	1	25 November 2020 s/d 24 November 2025	Nomor Perjanjian 024/0034/BKAD B/2208/XI/2020
			Honda GL 200 CW RI	AB 2374 UB	NHIMC22129KO18988	MC22E18941	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2375 UB	NHIMC22189KO18400	MC22E18314	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2376 UB	NHIMC22119KO21042	MC22E20945	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2377 UB	NHIMC22149KO21049	MC22E20948	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2378 UB	NHIMC22109KO20965	MC22E20977	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2379 UB	NHIMC22169KO21005	MC22E21127	2009	1		
7	RumahTahan Negara	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Avanza E M/T	AB 1016 IB	MHFM1BA 2J7K 008 060	DC 47169	2007	1	15 Desember 2020 s/d 14 Desember 2025	Nomor Perjanjian 024/05001/BKAD/2020
8	BNNK Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Panther	AB 1078 UB	TRB54K115666	E-115666	2004	1	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian B/000.1.4/0011/BPKPAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Pemohon	Nama Barang	Merk/Type	No Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Pembuatan	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan
		Multi Ourpose Vehicle (MPV)	Toyota Kijang G Lux	AB 1312 UB	MHFXW42G2E2283659	1TR7756492	2014	1		
		Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda	AB 2972 UB	MH1NFD12YK006750	NFGDE1006718	2000	1		
9	Kejaksaan Negeri Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	NEW AVANZA 1.36 M/T	AB 1301 UB	MHKMIBA31EK196760	MD27089	2014	1	12 Juni 2023 s/d 11 Juni 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/000951/BPKPAD
10	Polres Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 1129 UB	MHFJW8EM9J2356096	1TR-A501557	2018	1	11 Desember 2023 s/d 10 Desember 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/00189/BPKPAD B/2446/XII/HUK.8.1.1/2023/Res.Bt 1
			Toyota Kijang Veloz 1.5 M/T	AB 1202 YY	MHFAB1BY1P0084867	2NR-Y156227	2023	1		
		Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5118 UB	MH4LX150GJJP70110	LX150CEWB9574	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5120 UB	MH4LX150GJJP65919	LX150CEWB5722	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5123 UB	MH4LX150GJJP68970	LX150CEWB4421	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5124 UB	MH4LX150GJJP70102	LX150CEWB9876	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5125 UB	MH4LX150GJJP70118	LX150CEWB9009	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5126 UB	MH4LX150GJJP68899	LX150CEWB4418	2018	1		
KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5127 UB	MH4LX150GJJP68969	LX150CEWB4412	2018	1					
11	Pengadilan Negeri Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 5 B	MHFJW8EM0J2356150	1TR-A500546	2018	1	11 Desember 2023 s/d 10 Desember 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/00188/BPKPAD 3514/SEK.PN.W13-45/PL1.2/XII/23023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Pemohon	Nama Barang	Merk/Type	No Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Pembuatan	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan
12	Pengadilan Agama Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova G	AB 1304 UB	MHFXXW42G9E2283464	1TR-7754926	2014	1	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/00011/BPKPAD
13	Kodim 0729 Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5119 UB	MH4LX150GJJP69057	LX150CEWB5175	2018	1	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/00009/BPKPAD B/4611/2024
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5122 UB	MH4LX150GJJP69431	LX150CEWB5489	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5121 UB	MH4LX150GJJP69132	LX150CEWB4961	2018	1		
		Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 1095 UB	MHFJW8EMSJ2356077	1TR-A501088	2018	1		
14	BAWASLU	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	NevVario 110F CBS-ISS	AB 5220 UB	JFY1E1121557	JFY114JK124720	2018	1	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/0006/BPKPAD
			NevVario 110F CBS-ISS	AB 5219 UB	JFY1E1121543	JFY114JK124793	2018	1		
			Supra helm in F1 MMC VIN	AB 5207 UB	JBG11XJK208044	JBG1E1204628	2018	1		
			Supra helm in F1 MMC VIN	AB 5168 UB	JBG11XJK208126	JBG1E1204675	2018	1		

Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPER	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	BPN Kabupaten Bantul	Komputer	ENVY 23 2245d Touch Smart AiO	5 Unit	10 September 2019 s/d 09 September 2024	Nomor Perjanjian 028/04313/BKAD; 1777/SKB-34.02.UP.03/IX/20190
		Printer	Epson Stylus Photo 1390	3 Unit		
		Printer	LQ 2190	1 Unit		
		Printer	HP Laserjet Pro P1566	2 Unit		
		GPS	Maggellan Ex Plorist 510	4 Unit		
2	BPN Kabupaten Bantul	Laptop	Asus A412FL-EK703T	1 Unit	03 Juni 2020 s/d 02 Juni 2025	Nomor Perjanjian 028/02181/BKAD/ 2020 1174/SKB-34.02.UP.03/VI/2020



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
3	BPN Kabupaten Bantul	GPS	GPS CHC i50	1 Unit	03 Juni 2020 s/d 02 Juni 2025	Nomor Perjanjian 028/02181/BKAD/ 2020 1174/SKB-34.02.UP. 03/VI/2020
4	BPN Kabupaten Bantul	Lemari Arsip Dorong	Wifile MFB-6 BS 22	2 Buah	21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2025	Nomor Perjanjian 028/00675/I/2020
5	Polres Bantul	Kamera Digital	Canon IXUS 125 HS	1 Unit	25 Februari 2020 s/d 24 Februari 2025	Nomor Perjanjian 020/01265; B/347/III/2020
		Kursi Tamu	-	1 Set		
6	BNNK Bantul	AC Split	Nasionnal	1 Unit	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian B/000.1.4/0011/ BPKPAD
		Almari Arsip		1 Unit		
		Display		1 Unit		
		Filling Kabinet	Alba	2 Buah		
		Komputer	Acer Aspire T3-780	1 Unit		
		Kursi Biasa	Lokal	2 Buah		
		Kursi Kayu	Lokal	3 Buah		
		Kursi Kerja	Lokal	6 Buah		
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	1 Buah		
		Kursi Rapat	Futura	8 Buah		
		Kursi Rapat	Chitose	1 Buah		
		Almari Besi/Metal		1 Buah		
		Lemari Kayu		1 Buah		
		Lemari Pakaian	Lokal	1 Buah		
		Meja ½ Biro		6 Buah		
		Meja Kayu ½ Biro		7 Buah		
		Meja Kerja	Lokal	3 Buah		
		Meja Kerja Kayu		4 Buah		
		Meja Kerja Pejabat Eselon III		1 Buah		
		Meja Kursi Tamu	Lokal	1 Set		
Meja Pimpinan	Lokal	1 Buah				
Meja Tulis	Lokal	6 Buah				
Note Book Profesional	Asus X441UV	1 Buah				
Printer	HP L J Prop 1102WCE658A	1 Buah				
	Meja Kayu	Lokal	5 Buah			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		Kursi Kayu	Lokal	13 Buah		
		Meja Kerja Kayu	Lokal	2 Buah		
7	Kodim 0729	LCD Proyektor dan Layar	Panasonic LB280 XGA	1 Unit	21 September 2020 s/d 20 September 2025	No Perjanjian 028/03839/BKAD/ASET; B/780/IX/2020
8	Kodim 0729	Meja Kerja		10 Buah	7 November 2022 s/d 6 November 20276	Nomor Perjanjian 020/05088/BPKPAD
		Kursi Kerja		10 Buah		
9	Kejaksanaan Negeri Bantul	Sofa	Handmade	2 Buah	20 Desember 2023 s/d 19 Desember 2028	Nomor Perjanjian B/000.2.1/00036/BPKPAD B/149/M9.12/01/2024
		Televisi	LG 43 Inch	1 Buah		
		Televisi	LG 55 Inch	1 Buah		
		Televisi	LG 55 Inch	1 Buah		
		Mesin Cuci	Aqua	1 Buah		
		Meja Tamu Biasa	Handmade	1 Set		
		Kitchen Set	Handmade	1 Set		
		Gordyin/Kray	Handmade 100 M	1 Set		
		Tabung Gas	Elpiji 12 Kg	1 Buah		
		Kompor Gas (Alat Dapur)	Rinnai	1 Buah		
		Lemari Es	LG	1 Buah		
		A.C. Split	LG 3/4 PK	5 Buah		
		Kasur/Spring Bed	Handmade	6 Buah		
		MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	Handmade	2 Set		
		Lemari Kayu	Handmade	5 Buah		
		AC Split	Panasonic 2 PK	3 Buah		
10	Bawaslu	Filling Kabinet	Datascrib	2 Unit	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian B/000.2.3.2/00006BPKPAD
		Printer	HP LJ Pro 210n 9CF465A	2 Unit		
		Komputer	Asus K31AD care13	2 Unit		
		Note Book	Asus P2430U	2 Unit		
		Almari Kayu	Lokal	2 Buah		
		Meja Tamu	Fortuna Mexico	1 Set		
		Meja ½ Biro	Modera Class COD 128	2 Buah		
		Kursi Kerja	Ivhico IC 303	2 Buah		
		Kursi Rapat	Chitose Caesar P	41 Buah		
		Rak Buku	Brother B901	2 Buah		
		Almari ½ Tinggi Tanpa Pintu	Modera ACL 7491	3 Buah		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		Almari Besi Kaca	Brother B 304	4 Buah		
		Meja Rapat	Modera C class CCT 189	13 Buah		

6.2.5.2 Daftar BMD Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga

No.	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	LUAS		PEMANFAATAN	NO. PERJANJIAN SEWA	MASA SEWA TAHUN	BESARAN SEWA PER TAHUN (Rp)	TOTAL NILAI SEWA (Rp)	JANGKA WAKTU	
				TANAH	GEDUNG						TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR
1	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	Gedung Eks Dikmenof	Jl. Ir.H. Juanda No. 103 Trirenggo Bantul	-	2.500 m ²	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	119/04688/BPKPAD 037/KS-PDA/A/IX/22	5	11.000.000,00	55.000.000.00	21-Nov-22	20-Nov-27
2	PT Bank BPD DIY	Tanah dan Bangunan	Jalan lingkaran Manding Komplek Perkantoran Pemda II	3.25 m ²	3.25 m ²	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	B/0002.3.2/00140 PKS 063/HT 0501	5	8.000.000,00	40.000.000.00	2 Oktober 2023	1 Oktober 2028
3	PT Bank Mandiri Persero tbk)	Tanah dan Bangunan	Jalan lingkaran Manding Komplek Perkantoran Pemda II	3.50 m ²	3.50 m ²	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	B/0002.3.2/00138 JRB.R07.Ar.YGY/GA.0308/2023	2	16.692.000,00	33.384.000.00	2 Oktober 2023	1 Oktober 2028
4	PT BPD DIY	Tanah di Komplek DPRD Kab Bantul	Jl. Gajah Mada Komplek Kantor Sekretariat DPRD Kab. Bantul	9 m ²	-	ATM BPD	640/01902/BKAD 031/HT 0501	5	15.000.000,00	75.000.000.00	1 Juni 2021	31 Mei 2026
5	PT. BPD DIY	Tanah di Komplek Perkantoran	Jl. Robert Wolter Monginsidi	52.75 m ²	52.75 m ²	Kantor Kas BPD DIY Cab. Bantul	593/06040/BPKPAD 039/HT 0501	5	36.000.000,00	180.000.000,00	28 Desember 2022	27 Desember 2027



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL


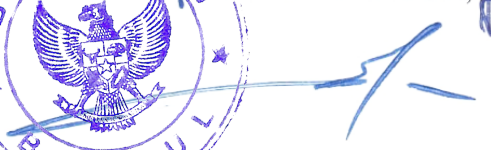
No.	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	LUAS		PEMANFAATAN	NO. PERJANJIAN SEWA	MASA SEWA TAHUN	BESARAN SEWA PER TAHUN (Rp)	TOTAL NILAI SEWA (Rp)	JANGKA WAKTU	
				TANAH	GEDUNG						TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR
			Bantul Komplek Perkantoran Parasmya			dan ATM (Parasmya)						
6	PT. Bank BPD DIY	Sebagian Tanah dan Bangunan	Jalan lingkaran Manding Komplek Perkantoran Pemda II	50 m ²	-	Bangunan Kantor Kas BPD DIY (Dinas Perijinan)	640/01100/BKAD 024/HT 0501	5	18.900.000,00	94.500.000,00	31 Maret 2021	30 Maret 2026
7	Majelis Wakil Cabang NU Kap. Piyungan	Bangunan/Gedung	Nglengis Sitimulyo Piyungan Bantul	485 m ²	144 m ²	Penyelenggaraan PAUD Kel Kurang mampu di Wil Kel. Sidomulyo	028/04609 061/MWC/TANF.AU/2-14/X/2022	5	500.000,00	2.500.000,00	18 Oktober 2022	17 Oktober 2027
8	Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa	Tanah dan Bangunan	Jl. Bantul Km. 9 Dukuh Karanggede Pendowoharjo Sewon Bantul...	3.130 m ²	638 m ²	Kantor Sekretariat DPC PKB	028/01048/BPKPAD 94/DPC-24.02/02/III/2022	2	39.055.500,00	78.111.000,00	10 Maret 2022	09 Maret 2024
9	DPC Partai PPP	Tanah	Jl. WR Supratman Babadan Bantul	392 m ²	-	Kantor DPC Partai PPP	028/01047/BPKPAD 17/DPC/PPP/III/22	3	4.033.500,00	12.100.500,00	10 Maret 2022	09 Maret 2025
10	DPD Partai Golkar	Tanah	Jl. A. Yani I/IV Nyangkringan Bantul	634 m ²	-	Kantor DPD Partai Golkar	028/00820/BPKPAD 01/GOLKAR/DPD-11/2022	5	6.596.400,00	32.982.000,00	22 Februari 2022	21 Februari 2027



BAB VII
PENUTUP

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 Kabupaten Bantul telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini mungkin masih belum sempurna, dalam arti belum seperti yang diharapkan oleh para pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Bantul,
 **BUPATI BANTUL,**

ABDUL HALIM MUSLIH